



DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN -----	5
1.1 Latar Belakang-----	5
1.2 Dasar Hukum-----	8
1.3 Hubungan Antar Dokumen -----	13
1.4 Maksud dan Tujuan -----	14
1.5 Sistematika Dokumen RKPD-----	14
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH -----	17
2.1 Kondisi Umum Daerah-----	17
2.1.1 Aspek Geografi Dan Demografi -----	17
2.1.1.1 Geografis Daerah-----	17
2.1.1.2 Demografi -----	29
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat -----	32
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi -----	32
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial -----	44
2.1.2.3 Fokus Seni Budaya Dan Olahraga -----	51
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum -----	59
2.1.3.1 Layanan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	59
2.1.3.2 Layanan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	72
2.1.3.3 Layanan Urusan Pilihan -----	88
2.1.3.4 Unsur Pendukung Pemerintahan -----	92
2.1.3.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah-----	92
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah -----	98
2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah-----	98
2.1.4.2 Fokus Iklim Berinvestasi-----	103
2.1.4.3 Fokus Sumber Daya Manusia -----	106
2.1.5 Aspek Pemenuhan Pelayanan Dasar-----	107
2.1.5.1 SPM Bidang Pendidikan -----	107
2.1.5.2 SPM Bidang Kesehatan -----	108
2.1.5.3 SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang -----	109
2.1.5.4 SPM Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman -----	110
2.1.5.5 SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Linmas-----	110
2.1.5.6 SPM Bidang Sosial -----	111
2.1.6 Aspek Kerjasama Daerah -----	111
2.1.7 Aspek Kinerja Badan Usaha Milik Daerah -----	112
2.1.8 EVALUASI PELAKSANAAN HASIL RPKD KOTA CIREBON TAHUN 2024-----	115
2.1.8.1 EVALUASI KETERCAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM -----	115
2.1.8.2 REKOMENDASI BERDASARKAN EVALUASI PELAKSANAAN RPKD TAHUN 2024 -----	118
2.2 Permasalahan Pembangunan Daerah-----	118



2.2.1	Permasalahan Pembangunan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah-----	118
2.2.1.1	Kemiskinan -----	119
2.2.1.2	Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi. -----	119
2.2.2	Isu Strategis dan Tema Pembangunan Kota Cirebon Tahun 2026	121
2.2.2.1	Peningkatan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia. ---	122
2.2.2.2	Optimalisasi Pertumbuhan Potensi Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing Tinggi, Inklusif, dan Berkelanjutan -----	122
2.2.2.3	Ketahanan Pangan dan Air-----	123
2.2.2.4	Optimalisasi Ruang Kota Tanpa Melampaui Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan -----	124
2.2.2.5	Tata Kelola Pemerintahan yang inovatif, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. --	124
2.2.2.6	Kemantapan Jaringan Infrastruktur Perkotaan Yang Inklusif Dan Berketahanan Di Seluruh Wilayah-----	124
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN -----		126
KEUANGAN DAERAH -----		126
3.1	Arah Kebijakan Ekonomi -----	126
3.1.1	Arah Kebijakan Ekonomi Nasional-----	126
3.1.2	Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Barat -----	128
3.1.3	Kondisi Ekonomi Daerah -----	129
3.1.4	Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah-----	135
3.1.5	Proyeksi Indikator Makro Ekonomi -----	136
3.1.6	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Kota Cirebon -----	137
1.6	3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah -----	137
1.6.1	3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah-----	138
3.2.1	Arah Kebijakan Belanja Daerah-----	142
3.2.2	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah-----	146
1.7	Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah -----	149
1.7.1	3.3.3 Dana Masyarakat/Umat -----	150
1.7.2	3.3.4 Corporate Social Responsibility (Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)) -----	151
1.7.3	3.3.5 Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP). -----	151
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH-----		154
TAHUN 2026		
IV.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan -----	155
IV.1.1	Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Serta Kebijakan Strategis Lainnya -----	155
IV.1.2	Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	



IV.1.3	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Cirebon-----	162
IV.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026 -----	182
IV.2.1	Isu Strategis dan Tema Pembangunan Kota Cirebon Tahun 2026	183
1.	Peningkatan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia. ---	183
2.	Optimalisasi Pertumbuhan Potensi Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing Tinggi, Inklusif, dan Berkelanjutan -----	183
3.	Ketahanan Pangan dan Air -----	184
4.	Optimalisasi Ruang Kota Tanpa Melampaui Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan -----	185
5.	Tata Kelola Pemerintahan yang inovatif, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. --	186
6.	Kemantapan Jaringan Infrastruktur Perkotaan Yang Inklusif Dan Berketahanan Di Seluruh Wilayah-----	186
IV.2.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Cirebon 2026	187
IV.2.2.1	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2026 -----	208
IV.2.2.2	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2026 dengan Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2026 dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat -----	211
IV.2.3	Program Prioritas Daerah Kota Cirebon Tahun 2026 -----	214
IV.2.3.1	Penjabaran Prioritas Pembangunan Dalam Program Prioritas dan Program Pembangunan Daerah -----	214
IV.2.3.2	Dukungan Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Daerah Tahun 2026 terhadap Program Prioritas Nasional dan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2026 -----	269
IV.2.3.3	Dukungan Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Daerah Tahun 2026 terhadap Arah Kebijakan Pengarusutamaan (Mainstreaming) Pembangunan Nasional Tahun 2026 -----	284
Tabel 4.20	Dukungan Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Daerah Tahun 2026 terhadap Arah Kebijakan Pengarusutamaan Pembangunan Nasional Tahun 2026 -----	284
IV.2.4	Kebijakan Pembangunan Kewilayahan -----	294
BAB V		299
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	-----	299
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH-----	311
VI.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026-----	311
VI.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2026-----	314
BAB VII		329
PENUTUP		329





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah suatu proses untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat melalui pengembangan perekonomian. Parameter pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan dan struktur ekonomi serta tingkat kesenjangan antar sektor pada suatu daerah penduduknya. Tujuan utama dari usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan pendapatan, dan tingkat pengangguran. pembangunan ekonomi bertujuan disamping menciptakan pertumbuhan yang maksimal, harus dapat mengurangi kemiskinan, kesenjangan pendapatan dan pengangguran¹. Kendala yang dihadapi oleh daerah antara lain terbatasnya ketersediaan sumber daya pembangunan terutama sumber daya finansial. Untuk itu penyelenggaraan pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis, terarah, dan berkelanjutan agar mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien sehingga perlu sinergi dan kolaborasi dengan pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan tujuan pembangunan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2025-2029 akan diwarnai dengan perencanaan jangka panjang yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2025-2029 Sejalan dengan hal tersebut dikarenakan penetapan dan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota terpilih jawa Barat tahun 2025 - 2029.

Rumusan dan sasaran prioritas pembangunan daerah Kota Cirebon mengacu dan memperhatikan pada visi misi Walikota Cirebon tahun 2025-2029. Adapun visi dan misi Kota Cirebon Berpijak pada Latar Belakang Gambaran Umum Kota Cirebon, Permasalahan-Permasalahan dan Isu strategis Kota Cirebon dapat disusun Visi Kota Cirebon Adalah **Terwujudnya Kota Cirebon Yang Sejahtera, Tertata, Aspiratif, Religius, Aman Dan Berkelanjutan Tahun 2029.**" Lebih ringkasnya, visi ini kemudian disingkat dengan: "Terwujudnya Kota Cirebon yang "SETARA Berkelanjutan" Tahun 2029"

Visi ini menggambarkan cita-cita kolektif Kota Cirebon untuk menjadi kota yang setara dalam pelayanan publik, setara dalam pembangunan antar wilayah di Kota Cirebon, setara dalam kemajuan dan kesejahteraan

¹ Todaro, Michael P. 2004. Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga. Edisi Kedua Terjemahan Haris Munandar. Jakarta: Penerbit Erlangga.



masyarakatnya dan setara dengan kota-kota maju lainnya dengan mengedepankan kekuatan budaya lokal sebagai basis identitas dan sumber daya ekonomi.

Untuk mendukung pencapaian visi Terwujudnya Kota Cirebon Yang “SETARA Berkelanjutan” Tahun 2029, ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan yang menjadi dasar perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah selama periode RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Misi I : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing tenaga kerja. Misi ini berfokus pada pengembangan manusia agar mampu menghadapi tantangan zaman, dunia kerja dan perubahan global. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam arti memiliki tingkat pendidikan, derajat kesehatan dan keterampilan yang tinggi, mendorong karakter yang religi, mandiri, dan produktif serta mampu berdaya saing di tingkat lokal maupun nasional dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada.

Misi II: Meningkatkan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal

Pembangunan diprioritaskan pada penguatan ekonomi kota berbasis sektor unggulan. Misi ini berfokus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan mengoptimalkan potensi lokal seperti perdagangan dan jasa, pariwisata heritage dan religi, seni dan budaya, kuliner dan kerajinan.

Misi III: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Bebas KKN, dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pembangunan diprioritaskan pada meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Misi ini berfokus pada upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government). Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prasyarat utama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat akuntabilitas, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik diyakini sebagai salah satu strategi utama dalam mewujudkan tata kelola yang efektif dan efisien.

Misi IV: Mewujudkan Keseimbangan serta Pelestarian Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan berketahanan

Pembangunan diprioritaskan pada penataan lingkungan perkotaan yang berkualitas untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan. Misi ini berfokus pada upaya penataan ruang kota



berdasarkan prinsip keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan, dengan memperhatikan mitigasi bencana melalui pengendalian pemanfaatan lahan di daerah rawan bencana serta menjaga daerah resapan air agar tetap hijau dan berfungsi optimal. Pengelolaan sampah yang terpisah antara organik dan anorganik, serta larangan membuang sampah di sungai, menjadi bagian penting untuk mencegah pencemaran dan bencana lingkungan. Hal ini disertai upaya pelestarian lingkungan hidup melalui pengelolaan ruang terbuka hijau, khususnya pengembangan dan pemeliharaan ruang hijau sebagai paru-paru kota yang berfungsi menurunkan suhu udara, menyerap polutan, mengendalikan erosi, serta meningkatkan daya serap air hujan sehingga dapat mengurangi risiko banjir dan kekeringan. Dalam hal itu juga dilakukan upaya mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam konservasi lingkungan, seperti gerakan penanaman pohon, sedekah air, dan pengelolaan sampah secara masif sebagai upaya menjaga kelestarian sumber daya alam dan memperkuat ketahanan lingkungan terhadap perubahan iklim dan bencana alam

Misi V: Meningkatkan Pemberdayaan Sosial dan Budaya Lokal

Pembangunan diprioritaskan pada terwujudnya kesejahteraan sosial melalui penurunan kemiskinan, melalui pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya lokal, dan integrasi kearifan lokal dalam pembangunan.

Misi ini berfokus pada upaya memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan potensi sosial dan budaya lokal sebagai modal utama dalam membangun kota yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Pemberdayaan sosial dan budaya lokal tidak hanya bertujuan untuk melestarikan warisan budaya dan tradisi yang menjadi identitas masyarakat, namun sekaligus meningkatkan potensi ekonomi masyarakat. Lebih jauhnya, hal ini diyakini dapat meningkatkan kapasitas masyarakat sehingga mampu beradaptasi dan berperan aktif dalam proses pembangunan daerah yang pada akhirnya bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat tanpa kecuali.

Metode pelaksanaan penyusunan dokumen RKPD Tahun 2026, yaitu:

1. Kolaborasi pemangku kepentingan pembangunan dilakukan melalui implementasi pendekatan pentahelix-ABCGM (Academic, Business, Community, Government, and Media).
2. Kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan.
3. Penerapan dynamic government sebagai inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Pendekatan spasial dan a-spasial.
5. Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Tahapan penyusunan RKPD Tahun 2026 diawali dengan Kick Off Meeting perencanaan tahun 2026 yang dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2025, dilanjutkan dengan Rembug Warga dan Musyawarah Pembangunan Kelurahan, Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2026 yang bertujuan untuk menjaring masukan dan saran penyempurnaan



yang berasal dari berbagai stakeholder pembangunan di Jawa Barat. Forum Perangkat Daerah dilaksanakan untuk menyelaraskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, serta rencana anggarannya dengan tetap dapat menjaring masukan dan saran penyempurnaan untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD Tahun 2026. Rangkaian ini kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan Musrenbang Kota Cirebon.

Dalam hal pembangunan kewilayahan, perencanaan pembangunan daerah disinergikan dengan dokumen perencanaan tata ruang wilayah dan potensi yang ada pada wilayah Kelurahan di Kota Cirebon. Proses pembangunan kewilayahan ini berorientasi terhadap sasaran dan target objek pembangunan berbagai macam aspek kehidupan yang sesuai wilayahnya. Hal ini dilakukan agar dapat menghasilkan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan bermanfaat secara maksimal di setiap wilayah pembangunan. RKPD merupakan rencana kerja yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan juga memberi peluang sekaligus mendorong partisipasi masyarakat.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan dokumen RKPD didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
22. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
23. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan;



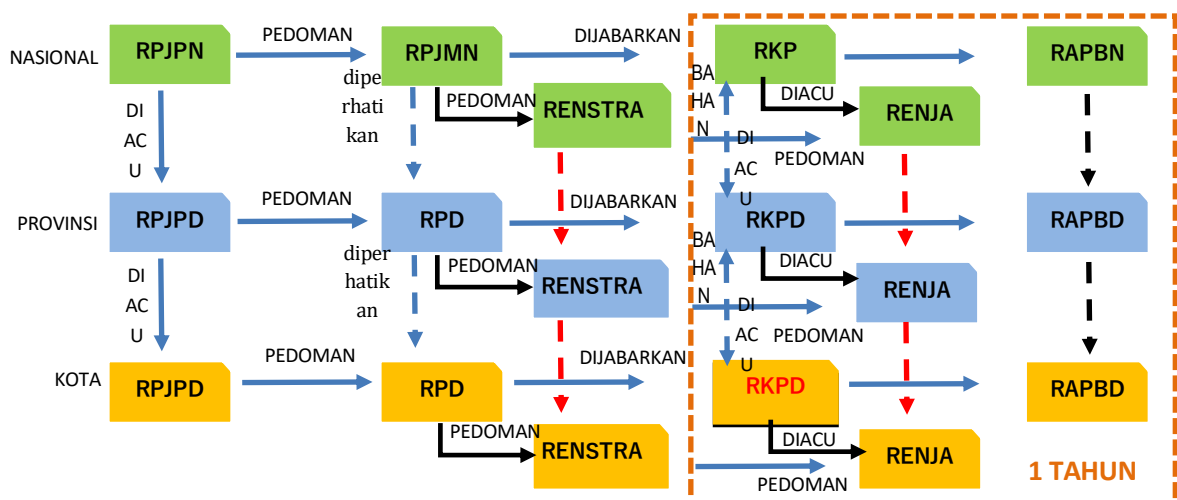
24. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional; 28. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer dan Pelayanan Kesehatan Lanjutan untuk Mendukung Implementasi Transformasi Kesehatan;
25. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; 30. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor



- 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
 12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
 13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045
 14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cirebon Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 8);
 15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon;
 17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
 19. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tahapan, Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon;
 20. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Walikota Kota Cirebon Nomor 37 Tahun 2019 Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Di Kota Cirebon;
 22. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Perencanaan Satu Atap;
 23. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon.;

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kota Cirebon Tahun 2026 disusun berdasarkan pendekatan teknokratis yaitu pendekatan secara ilmiah terhadap program dan kegiatan mana yang dianggap paling bermanfaat dan disusun dalam skala prioritas dan dapat dibiayai oleh APBD kemudian juga dilakukan pendekatan partisipatif yaitu dengan melibatkan seluruh segmen masyarakat yang ada di Kota Cirebon, juga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan atas-bawah (top-down) dan dari bawah-atas (bottom-up), yang dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan tingkat Kota Cirebon. Tahapan perencanaan di atas, dilaksanakan mulai dari Rembug Warga, Musbangkel, Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Kota Cirebon, dengan mengedepankan proses evaluasi, proyeksi dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah Kota Cirebon. Hubungan antara Rencana Pembangunan Daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat diilustrasikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 1 Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan

RKPD Kota Cirebon Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan program pembangunan daerah yang berpedoman pada dokumen RPJMD Kota Cirebon Tahun 2025-2029. RKPD Kota Cirebon Tahun 2026 menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah untuk menyusun program dan kegiatan yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Kota Cirebon Tahun 2026 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD.



1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan RKPD Kota Cirebon Tahun 2026 dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar sektor, antar wilayah dan tingkat pemerintahan serta mewujudkan efektifitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. RKPD Kota Cirebon Tahun 2026 merupakan pedoman untuk Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kota Cirebon dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2026. Adapun tujuan penyusunan RKPD Kota Cirebon Tahun 2026 adalah:

1. Mewujudkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat;
2. Menetapkan prioritas pembangunan, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan tahun 2026;
3. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pembangunan, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, perguruan tinggi dan komunitas; dan
5. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran tahunan pada RKPD Kota Cirebon Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang. Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan RKPD Tahun 2026
2. Landasan Hukum. Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2026
3. Hubungan Antara Dokumen. Menjelaskan tentang hubungan RKPD Tahun 2025 dengan dokumen-dokumen perencanaan baik tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten /kota.
4. Maksud dan Tujuan. Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan RKPD Tahun 2026
5. Sistematika Dokumen RKPD. Menjelaskan kerangka pemikiran tentang substansi RKPD yang ingin dituju berdasarkan tema perencanaan tahunan yang dicanangkan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.

1. Gambaran Umum Kota Cirebon. Menjelaskan tentang kondisi terkini berdasarkan capaian target pembangunan tahun 2024



2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD. Menjelaskan realisasi, hasil capaian program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD 2024 serta pencapaian indikator RPJMD Kota Cirebon
3. Permasalahan Pembangunan Daerah. Identifikasi permasalahan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2024.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.

1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan. Menjelaskan tentang hubungan tujuan/sasaran berdasarkan dokumen RPD, selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan.
2. Prioritas Pembangunan Daerah. Mengemukakan tentang prioritas pembangunan untuk tahun rencana, isu strategis, serta prioritas program pembangunan daerah berdasarkan isu strategis.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

1. Menjelaskan rincian program dan kegiatan prioritas RKPD tahun 2025, instansi pelaksana/ PD, indikator capaian masing-masing program dan kegiatan serta pagu indikatifnya.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.

1. Penetapan indikator dan target kinerja utama. Menguraikan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dijadikan acuan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada akhir tahun 2026.
2. Penetapan indikator dan target kinerja kunci. Menguraikan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dijadikan pedoman dalam penetapan kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun 2026.

BAB VII PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Pada bagian ini juga memuat antara lain :

1. Keterpaduan dan sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan di dalam dan di antara perangkat daerah dengan memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas perangkat daerah;
2. Peranan masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan RKPD;



3. Penegasan RKPD sebagai acuan penyusunan Kebijakan Publik dan APBD; dan
4. Penegasan tentang kewajiban pemerintah daerah untuk mengevaluasi pelaksanaan program RKPD.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografi Dan Demografi

Kota Cirebon berdasarkan letak kota dengan batas wilayahnya dan kondisi air, tanah serta udara sebagai aspek geografi yang mempengaruhi potensi kota dalam mendukung kehidupan sehari-harinya dengan risiko terhadap bencana. Pada sisi lain yang juga sangat penting adalah luas dan dimensi wilayah dari sisi penduduknya sebagai aspek demografi Kota Cirebon.

2.1.1.1 Geografis Daerah

Kota Cirebon berada pada 6°43'10.5" Lintang Selatan dan 108°34'18.7" Bujur Timur yang merupakan koordinat posisi titik Ø (nol) sebagai dasar perhitungan jarak dengan daerah lainnya dan juga berada pada jalur utama lintas pantura bagian timur Provinsi Jawa Barat. Kewilayahan Kota Cirebon memiliki karakteristik geografis utama kawasan dataran rendah dan sebagian kecil merupakan wilayah perbukitan di wilayah selatan kota, terdapat sungai dan daerah aliran sungai, serta kawasan pesisir. Potensi sumber daya alam berupa kelautan dan perikanan, pertanian, serta potensi pariwisata, perdagangan dan jasa, serta perindustrian.

Wilayah administratif pemerintahan Kota Cirebon, terbagi atas 5 Kecamatan, 22 Kelurahan, 249 Rukun Warga (RW) dan 1.385 Rukun Tetangga (RT)². Dalam 5 tahun terakhir, wilayah kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan telah dilakukan pemekaran. Wilayah kelembagaan RW dilakukan pemekaran 1 RW pada tahun 2019 di kelurahan Karyamulya menjadi 18 RW. Wilayah kelembagaan RT dilakukan pemekaran di kelurahan Argasunya 1 RT menjadi 59 pada tahun 2023; pemekaran di kelurahan Harjamukti 1 RT menjadi 59 pada 2019; 3 kali pemekaran di kelurahan Kalijaga, 8 RT pada tahun 2021 sehingga saat ini menjadi 121 RT, 1 RT pada tahun 2019 dan tahun 2024; 2 kali pemekaran di kelurahan Karyamulya yaitu pada tahun 2019 2 RT dan tahun 2021 3 RT. Sedangkan hal berbeda terjadi di kelurahan Larangan yang jumlah RT berkurang 1 menjadi 116 RT. Kecamatan Harjamukti merupakan wilayah kecamatan yang paling luas dengan jumlah RT dan RW terbanyak. Sementara itu, Kecamatan Pekalipan merupakan wilayah dengan luas paling kecil, namun jumlah RW dan RT terkecil berada di Kecamatan Kejaksan.

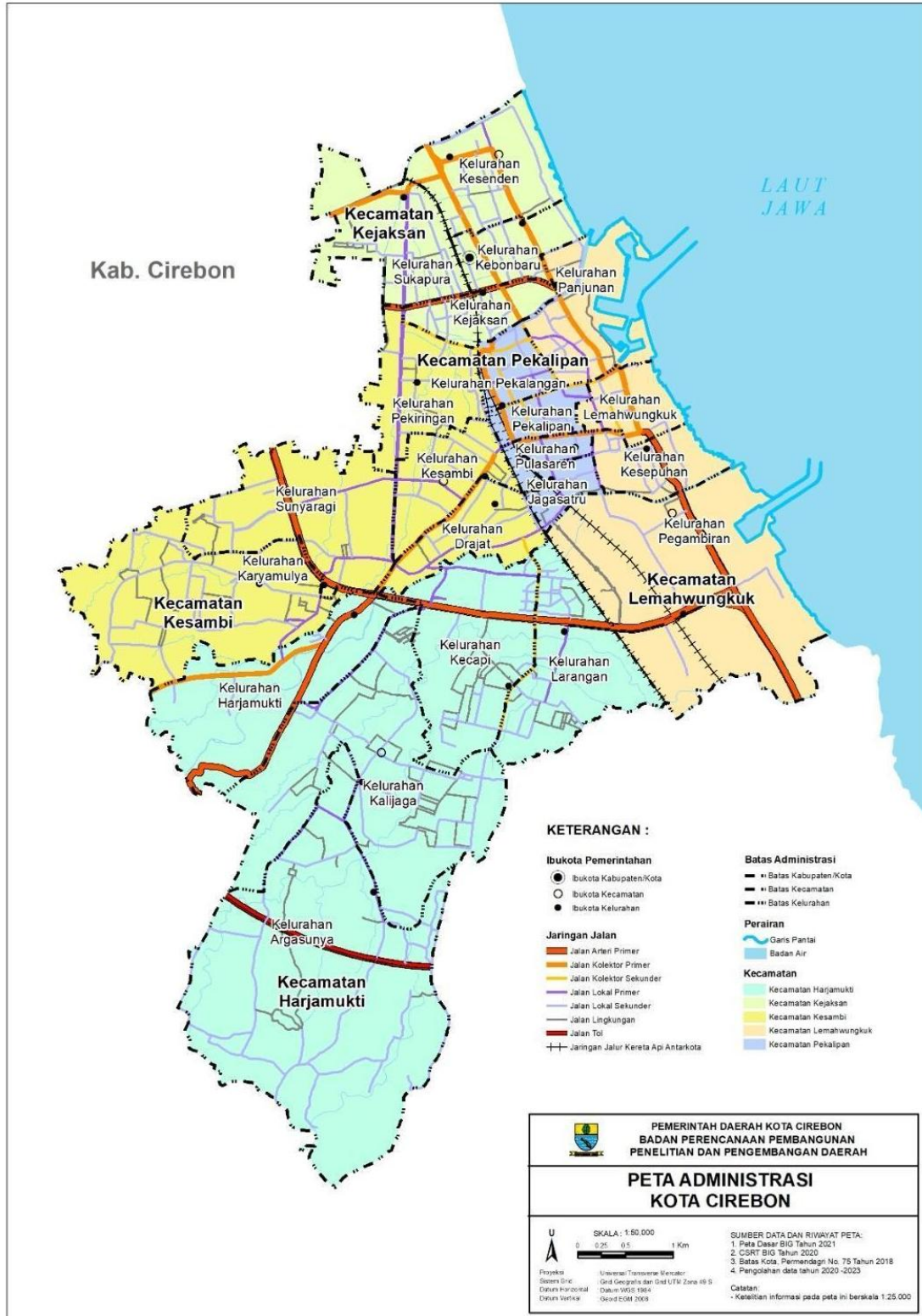
Berdasarkan pada perundang-undangan terbaru terkait Kota Cirebon bahwa Kota Cirebon luasnya menjadi 39,398 km² melalui penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 300.2.2-2138 tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau. Posisi kota berdasarkan pada Undang-undang 108 tahun 2024 tentang Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat, sebelah timur letak

² Sumber: Bagian Tata Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kota Cirebon 2025



wilayah administrasi Kota Cirebon berbatasan dengan Laut Jawa dan sisi lainnya sebelah selatan, sebelah barat serta sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Cirebon.

Gambar II-1 Peta Wilayah Kota Cirebon



Sumber: Bappelitbangda Kota Cirebon 2025.

Berikut rincian kelurahan beserta dengan jumlah RW dan RT per kecamatan pada tahun 2024:

Tabel II-1 Rincian RW dan RT di Kota Cirebon Tahun 2024



No.	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah RW	Jumlah RT
1.	Harjamukti	Argasunya	11	59
		Kalijaga	15	121
		Harjamukti	13	59
		Kecapi	19	116
		Larangan	19	116
2.	Lemahwungkuk	Pegambiran	17	83
		Kesepuhan	9	63
		Lemahwungkuk	6	44
		Panjunan	10	42
3.	Pekalipan	Jagasatru	10	51
		Pulasaren	8	40
		Pekalipan	12	50
		Pekalangan	9	45
4.	Kesambi	Karyamulya	18	92
		Sunyaragi	11	55
		Drajat	9	62
		Kesambi	7	47
		Pekiringan	11	57
5.	Kejaksan	Kejaksan	7	40
		Kebonbaru	7	37
		Sukapura	10	58
		Kesenden	11	48
Jumlah		22	249	1.385

Sumber: Sekretaria Daerah Kota Cirebon 2025

A. Topografi

Dimensi wilayah Kota Cirebon dari Utara ke Selatan berjarak $\pm 11,9$ kilometer dan jarak dari Barat ke Timur sebesar $\pm 7,96$ kilometer dengan sebagian besar berada pada dataran rendah di ketinggian ± 5 mdpl (meter dari permukaan laut) dan dataran tinggi pada wilayah selatan hingga ± 136 mdpl pada sebagian kecamatan Harjamukti, yaitu 287,59 Ha di ketinggian 50-100 mdpl dan 78,45 Ha di ketinggian 100-136 mdpl.

Tabel II-2 Kondisi Topografi Kota Cirebon (Ha)

Wilayah	0-50 mdpl	50-100 mdpl	100-136 mdpl	Jumlah
Kecamatan Kejaksan	442,93	-	-	442,93
Kecamatan Lemahwungkuk	718,94	-	-	718,94
Kecamatan Harjamukti	1.394,3	287,59	78,45	1.760,35
Kecamatan Pekalipan	159,76	-	-	159,76
Kecamatan Kesambi	865,31	-	-	865,31

Sumber : Laporan KLHS RTRW, 2022

Wilayah dataran rendah dan dataran tinggi Kota Cirebon, memiliki kemiringan lahan yang dapat diklasifikasikan³ berdasarkan rentang berikut: (1) Kemiringan 0-2% terdapat di sebagian besar wilayah Kota Cirebon yaitu 3.442,05 Ha, kecuali sebagian kecil wilayah di Kecamatan Harjamukti; (2) Kemiringan 2-15% terdapat di sebagian wilayah Kecamatan Harjamukti yaitu 338,59 Ha; (3) Kemiringan 15-25% terdapat di sebagian wilayah Kecamatan Harjamukti yaitu 166,64 Ha. Besar kemiringan tanah menentukan tingkat resapan terhadap air hujan, semakin landai maka tingkat resapan semakin besar. Hal ini terkait curah hujan tahunan di Kota Cirebon termasuk dalam klasifikasi hujan infiltrasi rendah⁴ yaitu 1500-3000 mm per tahun, yang

³ Arsyad, S. 2010. Konservasi tanah dan air, Institut Pertanian Bogor

⁴ Chow, V.T. 1968. Handbook of Applied Hydrology. McGraw-Hill Book Co. New York.



mempengaruhi potensi air tanah dari resapan air hujan di wilayah dengan kemiringan tanah yang besar untuk wilayah selatan Kota Cirebon.

Tabel II-3 Kondisi Kemiringan Tanah Kota Cirebon (Ha)

Wilayah	0-2 %	2-15 %	15-25 %	Jumlah
Kecamatan Kejaksan	442,93	-	-	442,93
Kecamatan Lemahwungkuk	718,94	-	-	718,94
Kecamatan Harjamukti	1.255,11	338,59	166,65	1.760,35
Kecamatan Pekalipan	159,76	-	-	159,76
Kecamatan Kesambi	865,31	-	-	865,31

Sumber : Laporan KLHS RTRW, 2022

B. Geologi

Hasil kajian dari Silitonga dkk. (1996), geologi di wilayah pesisir Cirebon dan sekitarnya merupakan endapan aluvium (Qa) yang terdiri dari kerikil, pasir dan lempung berwarna kelabu yaitu hasil endapan dengan ketebalan ± 5 m di sepanjang dataran banjir sungai sedangkan endapan di daerah pantai (Qac) terdiri atas lumpur hasil endapan rawa, lanau serta lempung kelabu dengan kandungan cangkang moluska yang memiliki ketebalan kedalaman beberapa meter. Untuk geologi wilayah pantai pelabuhan Cirebon mempunyai litologi endapan aluvial pantai yang terdiri dari endapan lempung dan pasir secara bergantian. Endapan permukaan ini menyebar di bagian utara dan bagian timur.

Kelompok Batuan Gunung Api disusun oleh hasil erupsi Gunung Api Muda Ciremai (Qvr) yang terdiri atas lahar, breksi dan batu pasir tufan. Hasil letusan gunung api tua Ciremai (QTvr) mempunyai karakter morfologi yang lebih menonjol dari pada morfologi batuan gunung api muda dengan batuan sekitarnya. Secara umum terdiri atas lahar, batu pasir tufan, dan konglomerat tersisip oleh lapisan lava, breksi aliran dan tuf/batu putih yang tersebar di sebelah selatan yang penyebarannya sangat terbatas.

C. Klimatologi

Kota Cirebon yang berada di daerah pesisir utara pulau Jawa termasuk daerah bertemperatur udara cukup tinggi dengan suhu udara rata-rata terendah tahun 2024 sebesar 22,4 °C dan rata-rata tertinggi 35,9 °C. hal ini merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi penghasil listrik melalui panel surya. Berikut data suhu di Kota Cirebon dalam lima tahun terakhir yang bersumber dari Posmet Penggung BMKG Kertajati, Majalengka, Jawa Barat:

Tabel II-4 Rata-rata Suhu Udara per Bulan di Kota Cirebon (°C)

Bulan	2020			2021			2022			2023			2024		
	Min	Rata ²	Maks	Min	Rata ²	Maks	Min	Rata ²	Maks	Min	Rata ²	Maks	Min	Rata ²	Maks
Januari	23,6	27,8	35,2	23,2	26,5	33,0	23,0	27,3	34,4	22,8	26,9	35,5	23,2	28,0	35,4
Februari	23,0	27,2	33,8	22,8	26,5	33,8	23,0	26,9	34,6	22,8	26,4	33,6	23,4	28,0	35,4
Maret	21,4	27,7	34,4	22,2	27,3	34,6	22,6	27,4	34,5	22,2	27,3	34,8	23,4	28,1	35,4
April	23,	28,0	34,8	22,	28,1	35,0	22,	27,9	34,8	22,8	27,8	34,6	24,0	29,2	35,8



Bulan	2020			2021			2022			2023			2024		
	Min	Rata ²	Maks	Min	Rata ²	Maks	Min	Rata ²	Maks	Min	Rata ²	Maks	Min	Rata ²	Maks
	2			8			8								
Mei	23,8	28,3	34,8	22,9	28,4	34,8	22,8	28,1	34,4	22,7	28,6	34,2	22,8	29,1	35,6
Juni	22,8	27,8	34,6	23,0	27,3	34,4	22,4	27,2	33,6	21,9	28,4	35,6	22,4	28,2	34,7
Juli	21,0	28,0	34,0	21,2	27,7	34,6	21,0	27,5	34,0	22,0	28,1	34,4	19,2	27,8	34,8
Agustus	22,4	28,5	35,6	22,8	28,6	36,4	22,8	28,2	35,2	19,0	28,1	36,2	19,8	28,4	37,0
September	23,2	29,7	36,4	22,6	28,9	35,8	22,8	29,0	36,0	20,6	29,3	36,8	23,3	29,7	36,5
Oktober	23,2	29,2	37,0	23,0	29,5	37,0	22,6	28,0	35,4	21,5	30,6	38,4	22,0	30,7	38,1
Nopember	23,6	28,6	35,4	22,2	27,6	35,0	22,0	27,5	35,0	24,2	30,2	37,4	23,4	29,2	36,0
Desember	22,9	26,9	34,0	22,8	27,4	34,4	22,4	27,2	34,0	23,8	29,4	36,4	23,8	28,0	35,0
Rata-rata	22,8	28,1	35,0	22,6	27,8	34,9	22,5	27,7	34,7	34,0	22,1	28,4	22,6	50,5	35,8

Sumber: BMKG Posmet Penggung

Curah hujan di Kota Cirebon sangat dipengaruhi oleh fenomena cuaca *La Niña* untuk fase panas dan *El Niño* untuk fase dingin. Fenomena *La Niña* terjadi pada tahun 2020 hingga tahun 2022 dan 2024 yang diselingi fase *El Niño* 2023. Fenomena tersebut akan berdampak pada banyaknya curah hujan yang terjadi di Kota Cirebon. Curah hujan tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 2.724,8 mm selama 188 hari dan terendah pada tahun 2023 sebesar 1.580 mm selama 116 hari. Peningkatan jumlah hari hujan ini tidak berbanding lurus dengan curah hujan yang terjadi, terlihat bahwa pada tahun 2020 jumlah curah hujan mencapai puncak tertinggi dalam periode ini sebesar 3.135,5 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 141 hari sedangkan jumlah hari hujan di tahun 2020 ini lebih rendah jika dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 187 hari hujan dengan jumlah curah hujan 3.092 mm. Curah hujan harian yang cukup tinggi terjadi pada 2020 sebesar 148 mm dan 2024 sebesar 146 mm di awal tahun, sedangkan pada tahun 2022 di akhir tahun sebesar 139,4 mm. Curah hujan harian yang tinggi akan menyebabkan air permukaan meluap dan melebihi kapasitas debit sistem drainase sehingga air hujan akan menggenang pada wilayah tertentu.

Tabel II-5 Curah Hujan (total, tertinggi harian) dan Hari Hujan di Kota Cirebon

Bulan	2020			2021			2022			2023			2024		
	Curah Hujan	Hari	Harian Tertinggi	Curah Hujan	Hari	Harian Tertinggi	Curah Hujan	Hari	Harian Tertinggi	Curah Hujan	Hari	Harian Tertinggi	Curah Hujan	Hari	Harian Tertinggi
Januari	550	24	148,0	437,5	25	77,3	490,1	26	99,5	409,8	18	120,5	387,1	22	75,3
Februari	588,3	25	146,1	540,5	21	102,5	242,9	22	40,2	396,1	23	89,5	599,0	20	146,0
Maret	370,5	25	101,8	261,7	19	64,4	242,9	22	78,0	204,8	10	73,9	147,2	11	47,2
April	176,5	16	34,8	134,6	11	44,5	293,5	15	81,0	207,3	20	47,5	126,0	12	37,0
Mei	240,1	17	51,2	55	7	27,1	168,3	16	59,5	86,5	10	29,2	48,4	4	21,5
Juni	92,6	7	33,0	159,4	14	68,8	126,6	14	30,0	62,3	3	35,2	92	8	45,0
Juli	50,9	3	28,0	20,4	5	8,4	212,1	10	81,0	11,0	3	11,0	60,9	4	63,7
Agustus	8,3	6	3,0	16,5	4	8,0	1,7	2	1,2	0	0	0	1,0	1	1,0
September	18,6	4	9,6	118,1	7	45,6	27,1	7	10,0	0	0	0	35,0	4	18,0
Oktober	137,7	9	48,6	67,8	5	40,5	327,6	16	139,4	5	4	5	0	0	0
Nopember	212,8	14	83,2	302,5	23	59,5	182,2	20	46,3	82,5	11	46,5	2,0	2	1,0
Desember	212,8	22	120,7	418,3	27	101,4	409,8	18	130,8	114,7	14	30,7	263	15	62



Bulan	2020			2021			2022			2023			2024		
	Curah Hujan	Hari	Harian Tertinggi	Curah Hujan	Hari	Harian Tertinggi	Curah Hujan	Hari	Harian Tertinggi	Curah Hujan	Hari	Harian Tertinggi	Curah Hujan	Hari	Harian Tertinggi
Jumlah	2.659,1	172		2.532,3	168		2.724,8	188		1.580	116		1761,6	103	
Rata-rata	221,59	14,33		211,03	14		227,1	15,67		131,67	9,67		146,8	8,6	

Sumber: BMKG Posmet Penggung

Catatan: satuan Hari Hujan (Jumlah Hari Hujan), Satuan Curah Hujan (mm)

Angin merupakan salah satu potensi energi terbarukan yang ada di Kota Cirebon, karena lokasi Kota Cirebon yang berada di pesisir pantai utara Pulau Jawa. Dalam lima tahun terakhir, pada tahun 2024 di bulan Agustus terjadi angin dengan kecepatan tertinggi yang berasal dari arah selatan sebesar 52 km/jam. Sedangkan kecepatan rata-rata tertinggi terjadi pada bulan Agustus tahun 2024 antara 19-30 km/jam. Hal ini merupakan potensi yang dapat menjadi sumber energi untuk menghasilkan listrik, karena dengan kecepatan angin 2 meter per detik (7,2 km/jam) sudah dapat menggerakkan turbin⁵ yang akan menghasilkan energi listrik.

Tabel II-6 Kecepatan Angin di Kota Cirebon (km/jam)

Bulan	2020			2021			2022			2023			2024		
	Maks	Rata ²	Arah Angin	Maks	Rata ²	Arah Angin	Maks	Rata ²	Arah Angin	Maks	Rata ²	Arah Angin	Maks	Rata ²	Arah Angin
Januari	26	n.a	Barat	30	5-15	Barat	46	5-20	Timur Laut	46	7-18	Barat	50	2-20	Barat Laut
Februari	35	n.a	Barat	37	n.a	Barat	46	6-16	Barat	48	7-28	Barat	41	3-20	Barat Laut
Maret	26	n.a	Barat	37	n.a	Barat	72	6-18	Barat	46	6-24	Barat	48	3-24	Barat
April	22	n.a	Timur Laut	39	7-13	Timur Laut	44	6-8	Timur	31	7-20	Barat Laut	41	4-13	Timur
Mei	24	n.a	Timur	24	13-24	Timur	43	6-16	Timur	46	8-28	Selatan	46	5-25	Timur Laut
Juni	22	n.a	Timur	26	9-26	Timur	41	4-25	Selatan	33	9-23	Selatan	33	5-21	Timur
Juli	37	n.a	Selatan	35	8-35	Selatan	35	6-24	Selatan	52	10-38	Selatan	46	12-31	Selatan
Agustus	33	n.a	Timur	37	8-37	Selatan	43	8-33	Selatan	56	9-41	Selatan	52	19-30	Selatan
September	37	n.a	Selatan	37	8-37	Selatan	37	8-25	Selatan	56	12-43	Selatan	46	8-31	Timur Laut
Oktober	46	n.a	Selatan	33	7-33	Selatan	30	5-19	Selatan	21	11-26	Timur Laut	48	8-27	Selatan
November	41	n.a	Timur	33	5-11	Timur Laut	41	6-15	Timur Laut	33	8-24	Timur Laut	22	9-22	Timur Laut
Desember	52	n.a	Barat	26	4-26	Timur Laut	46	7-18	Barat	37	4-16	Timur Laut	26	8-26	Barat

Sumber: BMKG Posmet Penggung

Berdasarkan data BMKG Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, Kota Cirebon juga memiliki potensi intensitas cahaya matahari maksimal yang hampir sepanjang tahun. Intensitas cahaya matahari ini dapat menjadi sumber energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan di Kota Cirebon yang dapat dikonversi menjadi energi listrik. Untuk itu pemerintah Kota Cirebon sangat mendukung pengembangan energi terbarukan yang bersumber dari

⁵ Suandi, Andi, et al. "Analisis Pengaruh Kecepatan Angin Pada Pembangkit Listrik Tenaga Angin." Teknobiz: Jurnal Ilmiah Program Studi Magister Teknik Mesin 12.3 (2022): 168-173.



cahaya matahari sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar yang berasal dari fosil yang terpendam di dalam bumi jutaan tahun.

Tabel II-7 Intensitas Matahari di Stamet Kertajati (%)

Bulan	2020			2021			2022			2023			2024		
	Maks	Min	Rata ²	Maks	Min	Rata ²	Maks	Min	Rata ²	Maks	Min	Rata ²	Maks	Min	Rata ²
Januari	100	55	91,5	100	68	89	100	64	85	100	49	78	100	75	94,2
Februari	100	67,5	92,8	100	3	83	100	54	81	100	43	88	100	60	88,8
Maret	100	62,5	93,8	100	60	89	n.a	n.a	n.a	100	25	89	100	75	92,0
April	100	45	93	100	74	93	100	63	90	100	2,5	83,2	100	78	96,0
Mei	100	56,3	95	100	78	97	100	13	84	100	16,3	89,43	100	62,5	96,5
Juni	100	91	98	100	56	92	100	63	88,3	100	51	95	100	8	71
Juli	100	88	98,8	100	34	88	100	41	79	100	70	97	100	58	95
Agustus	100	88	99	100	12	86	100	75	91	100	88	96	100	90	95
September	100	73	96	100	56	96	75	13	56	100	90	100	100	67,5	98
Oktober	100	59	93	100	63	94	100	34	76	100	37,5	96,2	100	58	95
November	100	62,5	92,7	100	13	80	93	41	68	100	73	93	100	51	84
Desember	100	3	87	100	16	82	100	49	82	100	12,5	86,8	100	10	88

Sumber: BMKG Stamet Kertajati

D. Hidrologi

Potensi sumber air di Kota Cirebon meliputi sumber air tanah dangkal, sumber air tanah dalam, sumber air permukaan, dan sumber air laut. Sumber air tanah akan ditemui pada kedalaman 5-10 meter untuk dataran rendah dan di lokasi dataran tinggi mencapai kedalaman 20-30 meter. Air tanah yang berada di kawasan pesisir pantai pada umumnya memiliki rasa yang asin karena intrusi air laut dan tidak dapat digunakan untuk kebutuhan air minum.

Sumber air bersih untuk konsumsi rumah tangga, sebagian besar telah dipasok oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Giri Nata Kota Cirebon dengan bahan bakunya bersumber dari mata air Cipaniis Kabupaten Kuningan. Untuk kawasan yang belum terjangkau pasokan air dari PDAM, pemenuhan air bersih untuk keperluan lainnya diperoleh dari sumur dengan kedalaman antara 2 (dua) meter sampai dengan 6 (enam) meter dan juga melalui kendaraan truk tangki dengan kapasitas 4.000 liter.

Kualitas air⁶ di Kota Cirebon masuk dalam kategori cemar berat. Untuk itu diperlukan penanganan khusus untuk memperbaikinya, walaupun kualitas air permukaan ini tidak dikonsumsi oleh penduduk.

Kondisi air permukaan yang ada di wilayah Kota Cirebon merupakan air yang mengalir melalui sungai dan anak-anak sungai. Sungai Kedung Pane, Sungai Sukalila (penyatuan dari Sungai Sicemplung dan Sungai Sijarak), Sungai Kesunean (Kriyan) dan Sungai Kalijaga (penyatuan dari Sungai Cicalong, Sungai Cideng, dan Kali Lunyu). Keberadaan sungai selain berfungsi sebagai saluran pembuangan air juga sebagai batas wilayah fisik antara Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon. Kualitas air⁷ di Kota Cirebon masuk

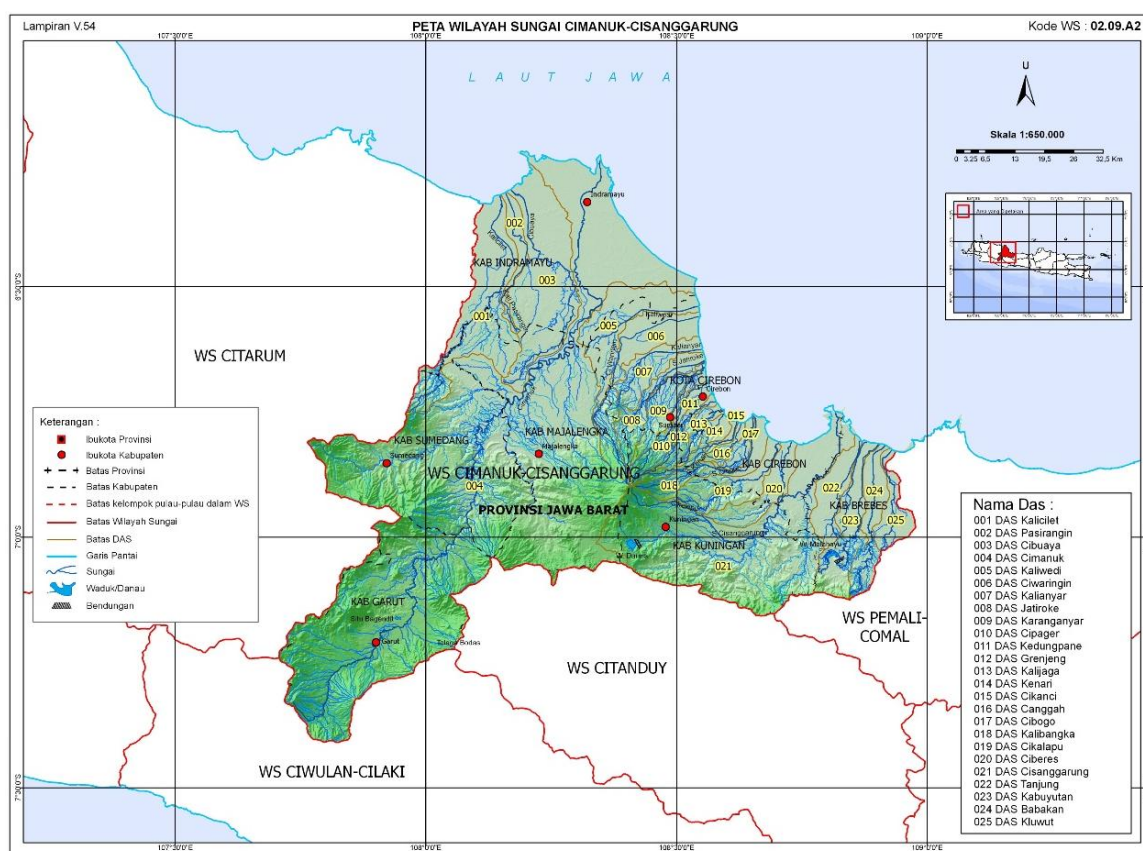
⁶ Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung, Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

⁷ Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung, Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

dalam kategori cemar berat. Untuk itu diperlukan penanganan khusus untuk memperbaikinya, walaupun kualitas air permukaan ini tidak dikonsumsi oleh penduduk.

Sungai yang mengalir di Kota Cirebon merupakan bagian dari 5 (lima) Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berada di wilayah Kota Cirebon yaitu: DAS Cipager seluar 0,64 Ha, Das Grenjeng seluar 1.013,55 Ha, DAS Kalijaga seluas 1.678,18 Ha, DAS Kedungpane seluas .254,41 Ha, DAS Kenari seluas dan 1,26 Ha. Rencana jaringan hidrologi di Kota Cirebon⁸ akan dilengkapi dengan embung di kelurahan Larangan kecamatan Harjamukti dengan kapasitas ± 5.000 (lima ribu) m³ dan embung di kelurahan Kalijaga kecamatan Harjamukti dengan kapasitas ± 7.000 (tujuh ribu) m³.

Gambar II-2 Peta Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung



Sumber: Permen PUPR No. 04/PRT/M/2015

E. Penggunaan Lahan

Kategori penggunaan lahan di Kota Cirebon terdiri dari danau/situ, empang, gedung/bangunan, padang rumput, perkebunan/kebun, permukiman dan tempat kegiatan, sawah, sawah tadah hujan, semak belukar, sungai dan tegalan. Sebagian besar lahan di Kota Cirebon digunakan untuk permukiman dan tempat kegiatan sebesar 2.190,07 Ha, lahan sawah seluas 499,23 Ha dan perkebunan/kebun seluas 499,23 Ha. Semakin bertambahnya jumlah penduduk mendorong bertambahnya kebutuhan ruang untuk beragam aktivitas. Hal ini menyebabkan perubahan penggunaan lahan sulit dikontrol, khususnya di daerah perkotaan. Di wilayah Kota Cirebon,

⁸ Laporan KLHS RPJMD Kota Cirebon 2025-2029.

perubahan penggunaan lahan yang banyak terjadi adalah perubahan pemanfaatan lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Hal ini dapat dijumpai antara lain di beberapa kelurahan di Kecamatan Harjamukti dan setidaknya dua kelurahan di Kecamatan Kesambi yang mengalami perubahan lahan pertanian sawah menjadi lahan non pertanian.

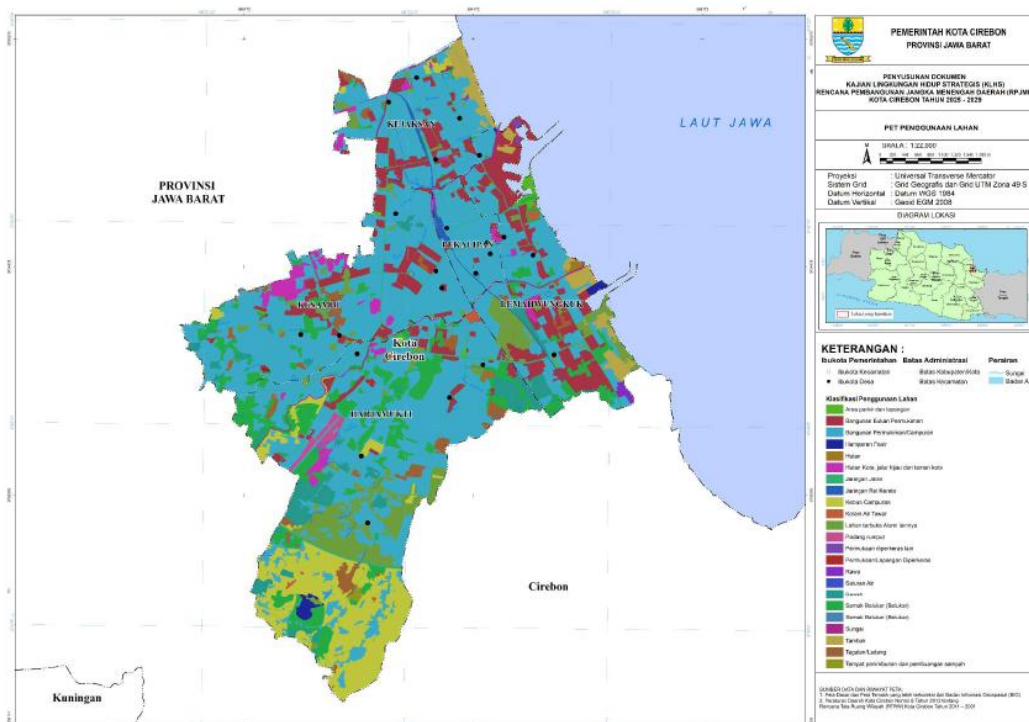
Tabel II-8 Penggunaan Lahan Kota Cirebon

Guna Lahan (Ha)	Harjamukti	Kejaksan	Kesambi	Lemahwungku	Pekalipen	Total
Danau/Situ	2,39	-	-	1,70	-	4,09
Empang	-	47,53	-	20,12	-	67,65
Gedung/Bangunan	1,40	0,06	0,89	16,25	1,46	20,06
Padang Rumput	95,63	11,85	31,24	86,12	9,74	234,59
Perkebunan/Kebun	416,38	-	25,14	-	7,85	449,38
Permukiman dan Tempat Kegiatan	603,69	348,00	595,12	496,06	147,19	2.190,07
Sawah	381,90	4,69	89,19	23,46	-	499,23
Sawah Tadah Hujan	28,42	-	-	47,04	-	75,46
Semak Belukar	8,42	-	-	12,03	-	20,45
Sungai	24,78	4,05	2,58	8,29	1,37	41,07
Tegalan/Ladang	197,33	26,75	121,15	-	-	345,23
Jumlah	1.760,35	442,93	865,31	711,09	167,61	3.947,29

Sumber: Laporan KLHS RTRW 2022

Sebagai upaya perlindungan terhadap lahan sawah, telah ditetapkan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD). Berdasarkan verifikasi oleh Kementerian ATR/BPN, pada tahun 2022 telah disepakati luas LSD yang akan dipertahankan di wilayah Kota Cirebon seluas 106,02 Ha. Luasan ini sebagai bagian dari integrasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan di RTRW. Berikut sebaran berdasarkan kategori penggunaan lahan di Kota Cirebon.

Gambar II-3 Peta Penggunaan Lahan Kota Cirebon



Sumber: Laporan KLHS RPJMD Kota Cirebon 2025-2029.



F. Rawan Bencana

Peran Pemerintah dalam Penanggulangan bencana Peran Pemerintah dalam Penanggulangan bencana di atur & dibentuk atas dasar ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang dilanjutkan dengan penetapan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 17 Tahun 2012 tentang kebijakan daerah bidang penanggulangan bencana Kota Cirebon dikoordinasikan oleh Kantor Penanggulangan Bencana Daerah (KPBD) Kota Cirebon.

Tabel II-9 Luas Potensi Bencana di Kota Cirebon (Ha)

Potensi Bahaya	Rendah	Sedang	Tinggi	Total	Kelas
Banjir	19	1.307	607	1.933	Sedang
Cuaca Ekstrim	231	275	3.230	3.736	Tinggi
Gempa Bumi	3.682	54	-	3.736	Rendah
Gelombang Ekstrim dan Abrasi	35	25	89	149	Tinggi
Likuefaksi	498	2.618	-	3.116	Sedang
Kebakaran Hutan dan Lahan	28	-	-	28	Rendah
Letusan Gunung Ciremai	140	-	-	140	Rendah
Tanah Longsor	27	20	24	71	Rendah

Sumber: Dokumen KRB Provinsi Jawa Barat 2022-2026

Menurut *Asian Disaster Reduction Center* (Wijayanto, 2012), Bencana adalah suatu gangguan serius terhadap masyarakat yang menimbulkan kerugian secara meluas dan dirasakan baik oleh masyarakat, berbagai material dan lingkungan (alam) dimana dampak yang ditimbulkan melebihi kemampuan manusia guna mengatasinya dengan sumber daya yang ada.

Mitigasi bencana guna mengurangi dampak bencana dilakukan untuk memperkecil jumlah korban jiwa dan kerugian materil. Masalah kebencanaan yang harus diselesaikan pemerintah dilakukan secara bekerjasama instansi pendukung lainnya dalam upaya penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai lembaga daerah yang bergerak dalam bidang penanggulangan bencana alam di Kota Cirebon.

Tabel II-10 Kejadian Bencana Alam di Kota Cirebon

Jenis Bencana	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Banjir	-	43	3	19	2	33	17	23
Cuaca Ekstrim	1	15	40	54	22	8	25	60
Gelombang Ekstrim Abrasi	-	1	-	3	-	12	-	4
Gempa Bumi	-	-	-	-	-	-	-	5
Kekeringan	1	1	1	-	-	-	1	1
Letusan Gunung Api	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanah Longsor	-	6	1	6	3	3	2	5
Jumlah	2	66	45	82	27	56	45	98

Sumber : Dokumen KRB Kota Cirebon, 2023; Open Data Kota Cirebon 2025

F.1 Bencana Banjir

Banjir merupakan kondisi dimana air permukaan meluap dan melebihi kapasitas debit sistem drainase. Penanganan banjir harus dilakukan secara terintegrasi, seperti telah dijabarkan dalam modul Pengelolaan Banjir Terpadu (Kodoatie & Sjarief, 2006) yang diterbitkan pada tahun 2017 oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi, Kementerian



Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dalam pengelolaan banjir secara terpadu yang dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), tahap pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi karakteristik banjir di Kota Cirebon. Selanjutnya dapat dilakukan mitigasi risiko melalui manajemen banjir dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, operasi dan pemeliharaan serta evaluasi dan monitoring. Manajemen banjir yang dilakukan di Kota Cirebon harus bersinergi dengan Kementerian PUPR yang memiliki kewenangan terhadap DAS di Kota Cirebon.

Tabel II-11 Potensi Bahaya Banjir di Kota Cirebon (Ha)

Kecamatan	Rendah	Sedang	Tinggi	Total	Kelas
Harjamukti	118,10	220,60	363,45	702,15	Tinggi
Kejaksaan	26,42	94,85	112,99	234,27	Tinggi
Kesambi	114,63	207,10	226,92	548,66	Tinggi
Lemahwungkuk	74,08	124,58	127,43	326,09	Tinggi
Pekalipan	5,73	35,52	40,11	81,37	Tinggi
Kota Cirebon	338,97	682,66	870,90	1.892,53	Tinggi

Sumber : Dokumen KRB Kota Cirebon 2018

Dengan teratasi bencana banjir sehingga kerugian fisik dan ekonomis dampak bencana banjir dapat berkurang (Green dkk., 2004). Pengurangan risiko kerentanan terhadap korban banjir melalui identifikasi lokasi bencana, besar tingkatannya/intensitas, kapasitas dari masyarakat dan sumber daya yang tersedia dan jangka waktunya sehingga dapat diperhitungkan tingkat risikonya untuk meminimalisir kerentanan korban yang terdampak.

Tabel II-12 Potensi Penduduk Terpapar Bencana Banjir di Kota Cirebon (Jiwa)

Kecamatan	Penduduk terpapar	Umur rentan	Penduduk miskin	Penduduk disabilitas	Kelas
Harjamukti	69.430	23.977	22.977	187	Tinggi
Kejaksaan	31.561	10.227	8.500	35	Tinggi
Kesambi	50.571	16.131	11.814	52	Tinggi
Lemahwungkuk	38.221	13.027	15.212	59	Tinggi
Pekalipan	20.747	6.896	7.058	180	Tinggi
Kota Cirebon	210.532	70.047	65.561	513	Tinggi

Sumber : Dokumen KRB Kota Cirebon 2018

Dalam mengurangi risiko keterpaparan diperlukan adanya perencanaan dan program, sistem dan prosedur, pelatihan dan pendidikan sumber daya dan tenaga yang dapat segera dimobilisasi dan diberdayakan dengan hasil terbaik. Dalam hal ini perlu dibangun kewaspadaan dari berbagai elemen termasuk infrastruktur yang diperlukan untuk mitigasi risiko bencana banjir.

Tabel II-13 Risiko bencana banjir di Kota Cirebon (Ha)

Kecamatan	Rendah	Sedang	Tinggi	Total	Kelas
Harjamukti	-	392.56	309.58	702.15	Tinggi
Kejaksaan	-	38.10	196.16	234.27	Tinggi
Kesambi	-	182.07	366.59	548.66	Tinggi
Lemahwungkuk	-	109.13	216.96	326.09	Tinggi
Pekalipan	-	3.64	77.72	81.37	Tinggi
Kota Cirebon	-	725.51	1.167.02	1.892.53	Tinggi

Sumber : Dokumen KRB Kota Cirebon 2018

F.2 Bencana pergerakan tanah

Letak geografis Kota Cirebon yang berada di kaki gunung Ciremai dengan jarak radius ± 26 km dari titik nol Kota Cirebon ke tepi kawah gunung Ciremai menjadi potensi memiliki risiko bencana gempa vulkanik. Pada sisi lain Kota



Cirebon juga berada di lingkungan sesar Balibis yang terletak di sebelah selatan Kota Cirebon sehingga juga memiliki risiko bencana gempa tektonik yang diakibatkan oleh pergeseran lempeng bumi.

Risiko gempa yang berdampak di Kota Cirebon cukup tinggi dengan rendahnya kapasitas Kota Cirebon dalam menghadapi gempa bumi. Kondisi ini akan memperburuk mitigasi risiko jika gempa bumi terjadi di Kota Cirebon. Untuk itu pemerintah Kota Cirebon dalam hal ini BPBD yang berperan sebagai koordinator, demi meningkatkan kapasitas tanggap bencana gempa bumi melalui perencanaan dan program kegiatan terkait mitigasi bencana kerugian materil dan non materil.

Risiko rawan longsoran merupakan gerakan perpindahan massa tanah atau batu pada arah tegak, mendatar atau miring dari kedudukan semula. Gerakan tanah mencakup gerak rayapan dan aliran maupun longsoran (Purbohadiwidjojo; dalam Pangular, 1985). Proses terjadinya tanah longsor terjadi karena air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Hujan deras yang terus mengguyur wilayah Cirebon dan sekitarnya dapat mengalami bencana longsor. Kota Cirebon memiliki kawasan rawan bencana/gerakan tanah/longsor pada bekas penambangan Galian C Kelurahan Argasunya seluas ± 200 ha. Kegiatan penambangan dengan menggunakan alat berat telah dihentikan, sedangkan penambangan secara tradisional menggunakan tenaga manusia masih dimungkinkan secara terkendali dengan pertimbangan kemanusiaan.

Disamping risiko longsoran tanah di daerah perbukitan, pengambilan air tanah yang berlebihan dapat menyebabkan penurunan tanah karena beban bangunan, hal ini disebabkan adanya konsolidasi alamiah beberapa lapisan tanah serta penurunan karena gaya-gaya tektonik yang merupakan tipe penurunan tanah yang dominan pada wilayah di kota besar. Perencanaan pembangunan sarana/prasarana, pelestarian lingkungan, pengendalian dan pengambilan air tanah, pengendalian intrusi air laut, serta perlindungan masyarakat dari dampak penurunan tanah perlu diidentifikasi karakteristiknya guna mitigasi bencana penurunan tanah yang harus dilakukan sedini mungkin, hal ini dikarenakan Kota Cirebon menjadi salah satu kota yang ada di peta potensi subsiden tanah di wilayah Indonesia dari tim Geodesi ITB keluaran 2018.

F.3 Bencana CUACA eKSTRIM

Kondisi cuaca di Kota Cirebon sangat berfluktuasi dalam periode tahunan. Adanya fenomena cuaca *La Niña* untuk fase panas dan *El Niño* untuk fase dingin juga mempengaruhi curah hujan dan intensitas matahari di Kota Cirebon. Kondisi ini akan mempengaruhi Bergeraknya udara sejajar dipermukaan bumi (Tjasyono, 2004), yang dikenal sebagai angin dipengaruhi oleh faktor pendorong yaitu perbedaan tekanan udara dari tempat bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan lebih rendah. Jika perbedaan tekanan yang sangat besar antara 2 lokasi yang berdekatan akan menyebabkan angin yang berkecepatan tinggi, kondisi ini berpotensi menyebabkan kerusakan.



Cuaca ekstrim juga menyebabkan kekeringan yang merupakan dampak fenomena cuaca La Niña. Salah satu mitigasi yang dapat dilakukan pemerintah saat terjadi kekeringan adalah dengan mensuplai kebutuhan air bersih untuk wilayah terdampak, sedangkan untuk korban terdampak badai angin adalah dengan mengevakuasi wilayah terdampak ke wilayah aman. Terjadinya cuaca ekstrim di Kota Cirebon cukup tinggi, berdasarkan data Kejadian Bencana Alam di Kota Cirebon yang bersumber dari Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Cirebon tahun 2023.

2.1.1.2 Demografi

Secara umum kultural dan suku bangsa di Kota Cirebon memiliki karakter religius, berbasis budaya dan sejarah, sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat dan kelestarian lingkungan. Hal ini merupakan bagian penting dari modal pembangunan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Potensi penduduk yang besar dan berkualitas dapat menjadi sumber daya yang menghasilkan barang dan jasa sehingga menciptakan *demand* dan pasar bagi barang dan jasa yang diproduksi. Penduduk yang besar harus dikendalikan agar tidak menjadi masalah kependudukan seperti: pengangguran; kemiskinan; putus sekolah dan lain-lain).

Jumlah penduduk Kota Cirebon mengalami peningkatan dengan jumlah penduduk sebanyak 352.347 jiwa pada tahun 2023 dan bertambah pada tahun 2024 menjadi 356.629 jiwa. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) mengalami fluktuasi terutama pada tahun 2021 yang mengalami penurunan menjadi 0,19 % karena adanya pandemi Covid-19.

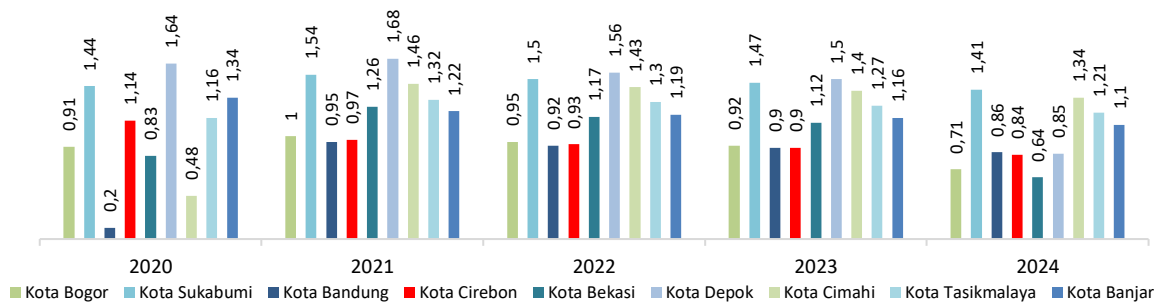
Tabel II-14 Jumlah Penduduk Kota Cirebon

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Penduduk (orang)	343.003	343.667	346.438	352.347	356.629
	Laki-laki	172.117	172.356	173.756	176.706	178.969
	Perempuan	170.886	171.311	172.682	175.641	177.660
2.	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,77	0,19	0,8	1,69	1,21
3.	Kepadatan penduduk (orang/km ²)	9.181,02	8.713,67	8.778,14	8.927,86	9.036,36

Sumber: Disdukcapil 2025.

Kepadatan penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan angka mencapai 9.181,02 jiwa/km². Kepadatan penduduk pada tahun 2021 turun menjadi 8.713,67 jiwa/km², hal ini terjadi karena adanya penambahan luas wilayah Kota Cirebon seluas 2,106 km², yang semula memiliki luas 37.36 km² menjadi 39,466 km². Pergerakan kepadatan penduduk sebanding dengan pertambahan jumlah penduduk. LPP turun pada tahun 2024 menjadi 1,21% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1,69 %.

Gambar II-4 LPP Kota di Jawa Barat (%)

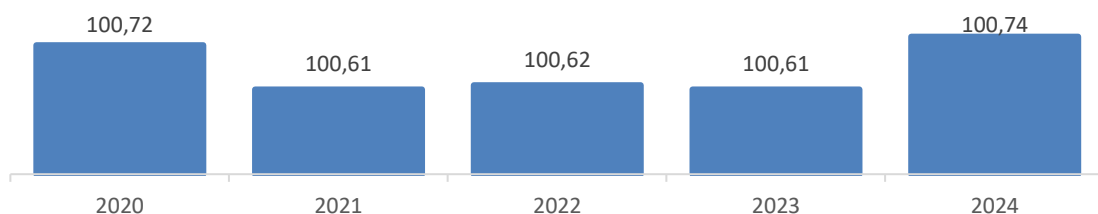


Sumber: BPS 2025

LPP di Kota Cirebon dalam lima tahun terakhir cenderung menurun cukup signifikan sebesar 0,58 % sebagai dampak dari adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2021. Penurunan LPP yang signifikan disebabkan oleh tingginya angka kematian di Kota Cirebon saat pandemi Covid-19, termasuk di Kota Cirebon pada periode akhir tahun 2019 hingga akhir tahun 2022 yang merupakan akhir masa pandemi Covid-19.

Pertumbuhan penduduk Kota Cirebon tidak hanya terjadi karena pertumbuhan alami, tetapi juga adanya migrasi masuk yang lebih besar dibandingkan dengan migrasi keluar. Pesatnya perkembangan pembangunan di wilayah kota, menjadi salah satu faktor daya tarik masyarakat sekitar untuk menetap sebagai penduduk di Kota Cirebon.

Gambar II-5 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Cirebon



Sumber: Disdukcapil Kota Cirebon 2025

Penduduk yang diperbandingkan berdasarkan jumlah penduduk laki-laki dan penduduk perempuan yang ditetapkan sebagai indikator Rasio Jenis Kelamin. Rasio jenis kelamin Kota Cirebon mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir dengan rasio pada tahun 2024 sebesar 100,74 yang artinya jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah perempuan, yaitu dari 100 orang penduduk perempuan terdapat 100 orang sampai 101 orang penduduk laki-laki.

Tabel II-15 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kota Cirebon

Kelompok Umur	2020	2021	2022	2023	2024
0 – 4	26.896	26.564	21.694	26.717	25.442
5 – 9	29.654	29.192	29.338	29.483	29.967
10 – 14	29.857	30.047	29.820	30.110	30.491
15 – 19	28.999	28.385	27.519	29.166	29.725
20 – 24	29.182	29.115	29.287	29.509	29.734
25 – 29	27.561	28.024	28.366	28.444	28.873
30 – 34	25.409	25.642	26.668	26.724	26.789
35 – 39	27.129	26.327	24.695	24.755	24.983
40 – 44	26.577	26.907	28.013	27.996	27.573
45 – 49	23.301	23.986	24.759	24.690	25.604



Kelompok Umur	2020	2021	2022	2023	2024
50 – 54	20.085	20.426	21.646	21.494	21.633
55 – 59	15.975	16.196	17.544	17.309	18.401
60 – 64	13.178	16.036	13.853	13.605	13.808
65 – 69	9.154	9.579	10.482	10.190	10.518
70 – 74	5.012	5.130	6.601	6.382	6.935
> 75	5.034	5.111	6.153	5.773	6.153
JUMLAH	343.003	343.667	346.438	352.347	356.629
	3	7	8	7	9

Sumber: Disdukcapil Kota Cirebon 2025.

Berdasarkan data di atas, dapat diklasifikasikan menjadi usia produktif dan tidak produktif, dimana usia produktif adalah usia 15-65 tahun. Jumlah penduduk terbanyak di Kota Cirebon selama 5 tahun terakhir adalah kelompok umur dengan rentang usia 10-14 tahun yaitu sebanyak 30.491 jiwa pada tahun 2024.

Tabel II-16 Kelompok Umur Produktif Penduduk Kota Cirebon

Kelompok Usia	2020		2021		2022		2023		2024	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
0 – 14	43.699	40.937	44.301	41.502	44.909	42.250	44.405	41.905	44.255	41.645
15 – 64	119.407	119.164	119.211	118.833	119.592	118.795	122.433	121.259	124.387	122.736
65 +	9.011	10.785	8.844	10.976	9.255	11.637	9.868	12.477	10.327	13.279
Jumlah	172.117	170.886	172.356	171.311	173.756	172.682	176.706	175.641	178.969	177.660
L + P	343.003		343.667		346.438		352.347		356.629	

Sumber: Disdukcapil Kota Cirebon 2025.

Penduduk Kota Cirebon lebih didominasi oleh kelompok usia produktif (15-64 tahun) pada tahun 2024, yaitu sebesar 69,81% atau 247.585 orang. Sedangkan kelompok usia yang tergolong tidak produktif sebesar 30,19% atau 107.094 orang sehingga 1 (satu) orang yang tergolong dalam usia produktif harus menanggung 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang yang berusia non-produktif. Dengan adanya bonus demografi ini, Kota Cirebon diuntungkan dan memiliki peluang untuk dapat meningkatkan pertumbuhan produktivitas masyarakatnya. Walaupun data menunjukkan 69,81% dari total jumlah penduduk Kota Cirebon adalah usia angkatan kerja (usia produktif), namun kualitasnya perlu terus ditingkatkan sehingga mampu bersaing di pasar kerja dan menekan angka pengangguran terbuka di Kota Cirebon.

Tabel II-17 Sebaran Penduduk Kota Cirebon per Kecamatan Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase Penduduk (%)	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan (Jiwa/km ²)
1.	Kejaksan	51.683	14,5	4,441	11.638
2.	Lemahwungkuk	61.723	17,3	7,185	8.591
3.	Harjamukti	130.803	36,7	17,602	7.431
4.	Pekalipan	31.446	8,8	1,585	19.840
5.	Kesambi	80.974	22,7	8,653	9.358
	Kota Cirebon	356.629	100	39,398	9.052

Sumber: Disdukcapil Kota Cirebon 2025.

Sebaran penduduk Kota Cirebon tersebar di 5 kecamatan dan 22 kelurahan, untuk Kecamatan Harjamukti memiliki jumlah penduduk paling besar pada tahun 2024 yaitu 130.803 jiwa atau 36,7% dari total jumlah penduduk. Sedangkan Kecamatan Pekalipan memiliki penduduk paling kecil

yaitu 31.446 jiwa atau 8,8% dari total jumlah penduduk Kota Cirebon. Kecamatan Harjamukti yang memiliki jumlah penduduk yang paling besar, tetapi tingkat kepadatan di Kecamatan Harjamukti adalah yang terendah dibanding Kecamatan lain di Kota Cirebon yaitu sebesar 7.431 jiwa/km² karena memiliki luas wilayah yang cukup besar. Sedangkan Kecamatan Pekalipan dengan jumlah penduduk paling sedikit namun memiliki luas wilayah yang paling kecil, maka Kecamatan Pekalipan tercatat sebagai kecamatan dengan kepadatan penduduk paling tinggi di Kota Cirebon dengan kepadatan penduduk mencapai 19.840 jiwa/km² pada tahun 2024.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan akhir dari penyelenggaraan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah guna mewujudkan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi: (1) aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (2) aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan sosial dan; (3) aspek kesejahteraan dengan fokus seni budaya dan olahraga.

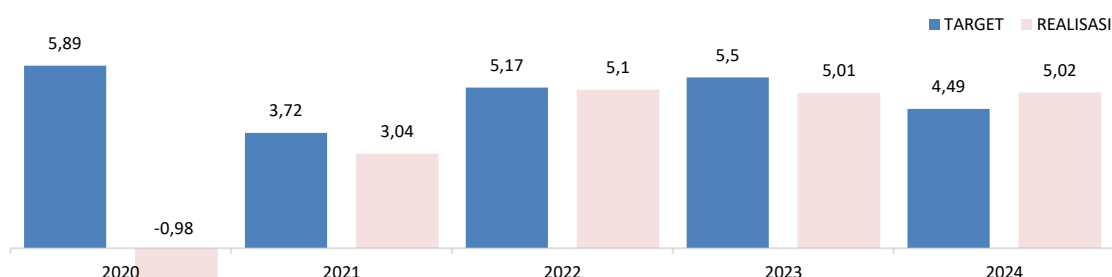
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi

Salah satu dari tujuan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat, yang dapat dicapai melalui pembenahan taraf hidup masyarakat, perluasan lapangan pekerjaan, serta peningkatan pendapatan bagi seluruh masyarakat. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan pemerataan ekonomi antara lain Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB per kapita, Laju Inflasi, Indeks Gini dan Persentase penduduk di atas garis kemiskinan.

A. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu indikator penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi daerah adalah tingkat pertumbuhan ekonomi. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dapat menggambarkan suatu dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan, khususnya dalam bidang ekonomi. LPE merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk oleh berbagai macam sektor ekonomi yang dapat menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. LPE daerah diukur melalui pertumbuhan PDRB.

Gambar II-6 Tingkat Capaian dan Target LPE Kota Cirebon (%)



Sumber: Dok. Perencanaan Kota Cirebon, BPS 2025

Kinerja pembangunan ekonomi di kota Cirebon tahun 2020-2024 menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan ditandai adanya capaian

pertumbuhan yang cenderung meningkat setelah terjadinya pandemi Covid-19, dimana LPE kota Cirebon saat awal pandemi Covid-19 berkontraksi hingga minus 0,98 di tahun 2020 dan berhasil kembali meningkat karena dampak keberhasilan pengendalian pandemi Covid-19 dengan adanya stimulus fiskal oleh Pemerintah. LPE tahun 2020 hingga 2024 belum ada yang mencapai target, sehingga target LPE disesuaikan menjadi sebesar 4,49 % pada dokumen perencanaan jangka menengah periode 2024-2026. Hal ini berdasarkan hasil analisa terhadap kemampuan LPE yang kembali turun sebesar 5,02 % pada tahun 2024.

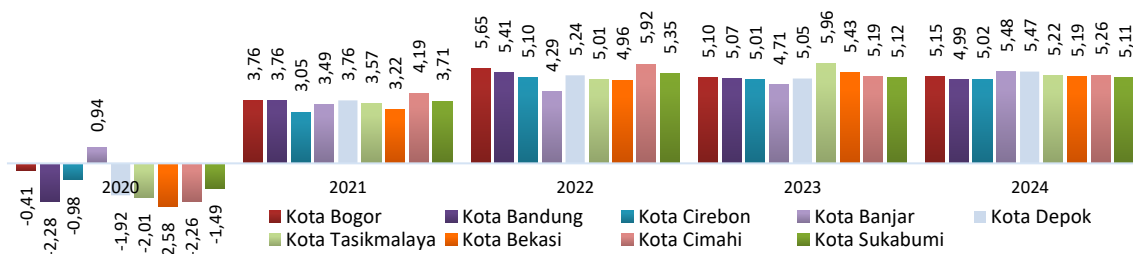
Gambar II-7 LPE Kota Cirebon, Jawa Barat dan Nasional



Sumber: BPS, 2025.

LPE Kota Cirebon searah dengan LPE Provinsi Jawa Barat dan Nasional. LPE di Kota Cirebon sebelum terjadinya pandemi Covid-19 berada di atas Provinsi Jawa Barat dan Nasional begitupun di saat hantaman Covid-19 terjadi, kontraksi LPE Kota Cirebon terbilang rendah bila dibandingkan dengan provinsi Jawa Barat dan Nasional. Pemulihan perekonomian Kota Cirebon pasca pandemi Covid-19 terlihat masih berada di bawah provinsi Jawa Barat dan Nasional hal ini terlihat dari LPE Kota Cirebon pasca pandemi Covid-19 berada di bawah provinsi Jawa Barat maupun Nasional dan belum mampu mengejar LPE sebelum terjadinya pandemi Covid-19.

Gambar II-8 LPE Kota di Wilayah Jawa Barat



Sumber: BPS, 2025.

Roda perekonomian di wilayah Jawa Barat kembali menunjukkan geliatnya, hal ini dapat dilihat dari bervariasinya perkembangan LPE wilayah kota di Jawa Barat. Di saat pandemi Covid-19 terjadi di tahun 2020, hanya Kota Banjar yang mampu bertahan dengan laju pertumbuhan positif, sementara kota lainnya termasuk Kota Cirebon berkontraksi negatif.

Seiring pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, geliat ekonomi di wilayah ini mulai terlihat tumbuh positif semua, kenaikan LPE cukup tinggi Kota Cirebon, yaitu dari minus 0,98 % menjadi 5,02 %, atau naik sebesar 6



%. Kondisi ini dimungkinkan dengan meredanya pandemik Covid-19. Penghentian kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), menyebabkan roda perekonomian kembali menuju normal dan diharapkan ekonomi di Kota Cirebon mampu melaju dengan kecepatan seperti sebelum terjadinya pandemi Covid-19.

Pencapaian LPE Kota Cirebon tahun 2024 dibandingkan kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat berada di peringkat 17 (tujuh belas) sedangkan pada tahun 2020 berada pada peringkat 10 (sepuluh), walaupun ada kecenderungan peningkatan LPE di Kota Cirebon pasca endemi Covid-19.

Tabel II-18 LPE Kota di Jawa Barat

Nama Kota	LPE 2020	LPE 2024
Kota Bandung	-2,28	4,99
Kota Banjar	0,94	5,48
Kota Bekasi	-2,58	5,19
Kota Bogor	-0,41	5,15
Kota Cimahi	-2,26	5,26
Kota Cirebon	-0,98	5,02
Kota Depok	-1,92	5,47
Kota Sukabumi	-1,49	5,11
Kota Tasikmalaya	-2,01	5,22
Prov Jawa Barat	-2,52	4,95

Sumber: BPS 2025

LPE di Kota Cirebon tahun 2024 berdasarkan dari 16 sektor lapangan usaha yang ada, sebanyak 14 lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang positif dan lapangan usaha sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib mengalami pertumbuhan negatif. Pertumbuhan paling besar ada pada sektor Real Estate yang tumbuh mencapai 12,48 %, berikutnya adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Tumbuh sebesar 8,83 % dan sektor Jasa Perusahaan berada di urutan ketiga yang tumbuh sebesar 6,57 %. Perkembangan LPE Kota Cirebon tahun 2024 menurun cukup signifikan jika dibandingkan dengan daerah lain pada tahun 2020.

Data berikut merupakan data PDRB ADHK 2010 untuk kontribusi lapangan usaha dalam pencapaian LPE di Kota Cirebon tahun 2020 sampai tahun 2024.

Tabel II-19 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kota Cirebon Menurut Lapangan Usaha (%)

No.	Sektor Lapangan Usaha	2020	2021	2022*	2023**	2024***
1.	A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,30	3,13	2,50	0,30	3,13
2.	B. Pertambangan dan Pengalihan	-	-	-	-	-
3.	C. Industri Pengolahan	-0,70	4,28	6,24	-0,70	4,28
4.	D. Pengadaan Listrik dan Gas	-4,26	3,45	5,34	-4,26	3,45



No.	Sektor Lapangan Usaha	2020	2021	2022*	2023**	2024***
5.	E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,01	8,83	6,56	3,01	8,83
6.	F. Konstruksi	-5,70	2,53	-1,78	-5,70	2,53
7.	G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-6,86	2,68	3,55	-6,86	2,68
8.	H. Transportasi dan Pergudangan	-2,58	2,42	18,68	-2,58	2,42
9.	I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-8,11	4,24	12,01	-8,11	4,24
10.	J. Informasi dan Komunikasi	33,83	3,11	4,73	33,83	3,11
11.	K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,04	3,03	-0,13	1,04	3,03
12.	L. Real Estate	-0,23	12,48	5,81	-0,23	12,48
13.	M,N. Jasa Perusahaan	-12,19	6,57	5,51	-12,19	6,57
14.	O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-7,22	-0,42	-1,48	-7,22	-0,42
15.	P. Jasa Pendidikan	6,83	2,09	7,39	6,83	2,09
16.	Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,89	3,02	5,78	10,89	3,02
17.	R,S,T,U. Jasa lainnya	-0,49	4,79	5,02	-0,49	4,79
Pertumbuhan PDRB Kota Cirebon		-0,98	-0,98	3,05	5,10	5,18
Jawa Barat		-2,52	3,74	5,45	5,00	4,91
Nasional		-2,07	3,70	5,31	5,05	4,95

Sumber: BPS 2025

*Angka sementara **Angka sementara ***Angka sangat sementara

Sebagai salah satu daerah unggulan di wilayah Provinsi Jawa Barat, Kota Cirebon harus mengoptimalkan setiap potensi yang dimilikinya, mengingat Kota Cirebon menjadi salah satu poros kegiatan ekonomi di wilayah Ciayumajakuning dan menjadi tolok ukur bagi wilayah di sekitarnya. Berdasarkan data LPE, Kota Cirebon memiliki optimisme untuk secara bertahap terus bergerak dan meningkat di berbagai sektor. adanya sektor bertumbuh negatif yang harus segera diatasi dengan beberapa kebijakan untuk meningkatkan geliat pertumbuhannya. Kebijakan yang diterapkan harus tepat sasaran, sehingga dapat menciptakan kebijakan yang tepat guna, efektif dan efisien.

PDRB menjadi salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. PDRB disajikan dengan pengukuran harga-harga pada tahun penghitungan untuk versi Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan pengukuran harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan untuk versi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB ADHB atau dikenal dengan PDRB nominal dapat digunakan untuk melihat struktur perekonomian suatu wilayah sedangkan PDRB atas harga konstan dapat digunakan untuk mengukur LPE.

Berdasarkan harga konstan, nilai PDRB Kota Cirebon pada tahun 2023 mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2022. Nilai PDRB Kota Cirebon tahun 2024 ADHK mencapai Rp.19.884,06 miliar, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp.18.934,40 miliar.

Tabel II-20 PDRB ADHK 2020 Kota Cirebon Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)

No.	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	47,11	48,59	49,80	49,14	38,91
2.	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
3.	Industri Pengolahan	1.677,75	1.749,50	1.858,64	2.012,08	2.037,65
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	97,74	101,11	106,41	115,91	112,09
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	46,01	50,08	53,36	52,64	52,70



No.	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
6.	Konstruksi	1.579,57	1.619,45	1.590,62	1.675,44	1.956,11
7.	Perdagangan Besar dan Eceran	5.066,52	5.202,31	5.386,76	5.507,93	5.565,47
8.	Transportasi dan Pergudangan	1.679,27	1.719,88	2.041,08	2.244,99	2.436,81
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	786,76	820,15	918,63	997,92	1.016,42
10.	Informasi dan Komunikasi	1.545,92	1.593,99	1.669,46	1.783,49	1.902,85
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.814,13	1.869,07	1.866,64	1.875,60	1.907,41
12.	Real Estate	173,03	194,62	205,93	224,91	245,93
13.	Jasa Perusahaan	131,04	139,65	147,34	149,42	152,46
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	516,21	514,04	506,42	515,77	462,95
15.	Jasa Pendidikan	638,05	651,35	699,51	737,46	777,89
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	441,29	454,60	480,85	508,71	583,76
17.	Jasa lainnya	407,82	427,35	448,79	482,98	634,65
Produk Domestik Regional Bruto		16.648,21	17.155,75	18.030,25	18.934,40	19.884,06

Sumber: BPS 2025;

* Angka sementara **Angka sementara

Nilai PDRB ADHB 2020 Kota Cirebon Menurut Lapangan Usaha pada tahun 2024 ADHB mencapai Rp.30.540,17 miliar, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp. 28.772,59 miliar.

Tabel II-21 PDRB ADHB 2020 Kota Cirebon Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)

No.	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	80,13	83,12	89,96	93,06	76,58
2.	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
3.	Industri Pengolahan	2.389,97	2.555,49	2.760,21	3.004,39	3.081,92
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	137,60	143,15	155,04	170,67	165,17
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	71,48	78,03	84,22	85,67	88,15
6.	Konstruksi	2.215,66	2.294,72	2.389,39	2.530,80	2.979,50
7.	Perdagangan Besar dan Eceran	6.967,96	7.268,15	7.659,17	8.135,60	8.340,36
8.	Transportasi dan Pergudangan	2.691,38	2.809,21	3.519,33	4.152,86	4.624,41
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.196,12	1.277,32	1.488,48	1.678,46	1.745,87
10.	Informasi dan Komunikasi	1.478,49	1.502,26	1.549,28	1.656,08	1.767,93
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.744,63	2.908,08	3.148,56	3.213,72	3.317,03
12.	Real Estate	217,55	245,17	267,69	300,05	330,30
13.	Jasa Perusahaan	196,61	210,54	225,12	235,09	233,19
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	858,28	859,05	844,10	871,96	712,64
15.	Jasa Pendidikan	1.006,72	1.047,67	1.132,30	1.218,88	1.321,63
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	611,29	633,28	679,38	736,05	834,23
17.	Jasa lainnya	564,93	591,37	625,61	689,26	921,26
Produk Domestik Regional Bruto		23.428,79	24.506,59	26.617,84	28.772,59	30.540,17

Sumber: BPS 2025

* Angka sementara **Angka sementara

Dari 17 kategori sektor lapangan usaha penyusun PDRB ADHB Kota Cirebon tahun 2024 yang memberikan kontribusi besar adalah sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Sektor tersebut berkontribusi sebesar Rp.8.340,36 miliar atau 27,31 %. Berikutnya dari sektor Transportasi dan Pergudangan dengan nilai PDRB sebesar



Rp.4.624,41 miliar atau 15,14% yang kontribusinya meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 14,43 %. Sektor Jasa Keuangan dan asuransi juga mempunyai potensi yang besar kontribusinya untuk PDRB sebesar Rp. 3.317,03 miliar atau 10,86 %. Kontribusi sebesar Rp. 3.081,92 miliar atau 10,09 % berasal dari sektor Industri Pengolahan. Ke-4 (empat) sektor ini merupakan yang berkontribusi besar pada PDRB Kota Cirebon.

Tabel II-22 Distribusi PDRB ADHB 2020 Kota Cirebon Menurut Lapangan Usaha (%)

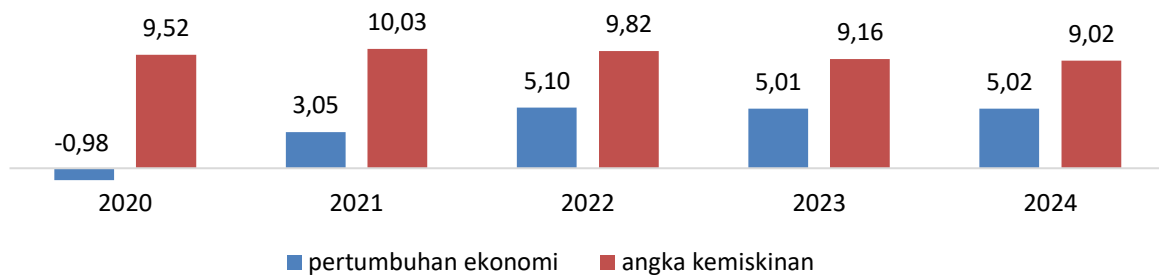
No.	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
1.	Pertanian, kehutanan dan perikanan	0,34	0,34	0,34	0,32	0,25
2.	Pertambangan dan penggalian
3.	Industri pengolahan	10,2	10,43	10,37	10,44	10,09
4.	Pengadaan listrik dan gas	0,59	0,58	0,58	0,59	0,54
5.	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,31	0,32	0,32	0,3	0,29
6.	Konstruksi	9,46	9,36	8,98	8,8	9,76
7.	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	29,74	29,66	28,77	28,28	27,31
8.	Transportasi dan pergudangan	11,49	11,46	13,22	14,43	15,14
9.	Penyediaan akomodasi dan makan minum	5,11	5,21	5,59	5,83	5,72
10.	Informasi dan komunikasi	6,31	6,13	5,82	5,76	5,79
11.	Jasa keuangan dan asuransi	11,71	11,87	11,83	11,17	10,86
12.	Real estate	0,93	1	1,01	1,04	1,08
13.	Jasa perusahaan	0,84	0,86	0,85	0,82	0,76
14.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	3,66	3,51	3,17	3,03	2,33
15.	Jasa pendidikan	4,3	4,28	4,25	4,24	4,33
16.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	2,61	2,58	2,55	2,56	2,73
17.	Jasa lainnya	2,41	2,41	2,35	2,4	3,02
	Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100

Sumber: BPS 2025

* Angka sementara **Angka sementara

Sebagai salah satu daerah unggulan di wilayah Provinsi Jawa Barat, Kota Cirebon harus mengoptimalkan setiap potensi yang dimilikinya, mengingat Kota Cirebon menjadi salah satu poros kegiatan ekonomi di wilayah Ciayumajakuning yang menjadi tolok ukur untuk wilayah di sekitarnya. Berdasarkan data LPE, Kota Cirebon memiliki optimisme untuk secara bertahap terus bergerak dan meningkat hampir di seluruh sektor. Hal itu menunjukkan perkembangan ekonomi Kota Cirebon yang bersifat progresif sesuai dengan salah satu misi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Daerah Kota Cirebon ke depan perlu menerapkan sekaligus mengelola kebijakan dengan tepat dalam pengembangan perekonomian daerah. Kebijakan yang diterapkan harus tepat sasaran, sehingga dapat menciptakan kebijakan yang tepat guna, efektif dan efisien. Oleh karena itu, dalam upaya pengembangan perekonomian Kota Cirebon ke depan diperlukan kajian dan inovasi daerah terkait dengan pertumbuhan perekonomian Kota Cirebon.

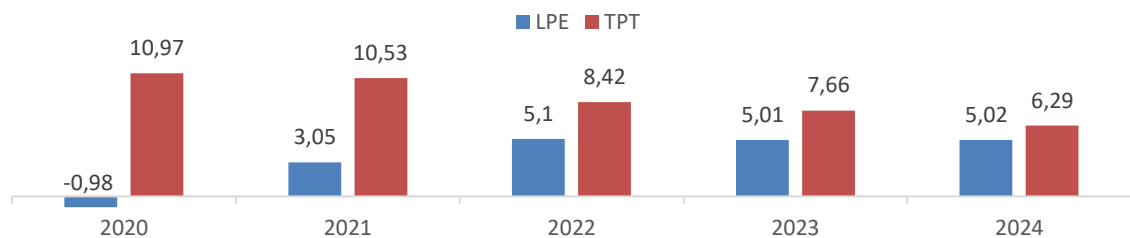
Gambar II-9 LPE dan Persentase Penduduk Miskin Kota Cirebon



Sumber: BPS 2025

Dengan adanya peningkatan angka LPE pada kurun waktu 2020-2024 diharapkan juga akan berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Namun, kondisi ini ternyata tidak berlaku pada Tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa LPE di Kota Cirebon mempunyai korelasi dengan penurunan angka kemiskinan. Ini bisa menandakan bahwa LPE yang terjadi, belum bisa mendongkrak angka kemiskinan yang ada disebabkan tingginya tingkat pengangguran di masa Pandemi Covid-19, sehingga diperlukan intervensi kebijakan Pemerintah Daerah Kota Cirebon untuk mengatasinya.

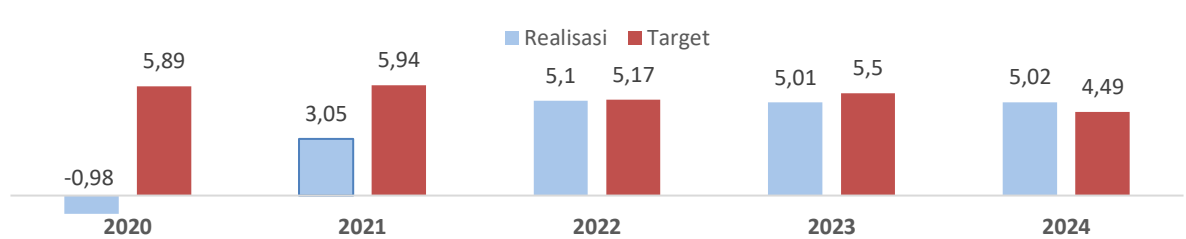
Gambar II-10 LPE dan TPT di Kota Cirebon



Sumber: BPS 2025

LPE juga dibandingkan dengan angka pengangguran terbuka karena variabel tersebut memiliki korelasi, dimana jika LPE naik maka kualitas ekonomi masyarakat akan meningkat. Selanjutnya kualitas ekonomi masyarakat dapat dilihat dari variabel angka pengangguran terbuka. Berikut komparasi antara LPE dengan pengangguran terbuka di Kota Cirebon dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Gambar II-11 Target dan Capaian LPE di Kota Cirebon



Sumber: BPS 2025

Pada Tahun 2024, capaian LPE yaitu sebesar 5,02 persen sedangkan target yang disesuaikan dalam dokumen perencanaan adalah 4,49 persen. Berikut target dan capaian LPE Kota Cirebon dalam lima tahun terakhir.

B. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita adalah nilai PDRB ADHB per satu orang penduduk yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Angka PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Angka ini digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah, sehingga dengan penyajian secara berkala akan menunjukkan adanya perubahan kemakmuran. PDRB per kapita ADHB menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk, sedangkan PDRB per kapita ADHK berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

Tabel II-23 Tingkat Capaian PDRB per kapita Kota Cirebon

Tahun	Jumlah penduduk	PDRB per Kapita (juta rupiah)		Pertumbuhan PDRB per kapita	
		ADHK	ADHB	ADHK (%)	ADHB (%)
2020	332.472	50,074	70,468	-5,96	-5,28
2021	336.864	51,088	72,978	2,03	3,56
2022	341.235	53,196	78,532	4,13	7,61
2023*	352.347	55,367	84,135	4,08	7,13
2024**	356.629	57,660	88,560	4,14	n.a

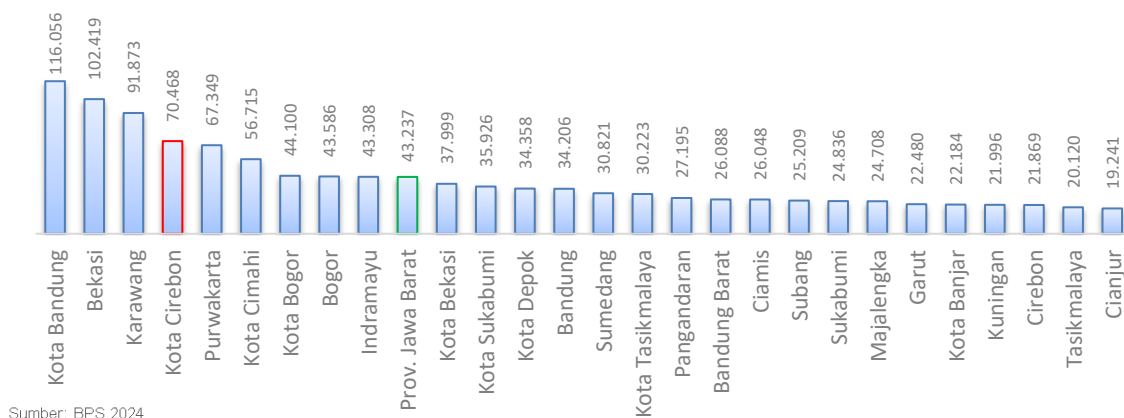
Sumber: BPS 2025

* Angka sementara;

** Angka sangat sementara.

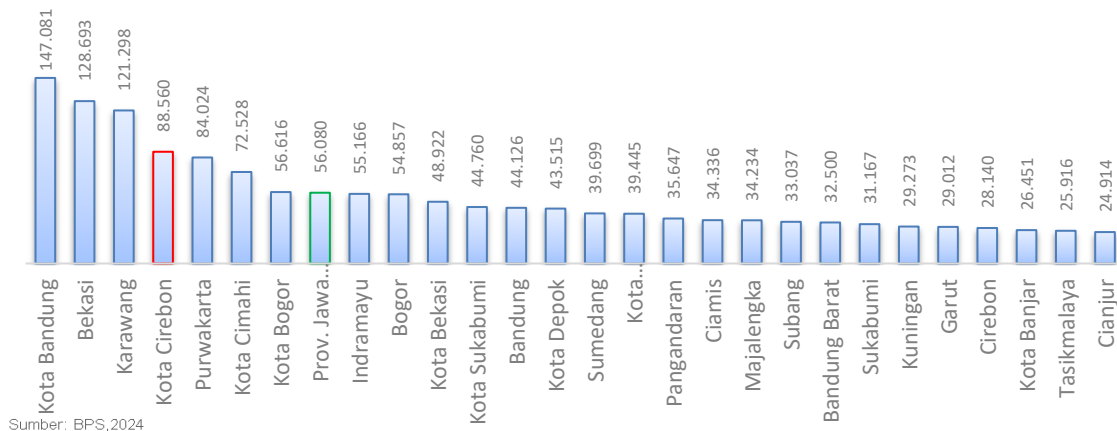
Dengan meningkatnya PDRB per kapita ADHB maka tingkat kemakmuran penduduk Kota Cirebon menjadi lebih baik bagi. Hal ini harus diimbangi dengan pertumbuhan penduduk yang tidak terlalu cepat, sehingga tingkat kemakmuran dapat dinikmati secara merata oleh seluruh penduduk Kota Cirebon. Namun dengan adanya pandemi Covid-19, berdampak terhadap penurunan pendapatan per kapita penduduk Kota Cirebon sebesar Rp.0,89 juta.

Gambar II-12 PDRB per kapita ADHB Kab. /Kota di Jawa Barat Tahun 2020



Sumber: BPS, 2024

Gambar II-13 PDRB per kapita ADHB Kab. /Kota di Jawa Barat Tahun 2024



PDRB per kapita ADHB Kota Cirebon mengalami peningkatan di tahun 2024 yang semula pada tahun sebelumnya sebesar Rp.78,532 juta menjadi Rp.88,560 juta, angka ini masih di bawah target daerah pada tahun 2024 sebesar Rp.83,84 juta. PDRB per kapita yang dihitung ADHB, selain dipengaruhi oleh inflasi yang sangat berpengaruh terhadap daya beli, juga karena pola distribusi dari pendapatan regional Kota Cirebon yang belum merata.

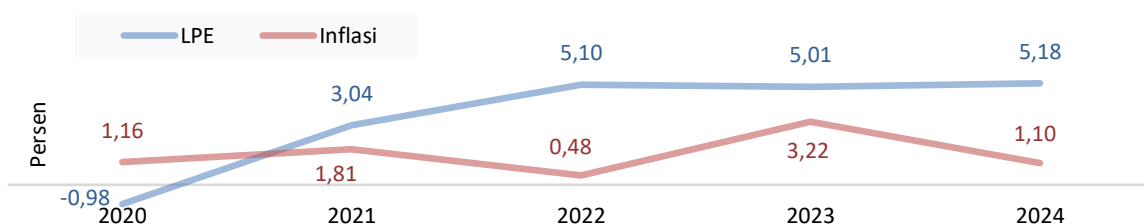
Pencapaian PDRB per kapita ADHB mengalami peningkatan selama periode 2020-2024 meskipun terjadi pandemi Covid-19 di tahun 2020, hal ini mampu untuk segera dipulihkan kembali di tahun 2022 dengan capaian 97,7% dari target yang ditetapkan Rp.80,38 juta.

Pencapaian PDRB per kapita ADHB Kota Cirebon tahun 2024 dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat berada di peringkat ke empat. Posisi ini masih bertahan bila dibandingkan dengan keadaan saat pandemi Covid-19 di tahun 2020 dimana PDRB per kapita Kota Cirebon menduduki posisi ke empat.

C. Laju Inflasi

Perkembangan harga-harga secara umum merupakan salah satu indikator penting dalam menunjukkan kinerja perekonomian suatu daerah. Fluktuasi dari perubahan harga-harga yang tercermin dari besarnya nilai inflasi yang dapat menjadi indikator apakah perekonomian sedang mengalami tekanan atau perbaikan. Fluktuasi inflasi yang rendah menunjukkan baiknya perekonomian, sebaliknya fluktuasi inflasi yang tinggi menunjukkan adanya permasalahan perekonomian walaupun hal ini tidak selalu sejalan dengan LPE.

Gambar II-14 Inflasi dan LPE



Sumber: BPS 2025



Laju inflasi Kota Cirebon mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dan mengalami penurunan menjadi 1,1% di tahun 2024 dari 1,16% pada tahun 2020 walaupun sempat menyentuh 4,86% di tahun 2022.

Tabel II-24 Inflasi Kota Cirebon (%)

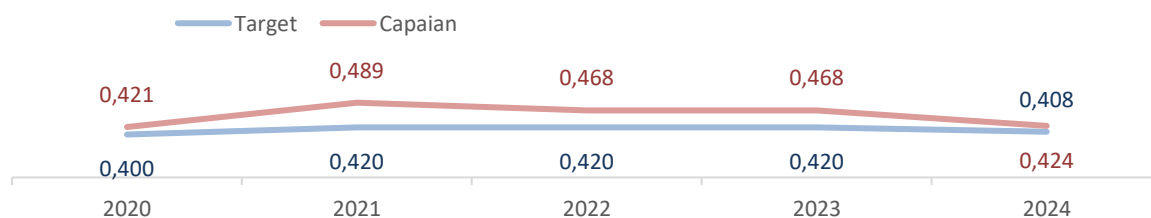
No.	Bulan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Januari	1,39	1,14	2,29	5,5	1,97
2.	Pebruari	1,76	1,04	2,38	5,72	2,19
3.	Maret	1,98	0,82	2,96	5,22	2,70
4.	April	1,82	1,13	3,37	4,85	2,57
5.	Mei	1,47	1,56	3,45	4,57	1,97
6.	Juni	1,76	0,93	4,13	4,27	1,43
7.	Juli	1,51	1,07	4,49	4,13	1,01
8.	Agustus	1,05	1,39	4,37	4,04	1,18
9.	September	1,13	1,59	5,60	3,07	0,83
10.	Oktober	1,03	1,66	5,41	3,20	0,88
11.	Nopember	1,18	1,75	5,06	3,27	0,85
12.	Desember	1,16	1,81	4,86	3,22	1,10

Sumber: BPS, 2025

D. Indeks Gini

Indeks Gini Kota Cirebon Tahun 2020-2024 terlihat fluktuatif, pada tahun 2024 sebesar 0,424. Angka Indeks Gini tersebut merupakan dasar indikator dari Gini, C (1912) yang dapat menggambarkan bahwa Kota Cirebon pada tahun 2024 termasuk wilayah yang memiliki ketimpangan pendapatan kategori sedang ($0,4 < \text{Indeks Gini} < 0,5$). Kondisi ini lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat.

Gambar II-15 Target dan Capaian Indeks Gini Kota Cirebon



Sumber: Dok. Perencanaan Kota Cirebon, BPS 2025

Dalam periode tahun 2020-2024, capaian Indeks Gini Kota Cirebon belum mencapai target yang telah ditetapkan. Pandemi Covid-19 memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap ketimpangan di Kota Cirebon, sebagaimana juga terjadi di tingkat Jawa Barat dan Nasional. Banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan menjadi salah satu penyebab meningkatnya ketimpangan.

Tabel II-25 Indeks Gini Kota Cirebon, Prov. Jawa Barat dan Nasional

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kota Cirebon	0,421	0,489	0,468	0,468	0,424
2.	Jawa Barat	0,403	0,412	0,417	0,425	0,421
3.	Nasional	0,381	0,384	0,381	0,388	0,379

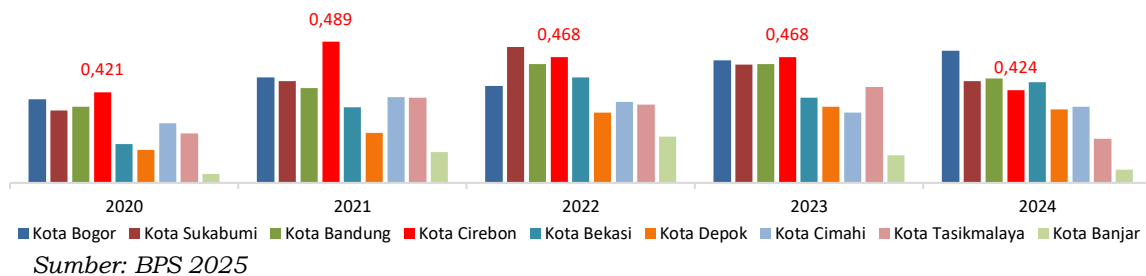
Sumber: BPS 2025

Dibandingkan dengan kota lain di Jawa Barat, Indeks Gini Kota Cirebon selama tahun 2020-2024 cukup tinggi. Biaya hidup di Kota Cirebon yang lebih



mahal serta rendahnya pendapatan pada sebagian masyarakat yang tergolong miskin sehingga menyebabkan kesenjangannya semakin lebar.

Gambar II-16 Indeks Gini Kota di Jawa Barat



E. Jumlah Dan Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan

Penduduk miskin memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK). GK merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Tabel II-26 Komoditi untuk penghitungan GK Makanan

1	Beras	14	Daging Babi	27	Nangka Muda	40	Gula Pasir
2	Beras Ketan	15	Daging Ayam Ras	28	Bawang Merah	41	Gula Merah
3	Jagung Pipilan	16	Daging Ayam Kampung	29	Cabe Merah	42	Kopi
4	Tepung Terigu	17	Tetelan	30	Cabe Rawit	43	Teh
5	Ketela Pohon	18	Telur Ayam Ras	31	Kacang Tanah	44	Garam
6	Ketela Rambat	19	Telur Itik/Manila	32	Tahu	45	Kemiri
7	Gaplek	20	Susu Kental Manis	33	Kerupuk	46	Tempe
8	Tongkol/Tuna	21	Susu Bubuk	34	Mangga	47	Terasi/Petis
9	Kembung	22	Bayam	35	Salak	48	Mie Instant
10	Teri	23	Buncis	36	Pisang Ambon	49	Roti Manis
11	Bandeng	24	Kacang Panjang	37	Pepaya	50	Kue Kering
12	Mujair	25	Tomat Sayur	38	Minyak Kelapa	51	Kue Basah
13	Daging Sapi	26	Daun Ketela Pohon	39	Kelapa	52	Rokok Kretek Filter

Sumber: Pengenalan Indikator Kemiskinan dan Ketimpangan BPS 2023.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari dengan 52 jenis komoditi kebutuhan dasar makanan antara lain: padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) merupakan kebutuhan minimum dengan 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Tabel II-27 Komoditi untuk penghitungan GK Bukan Makanan

1	Perumahan	13	Obat Nyamuk, Korek Api, Baterai, dsb	25	Handuk/Ikat Pinggang
2	Listrik	14	Pos Dan Benda Pos	26	Perabot Rumah Tangga
3	Air	15	Pengangkutan	27	Perkakas Rumah Tangga
4	Minyak Tanah	16	Foto	28	Alat Dapur/Makan
5	Kayu Bakar	17	Pakaian Jadi Laki2 Dewasa	29	Arloji/Jam Dinding
6	Bensin	18	Pakaian Jadi Perempuan Dewasa	30	Tas
7	Barang Kecantikan	19	Keperluan Menjahit	31	Mainan Anak
8	Perawatan Kulit/Muka	20	Alas Kaki	32	PBB
9	Kesehatan	21	Tutup Kepala	33	Pungutan Lain
10	Pemeliharaan Kesehatan	22	Sabun Cuci	34	Perayaan Hari Agama
11	Pendidikan	23	Bahan Pemeliharaan Pakaian	35	Upacara Agama



12	Perlengkapan Mandi	24	Pakaian Jadi Anak-anak	36	Pajak Kendaraan bermotor
----	--------------------	----	------------------------	----	--------------------------

Sumber: Pengenalan Indikator Kemiskinan dan Ketimpangan BPS 2023.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Berikut data kemiskinan Kota Cirebon:

Tabel II-28 Penduduk Miskin Kota Cirebon

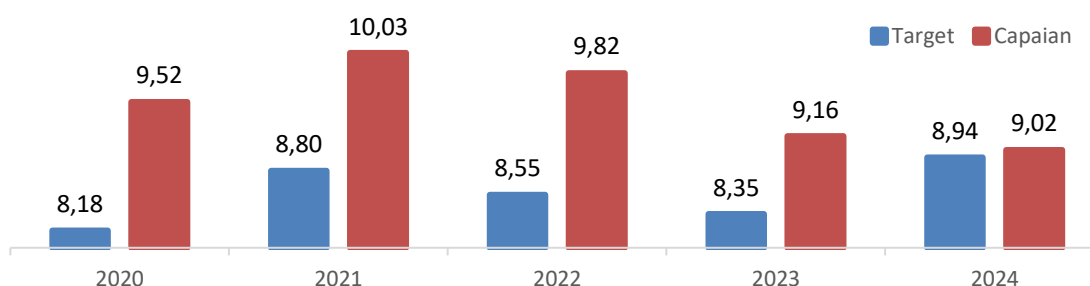
No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan)	30,61	30,98	31,47	29,49	29,17
2.	Persentase Penduduk Miskin (%)	9,52	10,03	9,82	9,16	9,02
3.	Garis Kemiskinan (Rp/Orang/Bulan)	457.95 4	467.24 8	485.61 3	520.57 9	545.59 2
4.	Garis Kemiskinan Jawa Barat (Rp/Orang/Bulan)	410.98 8	427.40 2	452.58 0	495.22 9	524.05 2
5.	Garis Kemiskinan Nasional (Rp/Orang/Bulan)	458.94 7	486.16 8	535.54 7	550.45 8	595.24 2

Sumber: BPS, 2025.

Garis kemiskinan Kota Cirebon Tahun 2024 sebesar 545.592 rupiah per kapita per bulan. Angka kemiskinan tersebut relatif naik jika dibandingkan dengan kemiskinan pada tahun sebelumnya yaitu 520,579 rupiah di tahun 2023.

Persentase target penduduk miskin di Kota Cirebon selama lima tahun terakhir belum tercapai, walaupun berhasil turun kecuali pada tahun 2021. Sebagaimana terjadi secara umum di daerah di Indonesia, pandemi Covid-19 telah meningkatkan jumlah dan persentase penduduk miskin.

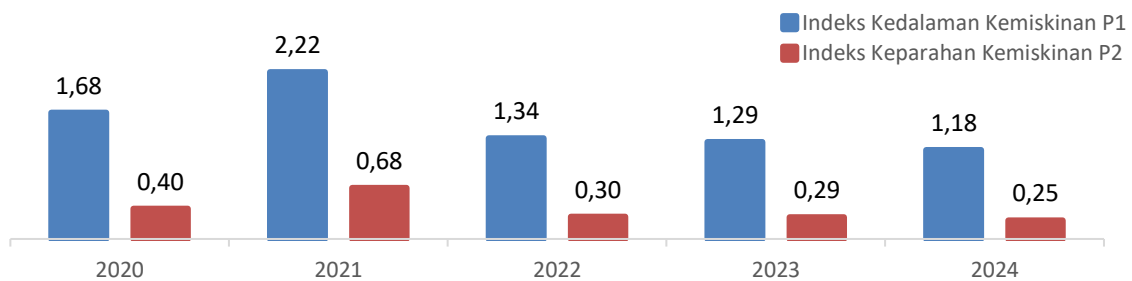
Gambar II-17 Penduduk Miskin Kota Cirebon



Sumber: BPS, 2025

Untuk mengukur kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan digunakan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1). Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Selain Indeks Kedalaman Kemiskinan, digunakan juga Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin itu sendiri.

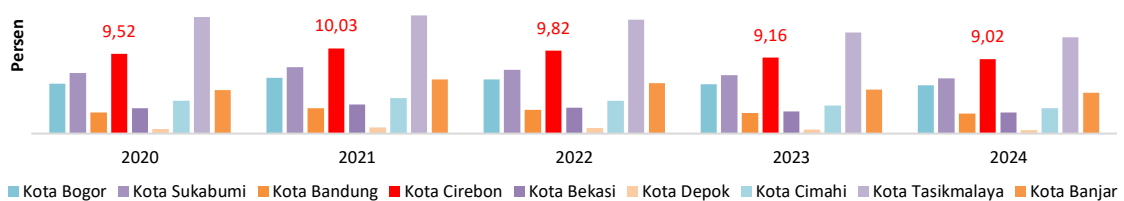
Gambar II-18 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) Kota Cirebon



Sumber: BPS 2025

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P₁) Kota Cirebon cenderung menurun dan sempat naik di tahun 2021, begitu pula dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (P₂). Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan, demikian pula dengan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin di Kota Cirebon semakin besar. Pandemi Covid-19 turut memperlebar kesenjangan dan ketimpangan orang miskin.

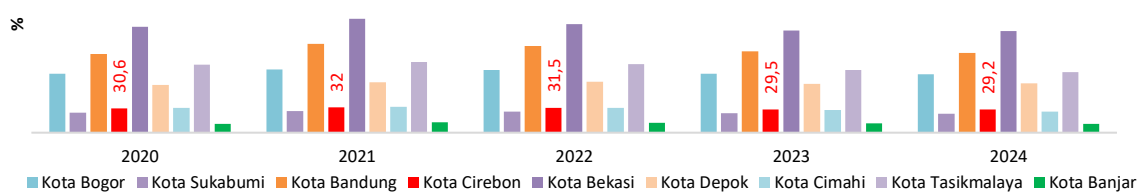
Gambar II-19 Persentase Penduduk Miskin Kota di Jawa Barat



Sumber: BPS 2025

Jumlah penduduk miskin di Kota Cirebon juga cukup kecil dibandingkan kota lain di wilayah Jawa Barat. Tentu saja jumlah penduduk yang berbeda di masing-masing Kabupaten Kota juga berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin yang ada. Kenaikan jumlah penduduk miskin tidak hanya terjadi di Kota Cirebon, melainkan di seluruh daerah di Wilayah Ciayumajakuning, sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut:

Gambar II-20 Jumlah Penduduk Miskin Kota di Jawa Barat



Sumber: BPS 2025

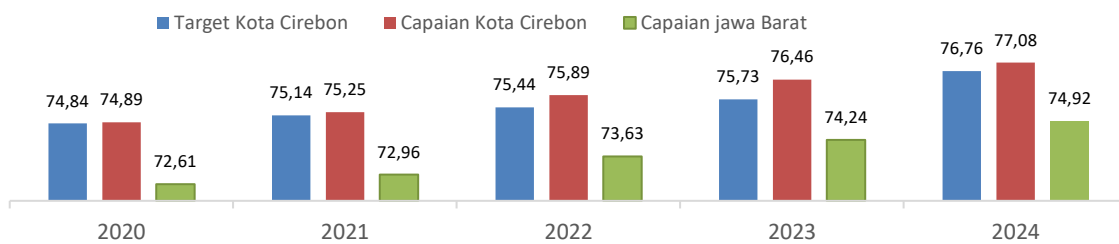
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Beberapa indikator yang bisa digunakan dalam mengukur kesejahteraan sosial antara lain meliputi Indeks Pembangunan Manusia, Angka Melek Aksara, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni, dan Indeks Kesehatan.

A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk. IPM adalah indeks yang mengukur pembangunan manusia dari usia, kesehatan, pengetahuan dan hidup layak.

Gambar II-21 Indeks Pembangunan Manusia



Sumber: Dok. Perencanaan Kota Cirebon, BPS 2025

IPM di Kota Cirebon dalam lima tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan. Perkembangan nilai IPM Kota Cirebon untuk periode tahun 2020-2024 berikut komponennya :

Tabel II-29 Komponen IPM Kota Cirebon

No.	Komponen IPM	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Manusia	74,89	75,25	75,89	77,45	77,08
2	Umur Harapan Hidup (Tahun)	72,76	72,44	72,74	73,08	73,34
3	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,12	13,13	13,14	13,16	13,17
4	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,91	10,12	10,33	10,37	10,53
5	Pengeluaran per kapita (Ribuan Rupiah/Orang)	11,800	11,810	12,087	12,506	12,869

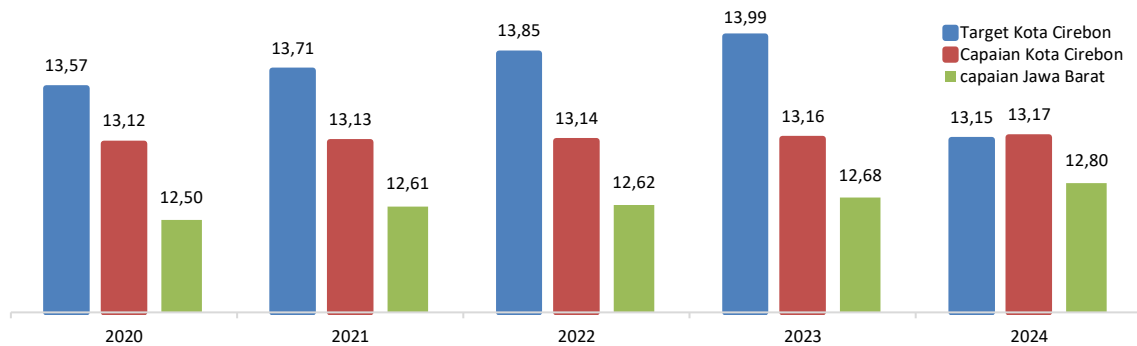
Sumber: BPS 2025.

B. Harapan Lama Sekolah (HLS)

HLS Kota Cirebon terus mengalami peningkatan, pada tahun 2020 sebesar 13,12 kemudian meningkat menjadi 13,17 pada tahun 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa harapan seorang anak di Kota Cirebon untuk bersekolah semakin baik.

Secara umum masyarakat Kota Cirebon sadar akan pentingnya pendidikan, hal ini terlihat dari semakin meningkatnya angka HLS dari tahun ke tahun, bahkan HLS Kota Cirebon berada di atas Jawa Barat. Hal ini berarti bahwa secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang Pendidikan formal pada tahun 2024 di Kota Cirebon memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,17 tahun atau setara dengan Diploma II.

Gambar II-22 Harapan Lama Sekolah Kota Cirebon (tahun)



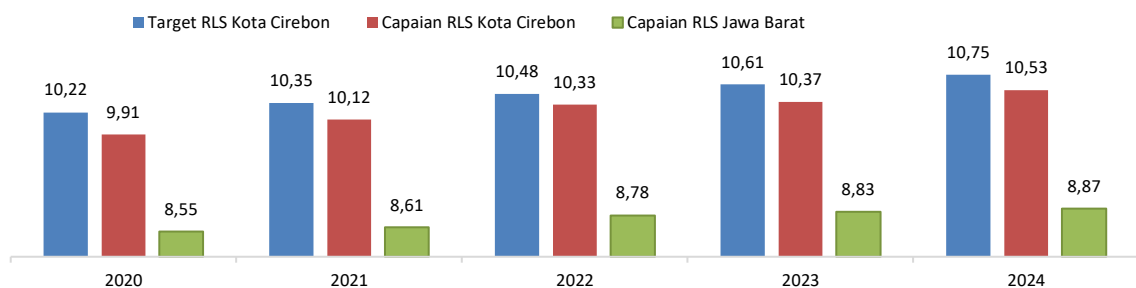
Sumber: Dok. Perencanaan Kota Cirebon, BPS 2025

Meskipun capaian HLS Kota Cirebon selalu naik setiap tahun, akan tetapi capaian HLS Kota Cirebon sepanjang Tahun 2020-2023 belum mencapai target, sehingga perlu penyesuaian pada dokumen RPD Kota Cirebon 2024-2026.

C. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Semakin baik kualitas pendidikan akan semakin menentukan arah perbaikan kualitas sumber daya manusianya. Pada penghitungan IPM metode baru, dimensi pendidikan diukur dengan komponen RLS dan HLS.

Gambar II-23 Rata-rata Lama Sekolah Kota Cirebon (tahun)



Sumber: Dok. Perencanaan Kota Cirebon, BPS 2025

RLS dalam menjalani pendidikan formal di Kota Cirebon pada tahun 2020 rata-rata seseorang menempuh pendidikan sekitar 9,91 tahun atau memasuki jenjang pendidikan SMA kelas 10. RLS Kota Cirebon sudah berada di atas Jawa Barat, sehingga rata-rata tingkat pendidikan masyarakat Kota Cirebon sudah cukup baik.

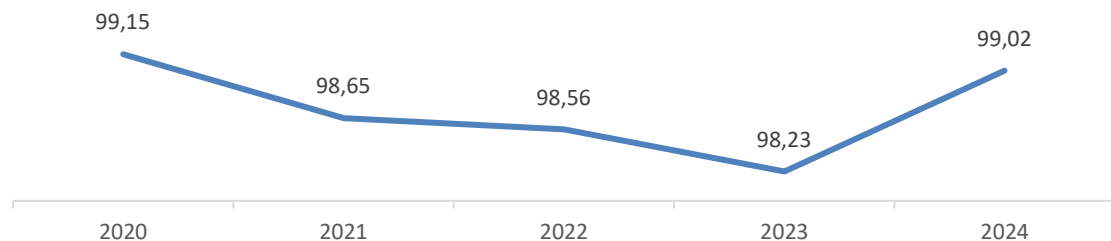
D. Angka Melek HURUF (AMH)

Pendidikan merupakan salah satu unsur dalam ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku umumnya diperoleh di lingkungan sekolah atau pendidikan formal. AMH merupakan salah satu indikator untuk melihat perkembangan pendidikan penduduk. Penduduk yang bisa baca tulis diasumsikan memiliki kemampuan dan keterampilan karena dapat menyerap informasi baik itu lisan maupun tulisan.

AMH di Kota Cirebon menunjukkan penurunan hingga tahun 2023. Walaupun masih ada penduduk yang belum memiliki kecakapan baca tulis, hal ini mungkin terjadi karena masih adanya angka putus sekolah yang

mengindikasikan capaian dibidang pendidikan belum maksimal. Untuk itu perlu kebijakan terhadap capaian standar pelayanan minimal pendidikan melalui pendidikan non-formal untuk mengeliminasi buta huruf di Kota Cirebon.

Gambar II-24 Angka Melek Huruf Kota Cirebon (%)



Sumber: BPS 2025

E. Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK digunakan untuk mengidentifikasi partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan menurut jenjang pendidikan tanpa melihat umur, sehingga nilai APK dapat lebih dari 100% apabila jumlah murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak di luar batas kelompok usia pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

APK PAUD untuk kelompok usia 3-6 tahun, APK SD/MI untuk kelompok usia 7-12 tahun dan APK SMP/MTs untuk kelompok usia 13-15 tahun. APK untuk SMA/MA/SMK untuk kelompok usia 16-18 tahun. APK SD/MI menunjukkan kecenderungan yang menurun, hal sebaliknya terjadi pada Angka Partisipasi Kasar PAUD. Sementara APK SMP/MTs dan SMA/SMK/MA terjadi fluktuasi. Realisasi APK yang mencapai di atas 100%, artinya keterjangkauan pendidikan dasar di Kota Cirebon sudah melebihi target penduduk Kota Cirebon berdasarkan jenjang kelompok usia sekolah. Sementara APK yang berada di bawah 100% untuk penduduk Kota Cirebon belum mencapai target penduduk Kota Cirebon berdasarkan jenjang kelompok usia sekolah.

Tabel II-30 Angka Partisipasi Kasar Kota Cirebon

No.	Angka Partisipasi Kasar	2020	2021	2022	2023	2024
1.	PAUD	33,4	32,2	40,3	73,1	43,10
2.	SD/MI	104,2	99,6	98,7	99,8	99,78
3.	SMP/MTs	98,6	97,5	100,7	104,0	103,95
4.	SMA/MA	109,0	113,0	104,9	105,0	104,96

Sumber: apkapm.data.kemdikbud.go.id 2024

F. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM berfungsi untuk menunjukkan penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai usianya. Selain itu APM juga digunakan untuk melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100,00%.

APM SD/MI menunjukkan jumlah penduduk kelompok usia 7-12 yang memperoleh pendidikan di SD/MI, APM SMP/MTs menunjukkan jumlah



penduduk kelompok usia 13-15 yang memperoleh pendidikan di SMP/MTs dan APM SMA/MA/SMK menunjukkan jumlah penduduk dengan usia 16-18 yang memperoleh pendidikan di SMA/MA/SMK.

Tabel II-31 APM di Kota Cirebon

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	PAUD	-	-	-	-	-
2.	SD/MI	94,2	91,1	89,7	90,8	90,77
3.	SMP/MTs	72,3	72,6	74,5	76,5	76,48
4.	SMA/SMK/M A	79,2	80,2	74,1	74,8	74,77

Sumber: *apkpm.data.kemdikbud.go.id 2024*

Realisasi capaian APM yang belum mencapai target 100 % menunjukkan masih terdapat anak sekolah yang belum bersekolah atau menyelesaikan sekolah di jenjang sesuai dengan kategori usianya. Oleh karena itu tetap diperlukan upaya mendorong anak-anak tersebut untuk dapat bersekolah, baik sekolah formal maupun non formal.

G. Jumlah Kematian Bayi

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah kematian bayi di Kota Cirebon cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 jumlah kematian bayi sebanyak 14 bayi dan turun kembali pada tahun berikutnya menjadi 12 bayi. Namun pada tahun 2021 jumlah kematian bayi kembali meningkat menjadi 21 bayi dan pada tahun berikutnya menjadi 38 bayi. Hal ini banyak disebabkan karena adanya penyakit dan berat badan bayi yang dilahirkan rendah.

Tabel II-32 Kematian dan Lahir Hidup Bayi di Kota Cirebon

No.	Tahun	Jumlah Kematian Bayi	Jumlah Lahir Hidup
1.	2020	12	5.163
2.	2021	21	5.070
3.	2022	38	4.731
4.	2023	n.a	n.a
5.	2024	n.a	n.a

Sumber: *BPS, 2025*

Perlunya intervensi program dan kegiatan pembangunan bidang kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Salah satu program unggulan dalam upaya menurunkan jumlah kematian bayi di Kota Cirebon adalah Rumah Sakit Berbasis Masyarakat (RSBM) sebagai upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas serta mendekatkan pelayanan kesehatan, khususnya untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak. Untuk menurunkan jumlah kematian bayi di Kota Cirebon tidak terlepas dari adanya kebijakan pemerintah Kota Cirebon untuk menempatkan dokter spesialis anak, dokter spesialis kandungan dan dokter spesialis penyakit jantung di Puskesmas sebagai bagian dari Program RSBM agar penyebab kematian bayi dapat dicegah lebih dini.



H. Prevalensi Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)

Berat badan bayi yang rendah saat ditimbang satu jam pertama setelah lahir kurang dari 2500 gram, salah satunya disebabkan karena bayi lahir sebelum usia kehamilan mencapai 37 minggu (prematuur). BBLR tidak hanya terjadi pada bayi prematur, tapi juga pada bayi cukup bulan yang mengalami hambatan pertumbuhan selama kehamilan. Untuk itu perlu upaya peningkatan pemahaman ibu hamil dalam menjaga kesehatan dan kebutuhan nutrisi bayi dalam kandungan. Hal ini sangat penting karena BBLR merupakan penyebab yang dominan pada kematian kelahiran bayi.

BBLR Kota Cirebon pada tahun 2021 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020 dan kembali naik pada tahun 2022.

Tabel II-33 Jumlah Bayi Lahir Hidup, Jumlah BBLR dan Persentase Kota Cirebon

Kecamatan	2020			2021			2022			2023			2024		
	LH	BBLR	%	LH	BBLR	%	LH	BBLR	%	LH	BBLR	%	LH	BBLR	%
Kejaksan	665	18	2,7	448	15	3,3	634	23	3,6	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
Kesambi	421	101	23,9	794	33	4,2	995	51	5,1	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
Pekalipan	438	53	12,1	293	23	7,8	337	30	8,9	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
Lemahwunguk	918	50	5,4	706	51	7,2	850	72	8,5	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
Harjamukti	1999	29	1,4	1472	66	4,5	1.891	87	4,6	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
Kota Cirebon	4441	251	5,6	3713	188	5,1	4.707	263	5,6	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

Sumber: Open Data Kota Cirebon 2025

I. Jumlah Kasus Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu target yang telah ditentukan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) untuk menurunkan angka kematian ibu secara global sampai di bawah 70/10.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. Kematian pada saat melahirkan menjadi faktor utama kematian ibu pada puncak produktivitasnya.

Kehamilan adalah proses reproduksi yang normal, tetapi perlu perawatan dini yang khusus agar ibu dan janin dalam keadaan sehat, oleh sebab itu kehamilan yang normal tetap mempunyai risiko. Upaya untuk menurunkan angka kematian ibu, perlu dilakukan dengan deteksi dini risiko ibu hamil di tempat pelayanan kesehatan ibu dan anak atau pada masyarakat. Kasus kematian ibu di Kota Cirebon menunjukkan angka fluktuasi naik turun sebagaimana terlihat pada gambar berikut:

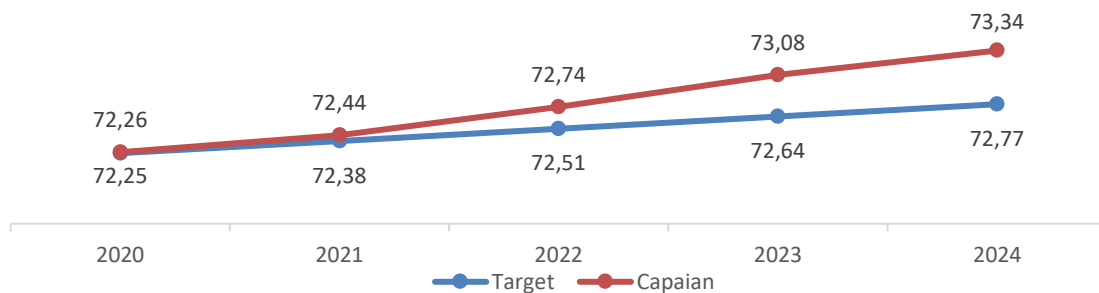
Jumlah kasus kematian ibu pada tahun 2020 sebanyak 2 orang dan meningkat setahun kemudian menjadi 12 orang yang kemudian turun pada tahun berikutnya menjadi 5 orang. Naik turunnya jumlah kasus kematian ibu di Kota Cirebon perlu mendapat perhatian yang serius dalam upaya untuk menekan dan menurunkan kasus kematian ibu. Peran strategis Puskesmas sebagai ujung tombak dalam pelayanan kesehatan perlu lebih ditingkatkan,

begitu pula stakeholders pembangunan kesehatan seperti Posyandu, Kampung Siaga/Kelurahan Siaga Aktif, dan RSBM perlu lebih ditingkatkan peranannya.

J. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) penduduk Kota Cirebon dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami peningkatan, yang artinya derajat kesehatan masyarakat Kota Cirebon dari tahun ke tahun mengalami peningkatan lebih baik. Pada tahun 2020, UHH Kota Cirebon sebesar 72,26 tahun dan meningkat pada tahun 2024 menjadi 73,34 tahun atau terjadi peningkatan 0,45 tahun.

Gambar II-25 Capaian dan Target UHH Kota Cirebon



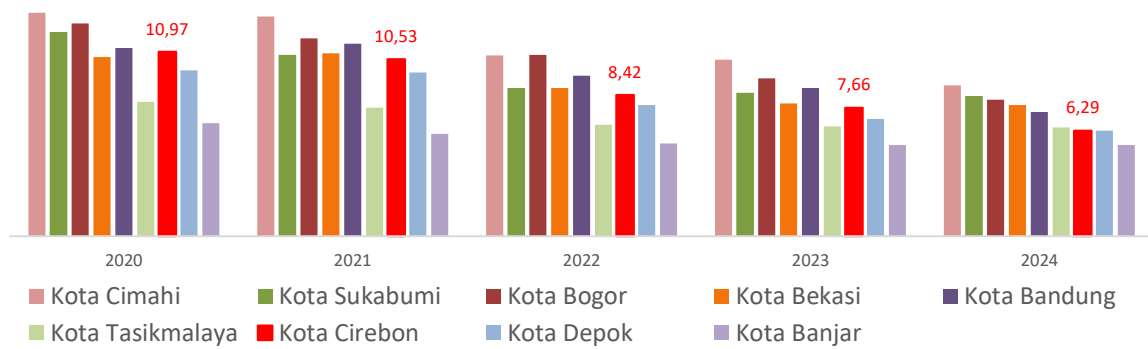
Sumber: BPS Kota Cirebon 2025

Capaian UHH Kota Cirebon selama kurun waktu lima tahun terakhir melebihi target sebagaimana ditunjukkan dalam grafik. Meskipun kondisi Pandemi Covid-19, ternyata UHH Kota Cirebon tetap naik dan bahkan melebihi target karena kualitas hidupnya meningkat. Namun berdasarkan data capaian SPM Dinas Kesehatan, permasalahan terkait dengan capaian pelayanan kesehatan belum 100%, untuk itu diperlukan penanganan dan kebijakan Dinas Kesehatan.

K. Rasio Penduduk Yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15-64 tahun yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja.

Jumlah penduduk yang bekerja setiap tahunnya terjadi fluktuatif. Menurut data Badan Pusat Statistik, tahun 2024 TPT Kota Cirebon sebesar 6,74%, sehingga dapat disimpulkan bahwa 92,26% dari angkatan kerja yang ada memperoleh pekerjaan (sedang bekerja) sedangkan sisanya masih mencari kerja atau bekerja tidak tetap. Jika dibandingkan dengan kota lainnya di Jawa Barat, Kota Cirebon termasuk kota yang berhasil menekan TPT.



2.1.2.3 Fokus Seni Budaya Dan Olahraga

Fokus seni, budaya dan olahraga di Kota Cirebon dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu urusan kebudayaan, serta urusan pemuda dan olahraga.

A. Seni Budaya

Semakin tinggi tingkat budaya suatu daerah maka semakin besar pula kesejahteraan masyarakatnya. Upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal sangat penting dalam upaya melestarikan budaya lokal. Adanya Gedung Kesenian Rarasantang di Kota Cirebon yang digunakan untuk mengembangkan kreatifitas seni dan budaya untuk melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya lokal yang ada dengan mengikuti kemajuan jaman. Walaupun jumlah sanggar seni yang menurun dari 148 sanggar seni sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 menjadi 145 sanggar seni. Pelestarian obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya oleh Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, menekankan pada empat langkah strategis yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon, adalah sebagai berikut:

Tabel II-34 Upaya Pemajuan Kebudayaan Kota Cirebon

NO	Pemajuan kebudayaan	Jumlah	Yang Dilindungi %			Yang Dikembangkan %			Yang Dimanfaatkan %			Yang Dibina %		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Tradisi Lisan	35	71	27	77	54	57	60	54	54	54	0	0	0
2	Manuskrip	12	50	6	50	8	8	8	17	17	17	0	0	0
3	Adat Istiadat	28	61	17	61	61	61	61	61	61	61	11	11	11
4	Ritus	34	85	31	91	74	76	79	74	74	74	6	6	6
5	Pengetahuan Tradisional	52	75	45	87	67	75	77	46	46	46	0	0	0
6	Teknologi Tradisional	9	100	9	100	33	33	33	33	33	33	0	0	0
7	Seni	28	86	24	86	79	79	79	79	79	79	25	25	25
8	Bahasa	10	100	12	120	100	100	100	100	100	100	30	30	30
9	Permainan Rakyat	21	48	10	48	24	24	24	0	0	0	0	0	0
10	Olahraga Tradisional	9	89	8	89	56	56	56	56	56	56	11	11	11
TOTAL		238	74,37	189	79,41	59,66	62,34	63,60	53,36	53,36	53,36	6,72	6,72	6,72

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2024

Pemerintah Kota Cirebon juga berupaya untuk memelihara dan tetap melestarikan budaya lokal, untuk itu upaya merealisasi kawasan wisata dengan daya tarik budaya pada beberapa kawasan menjadi hal penting dalam pembangunan kebudayaan di Kota Cirebon, antara lain: Kampung Arab,



Kampung Cina, Kampung Benda Kerep dan juga kawasan keraton sebagai cagar budaya dimana terdapat benda-benda bersejarah.

Berbagai warisan sejarah dan budaya ini menjadikan Kota Cirebon sebagai salah satu destinasi pariwisata, khususnya destinasi wisata religi dan budaya. Hal ini menjadi salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan melalui pengelolaan dan promosi warisan budaya Kota Cirebon untuk menarik wisatawan agar dapat mengunjungi Kota Cirebon.

Adapun data cagar budaya yang tercatat di Kota Cirebon sampai tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel II-35 Daftar Cagar Budaya di Kota Cirebon

No	NAMA	Lokasi
1.	Petilasan Sunan Kalijaga	Jl. Pramuka, Kelurahan Kalijaga
2.	Gedung SMP Negeri 1 Cirebon	Jl. Siliwangi, Kelurahan Kebonbaru
3.	Stasiun Kereta Api Kejaksan	Jl. Siliwangi, Kelurahan Kebonbaru
4.	SDN Kebonbaru I, II, III, VI	Jl. Veteran, Kelurahan Kebonbaru
5.	Balai Kota Cirebon	Jl. Siliwangi, Kelurahan Kebonbaru
6.	Kompleks Gedung Pamitran	Jl. KS. Tubun, Kelurahan Kejaksan
7.	Pendopo Kabupaten Cirebon	Jl. RA. Kartini, Kelurahan Kejaksan
8.	Gedung Negara / Keresidenan	Jl. Siliwangi, Kelurahan Kesenden
9.	Petilasan Sunan Drajat	Jl. Pangeran Drajat, Kelurahan Drajat
10.	Lapas. Klas I Kesambi	Jl. Raya Kesambi, Kelurahan Kesambi
11.	RSUD. Gunung Jati	Jl. Raya Kesambi, Kelurahan Kesambi
12.	Taman Kepurbakalaan Gua Sunyaragi	Jl Brigjend Dharsono, Kelurahan Sunyaragi
13.	Keraton Kasepuhan	Jl Kasepuhan, Kelurahan Kasepuhan
14.	Keraton Kanoman	Jl Kanoman, Kelurahan Lemahwungkuk
15.	Masjid Agung Sang Cipta Rasa	Jl. Kasepuhan, Kelurahan Lemahwungkuk
16.	Gedung Bunder	Jl. Kebumen, Kelurahan Lemahwungkuk
17.	Gedung Cipta Niaga	Jl. Kebumen, Kelurahan Lemahwungkuk
18.	Gedung SMP Negeri 14	Jl. Kebumen, Kelurahan Lemahwungkuk
19.	Gedung SMP Negeri 16	Jl. Kebumen, Kelurahan Lemahwungkuk
20.	Gereja Pasundan	Jl. Kebumen, Kelurahan Lemahwungkuk
21.	Gedung PT. British American Tobaccos	Jl. Pasuketan, Kelurahan Lemahwungkuk
22.	Klenteng Talang	Jl. Talang, Kelurahan Lemahwungkuk
23.	Gedung Bank Indonesia	Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Lemahwungkuk
24.	Gereja Santo Yusuf Cirebon	Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Lemahwungkuk
25.	Kantor PT. POS Indonesia	Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Lemahwungkuk
26.	Gedung Bank Mandiri	Jl. Kantor, Kelurahan Panjunan
27.	Klenteng Dewi Welas Asih	Jl. Kantor, Kelurahan Panjunan
28.	Masjid Merah Panjunan	Jl. Pengobongan, Kelurahan Panjunan
29.	Makam Pangeran Sipat Lurung	Jl. Buyut, Kelurahan Pegambiran
30.	Situs Kejawanan	Jl. Kalijaga, Kelurahan Pegambiran
31.	Pedati Gede Pekalangan	Gang Pedati Gede, Kelurahan Pekalangan
32.	Makam Syekh Maghribi	Jl. Astana Garib, Kelurahan Pekalangan
33.	Menara Air Parujakan	Jl. Parujakan, Kelurahan Pekalangan
34.	Klenteng Winaon (Pemancar Keselamatan)	Jl. Winaon, Kelurahan Pekalangan



No	NAMA	Lokasi
35.	Stasiun Kereta Api Parujakan	Jl.Nyi Mas Gandasari, Kelurahan Pekalangan
36.	Keraton Kacirebonan	Jl Pulasaren, Kelurahan Pulasaren

Sumber: *Profil Budaya dan Bahasa Kota Cirebon 2025*

Adapun data objek pemajuan kebudayaan yang tercatat di Kota Cirebon tahun 2024 adalah sebagai berikut:

A.1 Tradisi Lisan



1. Cerita Saida Saeni
2. Cerita Pasukan Sarwajala
3. Cerita Nyi Mas Gandasari
4. Legenda Argasunya
5. Cerita Adipati Tandha Moe
6. Cerita Ki Kaji Sela
7. Cerita Nyi Mas Ratu Pakungwati
8. Cerita Pangeran Sumajaya
9. Cerita Pemberontakan Ki Bagus Rangin
10. Cerita Raden Gilap
11. Cerita Raden Johar
12. Cerita Syarif Durakhman
13. Cerita Syekh Birawa dan Nyi Mas Ratu Kalitanjung
14. Cerita Syekh Lemahabang
15. Cerita Tentang Tenggelamnya Kapal Gajahmada
16. Legenda Panjunan
17. Legenda Cirebon
18. Asal-Usul Nama Cirebon
19. Legenda Kampung Kalijaga
20. Legenda Kampung Kanggraksan
21. Legenda Kampung Kejawanan
22. Legenda Kampung Kesunean
23. Legenda Kampung Pesantren
24. Legenda Kanoman
25. Legenda Pekalipan
26. Legenda Lawanggada
27. Legenda Syekh Magelung
28. Legenda Sunan Kalijaga di Cirebon
29. Legenda Jalan Karanggetas
30. Maca Babad Cirebon
31. Legenda Pasuketan
32. Macapat
33. Memaca
34. Legenda Kejaksan
35. Legenda Jagasatru
36. Balong Kambang (Cirebon)
37. Legenda Pekalangan
38. Legenda Kampung Larangan.

A.2 Manuskrip

1. Sejarah Cirebon
2. Serat Murtasiyah
3. Babad Galuh
4. Babad Cirebon Naskah Tangkil
5. Carita Purwaka Caruban Nagari
6. Pustaka Keraton Cirebon
7. Pustaka Negara Kerta Bumi
8. Sejarah Carub Kanda Naskah Pulosaren



9. Suluk Bujang Genjong
10. Tetamba
11. Mertasinga
12. Wangsakerta.

A.3 Adat istiadat

1. Kliwonan
2. Membuat Apem Safar
3. Grebeg Agung
4. Sedekah Lenga Tajug Jagabaya
5. Membuat Bubur Suro
6. Grebeg Syawal
7. Tawurji
8. Drugdag
9. Bekaseman Ikan
10. Sega Jimat
11. Maleman
12. Memaro
13. Memasang Cungkup Kembang Terate Pada Bangunan
14. Memberikan uang pada mereka yang kurang mampu pada saat menjelang hari Raya Idul Fitri
15. Membuat tumpeng pada acara syukuran
16. Menaruh Tanaman Selasih ke tengah jalan
17. Mengambil Hari Baik
18. Muharaman
19. Membuat Bubur Lolos
20. Pengajian
21. Pesantren Kilat
22. Muludan
23. Mengambil air siat
24. Membawa tanaman selasih pada ziarah kubur
25. Bagi hasil 1 banding 7 antara pemanen murni dengan pemilik padi sawah
26. Membakar kemenyan
27. Tidak menggunakan barang elektronik khususnya audiovisual
28. Membuat Bubur Abang Bubur Putih
29. Haol
30. Arak-arakan
31. Bagi hasil antara peng-garap dengan pemilik lahan dengan perbandingan 1 berbanding 1
32. Halal Bi Halal
33. Lek-lekan
34. Memecahkan kendi berisi air siat dan bunga.

A.4 Ritus

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Nadran / Sedekah Laut | 6. Memayu |
| 2. Panjang Jimat Cirebon | 7. Ngupati |
| 3. Ngunjung/Sedekah Bumi | 8. Nujuh Bulan |
| 4. Adzan Pitu | 9. Medekingi |
| 5. Jamasan | 10. Kirab Sawan |



11. Kalung Usus
12. Mbriman
13. Nyukur
14. Mudun Lemah
15. Sunatan
16. Punar
17. Khataman
18. Nyiram Gamelan Sekaten
19. Ngisis Wayang
20. Layonan
21. Rajaban 27 Rajab (Malam)
22. Muludan 8 Mulud (Siang)
23. Bulan Rayagung (Dzulhidjah)
24. Bulan Syawal
25. Gegelan Tanda Keprabon
26. Ruwahan 15 Ruwah/Sa'ban (Malam)
27. Maleman
28. Bulan Puasa
29. Safaran 15 Sapar atau Wakasan (Siang)
30. Suroan 10 Syura (Pagi)
31. Mungguh Suhunan
32. Saka Guru
33. 15 Ruwah/Sa'ban
34. Upacara Perkawinan Kasultanan Cirebon
35. Barikan

A.5 Pengetahuan Tradisional

1. Krupuk Lambak
2. Terasi
3. Nasi Bogana
4. Krupuk Melarat
5. Intip
6. Gandamesri
7. Tahu Tektek
8. Empal Gentong
9. Petis
10. Bubur Sop Ayam
11. Docang
12. Empal Asem
13. Encrod
14. Krupuk Upil
15. Mie Koclok
16. Nasi Jamblang
17. Nasi Lengko
18. Sate Kalong
19. Tahu Gejrot
20. Tahu Petis
21. Kue Tapel
22. Rara Gudig
23. Ongol-ongol
24. Kelepon
25. Koci
26. Bugis
27. Dongkal/Growol
28. Ketimus
29. Limpung
30. Bubur Candil
31. Misro
32. Gepu
33. Botok Roti
34. Geblog
35. Cikak
36. Syrup Tjampolay
37. Es Tape Ketan
38. Es Cuing
39. Sarikaya
40. Sate Pentul
41. Batik Wadasan
42. Menganyam Rotan
43. Merias Penganten Keraton Kasepuhan
44. Pengobatan Batuk pada Anak dengan Terasi
45. Merias Penganten Keraton Kanoman
46. Merias Penganten Adat Pesisiran
47. Pengobatan Perut Kembung dengan Daun Sembung
48. Pengobatan Bisul dengan Wisa Banyu
49. Pengobatan Batuk Darah dengan Kelabang
50. Membuat Batik
51. Membuat Ikat Lipet
52. Membuat Tampan atau Cantik ala Cirebon
53. Merias Penganten Keraton Kacirebonan
54. Pengobatan Kemandan de-



ngan Tanaman Kemanden

Sujen

A.6 Teknologi Tradisional

1. Kereta Paksi Naga Liman
2. Kereta Singa Barong
3. Ikat antar kayu penyangga pada Masjid Pesambangan (Masjid Baitul Karim)
4. Membuat sayap bergerak-gerak pada kereta keraton-keraton Cirebon
5. Membuat tembok atau bangunan dari cangkang kerang pada bangunan Gua Sunyaragi
6. Menggoreng dengan pasir
7. Menyimpan nasi dengan daun jati
8. Penerapan pegas (*shock breaker*) pada kereta kerajaan
9. Perekat untuk bangunan dari putih telur
10. Roda kendaraan pada bagian bawah lebih masuk ke dalam dari pada bagian atasnya
11. Saka Tatal Masjid Agung Sang Cipta Rasa

A.7 Seni

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Angklung Bungko | 17. Lukis Kaca |
| 2. Wayang Purwa | 18. Gamelan Denggung |
| 3. Gamelan Sekaten | 19. Berokan |
| 4. Masres/Sandiwara | 20. Gembyung |
| 5. Rudat Cirebon | 21. Genjring Akrobat |
| 6. Sampyong | 22. Kliningan |
| 7. Seni Buroq | 23. Macapat |
| 8. Sintren | 24. Musik Cotek Cirebon |
| 9. Tari Bedaya Rimbe | 25. Musik Renteng |
| 10. Tari Tayub | 26. Ronggeng Bugis |
| 11. Tari Topeng | 27. Tari Bedaya Kajongan |
| 12. Tarling | 28. Ukir Topeng Cirebon |
| 13. Wayang Golek Cepak | 29. Wayang Babad |
| 14. Wayang Wong Cirebon | 30. Debus |
| 15. Tari Topeng Beling | 31. Brai/Brahi |
| 16. Tari Sekar Kaputren | |

A.8 Bahasa

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1. Arab | 5. China |
| 2. Bahasa Jawa Cirebon | 6. Madura |
| 3. Bahasa Indonesia | 7. Minang |
| 4. Bahasa Sunda | |

A.9 Olahraga Tradisional

- | | |
|---|------------------|
| 1. Galah Asin/ Slodoran/
Gobak Sodor | 5. Kasti |
| 2. Enggrang | 6. Bakiak |
| 3. Benteng | 7. Balap Karung |
| 4. Boy Boyan | 8. Tarik Tambang |
| | 9. Pencak Silat |

A.10 Permainan Rakyat

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1. Congklak/Dakon | 2. Cublek-Cublek Suweng |
|-------------------|-------------------------|



3. Eksoan
4. Gasing
5. Gatrik/Tokle
6. Jangkungan/EngrangAp
oloan
7. Sumpringan/Tulup-
Tulupan
8. Engklek
9. Bi, Adol Apa
10. Gacon
11. Rekumpet/Petak Umpet
12. Jonjang
13. Tuk-tukan
14. Kentrungan
15. Peporong-peporong
16. Sebut Nama-namaan
17. Slek-slek Dur
18. Permainan Sampyong
19. Daduan
20. Bola Bekel/Bal Neng
21. Bon Bonan
22. Cip Cip turi
23. Gotri-gotrian/Om-oman
/Hong-hongan
24. Jaba Jeroan



B. Jumlah Gedung Olahraga Dan Klub Olahraga

Klub olahraga merupakan sebuah sarana yang mewadahi orang-orang yang memiliki minat yang sama terhadap suatu kegiatan seperti olahraga, khususnya olahraga yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan baik dari segi jasmani dan rohani serta hiburan untuk mendapatkan kegembiraan dan kesenangan dengan tempat yang mewadahi berbagai macam aktivitas olahraga.

Olahraga baik prestasi maupun rekreasi cukup berkembang di Kota Cirebon. Masyarakat Kota Cirebon cenderung menjadikan olahraga sebagai sebuah rekreasi untuk menghilangkan kejenuhan dan menjaga kesehatan, karena jenis olahraga ini mudah dan spontan dapat dilakukan oleh semua kelompok umur. Untuk mengetahui fasilitas olahraga dan klub olahraga yang berkembang di masyarakat digambarkan dalam tabel berikut:

Berdasarkan data Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, jumlah gedung olahraga menurun dari 14 gedung olahraga pada tahun 2015 menjadi 2 unit gedung olahraga pada tahun 2019. Sedangkan jumlah klub olahraga semakin berkembang dan meningkat dari tahun 2015 sebanyak 4 klub menjadi 151 klub olahraga pada tahun 2019 yang terbagi ke dalam 35 cabang olahraga.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 *Layanan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar*

Layanan urusan wajib pelayanan dasar merupakan jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai standar yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

A. Pendidikan

Sektor pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan tingkat kualitas sumber daya manusia yang diharapkan yaitu yang mampu melakukan inovasi, kreativitas serta memiliki karakter dan budi pekerti yang luhur.

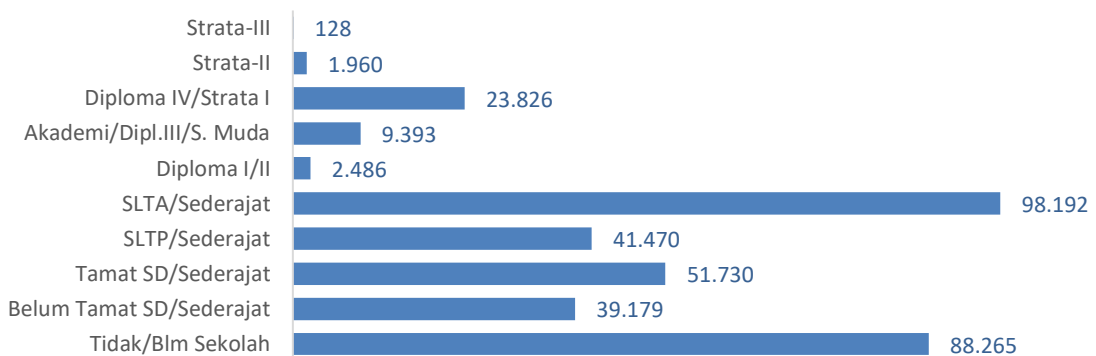
Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) salah satu diantaranya diupayakan melalui pembangunan di bidang pendidikan, terutama melalui pendidikan formal. Sementara itu, untuk memajukan dunia pendidikan upaya yang dilakukan diantaranya meningkatkan prasarana dan sarana agar dapat memperluas jangkauan pelayanan dan kesempatan kepada masyarakat dalam memperoleh pendidikan. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan di Kota Cirebon merupakan salah satu wujud nyata pembangunan dalam bidang pendidikan.

Salah satu upaya paling strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui pendidikan. Pendidikan sangat penting karena merupakan dasar untuk pengembangan pola berpikir konstruktif dan kreatif. Dengan pendidikan yang cukup memadai, maka seseorang akan bisa berkembang secara optimal baik secara ekonomi maupun sosial. Rumusan tentang pendidikan, lebih jauh termuat dalam Undang-Undang Nomor 20



Tahun 2003, bahwa pendidikan Indonesia bertujuan agar masyarakat Indonesia mempunyai pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Artinya, arah dari proses pendidikan nasional mencakup berbagai aspek kehidupan diri manusia dan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa aspek yang berkaitan dengan pendidikan dapat memberikan gambaran tentang kualitas sumber daya manusia yang ada antara lain tingkat partisipasi sekolah, HLS, RLS, ketersediaan sarana dan prasarana serta tingkat pendidikan.

Tabel II-36 Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024



Sumber: Disdukcapil Kota Cirebon 2025

Kualitas pendidikan yang memadai diperlukan oleh penduduk untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Tingginya permintaan jasa pendidikan menuntut tersedianya penyelenggara pendidikan yang makin bermutu. Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia ini didasarkan kepada pemikiran bahwa pendidikan tidak sekedar menyiapkan peserta didik agar mampu masuk dalam pasaran kerja, namun lebih dari itu, pendidikan merupakan salah satu pembangunan watak bangsa (*national character building*), seperti kejujuran, keadilan, keikhlasan, kesederhanaan, dan keteladanan.

Dengan meningkatnya pendapatan penduduk dan semakin majunya ilmu pengetahuan, maka masyarakat mulai menuntut adanya peningkatan sarana dan mutu pendidikan. Pemerintah serta pihak swasta harus mampu memenuhi kebutuhan pendidikan yang berkualitas. Untuk itu beberapa upaya pemerintah telah banyak dilakukan antara lain pengadaan sarana dan peralatan belajar, penyempurnaan kurikulum, penataran guru, dan perbaikan gedung sekolah. Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, diperlukan upaya-upaya penyediaan layanan pendidikan yang lebih baik.

A.1 Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) digunakan untuk mengetahui cakupan pelayanan pendidikan untuk setiap kelompok usia sekolah dan menggambarkan jumlah anak kelompok usia tertentu yang sedang sekolah tanpa membedakan jenjang pendidikan yang ditempuh. APS merupakan ukuran daya serap lembaga APS digunakan untuk mengetahui cakupan pelayanan pendidikan untuk setiap kelompok usia sekolah dan menggambarkan jumlah anak kelompok usia tertentu yang sedang sekolah tanpa membedakan jenjang pendidikan yang ditempuh. APS merupakan



ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dan sebagai indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. APS merupakan persentase penduduk yang bersekolah menurut kelompok umur tertentu. Indikator APS digunakan sebagai ukuran daya serap sistem pendidikan Nasional terhadap penduduk usia sekolah. Indikator ini tidak memperhitungkan jenjang pendidikan, lembaga, maupun jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Kegiatan bersekolah tidak saja bersekolah di jalur formal, akan tetapi juga termasuk bersekolah di jalur non formal, seperti paket A setara SD/MI, paket B setara SMP/MTs, dan Paket C setara SMA/SMK/MA.

Tabel II-37 Angka Partisipasi Sekolah

No	Kelompok Umur	2020	2021	2022	2023	2024
1.	7-12 tahun	99,87	99,43	99,45	99,25	99,27
2.	13-15 tahun	92,94	92,13	93,68	93,05	91,3
3.	16-18 tahun	75,16	74,49	72,29	68,22	74,16
4.	19-23 tahun	20,04	20,62	19,8	22,73	20,43

Sumber: BPS 2025

A.2 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Dasar Dan Menengah

Dalam upaya pemerataan akses layanan pendidikan di Kota Cirebon, Pemerintah Daerah Kota Cirebon dari tahun ke tahun terus berupaya untuk memenuhi fasilitas pendidikan yang memadai, baik melalui penambahan ruang kelas, rehabilitasi bangunan sekolah/ruang kelas berikut sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Tabel berikut menggambarkan rasio ketersediaan gedung/bangunan sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan jumlah penduduk usia sekolah di Kota Cirebon.

Tabel II-38 Rasio Ketersediaan Sekolah Dasar dan Menengah

No	Indikator	2021	2022	2023
A. Pendidikan Dasar				
1.	Jumlah Penduduk Usia 7-12 tahun	30.521	30.336	30.336
	Jumlah bangunan SD/ MI (unit)	162	163	163
	Rasio	188,40	186,11	186,11
2.	Jumlah Penduduk Usia 13-15 tahun	13.965	2.203	13.516
	Jumlah bangunan SMP/MTs (unit)	49	50	52
	Rasio	285	44,06	259,92
B.1 Pendidikan Menengah (SMA/SMK/MA)				
1.	Jumlah penduduk usia 16-18 tahun	3.036	9.223	3.170
	Jumlah bangunan sekolah (unit)	27	28	27
	Rasio	112,44	329,39	117,41
B.2 Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK)				
1.	Jumlah penduduk usia 16-18 tahun	0	8.082	0
	Jumlah bangunan sekolah (unit)	28	28	28
	Rasio	n.a	288,64	n.a

Sumber: Portal Data Pendidikan 2025



A.3 Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Dasar Dan Menengah

Perbandingan jumlah guru dan murid yang mengajar di jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah di Kota Cirebon, dirinci pada tabel berikut.

Tabel II-39 Rasio Murid Terhadap Guru Sekolah Dasar dan Menengah

No	Indikator	2021	2022	2023
A. Pendidikan Dasar				
1.	Jumlah Guru SD/MI	1.882	1.884	1.912
	Jumlah murid SD/MI	33.580	33.320	33.092
	Rasio	17,84	17,69	17,31
2.	Jumlah Guru SMP/ MTs	1.079	1.062	0
	Jumlah murid SMP/ MTs	18.088	17.508	17.717
	Rasio	16,76	16,49	n.a
B. Pendidikan Menengah (SMA/SMK/MA)				
1.	Jumlah Guru MA/SMK/MA	1.414	1.418	0
2.	Jumlah murid MA/SMK/MA	24.478	23.360	23.565
	Rasio	17,31	16,47	n.a

Sumber: Portal Data Pendidikan 2025

A.4 Angka Putus Sekolah

Putus sekolah adalah suatu keadaan dimana seseorang yang telah masuk dalam sebuah lembaga pendidikan formal baik itu pada tingkat SD, SMP, atau SMA untuk belajar dan menerima pelajaran, namun tidak sampai tamat atau lulus kemudian berhenti atau keluar dari sekolah. Tabel berikut menunjukkan angka putus sekolah di Kota Cirebon pada jenjang pendidikan dasar dan menengah tahun 2018-2023.

Tabel II-40 Angka Putus Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah

No.	Uraian	2021	2022	2023
1.	SD	9	23	22
2.	SMP	25	19	4
3.	SMA/SMK	29	4	7

Sumber: Portal Data Pendidikan 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2021-2023 di Kota Cirebon masih terdapat siswa yang putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Perlunya komitmen dan intervensi program secara terpadu sangat diperlukan, sehingga diharapkan dapat meminimalisir munculnya masalah sosial.

Upaya yang dapat dilakukan untuk menekan angka putus sekolah melalui pendidikan non formal berupa Paket A, B dan C. Di samping itu, juga perlu dirancang upaya pemanfaatan waktu luang, sehingga anak yang putus sekolah disibukkan dengan kegiatan-kegiatan positif dan konstruktif yang meningkatkan dan mengembangkan potensi yang ada.

A.5 Persentase Guru Memenuhi Kualifikasi S1/D-Iv

Kebutuhan tenaga pendidikan yang belum memenuhi kualifikasi S1/D-IV masih cukup banyak. Hal ini juga terjadi untuk jenjang SMP/MTs. Pemerintah Daerah Kota Cirebon dapat memenuhi tenaga pendidik dengan kualifikasi S1/D-IV, kualitas dan profesionalitas tenaga pendidik akan lebih

meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Cirebon.

Tabel II-41 Guru Kualifikasi S1/D-IV Di Kota Cirebon

No.	Satuan Pendidikan	2021	2022	2023
1.	SD/Mi	223	232	205
2.	SMP/MTs	248	240	310
3.	SMA/MA	173	166	240
4.	SMK/MAK	185	176	243

Sumber: Portal Data Pendidikan 2025

A.6 Persentase Guru Memenuhi Sertifikasi Tenaga Pendidik

Untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Cirebon, tenaga pendidik tidak hanya dituntut untuk memiliki kualifikasi pendidikan S1 atau D-IV, tetapi juga harus memiliki sertifikasi sebagai tenaga pendidik yang tidak hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi belaka, tetapi yang terpenting seorang tenaga pendidik sudah memiliki “kelayakan” untuk mengajar secara profesional yang selalu berupaya meningkatkan penguasaan terhadap berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang selalu dinamis.

B. Kesehatan

B.1 Indeks Kesehatan

Salah satu indikator penting dalam pembangunan adalah *Human Development Index/IPM* yang terdiri dari indeks ekonomi (pendapatan riil per kapita), indeks pendidikan (HLS dan RLS), dan indeks kesehatan (usia harapan hidup waktu lahir). Indeks kesehatan digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan dengan mengukur indikator UHH pada saat lahir. Perubahan Indeks Kesehatan penduduk Kota Cirebon selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II-42 Indeks Kesehatan Kota Cirebon

Indikator	2020	2021	2022
Indeks Kesehatan	80,40	80,68	81,14

Sumber: BPS, 2025

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa perkembangan Indeks Kesehatan Kota Cirebon mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, Indeks Kesehatan Kota Cirebon mencapai 80,40 dan meningkat pada tahun 2023 menjadi 120,07. Peningkatan tersebut mengindikasikan tingkat kesehatan di Kota Cirebon semakin baik.

B.2 Rasio Puskesmas/Puskesmas/Pustu Per Satuan Penduduk

Jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu selama kurun waktu 5 (lima) tahun sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 tidak mengalami perubahan yaitu tetap 37 unit, yang terdiri atas 22 unit puskesmas dan 15 unit pustu. Jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu serta rasionya per satuan penduduk di Kota Cirebon dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-43 Fasilitas Kesehatan per Satuan Penduduk di Kota Cirebon



Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2026

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Puskesmas/ Pusling/Pustu	34	34	34	34	34
2.	Jumlah Penduduk	343.003	343.667	346.438	352.347	356.629
3.	Rasio Puskesmas/ Pusling/Pustu per satuan penduduk	10.088	10.1087	10.189	10.363	10.489

Sumber: Open Data Kota Cirebon, 2025

B.3 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Jumlah rumah sakit di Kota Cirebon dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 masih tetap tidak berubah yaitu sebanyak 11 (sebelas) rumah sakit, yang terdiri atas 7 (tujuh) unit rumah sakit umum (yaitu Rumah Sakit Umum Gunung Jati, Rumah Sakit Tentara Ciremai, Rumah Sakit Pelabuhan, Rumah Sakit Budi Luhur, Rumah Sakit Putra Bahagia, Rumah Sakit Budi Asta, dan Rumah Sakit Sumber Kasih) serta 4 (empat) unit rumah sakit bersalin/rumah sakit khusus, yaitu Rumah Sakit Bersalin Panti Abdi Darma, Rumah Sakit Bersalin Muhammadiyah, Rumah Sakit Khusus Bedah Medimas, serta Rumah Sakit Ibu dan Anak Cahaya Bunda.

Tabel II-44 Rumah Sakit per Satuan Penduduk

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Rumah Sakit	11	11	11	11	11
2.	Jumlah Penduduk	343.003	343.667	346.438	352.347	354.679
3.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	31.182	31.242	31.494	32.032	32.244

Sumber: Open Data Kota Cirebon, 2025

B.4 Indikator Kinerja Pelayanan Rumah Sakit

Indikator penilaian tingkat keberhasilan pelayanan di Rumah Sakit menggambarkan mutu pelayanan rumah sakit yang dilihat dari berbagai aspek, yaitu pemanfaatan sarana, mutu dan tingkat efisiensi pelayanan. Indikator yang digunakan antara lain pemanfaatan tempat tidur (*Bed Occupancy Rate*), rata-rata lama hari perawatan (*Length Of Stay*), rata-rata tempat tidur dipakai (*Bed Turn Over*), rata-rata selang waktu pemakaian tempat tidur (*Turn Over Internal*), persentase pasien keluar yang meninggal dunia (*Gross Death Rate*) dan persentase pasien keluar yang meninggal dunia ≥ 48 jam perawatan (*Net Death Rate*).

Tabel II-45 Indikator Kinerja Pelayanan Rumah Sakit

No	Indikator	2020	2021
1.	BOR (Persen)	44,60	52,00
2.	LOS (Hari)	3,40	3,29
3.	BTO (Kali)	51,10	14,92
4.	TOI (Kali)	4,00	3,63
5.	GDR	37,80	27,88
6.	NDR	14,10	15,25

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Cirebon, 2022

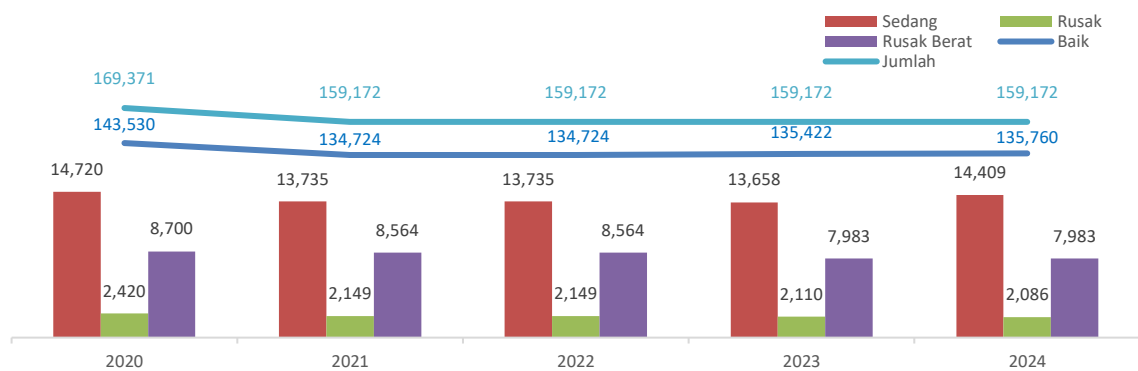
C. Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

C.1 Tingkat Kemantapan Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, sedang, rusak sedang dan rusak berat pada periode tahun 2018-2022, sedangkan kondisi jalan baik mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2017 dibandingkan tahun sebelumnya.

Ruas jalan di Kota Cirebon yang kewenangannya dimiliki oleh Pemerintah Pusat ditetapkan melalui Keputusan Menteri PUPR Nomor 1688/KPTS/M/2022 sepanjang 39,92 km dan jalan yang kewenangannya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 620/Kep.1086-Rek/2016 sepanjang 6,545 km. Jalan yang kewenangannya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 621/Kep.46-DPUPR/2021 sepanjang 159,172 km.

Gambar II-26 Panjang Jalan per Kondisi Jalan di Kota Cirebon (km)



Sumber: BPS 2025

C.2 Cakupan Saluran Drainase

Saluran drainase di Kota Cirebon sangat menentukan kondisi wilayah terhadap genangan air pada saat di musim hujan. Berdasarkan data Dokumen Rencana Induk Drainase Kota Cirebon pada tahun 2011, yang merupakan data lokasi genangan yang dapat menyebabkan banjir pada wilayah tersebut. Pada lokasi tersebut perlu diberikan perhatian untuk dilakukan perbaikan saluran drainase, agar pada lokasi tersebut tidak terjadi genangan air. Pada beberapa ruas jalan belum didukung dengan saluran drainase, untuk itu perlu pendataan lebih lanjut dalam merencanakan pembangunan dan perbaikan drainase yang dibutuhkan untuk mengatasi genangan air yang menyebabkan banjir.

Tabel berikut merupakan jaringan drainase dalam kondisi baik, kondisi sedang dan kondisi buruk di Kota Cirebon yang berdasarkan Open Data Kota Cirebon terbagi menjadi 2 tipe, yaitu jaringan drainase terbuka, dan drainase tertutup.

Tabel II-46 Cakupan Saluran Drainase di Kota Cirebon

Kondisi Saluran Drainase	2020	2021	2022
Cakupan Saluran Drainase Terbuka			
Kondisi Baik (%)	3,14	3,51	99,17
Kondisi Sedang (%)	3,87	3,87	0,67
Kondisi Buruk (%)	92,99	92,62	0,16
Total Saluran Drainase Terbuka (meter)	3.827.521	3.827.521	565.887
Cakupan Saluran Drainase Tertutup			
Kondisi Baik (%)	0	0	98,41
Kondisi Sedang (%)	0	0	1,25
Kondisi Buruk (%)	0	0	0,34
Total Saluran Drainase Tertutup (meter)	0	0	483.545

Sumber: Open data Kota Cirebon, 2025.

C.3 Cakupan Pelayanan Air Limbah

Definisi air limbah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan berwujud cair yang tidak dimanfaatkan kembali.

Layanan air limbah di Kota Cirebon seperti Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang didukung oleh kendaraan truk tinja, sistem sanitasi yang berbasis masyarakat (Sanimas, RW 08 kelurahan Panjunan) dan sistem komunal pada rumah susun sewa Dukuh Semar. Pada grafik berikut digambarkan kapasitas pelayanan air limbah yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Cirebon.

Cakupan pelayanan air limbah domestik dari tahun 2017-2020 terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2017 mencapai 65,35%, meningkat pada tahun 2018 menjadi 90,32%, dan pada tahun 2019 dan 2020 meningkat menjadi 93,70%. Hal ini perlu ditingkatkan lagi agar cakupan pelayanan air limbah dapat dilakukan hingga target 100% yaitu untuk seluruh penduduk di Kota Cirebon.

C.4 Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Minum Bersih

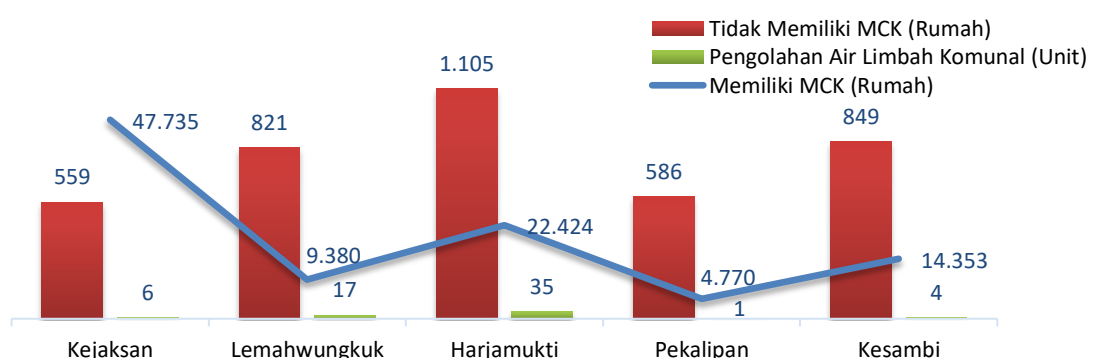
Alternatif masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan sumber air minum di Kota Cirebon yang sebagian besar sudah menggunakan jasa PDAM adalah penggunaan sumur gali, sumur pompa, dan mata air. Sumber air PDAM, sumur gali, sumur pompa relatif memenuhi persyaratan kesehatan.

Namun untuk kebutuhan air minum yang bersumber dari mata air perlu penanganan khusus oleh instansi terkait dengan dilakukan pemeriksaan dan perlu dilakukan pengawasan oleh Dinas Kesehatan Kota Cirebon sebelum digunakan oleh masyarakat, agar terhindar dari gangguan penyakit yang bersumber melalui perantara media air.

C.5 Persentase Rumah Tangga Bersanitasi

Fasilitas sanitasi yang layak merupakan Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 3 tahun 2014. Salah satu fasilitas yang harus dipenuhi adalah jamban yang memenuhi syarat untuk kriteria kesehatan. Jamban tersebut harus dilengkapi dengan Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), baik yang digunakan secara individu maupun secara bersama, dengan resapan lebih dari 10 meter dari sumber air terdekat.

Gambar II-27 Cakupan Akses Sanitasi Layak di Kota Cirebon Tahun 2021





Sumber: Open Data Kota Cirebon 2021. Data diolah.

Berdasarkan data DPUPR Kota Cirebon pada di atas, penduduk yang memiliki akses sanitasi layak secara individu pada tahun 2021 untuk kepemilikan Mandi Cuci Kakus (MCK) sebanyak 98,662 rumah dan yang tidak memiliki sebanyak 3,920 rumah. Sementara SPAL yang digunakan secara bersama tersebar di seluruh kecamatan di wilayah Kota Cirebon, dengan jumlah pada setiap kecamatan yaitu terbanyak di Kecamatan Harjamukti 35 unit, berikutnya 17 unit di Kecamatan Lemahwungkuk, 6 unit di Kecamatan Kejaksan, 4 unit di Kecamatan Kesambi dan terakhir di Kecamatan Pekalipan yang merupakan jumlah terendah berjumlah 1 unit.

Fasilitas SPAL tidak dapat langsung mengurangi kebiasaan penduduk untuk buang air besar sembarangan atau dengan istilah *Open Defecation Free* (ODF), Kota Cirebon diharapkan bebas dari ODF dapat segera terwujud.

C.6 Perkembangan Luasan Ruang Terbuka Hijau

Undang-Undang RI nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa penetapan RTH pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota dan paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota adalah RTH publik.

Maksud dari penyediaan dan pemanfaatan RTH adalah untuk menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air, menciptakan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan serta meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

Rincian luas RTH di bawah pengelolaan dan dimiliki oleh pemerintah pada wilayah Kota Cirebon yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Luas tutupan lahan RTH publik sebanyak 424.29 hektar atau 10.75% dari 3,947.21 hektar yang merupakan luas Kota Cirebon. Masih ada kekurangan sebesar 9.25% yang harus disediakan oleh pemerintah kota sebagai RTH publik. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Cirebon nomor 76 tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Tahun 2021–2041, akan dilakukan pembebasan lahan untuk pemenuhan 20% atau seluas 492,16 hektar sebagai RTH publik secara bertahap pada periode 2021-2041.

Tabel II-47 Luas Tutupan Lahan RTH Kota Cirebon

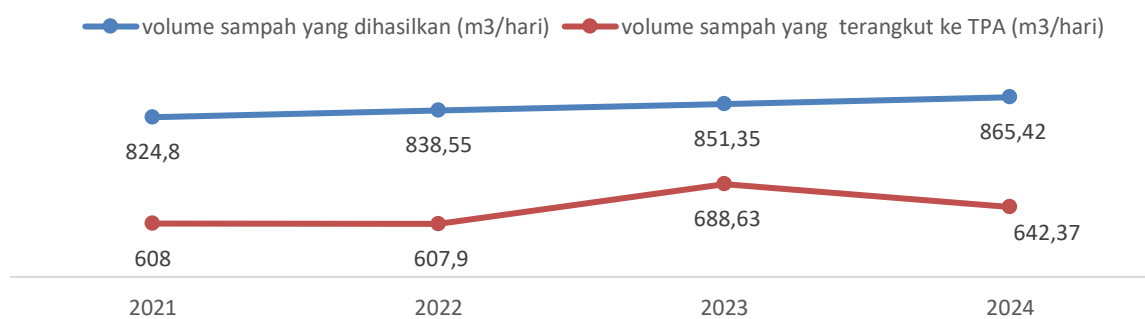
No	Tipologi Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Persentase Terhadap Luas Wilayah Kota Cirebon (%)
1.	Taman RT	4,28	0,11
2.	Taman RW	8,72	0,23
3.	Taman Kelurahan	20,52	0,54
4.	Taman Kecamatan	6,24	0,16
5.	Taman Kota	11,79	0,31
6.	Taman Pemakaman	71,25	1,87
7.	Jalur Hijau Jalan	3,43	0,09
8.	Sempadan Rel KA	48,15	1,26
9.	Sempadan Pantai	84,58	2,22
10.	Sempadan Sungai	134,50	3,53
11.	Hutan Kota	10,07	0,26
12.	Hutan Mangrove	2,11	0,06
13.	Lapangan Olahraga	18,65	0,49
Jumlah Total Tutupan Lahan		424,29	10,75

Sumber: Dokumen IKLH Kota Cirebon Tahun 2019, DLH Kota Cirebon, 2020

C.7 Cakupan Penanganan Sampah

Cakupan penanganan sampah adalah jumlah sampah yang diangkut oleh petugas ke pembuangan akhir di Kopi Luhur, Argasunya, Kota Cirebon seluas 9,8 hektar yang merupakan lokasi galian C sebelum dijadikan TPA. Volume sampah yang diangkut ke TPA sangat terbatas sehingga perlu upaya untuk pengolahan sampah dimulai dari sumbernya. Hal ini menjadi tantangan pemerintah agar penanganan sampah yang diangkut ke TPA akan berkurang dikarenakan area pembuangan di TPA Kopi Luhur kian mendekati kapasitas maksimal berkisar antara 60%-80% dan harus ada inovasi untuk mengatasi permasalahan ini seiring berkembangnya bertumbuhnya penduduk penghasil sampah yang cenderung meningkat di Kota Cirebon.

Gambar II-28 Cakupan Penanganan Sampah Kota Cirebon



Sumber: DLH Kota Cirebon, 2025

C.8 Penerbitan Izin Persetujuan bangunan gedung

Persetujuan bangunan gedung (PBG) yang juga disebut sebagai izin mendirikan bangunan (IMB) adalah persetujuan yang dikeluarkan oleh otoritas nasional atau daerah bahwa sebuah bangunan rumah/gedung diizinkan untuk dibangun/di renovasi. Penerbitan PBG terbesar dari jenis bangunan yang diperuntukan untuk hunian. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan untuk pembangunan perumahan baik untuk renovasi maupun bangunan baru seiring dengan berkembangnya jumlah penduduk.

Tabel II-48 Penerbitan IMB di Kota Cirebon

No	Jenis Bangunan	2021	2022	2023	2024
1.	Campuran	24	8	128	1
2.	Hunian	531	1644	502	317
3.	Pemerintah	1	0	5	4
4.	Sosial	8	1	17	11
5.	Usaha	105	96	12	106

Sumber: Open Data Kota Cirebon, 2025

D. Perumahan Dan Kawasan Permukiman

D.1 Jumlah Dan Persentase Kawasan Lingkungan Permukiman Kumuh Ditangani

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 663/Kep.133-DPRKP/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 663/Kep.70-BAPPEDA/2015 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Cirebon, disebutkan bahwa luas kawasan kumuh Kota Cirebon sebanyak 315,91 hektar. Dari luas kawasan

kumuh tersebut yang telah dilakukan penanganan di tahun 2018 seluas 13,55 hektar, tahun 2019 seluas 27,84 hektar, dan di tahun 2020 seluas 4,46 hektar, sehingga di tahun 2021 persentase capaian pengurangan kawasan kumuh adalah sebagai berikut:

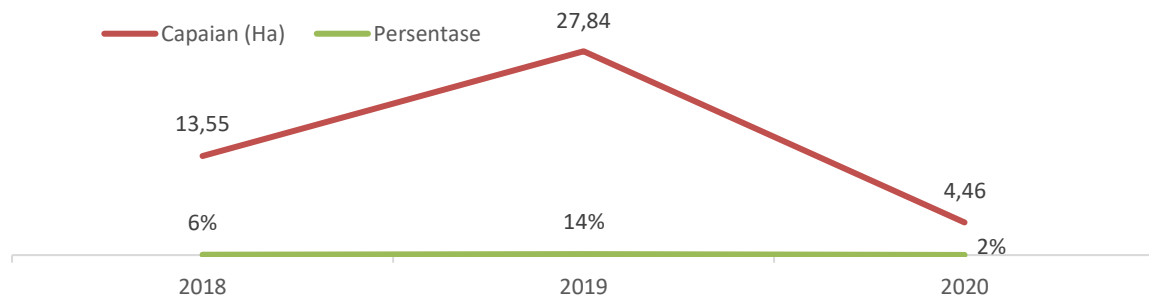
Tabel II-49 Kawasan Lingkungan Permukiman Kumuh Ditangani di Kota Cirebon (Ha)

No	Uraian	Urusan	Target 2021	2018	2019	2020	2021	2024
1.	Luasan Permukiman Kumuh yang Ditangani secara Terpadu	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	1,54	13,55	27,84	n.a	10,61	19,76
2.	Kawasan di Permukiman Kumuh Perkotaan yang Ditangani Melalui Peremajaan Kota	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	1,54	n.a	n.a	4,46	1,83	

Sumber: DPRKP Kota Cirebon, 2024

Jumlah Luasan Permukiman Kumuh yang Ditangani secara Terpadu memiliki target seluas 1.54 di tahun 2021, namun realisasinya hingga di tahun 2021 tercatat seluas 10,61 Ha permukiman kumuh. Sisi lain, Jumlah Kawasan di Permukiman Kumuh Perkotaan yang Ditangani Melalui Peremajaan Kota dari target pada 2021 sebesar 1,54, hampir mendekati target dengan Jumlah Kawasan di Permukiman Kumuh Perkotaan yang Ditangani Melalui Peremajaan Kota sebesar 1,83 Ha.

Gambar II-29 Kawasan Lingkungan Permukiman Kumuh Kota Cirebon yang ditangani

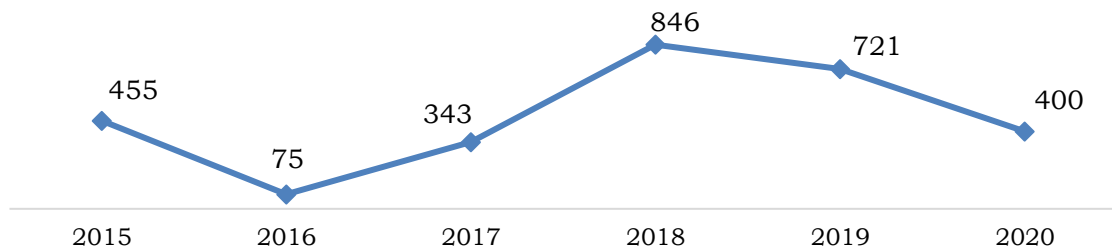


Sumber: DPRKP Kota Cirebon, 2021

D.2 Cakupan Rumah Tidak Layak Huni

Gambar berikut menunjukkan bahwa rasio rumah layak huni sebesar 0,21034 dalam periode tahun 2015-2021, sedangkan persentase lingkungan permukiman kumuh sebesar 6,31 pada periode yang sama. Rasio rumah layak huni dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal tersebut menunjukkan bahwa pembangun di Kota Cirebon terkait rumah tidak layak huni perlahan dapat ditangani dengan cukup baik. Hal tersebut berbanding lurus dengan persentase lingkungan permukiman kumuh yang seiring berjalannya waktu menurunkan persentase atas lingkungan permukiman kumuh.

Gambar II-30 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Ditangani di Kota Cirebon



Sumber: DPRKP Kota Cirebon, 2021

E. Ketentraman Dan Ketertiban Umum

E.1 Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP serta kegiatan pembinaan politik di daerah.

Tabel II-50 Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kota Cirebon

No	Uraian	2020	2021	2022
1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (kegiatan)	17	5	28
2	Kegiatan pembinaan politik daerah (kegiatan)	1	11	0

Sumber: BPS 2025

E.2 Rasio Linmas Per Satuan Penduduk

Rasio petugas Linmas di Kota Cirebon adalah jumlah satuan perlindungan masyarakat pada tingkat kelurahan dengan tugasnya membantu memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Dengan menggunakan rumus rasio jumlah satuan Linmas per kelurahan adalah jumlah satuan Linmas dalam satu kota dibagi jumlah kelurahan dalam satu kota. Rasio petugas Linmas di Kota Cirebon baru mencapai 2,22 per Kelurahan.

Tabel II-51 Linmas per Satuan Penduduk di Kota Cirebon

No	Uraian	2020	2021
1.	Jumlah Linmas	1100	358
2.	Jumlah Penduduk	343.003	343.497
3.	Rasio Linmas Per 10.000 Penduduk	32,06	10,43

Sumber: Open Data Kota Cirebon, 2021

Jumlah Linmas di Kota Cirebon pada tahun 2021 sebanyak 358 orang, sehingga rasio jumlah Linmas terhadap jumlah penduduk per 10.000 penduduk adalah 10,43 yang artinya sekitar 11 orang Linmas bertanggung jawab atas ketentraman dan ketertiban umum masyarakat terhadap 10.000 jiwa penduduk Kota Cirebon. Seiring dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, sudah seharusnya jumlah linmas terus ditingkatkan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum masyarakat, sehingga kondisi lingkungan akan lebih kondusif dan masyarakat merasa nyaman dalam beraktivitas.

F. Sosial

Tujuan pembangunan sosial adalah meningkatkan kualitas hidup Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan kepedulian serta



partisipasi sosial masyarakat dan dunia usaha dengan indikator: (1) terciptanya aksesibilitas terhadap pelayanan social; (2) meningkatnya ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; (3) meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial.

Penanganan PPKS ini tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan sarana dan prasarana seperti Panti Jompo, Rumah Singgah, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), dan lain-lain. PPKS adalah seseorang keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/keterpencilan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung seperti terjadinya bencana. Kelompok sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Cirebon yaitu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Tabel II-52 Jumlah PPKS di Kota Cirebon

Jenis PPKS	2021	2022	2023	2024
Anak balita terlantar	11	0	133	101
Anak dengan kedisabilitas	0	101	144	133
Anak jalanan	0	88	13	15
Anak terlantar	32	0	174	120
Anak yang berhadapan dengan hukum	1	34	10	11
Anak yang memerlukan perlindungan khusus	31	0	12	8
Anak yang menjadi korban tindak kekerasan	1	21	12	9
Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan	1	0	230	230
Fakir miskin	-	-	-	-
Gelandangan	0	71	85	83
Kelompok minoritas	4	0	13	13
Korban bencana alam	41	4	13	13
Korban bencana sosial	25	0	0	0
Korban penyalahgunaan napza	50	21	9	9
Korban tindak kekerasan	0	1	3	3
Korban trafficking	0	11	1	1
Lanjut usia terlantar	1	0	2565	2165
Orang dengan hiv/aids (odha)	60	78	3	3
Pekerja migran bermasalah sosial	0	0	0	0
Pemulung	2	1	148	122
Pengemis	78	43	85	70
Penyandang disabilitas	29	0	1115	1015
Perempuan rawan sosial ekonomi	11	1	2251	2251
Tuna susila	0	1	13	14
Jumlah	378	476	7032	6389

Sumber: Open Data Kota Cirebon, 2025

Dari gambaran tersebut terlihat bahwa untuk beberapa jenis PPKS datanya tidak berubah, yang bisa berarti bahwa terhadap PPKS tersebut tidak ada intervensi atau bisa juga tidak adanya *updating* data PPKS. Kondisi ini merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi yaitu tidak adanya kontinuitas pendataan/*updating data* yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam penanganan PPKS, sehingga



berakibat tidak fokusnya upaya pengentasan masalah kesejahteraan sosial yang ada.

Penanganan PPKS menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, peran serta aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengentaskan permasalahan sosial yang terjadi. Berbagai permasalahan kesejahteraan sosial yang dihadapi dan terjadi di Kota Cirebon, diantaranya anak terlantar, anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum, anak korban kekerasan. Anak-anak tersebut seharusnya menikmati layanan pendidikan, kesehatan dan layanan lainnya sebagaimana anak pada umumnya, namun karena kondisi lingkungan keluarga yang kurang beruntung, sehingga mengakibatkan anak-anak tersebut tidak memperoleh hak-haknya.

2.1.3.2 *Layanan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar*

Layanan urusan wajib bukan pelayanan dasar merupakan jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa yang tidak berkaitan dengan kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.

A. Tenaga Kerja

Pasar kerja sebagaimana karakteristik umumnya bersifat dualisme, dimana lapangan kerja sektor modern (formal) dengan jumlah tenaga kerja yang relatif sedikit dan sektor tradisional (informal) dengan jumlah tenaga kerja yang besar berjalan secara bersamaan dalam perekonomian. Sektor modern memiliki upah yang lebih tinggi dan kondisi kerja yang lebih baik dibandingkan sektor tradisional. Selain itu, pekerja sektor modern memiliki kesempatan untuk memperoleh keterampilan dan akses terhadap pelatihan, sehingga memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. Sebaliknya, pekerja di sektor tradisional melakukan kegiatan yang lebih rendah tingkat produktivitasnya dengan upah yang relatif lebih rendah. Kesenjangan antara produktivitas dan upah antara sektor modern dan sektor tradisional mencerminkan perbedaan tingkat pendidikan. Pekerja sektor modern berpendidikan lebih tinggi dibandingkan pekerja sektor tradisional.

Oleh karenanya, persoalan ketenagakerjaan tidak hanya terkait dengan upaya perluasan kesempatan kerja, tetapi juga mencakup upaya memfasilitasi perpindahan “surplus tenaga kerja” keluar dari sektor informal ke sektor modern yang lebih produktif dan memberikan upah yang lebih tinggi. Perpindahan surplus tenaga kerja dari sektor informal ini, selain bertujuan untuk meningkatkan hak-hak tenaga kerja juga menjadi tujuan utama dari siklus pembangunan, LPE dan pengurangan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut secara selaras, maka dalam konteks kebijakan tenaga kerja, perlu dijalin keseimbangan yang tepat antara perlindungan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.

A.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK merupakan persentase angkatan kerja dibandingkan dengan penduduk usia kerja pada suatu periode tertentu yang di Kota Cirebon pada tahun 2020 sebesar 63,75 % sedikit mengalami peningkatan dari capaian tahun 2019 sebesar 62,71 %. Kondisi ini tidak terlepas dari dampak pandemi Covid-19 yang mempengaruhi sektor sosial dan perekonomian masyarakat Kota Cirebon. Persentase jumlah penduduk yang berusia lebih dari 15 tahun yang aktif secara ekonomi di Kota Cirebon pada tahun 2024 sebanyak 68,55 persen.

Tabel II-53 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

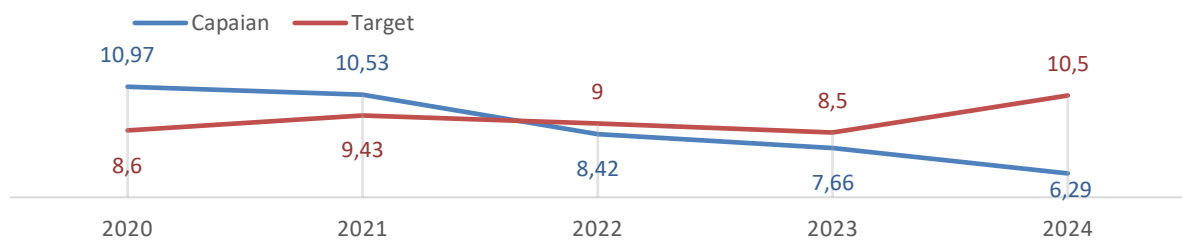
No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	63,75	62,87	65,42	68,71	68,55

Sumber: BPS 2025

A.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT merupakan salah satu indikator ketenagakerjaan yang digunakan untuk mengetahui berapa banyak penduduk umur kerja yang sedang mencari pekerjaan. TPT dihitung dengan membandingkan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah Angkatan kerja.

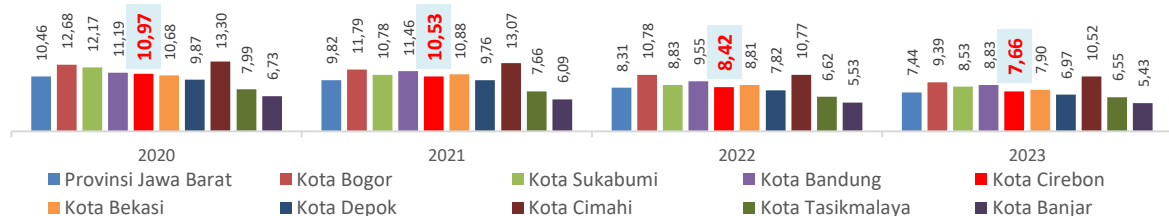
Gambar II-31 Capaian dan Target TPT Kota Cirebon



Sumber: Dok. Perencanaan Kota Cirebon, BPS 2025

TPT di Kota Cirebon pada tahun 2024 mencapai 6,29%. Adanya pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi penduduk untuk beraktivitas secara ekonomi, sehingga berdampak pada penghasilan dan pemenuhan kebutuhan keluarga. Dampak adanya pandemi Covid-19 di bidang ketenagakerjaan, antara lain adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), perusahaan tidak dapat memproduksi, dan pembatasan aktivitas ekonomi karena adanya pembatasan mobilitas penduduk. Dibandingkan dengan daerah lain di Wilayah Kota di Jawa Barat, TPT Kota Cirebon termasuk yang tinggi.

Gambar II-32 TPT di Wilayah Kota di Jawa Barat



Sumber: BPS Jawa Barat 2024



A.3 Cakupan Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan

Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi tertinggi dicapai pada tahun 2016 sebanyak 84,75% dan terendah tahun 2017 sebesar 48,84%. Selanjutnya tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan, kinerja tertinggi dicapai tahun 2017 sebesar 75,00%. Sementara kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuatif, tertinggi dicapai pada tahun 2016 sebesar 84,62% dan terendah tahun 2017 sebesar 30,00%.

Kepesertaan aktif tenaga dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja cenderung bertambah setiap tahunnya. Kepesertaan Jamsostek dicapai pada tahun 2020 sebesar 78,50 % dan tahun 2019 sebesar 55,00 %.

B. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Sebagai penggerak pembangunan, sebesar 46,00% perempuan 15 tahun ke atas berkontribusi dalam perekonomian (BPS, 2015). Kesetaraan gender dan pembangunan berkelanjutan memang sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Kesetaraan gender, penegakan hak asasi manusia, penegakan martabat dan kapabilitas perempuan merupakan syarat utama dalam kehidupan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

B.1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan ukuran yang dipakai untuk menyoroti tentang status perempuan khususnya mengukur prestasi dalam kemampuan dasar. Melalui IPG, perbedaan pencapaian yang menggambarkan kesenjangan pencapaian antara laki-laki dan perempuan dapat dijelaskan. Perkembangan IPG Kota Cirebon menunjukkan peningkatan, dengan nilai IPG 94,35 poin pada tahun 2019 meningkat menjadi 95,55 poin pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa kapabilitas dasar perempuan terus mengalami peningkatan.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menggambarkan partisipasi aktif perempuan dalam bidang politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi Kota Cirebon diikuti pula dengan kenaikan setiap komponen/indikator kompositnya. Pada tahun 2019, IDG Kota Cirebon sebesar 77,86 poin turun menjadi 77,03 poin pada tahun 2023. Walaupun partisipasi perempuan menurun dalam pengambilan keputusan, diharapkan pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya. Mengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak terlepas dari meningkatnya pencapaian pembangunan gender.

Tabel II-54 IPG dan IDG Kota Cirebon

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,35	94,35	94,39	94,91	95,55
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	77,86	77,86	78,09	78,07	77,03

Sumber: Dinas tenaga Kerja Kota Cirebon, 2024

B.2 Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintahan

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan direpresentasikan oleh partisipasi perempuan yang bekerja di Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Tabel



berikut menggambarkan tingkat partisipasi perempuan dilihat dari jumlah pejabat Eselon II, III, dan IV di Pemerintah Daerah Kota Cirebon tahun 2017-2021. Setiap perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan struktural maupun fungsional di lembaga pemerintahan, baik di posisi Eselon II, III maupun IV. Sampai dengan tahun 2021, partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah di Kota Cirebon terwakili sebesar 39,60 %.

Tabel II-55 Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Cirebon

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Perempuan yang menduduki posisi managerial di Lembaga Pemerintah (orang)	263	280	274	171	169
2.	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah (%)	29,03	31,61	39,60	28,57	25,71

Sumber: BKPSDM Kota Cirebon, 2024

C. Perlindungan Anak

Partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak di Kota Cirebon telah berjalan cukup lama, antara lain dengan berdirinya berbagai Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)/Panti Asuhan. Disamping lembaga yang didirikan oleh masyarakat tersebut, Pemerintah Daerah Kota Cirebon melalui Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya membentuk Lembaga Perlindungan Anak seperti Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Cirebon, dan Pusat Perlindungan Anak (PPA) Kepolisian Resort Cirebon Kota.

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Cirebon mencatat dalam kurun waktu 2017-2021, dimana pada tahun 2017, jumlah kasus kekerasan sebanyak 53 kasus (36 kasus diantaranya korbannya anak-anak) dan tahun 2018 naik menjadi 65 kasus kekerasan, dan pada tahun 2019 jumlah kekerasan menurun menjadi 41 kasus. Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 terus meningkat menjadi 54 kasus pada tahun 2020 dan menjadi 64 kasus di tahun 2021.

Sebagian besar dari korban kekerasan pada tabel tersebut di atas adalah anak-anak (0-18 tahun) yang mengalami jenis kekerasan seksual, yang meliputi sodomi, pencabulan, dan pemerkosaan. Dapat dilihat pada tabel berikut untuk dapat melihat jumlah korban menurut kelompok usia.

Pada tahun 2021 korban kekerasan yang ditangani PPT Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon berasal dari Kota Cirebon sebanyak 40 kasus dimana 77,50 persennya menimpa anak-anak, menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 54 kasus. Dalam upaya perlindungan terhadap anak adalah pemenuhan kebutuhan identitas anak. Kota Cirebon telah berkomitmen untuk dapat memenuhi kebutuhan identitas anak berupa pemenuhan akta kelahiran secara gratis.

D. Pangan

D.1 Ketersediaan Pangan Utama

Kejadian rawan pangan menjadi masalah yang sangat sensitif dalam dinamika kehidupan sosial politik masyarakat. Oleh sebab itu, menjadi sangat penting untuk mampu mewujudkan ketahanan pangan daerah khususnya di Kota Cirebon:

Tabel II-56 Ketersediaan Pangan Utama di Kota Cirebon

No.	Uraian	2020	2021
1.	Jumlah ketersediaan pangan utama (ton)	276.973,4 2	276.973,4 2
2.	Ketersediaan pangan utama per 1000 jiwa per tahun (ton)	276.973,4 2	276.973,4 2
3.	Ketersediaan Pangan Utama (Kg/jiwa/ tahun)	820,45	820,45
4.	AKG pangan utama per kapita per tahun (kg)	109	109
5.	Ketersediaan energi/kalori (Kkal/Kap/hari)	n.a	n.a
6.	Surplus ketersediaan pangan utama per jiwa per tahun (kg/kap/th)	711,45	711,45

Sumber: DKPPP Kota Cirebon, 2021

D.2 Skor PPH

Indikator kualitas konsumsi pangan ditunjukkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. PPH digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan yang ideal di suatu wilayah. Pentingnya pencapaian skor PPH diamanatkan oleh Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Indikator PPH digunakan sebagai indikator kinerja bidang ketahanan pangan. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2020 sebesar 90,2 %.

E. Lingkungan Hidup

E.1 Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan diberlakukan untuk tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mengacu pada Undang-undang RI nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal tersebut perlu dilakukan dalam proses pembangunan guna meminimalisir dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Tabel II-57 Kepemilikan Pengolahan Limbah oleh Perusahaan

No.	Jumlah Perusahaan Industri/Pabrik	2020	2021
1.	Memiliki Pengolahan Limbah (Perusahaan)	56	66
2.	Tidak Memiliki Pengolahan Limbah (Perusahaan)	241	1257
3.	Telah diawasi (Unit)	86	130
4.	Ditindak Sanksi Administrasi (Unit)	14	53

Sumber: Open Data Kota Cirebon, 2021

Sanksi administrasi diperlukan dalam penegakan hukum yaitu berupa sanksi ringan, seperti teguran tertulis, peringatan hingga kepada perintah penghentian sementara atau penghentian permanen untuk sebagian kegiatan atau seluruhnya. Dalam Penegakan hukum lingkungan, diperlukan pengawasan oleh aparat Pemerintah Daerah yang memiliki kemampuan dan terlatih untuk menegakkan peraturan di bidang lingkungan, namun hal ini masih terhambat dengan keterbatasan aparat yang telah mengikuti

pelatihan pengawasan lingkungan dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang ada di Kota Cirebon. Untuk itu diperlukan instrumen elektronik berupa sensor yang harus dimiliki oleh perusahaan guna memantau pencemaran atauerusakan lingkungan hidup.

E.2 Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Isu global perubahan iklim semakin mengemuka. Perubahan iklim dapat diartikan sebagai berubahnya iklim yang diakibatkan baik langsung maupun tidak langsung oleh berbagai aktivitas manusia, sehingga menyebabkan berbagai perubahan komposisi atmosfer secara global yang mengakibatkan kenaikan suhu bumi.

Untuk menjawab isu global tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Protokol Kyoto* atas Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim) merupakan pengesahan *Protokol Kyoto* tentang perubahan iklim yang membawa baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terlibat secara aktif dalam mengatasi perubahan iklim. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan dan target kontribusi pada upaya global mengatasi perubahan iklim melalui pengurangan emisi gas rumah kaca, serta memberikan nilai ekonomi pada upaya pengurangan tersebut merupakan tujuan diterbitkannya Peraturan Presiden nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. Peraturan ini mengatur mekanisme perdagangan karbon dengan Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk mencapai target Kontribusi yang ditetapkan secara nasional/ *Nationally Determined Contribution (NDC)* dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional. Untuk tingkat penurunan emisi GRK di Kota Cirebon setiap tahunnya cenderung menunjukkan peningkatan.

Tabel II-58 Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kota Cirebon

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023
1.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.	3,87	5,9	5,37	6,91

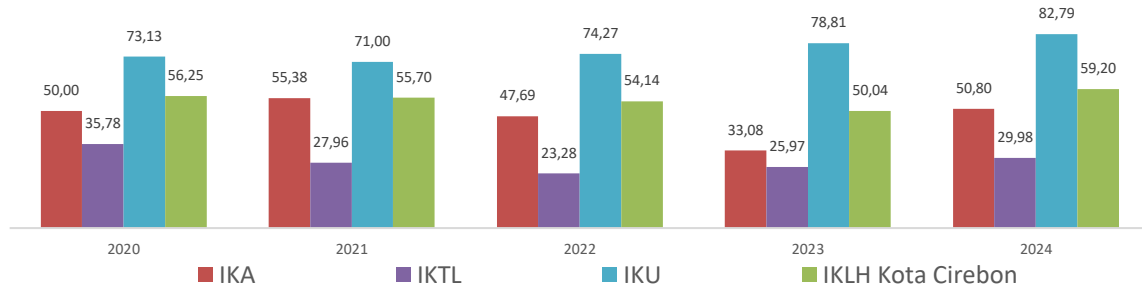
Sumber: Open Data Kota Cirebon, 2025

E.3 Indeks Pengukuran Kualitas Lingkungan Hidup

Kondisi air sungai sangat dipengaruhi oleh limbah rumah tangga dan limbah industri. Pada beberapa industri yang tidak memiliki pengolahan air limbah, limbah cair yang dihasilkan langsung dialirkan ke sungai. Termasuk perubahan pola penggunaan lahan, atau masalah lain yang mempengaruhi kualitas air. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 5 Tahun 2021 Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, kualitas air sungai ditentukan dengan kondisi temperatur 15°-35° berdasarkan parameter pada tabel Rentang Nilai Parameter Kinetik dan Stoikiometri. Pengambilan sampel dilakukan pada titik pengamatan yang mewakili sungai-sungai utama di Kota Cirebon sebagai perhitungan IKA.

Sedangkan Kebutuhan air bersih di Kota Cirebon telah dipenuhi sebagian melalui jaringan pipa PDAM, air minum dari PDAM sudah dapat dikonsumsi oleh 256,703 orang pada tahun 2021 yang merupakan 77.02% penduduk Kota Cirebon. Sedangkan 22.98% menggunakan sumber air lain yang bukan dari layanan PDAM antara lain air bawah tanah.

Gambar II-33 Indeks Kualitas Air Kota Cirebon



Sumber: Open Data Kota Cirebon 2025

Kualitas air secara *mikrobiologi*, dipengaruhi oleh adanya mikroba seperti bakteri akibat pencemaran tinja (*Coliform*) di dalam air. Pada pemeriksaan kualitas air bawah tanah yang telah dilakukan wilayah Kelurahan Argasunya, diidentifikasi telah tercemar bakteri *Coliform* yaitu sebesar 7.90 per 100 ml air. Di Samping adanya bakteri *coliform*, air pada daerah tersebut juga tercemar *nitrate* (NO₃) sebesar 13,83 mg/ltr dan *nitrite* (NO₂) sebesar 1,26 mg/ltr. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990, ambang batas kandungan NO₃ dalam air adalah 10 mg/ltr dan NO₂ 1 mg/ltr. Untuk penduduk Kota Cirebon yang sumber air bawah tanahnya tercemar dan tidak memiliki akses jaringan pipa PDAM, perlu ada intervensi dari Pemerintah Daerah Kota Cirebon untuk memberikan bantuan air minum melalui kendaraan distribusi PDAM melalui program Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program ini ditujukan bagi masyarakat yang memerlukan air dengan pendapatan rendah.

Pengujian laboratorium untuk kualitas udara hasil pengukuran beberapa titik pengamatan berdasarkan kualitas udara ambien pada wilayah pemukiman, perkantoran, kawasan industri dan area transportasi di Kota Cirebon. Kandungan NO₂ terkecil di kawasan pemukiman sedangkan kandungan terbesar di area perkantoran dan area transportasi. Kandungan SO₂ terkecil di wilayah perkantoran, sedangkan kandungan terbesar di kawasan industri.

Tutupan hutan di Kota Cirebon terbagi menjadi beberapa kategori, pertama hutan lahan kering primer, ke-dua hutan lahan kering sekunder, ke-tiga hutan mangrove primer, ke-empat hutan mangrove sekunder, ke-lima hutan rawa primer, ke-enam hutan rawa sekunder, ke-tujuh hutan tanaman, ke-delapan semak/belukar, ke-sembilan semak/belukar rawa, dan ke-sepuluh ruang terbuka hijau. Terjadinya alih fungsi lahan di Kota Cirebon yang menjadi salah satu penyebab terjadinya penurunan nilai IKTL yang merupakan bagian dari parameter pengukuran IKTL.



F. Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kemajuan kinerja urusan kependudukan dan catatan sipil dapat dilihat dari perkembangan pencatatan administrasi kependudukan sebagai bentuk tertib administrasi kependudukan. Salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari jumlah penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk berupa KTP, KK, dan dokumen pencatatan sipil berupa akte kelahiran, akte kematian, serta dan akte nikah. Rasio kepemilikan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, maupun akte nikah menggambarkan tingkat kesadaran masyarakat Kota Cirebon mengenai identitas diri/administrasi kependudukan.

Tabel II-59 Administrasi Kependudukan di Kota Cirebon

Kependudukan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk	343.003	343667	346438	352347	356629
Jumlah Kepala Keluarga (KK)	109.570	110.874	112.100	115.372	117.801
Jumlah Kartu Keluarga	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
Jumlah wajib KTP (orang)	244.190	248.304	248.496	259.685	258.339
Jumlah penduduk belum memiliki KTP (orang)	3.586	3.518	3.686	92.662	1.886
Jumlah penduduk berakta kelahiran (orang)	108.983	110.874	113.421	115.372	180.945
Rasio bayi berakta kelahiran (%)	42,52	48,82	48,31	50,09	51,02
Persentase penerbitan akta kematian (%)	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

Sumber: Open Data Kota Cirebon, 2025

G. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

G.1 Persentase PKK Aktif

Pemberdayaan masyarakat dan desa dapat mewujudkan kemandirian dan keswadayaan masyarakat dan desa yang terlihat dari meningkatnya kapasitas dan kualitas masyarakat dan desa dalam tata Kelola pembangunan di desa, meningkatnya kualitas sumber daya manusia juga diimbangi dengan meningkatnya kapasitas dan kualitas kelembagaan-kelembagaan kemasyarakatan di tingkat desa. Dengan meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM dan kelembagaan, maka keswadayaan pembangunan di desa diharapkan semakin meningkat. Persentase PKK Aktif pada tahun 2020 dan tahun 2021 sebesar 100%.

G.2 Persentase Ormas/LSM Aktif

Pada tahun 2015 jumlah Ormas/LSM di Kota Cirebon sebanyak 75 lembaga dan pada tahun 2019 jumlah Ormas/LSM menurun menjadi 20 lembaga, dengan tingkat keaktifan mencapai 100,00%. Sedangkan pada tahun 2021 menjadi 124.

H. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

H.1 Pencapaian Peserta KB Baru

Peserta KB mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk ber-KB guna menciptakan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Penggunaan KB di Kota Cirebon didominasi oleh penggunaan hormonal.

Pada tahun 2021, untuk KB non hormonal, metode yang paling banyak digunakan adalah Metode Operasi Wanita (MOW) atau tubektomi/steril dengan jumlah peserta sebanyak 727 orang. Sedangkan untuk KB yang



bersifat hormonal, metode yang paling banyak digunakan adalah metode suntik dengan jumlah peserta sebanyak 2.343 orang pada tahun 2021.

H.2 Rasio Akseptor Keluarga Berencana

Tabel berikut menjelaskan bahwa partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) dalam ber-KB sudah cukup tinggi. Pencapaian kinerja ini tetap membutuhkan upaya lebih keras lagi untuk meningkatkan partisipasi PUS dalam ber-KB, terutama dalam upaya menekan LPP dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

H.3 Pencapaian Peserta KB Aktif

Pencapaian peserta KB aktif tertinggi dicapai pada tahun 2021 sebesar 64,59%. Meningkatnya pencapaian peserta KB aktif dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain semakin gencar dan efektifnya kegiatan penyuluhan untuk terus memotivasi PUS dalam ber-KB sehingga menumbuhkan kesadaran dalam ber-KB.

Tabel II-60 Pencapaian Peserta KB Aktif di Kota Cirebon

No.	Mix Kontrasepsi	2020	2021
1.	IUD	3.276	3.156
2.	MOW	1.970	1.783
3.	MOP	28	27
4.	Kondom	414	392
	Non Hormonal	5.966	5.688
5.	Implant	1.336	1.287
6.	Suntik	15.388	15.036
7.	PIL	2.819	2.696
	Hormonal	19.982	19.543
	Total	25.948	25.231
	Jumlah PUS	40.943	39.248
	Capaian (%)	63,38	64,29

Sumber: DP3APPKB Kota Cirebon, 2022

H.4 Pencapaian Peserta KB Aktif Menurut Tahapan Keluarga Sejahtera

Pada tahun 2020 cakupan peserta KB aktif dari Pra KS dan KS 1 13,06% dan pada akhirnya semakin menurun di tahun 2021 menjadi 12,71% dari total jumlah keluarga di Kota Cirebon. Perkembangan cakupan peserta KB aktif menurut tahapan keluarga disajikan pada tabel berikut:

Tabel II-61 Cakupan Peserta KB Aktif Menurut Tahapan Keluarga di Kota Cirebon

No.	Mix Kontrasepsi	2020	2021
1.	IUD	981	980
2.	MOW	867	779
3.	MOP	18	17
4.	Kondom	133	129
	Non Hormonal	2.040	1.999
5.	Implant	693	675
6.	Suntik	7.205	7.110
7.	Pil	1.188	1.153
	Hormonal	9.082	9.086
	T o t a l	11,122	11,085
	Jumlah Keluarga	84.292	84.892



No.	Mix Kontrasepsi	2020	2021
	Persentase	13,19	13,06

Sumber: DP3APPKB Kota Cirebon, 2022

H.5 Pembinaan PUP/Kesehatan Reproduksi Remaja

Kelompok remaja dapat dijadikan wahana untuk terus memberikan pengertian dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi remaja, sehingga sejak dini remaja sudah mendapatkan pemahaman yang benar terkait berbagai hal, diantaranya bahayanya perkawinan usia dini, pergaulan bebas yang berakibat hamil di luar nikah, dan sebagainya.

Tabel II-62 Jumlah Kelompok Kesehatan Reproduksi Remaja

No	Uraian	2020	2021
1.	Jumlah PIK R/M Tumbuh	22	22
2.	Jumlah PIK R/M Tegak	0	0
3.	Jumlah PIK R/M Tegar	0	0
	Jumlah	21	22

Sumber: DP3APPKB Kota Cirebon, 2022

H.6 Cakupan Remaja/Mahasiswa Dalam Pusat Informasi Dan Konseling

Keberadaan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) remaja/mahasiswa di setiap kecamatan perlu terus dikembangkan baik jumlah maupun kualitasnya, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Dengan adanya PIK di setiap Kecamatan, secara dini remaja dapat memperoleh informasi terkait kesehatan reproduksi dan pembangunan keluarga sejahtera

Tabel II-63 Cakupan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa

No.	Uraian	2020	2021
1.	Jumlah PIK R/M	22	22
2.	Jumlah kecamatan	5	5
3.	Cakupan	4,40	4,40

Sumber: DP3APPKB Kota Cirebon, 2022

I. Perhubungan

Pertumbuhan sektor transportasi akan LPE secara langsung, sehingga transportasi mempunyai peranan yang penting dan strategis, baik secara makro maupun mikro. Keberhasilan sektor transportasi secara makro dapat terlihat dari sumbangan nilai tambahnya dalam pembentukan PDRB, dampak ganda (*multiplier effect*) yang ditimbulkannya terhadap pertumbuhan sektor-sektor lain dan kemampuannya meredam laju inflasi melalui kelancaran distribusi barang dan jasa. Oleh karenanya ketersediaan infrastruktur transportasi yang handal dan memadai merupakan hal yang sangat penting untuk diupayakan guna meningkatkan perekonomian masyarakat.

Tabel II-64 Gambaran Perhubungan Kota Cirebon

No	Uraian	Satuan	2020	2021
1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	-	-
2.	Rasio ijin trayek	Nilai	90	-
3.	Jumlah uji KIR angkutan umum	Kendaraan	9935	9049
4.	Jumlah Pelabuhan Laut	Unit	2	2
5.	Jumlah Pelabuhan Udara	Unit	1	1
6.	Jumlah Pelabuhan Terminal Bis	Unit	1	1
7.	Persentase layanan angkutan darat	Persen	100	100
8.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	Persen	100	100



Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2026

No	Uraian	Satuan	2020	2021
9.	Pemasangan Rambu-rambu	Persen	87	91
10.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Nilai	-	-
11.	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	Orang	-	-
12.	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	Kg	-	-
13.	Jumlah orang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	Orang	119074	-
14.	Jumlah barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	Kg	-	-

Sumber: Dishub Kota Cirebon 2021

I.1 Jumlah Terminal, Bandara Dan Pelabuhan

Sebagai daerah yang sedang berkembang dan telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Jawa Barat bagian timur, Kota Cirebon telah dilengkapi dengan sarana perhubungan yang baik, yaitu 1 (satu) terminal, 1 (satu) bandara, 1 (satu) pelabuhan laut dan 2 (dua) stasiun kereta api.

Transportasi baik darat (terminal, stasiun Kereta Api), Bandara Cakrabhuana Penggung dan pelabuhan laut. Sebagai daerah transit kendaraan bus antar provinsi (AKAP) dan bus antar kabupaten/kota di wilayah Ciayumajakuning, Kota Cirebon dilengkapi dengan sebuah terminal bus Harjamukti, dimana pada akhir tahun 2019 pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Selain itu terdapat pula terminal elf yang menghubungkan antara Kota Cirebon dengan kabupaten sekitar. Moda transportasi darat lainnya di Kota Cirebon yaitu Kereta Api melalui Stasiun Kejaksaan dan Stasiun Parujakan yang menghubungkan Cirebon ke arah Barat, Timur dan Selatan Jawa.

I.2 Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Kota

Cakupan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Ketersediaan fasilitas transportasi sangat penting dalam upaya menciptakan kawasan tertib berlalu lintas yang harus dipatuhi oleh setiap pengguna, sehingga diharapkan dapat mengurangi pelanggaran berlalu lintas dan mengurangi angka kecelakaan.

Tabel II-65 Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Kota Cirebon

Uraian	Satuan	2021	2022	2023	2024	Keterangan
						1. Pelayanan Transportasi
1.1 Fasilitas Pendukung Keselamatan (Pengujian, dll.)	Unit	1	1	1	1	
						2. Fasilitas Perlengkapan Jalan (halte, trotoar)
2.1 Jalur Sepeda	Unit	1	1	1	1	Jl. Siliwangi
2.2 Tempat Penyeberangan Pejalan Kaki (JPO)	Lokasi	-	-	-	-	
2.3 Tempat Penyeberangan Pejalan Kaki (Zebra Cross)	Lokasi	45	45	45	45	Persimpangan Traffic Light
2.4 ZOSS	Lokasi	7	7	7	7	Jl. Pemuda, Jl. Kartini, Jl. Siliwangi, Jl. Pilang, Jl. Veteran, Jl. Majasem
2.5 Marka jalan lain	Segmen	18	18	18	18	m ²
2.6 Halte	Unit	20	23	23	23	
2.7 Perambuan	Unit	1,034	1008	1007	1007	
2.8 Jaringan Pelayanan Angkutan	Unit	10	10	9	7	trayek
2.9 RPPJ	Unit	78	78	50	50	



Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2026

Uraian	Satuan	2021	2022	2023	2024	Keterangan
2.10 Pagar Pengaman	Unit	1	1	1	1	Tikungan Samadikun
2.11 Traffic Light	Unit	31	31	31	31	Jl. Provinsi, Kota, Nasional
2.12 Warning Light	Unit	27	27	27	27	Jl. Provinsi, Kota, Nasional
2.13 ATCS	Unit	9	11	11	11	CCTV
2.14 Pelayanan Angkutan	Unit	979	499	261	241	Angkutan
2.15 Penerangan Jalan Lingkungan	Titik	8,044	8044	8044	8054	

Sumber: Open Data Kota Cirebon 2025

I.3 Jumlah Kendaraan Bermotor

Tabel berikut menggambarkan perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Kota Cirebon yang berkontribusi terhadap pendapatan dari pajak kendaraan kepada Kota Cirebon.

Tabel II-66 Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Cirebon Menurut Jenisnya

No.	Jenis Kendaraan	2021	2022	2023	2024
1.	Mobil Penumpang	29.501	29.964	30.460	30.541
2.	Bus	415	411	418	434
3.	Truk	12.540	12.426	12.363	12.076
4.	Sepeda Motor	130.628	130.009	130.647	130.179

Sumber: Open Data Data 2025

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah kendaraan bermotor roda dua di Kota Cirebon mendominasi dengan jumlah terbesar yang disusul oleh mobil penumpang dan jumlah bus adalah yang terkecil.

I.4 Pemeriksaan Kelayakan Kendaraan Angkutan Umum Di Pengujian Kendaraan Bermotor

Dalam upaya mengawasi dan memastikan kelayakan angkutan umum dan angkutan barang laik jalan, maka dilakukan pengujian kendaraan bermotor setiap 6 (enam) bulan sekali oleh UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor. Pemeriksaan dimaksudkan untuk memeriksa emisi gas buang (*smoke tester/COHC*) dan kebisingan (*noise tester*) yang merupakan salah satu laik jalan kendaraan bermotor.

J. Komunikasi Dan Informatika

Ketersediaan dan keterbukaan informasi menjadi syarat mutlak pelaksanaan pemerintahan yang baik. Dengan keterbukaan informasi masyarakat bisa dengan mudah mengakses kebutuhan akan informasi yang dinyatakan dengan . Jaminan akan keterbukaan informasi semakin dikuatkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam UU tersebut dengan tegas disebutkan bahwa semua orang mempunyai hak untuk mengakses dan mendapatkan informasi publik yang tidak dikecualikan. Untuk mengawal pelaksanaan UU tersebut, maka pemerintah pusat sampai daerah diperlukan Komisi Informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dibantu Sekretaris Perangkat Daerah di Kota Cirebon.

Tuntutan pelayanan bidang komunikasi dan Informasi semakin meningkat seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi komunikasi dan informasi yang ada. Semakin meningkatnya kemampuan masyarakat luas dalam penguasaan teknologi komunikasi dan informasi harus diimbangi oleh pemerintah daerah sebagai aktor utama pelaksana pembangunan. Untuk



memudahkan komunikasi antar pemerintah dengan masyarakat Kota Cirebon telah memiliki *website* resmi yang dikelola oleh pemerintah daerah.

J.1 Ketersediaan Website Milik Pemerintah Daerah

Sarana/prasarana komunikasi dan informatika saat ini telah berkembang dengan pesat dan telah merevolusi cara hidup manusia, baik cara berkomunikasi, cara belajar, cara bekerja, cara berbisnis dan lain sebagainya. Dengan teknologi komunikasi dan informasi segala aktivitas manusia dapat dilakukan melalui cara baru, inovatif, instan, transparan, akurat, tepat waktu, dan efektif. Selain itu, semua proses pelaksanaan kegiatan serta konten dapat ditransformasikan dari fisik dan statis menjadi *digital, mobile, virtual* serta personal, dengan demikian kinerja lebih cepat dan meningkat.

Teknologi informasi dapat digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

J.2 Penerapan Kota Cerdas (*Smart City*)

Smart city adalah konsep tata kelola kota yang disusun secara cerdas untuk menyelesaikan setiap persoalan atau masalah yang dihadapi masyarakat. Hal tersebut dilakukan melalui pengelolaan sumber daya dan komunitas yang ada, yang diwujudkan dalam strategi penyelesaian masalah, pelayanan publik dan penciptaan situasi dan kondisi kota yang sejahtera dan nyaman. Elemen-elemen *Smart City* terdiri dari *Smart Governance, Smart Branding, Smart Ekonomi, Smart Living, Smart Society dan Smart Environment*.

Dalam upaya menuju Cirebon *Smart City*, Pemerintah Daerah Kota Cirebon telah mengembangkan beberapa aplikasi untuk mewujudkan Kota Cirebon sebagai *Smart City* walaupun belum digunakan secara optimal.

K. Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

K.1 Persentase Koperasi Aktif

Jumlah Koperasi aktif di Kota Cirebon tahun 2019 sebanyak 247 unit koperasi dengan anggota aktif sebanyak 36.899 orang. Angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 240 unit koperasi aktif dengan jumlah anggota sebanyak 36.899 orang.

Tabel II-67 Persentase Koperasi Aktif di Kota Cirebon

Uraian	Jumlah Koperasi Produksi	Jumlah Koperasi Konsumsi	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam	Jumlah Koperasi Serba Usaha
1. Jumlah Dibantu Pemerintah				
1.1 Jumlah Koperasi Aktif				
1.1.1 Kejaksan	0	0	0	0
1.1.2 Lemahwungkuk	0	0	0	0
1.1.3 Harjamukti	0	0	0	0
1.1.4 Pekalipan	0	0	0	0
1.1.5 Kesambi	0	0	0	0
1.2 Jumlah Koperasi Tidak Aktif				



Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2026

Uraian	Jumlah Koperasi Produksi	Jumlah Koperasi Konsumsi	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam	Jumlah Koperasi Serba Usaha
1.2.1 Kejaksan	0	0	0	0
1.2.2 Lemahwungkuk	0	0	0	0
1.2.3 Harjamukti	0	0	0	0
1.2.4 Pekalipan	0	0	0	0
1.2.5 Kesambi	0	0	0	0
2. Jumlah Kepemilikan Mandiri				
2.1 Jumlah Koperasi Aktif	7	224	25	224
2.1.1 Kejaksan	1	60	6	60
2.1.2 Lemahwungkuk	2	36	4	36
2.1.3 Harjamukti	2	43	4	43
2.1.4 Pekalipan	1	8	3	8
2.1.5 Kesambi	1	77	8	77
2.2 Jumlah Koperasi Tidak Aktif	5	131	2	131
2.2.1 Kejaksan	1	12	0	12
2.2.2 Lemahwungkuk	0	27	1	27
2.2.3 Harjamukti	3	41	1	41
2.2.4 Pekalipan	1	8	0	8
2.2.5 Kesambi	0	43	0	43

Sumber: Open Data Kota Cirebon, 2021

K.2 Usaha Mikro Dan Kecil

Usaha mikro kecil dan menengah merupakan jenis usaha yang cukup menggeliat akhir-akhir ini. Dukungan pemerintah pada usaha ini juga cukup besar. Usaha mikro dan menengah (UMKM) merupakan “Kegiatan ekonomi kerakyatan yang berskala kecil, dengan bidang yang mayoritas dalam skala kecil, sehingga perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan yang tidak sehat”. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya UMKM adalah usaha kecil yang dimiliki oleh perseorangan atau kelompok perorangan.

Tabel II-68 Jumlah Usaha Mikro dan Kecil di Kota Cirebon

No	Uraian	Bidang Kuliner	Bidang Fashion	Bidang Pendidikan	Bidang Otomotif	Bidang Agrobisnis	Bidang Teknologi Internet	Bidang Lainnya
A. Jumlah Usaha Mikro								
1.	Kejaksan	511	4	0	0	0	0	71
2.	Lemahwungkuk	190	4	0	0	1	2	48
3.	Harjamukti	291	42	0	0	10	6	199
4.	Pekalipan	137	7	0	0	5	2	117
5.	Kesambi	182	13	0	0	1	1	194
B. Jumlah Usaha Kecil								
1.	Kejaksan	0	0	0	0	0	0	0
2.	Lemahwungkuk	0	0	0	0	0	0	0
3.	Harjamukti	0	0	0	0	0	0	0
4.	Pekalipan	0	0	0	0	0	0	0
5.	Kesambi	0	0	0	0	0	0	0
C. Jumlah Usaha Menengah								
1.	Kejaksan	0	0	0	0	0	0	0
2.	Lemahwungkuk	0	0	0	0	0	0	0
3.	Harjamukti	0	0	0	0	0	0	0
4.	Pekalipan	0	0	0	0	0	0	0
5.	Kesambi	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: Open Data Kota Cirebon, 2021

L. Penanaman Modal

Nilai investasi yang masuk di Kota Cirebon hingga tahun 2021 mengalami perkembangan yang fluktuatif, hal ini menunjukkan bahwa iklim investasi di Kota Cirebon belum stabil.



Pada tahun 2021 jumlah investor (PMDN)/PMA) yang ada di Kota Cirebon melalui pelayanan PMPTSP sebanyak 3.836 investor (11 PMA dan 3.825 PMDN). Berkembangnya jumlah investor akan berbanding lurus dengan peningkatan investasi. Nilai investasi tahun 2021 meningkat menjadi Rp.5.419.419.000.000 meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp.454.970.000.000, sedangkan Jumlah nilai investasi berskala internasional mencapai Rp.109.367.000.000

M. Kepemudaan Dan Olahraga

Gambaran kinerja kepemudaan dan olahraga dapat dilihat dari jumlah pemuda yang mendapat latihan kepemimpinan, pelatihan kewirausahaan, jumlah atlet yang dibina per tahun dari 12 cabang olahraga, dan kelompok olahraga yang berkembang di masyarakat.

Berdasarkan data di atas, Jumlah terbanyak pemuda yang mendapat pelatihan kepemimpinan terjadi pada tahun 2020 yaitu sebanyak 32 orang, namun pada tahun selanjutnya mengalami stagnasi tetap 32 orang. Begitu juga pada kategori pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan terjadi pada tahun 2020 sebanyak 30 orang. pada tahun 2021 mengalami stagnasi tetap jadi 30 orang.

Pada bidang olahraga, Kota Cirebon memiliki 34 Cabang olahraga, detailnya pada tabel di bawah ini.

Tabel II-69 Jumlah Kelompok Olahraga per Cabang Olahraga di Kota Cirebon

No.	Cabang Olahraga	2020	2021
1.	Bola Voli	5	5
2.	Bola Basket	10	11
3.	Sepak Bola	12	12
4.	Futsal	15	15
5.	Sepak Takraw	1	1
6.	Tenis	3	3
7.	Tenis Meja	8	8
8.	Bulu Tangkis	5	5
9.	Billiard	6	6
10.	Bowling	1	1
11.	Renang	10	10
12.	Tinju/Beladiri	2	2
13.	Sepeda	5	5
14.	Binaraga	1	1
15.	Panahan	5	5
16.	Gulat	5	5
17.	Soft Ball	6	6
18.	Base Ball	2	2
19.	Tarung Derajat	1	1
20.	Judo	1	1
21.	Taekwondo	6	6
22.	Pencak Silat	20	20
23.	Olahraga Tradisional	1	1
24.	Aeromodelling	1	1
25.	Selam	1	1
26.	Atletik	2	2
27.	Senam	2	2
28.	Catur	7	7
29.	Panjat Tebing	2	2
30.	Muangthai	1	1
31.	IMI	1	1
32.	Drumband	5	5
33.	Persirosi (Sepatu)	1	1



No.	Cabang Olahraga	2020	2021
	Roda)		
34.	Golf	1	1

Sumber: Open Data Kota Cirebon, 2021

N. Kebudayaan

Pemerintah Daerah Kota Cirebon terus berupaya mewujudkan pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan daerah untuk tetap hidup dan tumbuh di tengah arus globalisasi. Upaya yang dilakukan menginventarisir budaya-budaya Cirebon dengan menyelenggarakan event-event budaya Cirebon sebagai ajang promosi untuk memperkenalkan kebudayaan Cirebon di tingkat Regional, Nasional dan Internasional. Ajang Promosi yang dilakukan adalah penampilan kesenian, festival budaya, event budaya dan pawai budaya. Pemerintah Daerah juga melakukan pendataan benda, situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan.

Tabel II-70 Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya di Kota Cirebon

Jenis Cagar Budaya		2020	2021	2022	2023	2024
Milik Pemerintah Daerah	Bangunan cagar budaya	34	45	45	28	28
	Benda cagar budaya	0	279	279	279	279
	Kawasan cagar budaya	0	6	0	2	2
	Situs cagar budaya	0	6	6	27	27
	Struktur cagar budaya	1	22	22	1	1
Milik Swasta	Bangunan cagar budaya	41	1	1	30	30
	Benda cagar budaya	279	30	30	30	30
	Kawasan cagar budaya	5	0	6	4	4
	Situs cagar budaya	9	0	0	1	1
	Struktur cagar budaya	14	0	0	0	0

Sumber: Open Data Kota Cirebon, 2025

Sektor Seni dan Budaya sangat berpotensi untuk meningkatkan daya Tarik wisata terutama di bidang kebudayaan. Berkaitan dengan Kegiatan Kebudayaan di Kota Cirebon, Jumlah Gedung Kesenian terdapat 1 unit, dengan 197 Sanggar Seni pada tahun 2021, sedangkan Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya 1 kali dalam setahun.

O. Statistik

Indikator kinerja urusan statistik dapat dilihat dari ketersediaan data dan informasi pembangunan yang diperlukan untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah berbasis data dan informasi.

Tabel II-71 Ketersediaan Data Kebutuhan Perencanaan Pembangunan di Kota Cirebon

No.	Uraian	2020	2021
1.	Buku Kota Cirebon Dalam Angka	Ada	Ada
2.	Buku Profil Kota Cirebon	Ada	Ada
3.	Buku Statistik Daerah Kota Cirebon	Ada	Ada
4.	Buku PDRB Kota Cirebon	Ada	Ada
5.	Buku IPM Kota Cirebon	Ada	Ada
6.	Buku Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender Kota Cirebon	Tidak ada	Tidak ada
7.	Buku Indeks Kebahagiaan Penduduk Kota Cirebon	Tidak Ada	Tidak Ada
8.	Data Kemiskinan Kota Cirebon	Ada	Ada
9.	Buku Indikator Makro Kota Cirebon	Ada	Ada
10.	Buku Profil Kesehatan Kota Cirebon	Ada	Ada
11.	Buku Profil Pendidikan Kota Cirebon	Ada	Ada
12.	Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Cirebon	Ada	Ada
13.	Buku Perencanaan Tenaga Kerja Daerah Kota	Ada	Ada



	Cirebon		
--	---------	--	--

Sumber: Berbagai Perangkat Daerah Kota Cirebon, 2021

P. Perpustakaan

P.1 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Pemerintah Daerah Kota Cirebon memiliki 1 (satu) Perpustakaan Daerah sebagai sarana tempat belajar bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum.

Tabel II-72 Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kota Cirebon

No	Kategori Pengunjung Perpustakaan	2020	2021
1.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Umum (orang)	71.749	6.612
2.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Khusus (orang)	250	1.451
3.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Sekolah (orang)	91.500	n.a
4.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Perguruan Tinggi (orang)	10.950	n.a
5.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (orang)	174.449	8.063

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon, 2022

jumlah pengunjung perpustakaan mengalami penurunan pada masa pandemi Covid-19 karena terjadi pembatasan pergerakan masyarakat.

Faktor yang turut mendorong meningkatnya minat baca masyarakat adalah gencarnya pembentukan kelompok-kelompok “Literasi” di masyarakat, sehingga terbentuk komunitas “*Gelem Maca*” di Kota Cirebon. Bahkan Wakil Wali Kota Cirebon telah diangkat dan ditetapkan sebagai “Bunda Literasi”.

Q. Kearsipan

Dalam upaya penataan dan pengelolaan arsip secara baku dan profesional, Pemerintah Daerah Kota Cirebon melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan hasil sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel II-73 Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku di Kota Cirebon

No	Uraian	2020	2021
1.	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku (PD)	18	18
2.	Jumlah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon (PD)	31	32
3.	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku (%)	58,06	56,25
4.	Jumlah arsip vital dan arsip statis	12.894	15.657

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon, 2022

2.1.3.3 Layanan Urusan Pilihan

A. Kelautan Dan Perikanan

Pola pengembangan perikanan di Kota Cirebon adalah perikanan darat dan perikanan laut. Keberadaan Rumah Tangga Perikanan dengan berbagai investasinya di Kota Cirebon merupakan potensi sumberdaya perikanan yang sangat dominan dan sebagai penentu dalam pelaksanaan program pengembangan usaha produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya. Pemerintah Daerah Kota Cirebon senantiasa menjaga stabilitas, tekad, gairah dan semangat untuk berusaha, serta keterampilan penerapan



teknologi rumah tangga yang ada dan pengembangannya bagi nelayan dan keluarganya.

Tabel II-74 Produksi Perikanan di Kota Cirebon

No.	Tahun	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum (Ton)	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)
1.	2015	4.216,18	0	323,18
2.	2016	2.477,41	0	355,86
3.	2017	5.172,00	0	316,68
4.	2018	3.397	0	162
5.	2019	6.821	0	180,29
6.	2020	6.003,475	0	206

Sumber: Open Data Kota Cirebon, 2021

B. Pariwisata

B.1 Kunjungan Wisata

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan daerah dari sektor pariwisata adalah jumlah kunjungan wisatawan. Kota Cirebon sebagai kota yang memiliki keanekaragaman budaya mempunyai kesempatan untuk menjual atraksi budayanya kepada wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun nusantara. Tinggi rendahnya kunjungan wisatawan ke suatu daerah akan mendatangkan penerimaan bagi daerah yang dikunjunginya, tidak hanya bagi Pemerintah Daerah, tetapi juga bagi kehidupan ekonomi masyarakat di sekitar lokasi wisata.

Dengan adanya wabah pandemi Covid-19 yang melanda seluruh Indonesia, termasuk Kota Cirebon memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor perekonomian, termasuk kunjungan wisatawan ke Kota Cirebon mengalami penurunan drastis. Berdasarkan data yang ada, dari target yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Cirebon tahun 2018-2023 sebanyak 2,1 juta kunjungan wisatawan pada tahun 2020, and terealisasi sebesar 46,57%. Penurunan jumlah kunjungan wisatawan ini di luar prediksi, mengingat dalam masa pandemi Covid-19 telah diberlakukan pembatasan-pembatasan pergerakan dan mobilitas penduduk untuk memutus rantai penyebaran dan penularan virus Covid-19.

Tabel II-75 Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara di Kota Cirebon

No.	Indikator	2020	2021
1.	Jumlah Wisatawan Domestik	970.585	3.611.069
2.	Jumlah Wisatawan Mancanegara	51.585	58.126
	T o t a l	1.022.170	3.669.195

Sumber: BPS Kota Cirebon, 2021

B.2 Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB

Kedatangan wisatawan mancanegara maupun domestik pada suatu objek wisata akan meningkatkan pendapatan daerah. Konsumsi wisatawan cenderung akan meningkatkan output barang dan upah di sektor yang menjual barang maupun jasa kepada wisatawan. Konsumsi wisatawan akan menciptakan permintaan baik barang maupun jasa yang pada akhirnya akan menimbulkan kegiatan produksi baik barang maupun jasa yang secara



otomatis akan memberikan nilai tambah kepada pendapatan regional khususnya PDRB di suatu daerah.

Kota Cirebon memiliki destinasi wisata yang cukup terkenal, terutama dengan adanya Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, Keraton Kacirebonan, Keraton Kaprabonan, Situs Gua Sunyaragi, dan lain-lain. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Cirebon. Salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan melakukan event-event, promosi wisata, penyediaan sarana dan prasarana wisata, sehingga wisatawan dapat lebih mengenal objek wisata yang ada di Kota Cirebon dan tertarik untuk berkunjung.

Dengan terus meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Cirebon tersebut, sudah barang tentu akan membawa dampak yang positif terhadap perekonomian Kota Cirebon seperti yang ditunjukkan kontribusi sektor wisata yang selalu meningkat setiap tahunnya. Untuk itu, bagi pengambil kebijakan dan para pelaku penyedia jasa pariwisata baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun swasta harus tetap bisa menjalankan fungsinya masing-masing, agar setiap wisatawan yang datang ke Kota Cirebon tetap merasa nyaman.

C. Pertanian

Kota Cirebon sebagai salah satu kota dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat yang mengalami LPE dan LPP karena migrasi yang cukup cepat. Pertumbuhan ini mengakibatkan luas lahan produktif pertanian setiap tahunnya menurun. Penurunan ini disebabkan beralih fungsinya lahan sawah menjadi daerah pemukiman dan lahan usaha. Meskipun demikian, adanya teknologi pertanian yang lebih maju seperti dalam bibit unggul dan pupuk menyebabkan produksi pertanian tetap meningkat meskipun luas lahan pertanian berkurang.

Meskipun Kota Cirebon telah memfokuskan pengembangan perekonomian di sektor perdagangan dan jasa, namun pengembangan di sektor pertanian masih terus dilakukan. Karena beberapa wilayah di Kota Cirebon masih dimungkinkan untuk mengembangkan sektor pertanian.

D. Energi Dan Sumber Daya Mineral

D.1 Rumah Tangga Pengguna Listrik

Sebagai sumber penerangan dan energi di sektor rumah tangga, bisnis dan industri, listrik memegang peranan yang sangat vital. Tahun 2020 pelanggan rumah tangga mendominasi sebagai pengguna energi listrik terbesar dengan jumlah 105.349 Pelanggan. Daya terpasang untuk mencukupi kebutuhan masyarakat terhadap listrik sebesar 125,42 MW yang kemudian terjual sebesar 157.305,14 MWh dengan anggaran sebesar 114.507,31 M.

D.2 Pelanggan Gas Kota Cirebon

Jumlah pelanggan gas di Kota Cirebon tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 rumah tangga



pengguna gas alam sebanyak 15.957 pelanggan meningkat di tahun 2020 menjadi 28.968 pelanggan. Pada tahun 2019 Pemerintah telah membangun jaringan gas untuk 3.503 sambungan rumah (SR) di wilayah Kecamatan Harjamukti, yaitu di wilayah Suket Duwur, Surapandan, Kedung Krisik serta penetrasi di Kelurahan Argasunya, Kalijaga dan Harjamukti, sehingga sampai dengan akhir tahun 2020 rumah tangga pelanggan gas sudah mencapai 28.968 rumah tangga. Peningkatan tersebut sejalan dengan program pemerintah meningkatkan penyaluran pemanfaatan gas bumi untuk rumah tangga.

E. Perdagangan

Dalam menghadapi era globalisasi perdagangan bebas, kemandirian daerah dalam mengelola pembangunan perlu mendapat perhatian. Dalam teori basis ekonomi (*Economics Bases Theory*) mendasarkan pandangannya bahwa LPE suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Ekspor non migas merupakan penyumbang devisa dan telah membawa dampak kemajuan daerah terutama tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan data dari Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Cirebon, nilai ekspor non migas Kota Cirebon pada tahun 2018 mencapai Rp139.328.550.000,00 dan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi Rp117.617.868.394,00. Ekspor yang terbanyak ke Negara tujuan Jepang, USA, China dan komoditi masih didominasi Rotan, Kayu dan *handicraft*. Tahun 2020 sebesar 118,781,778,306, sedangkan di Tahun 2021 sebesar 25,062,934,785.

Sedangkan dari sisi kontribusi terhadap perekonomian, urusan sektor perdagangan terhadap perekonomian di Kota Cirebon cukup signifikan. Sektor perdagangan bersama dengan sektor transportasi dan pergudangan, sektor industri pengolahan, konstruksi, dan jasa keuangan merupakan sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian di Kota Cirebon. Meskipun demikian, kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian Kota Cirebon dalam lima tahun terakhir kondisinya semakin menurun. Pada tahun 2015 kontribusi sektor perdagangan mencapai 31,84% dari total PDRB, namun pada tahun 2020 kontribusinya turun menjadi 29,73%.

Selain penyediaan pasar, untuk mendukung sektor perdagangan, juga dilakukan penataan terhadap kawasan perdagangan kaki lima dan pembinaan terhadap para pedagang. Jumlah kawasan perdagangan kaki lima yang ditata sebanyak 2 (dua) lokasi. Sedangkan pembinaan terhadap pedagang dilakukan kepada pedagang formal dan informal.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka menjaga kondusifitas sektor perdagangan adalah dengan melakukan pengawasan terhadap pasar; pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan; pemantauan ketersediaan harga, pasokan, akses pangan dikumpulkan secara rutin; dan upaya perlindungan terhadap konsumen.

F. Perindustrian

PDRB menggambarkan tingkat kegiatan perekonomian suatu daerah baik yang dilakukan oleh masyarakat, swasta maupun pemerintah dalam



suatu periode tertentu (biasanya satu tahun). Seluruh hasil produksi atau output yang diciptakan oleh suatu daerah tercatat dalam PDRB, sehingga secara tidak langsung dapat digunakan sebagai indikator menilai hasil kegiatan pembangunan daerah. Dari hasil PDRB dapat dilihat perkembangan sektor yang menjadi komponen struktur ekonomi.

Perkembangan industrialisasi di Kota Cirebon didominasi oleh industri pengolahan (makanan olahan). Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa kontribusi sektor industri Kota Cirebon mulai periode tahun 2015 sampai 2020 terhadap PDRB mengalami perlambatan dari 10,55% menjadi 10,21% di tahun 2020.

2.1.3.4 *Unsur Pendukung Pemerintahan*

A. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kota Cirebon merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang termasuk pada kelompok urusan penunjang pemerintahan. Sekretariat Daerah memiliki fungsi penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah daerah, pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk menjalankan tugas tersebut, Sekretariat Daerah Kota Cirebon didukung oleh 9 bagian, yang meliputi: 1) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, 2) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, 3) Bagian Hukum dan Hak Azasi manusia, 4) Bagian Administrasi Pembangunan, 5) Bagian Administrasi Perekonomian, 6) Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa, 7) Bagian Umum, 8) Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Daerah, dan 9) Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

Dari beberapa indikator yang ditetapkan, dapat diketahui bahwa perkembangannya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Walaupun nilai AKIP Kota Cirebon pada tahun 2017 sudah mendapatkan nilai BB namun masih perlu terus ditingkatkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

2.1.3.5 *Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

A. Perencanaan

Seluruh dokumen perencanaan di Kota Cirebon tergambar secara rinci dalam tabel berikut.

Tabel II-76 Regulasi Dokumen Perencanaan Daerah Kota Cirebon

No.	Jenis Dokumen Perencanaan	Penetapan	
		Peraturan Daerah	Peraturan Wali Kota
1.	a. RPJPD Kota Cirebon 2002-2023	Perda Nomor 9 Tahun 2008	-
	b. RPJPD Kota Cirebon 2025-2045	Perda Nomor 8 Tahun 2024	-
2.	a. RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023	Perda Nomor 7 Tahun 2021	-
	b. RPJMD P Kota Cirebon Tahun	Perda Nomor 5 Tahun	-



Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2026

No.	Jenis Dokumen Perencanaan	Penetapan	
		Peraturan Daerah	Peraturan Wali Kota
	2018-2023	2019	
	c. RPD Kota Cirebon Tahun 2024-2026	Perwal Nomor 44 Tahun 2023	-
3.	RKPD Kota Cirebon:		
	a. RKPD Tahun 2015	-	Perwal Nomor 13 Tahun 2014
	b. RKPD Tahun 2016	-	Perwal Nomor 28 Tahun 2014
	c. RKPD Tahun 2017	-	Perwal Nomor 18 Tahun 2016
	d. RKPD Tahun 2018	-	Perwal Nomor 22 Tahun 2017
	e. RKPD Tahun 2019	-	Perwal Nomor 18 Tahun 2018
	f. RKPD Tahun 2020	-	Perwal Nomor 21 Tahun 2019
	g. RKPD Tahun 2021		Perwal Nomor 30 Tahun 2020
	h. RKPD Tahun 2022		Perwal Nomor 57 Tahun 2021
	i. RKPD Tahun 2023		Perwal Nomor 26 Tahun 2022
	j. RKPD Tahun 2024		Perwal Nomor 57 Tahun 2023
k. RKPD Tahun 2025		Perwal Nomor 14 Tahun 2024	

Sumber: JDIH Kota Cirebon, 2025

B. Keuangan

Di dalam mewujudkan Pemerintahan Daerah yang bersih, Pemerintah Daerah Kota Cirebon telah mengambil beberapa strategi antara lain akuntabilitas dan transparansi di berbagai bidang. Langkah strategis dan inovasi di dalam mengakselerasi kinerja aparatur pemerintah pada tingkatan paling tinggi sampai tingkatan paling rendah, perlu diupayakan dan dilakukan yaitu melalui dukungan pengawasan yang solid dan dipercaya, sehingga dapat tercipta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya hasil pengawasan fungsional pemerintah serta sasaran pembangunan.

C. Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Cirebon, maka peran Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan penempatan aparatur berdasarkan "Sistem Merit" semakin penting. Kewenangan pemerintah Kota Cirebon dalam manajemen kepegawaian daerah yaitu: (1) melaksanakan pembinaan teknis dan (2) pelayanan administratif kepegawaian sesuai peraturan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Roadmap Reformasi Birokrasi secara Nasional. Pembinaan teknis administratif, meningkatkan kedisiplinan ASN dalam rangka meningkatkan profesionalisme pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan publik (*public servant*). Indikator kinerja dalam rangka mendorong peningkatan disiplin, tertib hukum dan pelayanan aparatur kepada masyarakat dan dunia usaha secara profesional.

Upaya peningkatan kapasitas sumberdaya ASN menjadi kewenangan daerah dalam rangka peningkatan kepangkatan, pembinaan karir dengan

mutasi jabatan, pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan, agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik. Upaya tersebut yaitu dengan meningkatkan pendidikan formal/tugas belajar aparatur, mengikutsertakan aparatur dalam Diklatpim untuk penyesuaian jabatan, menerapkan diklat Pra-jabatan bagi CPNS dan melakukan diklat teknis fungsional.

Upaya peningkatan pembinaan dan pengembangan aparatur menjadi kewajiban pemerintah daerah antara lain pengangkatan ASN, kenaikan pangkat, pembinaan, pemindahan, dan pemberhentian ASN Daerah sesuai Norma, Standar dan Prosedur (NSP) berdasarkan peraturan perundang-undangan kepegawaian. Jumlah ASN di Kota Cirebon dalam kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami penurunan. Untuk mengatasi kesenjangan terhadap kebutuhan aparatur di Kota Cirebon, pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mulai dilaksanakan sejak tahun 2022 sesuai kebijakan Pemerintah Pusat.

Tabel II-77 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Cirebon

Kategori	2020	2021	2022	2023	2024
Golongan I	22	16	15	13	10
Golongan II	708	635	618	505	420
Golongan III	2.925	2.767	2.671	2.577	2.497
Golongan IV	1.108	1.073	1.011	970	909
PPPK	-	-	173	562	1.251
Jumlah ASN	4.763	4.491	4.488	4.627	5.087

Sumber: Open Data Kota Cirebon, 2025

Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kota Cirebon juga mendapatkan dukungan dari tenaga Non ASN berdasarkan 7 kategori:

Tabel II-78 Jumlah Non ASN Kota Cirebon

Kategori	2020	2021	2022	2023	2024
Pendidik	721	721	721	721	125
Kesehatan	602	602	602	602	17
Penyuluh/Pendamping	68	68	68	68	-
Kebersihan/Outsourcing	78	78	78	78	-
Keamanan	200	200	-	-	-
Lainnya	1.283	1.283	200	200	-
Teknis	-	-	-	-	1.161
Jumlah Non ASN	2.952	2.952	1.669	1.669	1.303

Sumber: Open Data Kota Cirebon, 2025

D. Penelitian Dan Pengembangan

Dalam upaya tersedianya hasil kelitbangan yang diimplementasikan dan berkualitas, diperlukan keorganisasian Kelitbangan di Kota Cirebon. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 mengamanatkan terbentuknya pengorganisasian Kelitbangan di kabupaten/kota yang terdiri dari Majelis Pertimbangan Kelitbangan; Tim Pengendali Mutu Kelitbangan; dan Tim Kelitbangan.

Hingga saat ini di Kota Cirebon telah terbentuk Tim Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu Kelitbangan dan Tim Kelitbangan yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Cirebon. Tim Kelitbangan



Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2026

memiliki tugas yang lebih bersifat teknis yaitu melaksanakan Kelitbangannya sesuai dengan norma, metodologi, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan serta melaporkan hasil pelaksanaan Kelitbangannya secara berkala kepada Bappelitbangda Kota Cirebon. Sedangkan majelis pertimbangan kelitbangannya dan tim pengendali mutu kelitbangannya diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pelaksanaan serta menjaga kualitas kegiatan Kelitbangannya dan pemanfaatan hasil-hasil Kelitbangannya.

Tabel II-79 Daftar Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan

No	Kegiatan penelitian dan pengembangan	Tahun	Pelaksana
1.	Kajian Penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi dalam Penataan Organisasi Perangkat Daerah di Kota Cirebon	2017	Litbang Pemerintahan dan Kemasyarakatan
2.	Kajian Pengaruh Kualitas Pelayanan Perizinan Terhadap Peningkatan Iklim Usaha di Kota Cirebon	2017	Litbang Pemerintahan dan Kemasyarakatan
3.	Kajian Penelitian dan Pengembangan di Pemerintah Kota Cirebon	2017	Litbang Perkotaan dan Inovasi Daerah
4.	Kajian Pengembangan Wilayah Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon	2017	Litbang Perkotaan dan Inovasi Daerah
5.	Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	2018	Litbang Pemerintahan dan Kemasyarakatan
6.	Kajian Efektivitas Program Sosial Bantuan Walikota (BAWAL) kepada RW Terhadap Partisipasi Masyarakat Tahun 2018	2018	Litbang Pemerintahan dan Kemasyarakatan
7.	Kajian Analisis Pelayanan Aparatur Pemungut Pajak Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Cirebon	2018	Litbang Pemerintahan dan Kemasyarakatan
8.	Kajian Profil Ekonomi Kreatif di Kota Cirebon	2018	Litbang Pemerintahan dan Kemasyarakatan
9.	Kajian Rencana Induk Kelitbangannya Daerah Kota Cirebon	2018	Litbang Pemerintahan dan Kemasyarakatan
10.	Kajian Study Kelayakan Pembuatan Embung di Kawasan Argasunya	2018	Litbang Perkotaan dan Inovasi Daerah
11.	Kajian Pengembangan Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Masyarakat Kota Cirebon	2019	Litbang Pemerintahan dan Kemasyarakatan
12.	Kajian Pengembangan Destinasi Pariwisata Perlindungan dan Pelestarian Budaya Lokal dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Kota Cirebon	2019	Litbang Pemerintahan dan Kemasyarakatan
13.	Kajian Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi Kawasan Pengembangan Kawasan Pariwisata Stadion Bima Kota Cirebon	2019	Litbang Pemerintahan dan Kemasyarakatan
14.	Kajian Alternatif Potensi Investasi pada Lahan Eks Galian C di Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon	2019	Litbang Pemerintahan dan Kemasyarakatan
15.	Implementasi Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kota Cirebon	2019	Litbang Pemerintahan dan Kemasyarakatan
16.	Kajian Pengaruh Persepsi Wisatawan Terhadap Keputusan Berkunjung ke Destinasi Pariwisata Kota Cirebon	2019	Litbang Pemerintahan dan Kemasyarakatan
17.	Kajian Kompetensi Sumber Daya Aparatur pada dinas PUPR	2019	Litbang Perkotaan dan Inovasi Daerah
18.	Kajian Penataan Sempadan Jalan	2019	Litbang Perkotaan dan Inovasi Daerah
19.	Kajian Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tinggal Melalui Rumah Susun di Kota Cirebon	2019	Litbang Perkotaan dan Inovasi Daerah
20.	Kajian Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Industri Kreatif	2020	Litbang Pemerintahan dan Kemasyarakatan
21.	Kajian Pengelolaan dan Publikasi Hasil Kelitbangannya Berbasis E-Jurnal Kota Cirebon	2020	Litbang Pemerintahan dan Kemasyarakatan
21.	Kajian Dampak Sosial Ekonomi dan Efektivitas Penanganan Program Sosial Ekonomi Dalam Masa Pandemic Covid-19 di Kota Cirebon	2020	Litbang Pemerintahan dan Kemasyarakatan
23.	Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Cirebon Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan	2020	Litbang Pemerintahan dan Kemasyarakatan
24.	Kajian Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase di Kota Cirebon	2020	Litbang Perkotaan dan Inovasi Daerah
25.	Kajian Evaluasi Pengelolaan Sarana Prasarana Sampah Baik di TPS maupun di TPA (Melakukan Partisipasi Masyarakat Dalam	2020	Litbang Perkotaan dan Inovasi Daerah



Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2026

No	Kegiatan penelitian dan pengembangan	Tahun	Pelaksana
	Mengelola Sampah)		
26.	Kajian Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas dan Efisiensi Kinerja PNS dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Pemerintahan Daerah Kota Cirebon	2020	Litbang Perkotaan dan Inovasi Daerah
27.	Publikasi Hasil Kelitbangan Berbasis e-Jurnal Kota Cirebon Tahun 2021	2021	Litbang Pemerintahan dan Kemasyarakatan
28.	Kajian Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir Kota Cirebon	2021	Litbang Perkotaan dan Inovasi Daerah
29.	Studi Kelayakan Sky bridge Sungai Sukalila Kota Cirebon	2021	Litbang Perkotaan dan Inovasi Daerah
30.	Kajian Pembangunan Partisipatif Dalam Mengembangkan Ekonomi Kreatif di Kota Cirebon	2021	Litbang Perkotaan dan Inovasi Daerah
31.	Kajian Digital Heritage Menuju Pengembangan Pariwisata dan Budaya Kota Cirebon	2021	Bidang Litbang
32.	Kajian Analisis Situasi Stunting di Kota Cirebon	2022	Bidang Litbang
33.	Kajian Pengaruh Perlintasan Sebidang Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dinamika Sosial di Kota Cirebon	2022	Bidang Litbang
34.	Publikasi Hasil Kelitbangan Berbasis e-Jurnal Kota Cirebon Tahun 2022	2022	Bidang Litbang
35.	Kajian Studi Kelayakan Penataan dan Pengembangan Kawasan Strategis Stadion Bima Kota Cirebon	2022	Bidang Litbang
36.	Kajian Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kota Cirebon Tahun 2022-2045	2022	Bidang Litbang
37.	Kajian Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Penurunan Stunting di Kota Cirebon Tahun 2022-2024	2022	Bidang Litbang
38.	Kajian Penyusunan Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Cirebon Tahun 2024-2026	2022	Bidang Litbang

Sumber: *Bappelitbangda Kota Cirebon 2023*

Disamping kegiatan penelitian/kajian, kegiatan lain yang diselenggarakan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappelitbangda antara lain:

1. Pengelolaan Jurnal Ilmiah

- Jurnal ilmiah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon dengan nama Jurnal *Dinamika Pembangunan Kota Cirebon*. Jurnal ilmiah tersebut dengan ISSN Cetak: 2808-0025 dan ISSN Online: 2807-954X memuat informasi untuk publikasi hasil penelitian dan pengembangan daerah yang dikelola dalam rangka pengembangan menuju jurnal terindeks pembangunan daerah secara baik, efektif, transparan dan bertanggung jawab.

2. Pendampingan Penilaian Indeks Inovasi Daerah (IID)/ *Innovative Government Award (IGA)*

- Hasil penilaian Indeks Inovasi Daerah dari Kementerian Dalam Negeri untuk Kota Cirebon Tahun 2020 sebesar 1.164 (metode lama) dengan kategori sangat inovatif. Sedangkan Tahun 2021 nilai Indeks Inovasi Daerah sebesar 43,47 dengan kategori inovatif, dan Tahun 2022 sebesar 41,41 dengan kategori inovatif.

3. Inovasi di Bidang Penelitian dan Pengembangan yang dikembangkan pada tahun 2022.

- Sistem Informasi Kelitbangan Kota Cirebon (SIKOCIR) memuat informasi publik berkaitan dengan kegiatan kelitbangan, hasil-hasil kelitbangan, dan informasi lainnya yang relevan dengan kelitbangan.



- Sistem Informasi Jejaring Inovasi Kota Cirebon (SIJARI) dirancang dan dibangun dalam rangka sarana informasi dan komunikasi publik berkaitan dengan informasi inovasi daerah di Kota Cirebon.
4. Pendampingan Penilaian Kompetisi Inovasi Jawa Barat (KIJB)
- Berdasarkan hasil penilaian Kompetisi Inovasi Jawa Barat (KIJB) Tahun 2022, salah satu inovasi telah mendapatkan penghargaan TOP 45 INOVASI untuk Kategori Pembangunan Ekonomi: UMKM dan Ketenagakerjaan yaitu SIPEKa (Sistem Informasi Pelayanan Antar Kerja) oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon.

E. Pengawasan

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam penyelenggaraan pemerintahan berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat berdasarkan amanat undang-undang. Untuk mencapai hal tersebut, salah satu bentuk yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan sepenuhnya dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah. Inspektorat Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon secara berkala dan menginformasikan hasilnya kepada publik.

Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah bersifat internal dalam rangka meningkatkan kinerja urusan pembangunan daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Cirebon, obyek pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan kepala daerah. Pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah dilakukan dengan pemeriksaan terhadap laporan penyelenggaraan pemerintah dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan.

Salah satu tugas dan fungsi lain dari pelaksanaan pengawasan di daerah adalah menindaklanjuti hasil temuan instansi pemeriksa dari tingkat pusat, dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK salah satunya akan menghasilkan temuan-temuan atas tindakan pengelolaan keuangan di daerah. Temuan-temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Inspektorat. Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dibutuhkan sumber daya manusia auditor/tenaga pemeriksa yang memiliki kompetensi dan kapabilitas.

Selain itu, Kota Cirebon ke depan diharapkan mampu mewujudkan pembentukan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hal tersebut menindaklanjuti amanat pemerintah yang dituangkan melalui Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas



Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan instansi pemerintah

Berdasarkan data di atas, jumlah temuan pada Perangkat Daerah oleh APIP di lingkungan Pemerintahan Kota Cirebon terjadi secara fluktuatif, temuan paling sedikit terjadi pada tahun 2017 dengan jumlah temuan sebanyak 35 temuan. Dari temuan tersebut sebanyak 23 temuan atau 66,00% diantaranya telah selesai ditindaklanjuti, dan temuan yang dalam proses tindak lanjut sebanyak 12 temuan atau 34,00%. Sementara jumlah temuan terbanyak terjadi pada tahun 2016, yaitu sebanyak 89 temuan. Dari jumlah tersebut, yang telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 15 temuan atau 17,00% dan yang dalam proses tindak lanjut sebanyak 74 temuan atau 83,00%. Selanjutnya, pada tahun 2019, jumlah temuan sebanyak 39 temuan, yang sudah selesai ditindaklanjuti sebanyak 18 temuan atau 46,00% dan yang dalam proses tindak lanjut sebanyak 21 temuan atau 54,00%. Dengan berkurangnya jumlah temuan, menandakan bahwa Perangkat Daerah dalam menjalankan masing-masing fungsi dalam pemerintahan Kota Cirebon sudah semakin tertib dan sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga menggambarkan kualitas kinerja dari Perangkat Daerah semakin membaik.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing (competitiveness) dapat dimaknai sebagai kemampuan suatu entitas perekonomian, dalam hal ini Kota Cirebon, untuk mencapai pertumbuhan tinggi dan berkelanjutan. Dalam otonomi pembangunan di daerah, peran Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu melaksanakan penguatan instrumen tata kelola perbaikan layanan publik dan daya saing. Daerah yang memiliki kemampuan bersaing yang tinggi akan menghasilkan nilai tambah output, kesempatan kerja, kekayaan daerah, dan lainnya. Situasi global yang terus berkembang ke arah keterbukaan pasar dan pengintegrasian perekonomian penguatan daya saing dengan memanfaatkan keunggulan yang dimiliki. Terdapat 4 (empat aspek) yang dapat mempengaruhi performa daya saing suatu daerah yakni aspek kemampuan ekonomi daerah, aspek infrastruktur atau fasilitas wilayah, aspek iklim investasi, dan aspek sumber daya manusia

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Dari segi perekonomian, daya saing menjadi upaya untuk meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita.

A.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan pengeluaran rumah tangga. Semakin tinggi rasio atau angka konsumsi rumah tangga, maka semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui



dengan menghitung angka konsumsi rumah tangga per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman dan Non-Makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya per jumlah penduduk.

Tabel II-80 Pengeluaran per kapita Sebulan Menurut Jenis Komoditi Kota Cirebon

Kategori	2020	2021	2022	2023	2024
Makanan	Rp 820.119	Rp 960.673	708.258	788.126	764.040
	44,37 %	41,05 %	45,43 %	43,11 %	46,28 %
Bukan makanan	Rp 654.100	Rp 669.035	850.872	1.040.035	886.953
	55,63 %	58,95 %	54,57 %	56,89 %	53,72 %
Rata-Rata Pengeluaran bulanan/Kapita	Rp 1.474.219	Rp 1.629.708	1.559.130	1.828.161	1.650.993

Sumber: BPS 2025

Data publikasi BPS menunjukkan bahwa dalam 4 tahun terakhir, rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita sebulan di Kota Cirebon cenderung mengalami peningkatan, meskipun pada tahun 2022 mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan masyarakat menjadi lebih berhati-hati dalam mengatur keuangan sehingga berdampak pada turunnya konsumsi rumah tangga. Dari tabel pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per bulan dapat dilihat bahwa persentase terbesar pada komposisi pengeluaran Bukan Makanan dibandingkan Makanan. Peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita dalam satu bulan pada tahun 2021 juga mengindikasikan pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19 dan peningkatan pendapatan rumah tangga di Kota Cirebon.

A.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

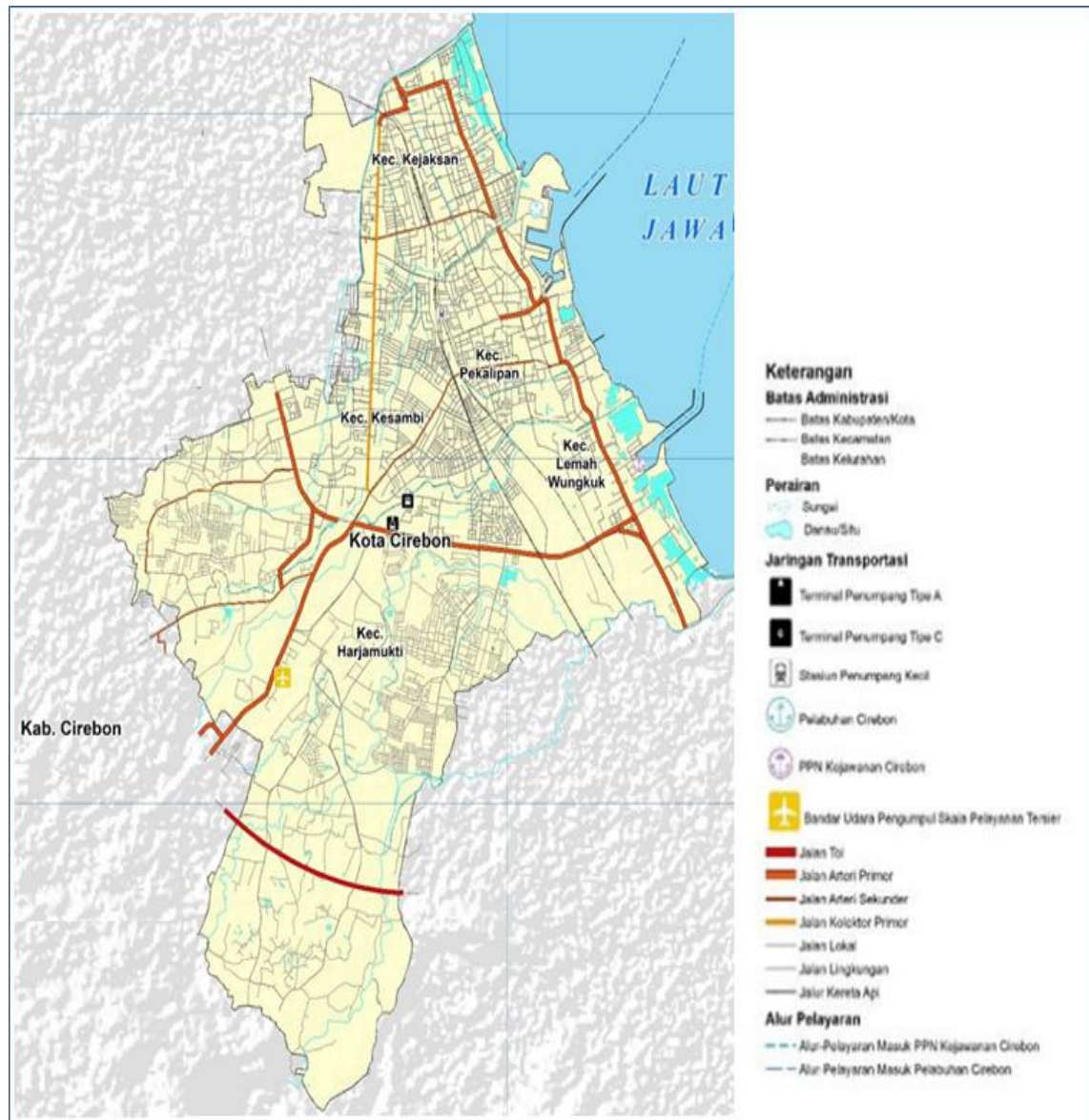
Kinerja fasilitas wilayah/infrastruktur diyakini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap daya saing wilayah. Ketersediaan fasilitas wilayah atau infrastruktur akan menunjang daya saing daerah dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Kota Cirebon dengan karakteristik perkotaan memiliki infrastruktur yang memadai yang berkualitas. Distribusi layanan infrastruktur sudah hampir merata di seluruh wilayah, namun demikian untuk lebih meningkatkan interkoneksi antar wilayah dalam meningkatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat terutama di wilayah selatan (Kecamatan Harjamukti) perlu lebih ditingkatkan.

A.2.1 Transportasi

Infrastruktur transportasi merupakan penggerak utama mobilitas, baik orang maupun barang. Semakin tinggi mobilitas, semakin terbuka peluang terjadinya interaksi sehingga semakin tinggi pula peluang terciptanya transaksi ekonomi. Maka tak heran jika ketersediaan infrastruktur transportasi menjadi salah satu komponen penting dalam mendorong terselenggaranya kegiatan ekonomi. Karena itu pula, kinerja infrastruktur transportasi menjadi salah satu faktor pembentuk daya saing daerah yang cukup penting.



Gambar II-38 Sebaran Fasilitas Transportasi di Kota Cirebon



Sumber: Dokumen Evaluasi RTRW Kota Cirebon, Bappelitbangda Kota Cirebon, 2021

Selain memiliki lokasi yang strategis terhadap kota-kota di sekitarnya, secara umum Kota Cirebon memiliki aksesibilitas yang sangat baik. Kota Cirebon memiliki kelengkapan infrastruktur yang mendukung kemudahan akses transportasi, baik darat, laut, maupun udara. Di wilayah administratif kota ini terdapat dua terminal, dua stasiun Kereta Api, dua pelabuhan, serta satu bandara pengumpul non komersial. Selain itu, Kota Cirebon juga dilewati tol lintas Jawa dan memiliki akses yang sangat dekat Bandara Kertajati.

Mobilitas harian penduduk di dalam kota didominasi oleh transportasi darat melalui jalan raya. Dalam hal ini, layanan infrastruktur jalan serta ketersediaan angkutan umum menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kinerja infrastruktur terhadap daya saing daerah. Selain itu, kinerja layanan kereta api serta pelabuhan terhadap mobilitas penumpang dan barang, turut mendukung kinerja infrastruktur transportasi Kota Cirebon secara keseluruhan. Berikut ini gambaran kinerja fasilitas



wilayah/infrastruktur Kota Cirebon yang mendukung performa daya saing Kota Cirebon saat ini.

A.2.2 *Infrastruktur Jalan Dan Jembatan*

Kinerja infrastruktur jalan antara lain dapat diwakili oleh panjang jalan dengan perkerasan yang menggambarkan ketersediaan sarana transportasi untuk mendukung mobilitas orang maupun barang. Selain itu, kinerja infrastruktur jalan juga dapat digambarkan melalui proporsi jalan dengan kondisi baik. Proporsi jalan dengan kondisi baik dapat menggambarkan layanan infrastruktur jalan dalam mendukung aksesibilitas.

Dalam kurun waktu 2016-2018 terdapat penambahan panjang jalan yang ada di Kota Cirebon sebesar 50,98 km. Sementara itu, meski terdapat kenaikan angka panjang jalan dengan kondisi baik, namun proporsi kondisi jalan baik menurun dari 85,62% di tahun 2016 menjadi 77,97% di tahun 2018. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan upaya pemeliharaan kondisi ruas jalan yang ada di wilayah Kota Cirebon sesuai dengan kewenangan status jalannya.

A.2.3 *Fasilitas Jasa Keuangan Dan Asuransi*

Kota Cirebon memiliki lembaga penunjang perekonomian berupa fasilitas perbankan yang terdiri dari bank umum yaitu Bank Jabar Banten, BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara, Bank Panin, Bank Danamon, Bank Permata, Bank Internasional Indonesia (BII), Bank BCA, Bank CIMB, Bank UOB Buana, Bank Rabobank Internasional, Bank BTPN, Bank OCBC NISP, Bank Artha Graha, Bank Nusantara Parahyangan, Bank Mega, Bank Ekonomi Raharja, Bank Victoria Syariah, Bank Commonwealth, Bank Bukopin, Bank Muamalat Indonesia, Bank Sinarmas, Bank Himpunan Saudara 1906, Bank Niaga Syariah, Bank Mayapada, Bank Pundi Indonesia, dan BPR. Perusahaan asuransi di Kota Cirebon berkembang cukup pesat dengan jenis layanan diantaranya asuransi jiwa, pendidikan, kesehatan, dan dana pensiun.

A.2.4 *Akomodasi Dan Fasilitas Makan Minum*

Ketersediaan akomodasi berupa penginapan/hotel merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin berkembangnya investasi ekonomi di daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan wisatawan ke daerah tersebut, sehingga perlu diimbangi dan didukung oleh ketersediaan penginapan/hotel yang memadai. Berdasarkan data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kota Cirebon, terdapat kecenderungan penurunan jumlah hotel.

Usaha penyediaan akomodasi di Kota Cirebon tercatat sebanyak 59 usaha. Menurut klasifikasi, usaha akomodasi di Kota Cirebon terdiri dari 26 hotel bintang (44,07 persen) dan sebanyak 33 hotel non bintang (55,93 persen). Dibandingkan daerah sekitarnya Kota Cirebon memiliki kualitas lebih baik dalam penyediaan akomodasi hal ini dapat dilihat pada perbandingan jumlah hotel Bintang dan Non-Bintang di daerah Ciayumajakuning.

Tabel II-81 Jumlah Akomodasi tahun 2020 di Ciayumajakuning



No	Kota/Kabupaten	Klasifikasi (Unit)		Jumlah
		Bintang	Non-Bintang	
1.	Kota Cirebon	26	33	59
2.	Indramayu	4	23	27
3.	Majalengka	1	17	18
4.	Kuningan	6	53	59
5.	Cirebon	7	17	24

Sumber: Statistik Hotel dan Akomodasi Lainnya Provinsi Jawa Barat, 2019-2020

Adapun ketersediaan fasilitas makan minum atau restoran pada suatu daerah menunjukkan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Banyaknya restoran dan rumah makan menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Seiring dengan pesatnya perkembangan Kota Cirebon saat ini banyak restoran dan rumah makan yang menyediakan berbagai macam jenis makanan termasuk makanan khas daerah. Berdasarkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon terdapat 240 jenis usaha jasa makanan/minuman tahun 2020.

2.1.4.2 Fokus Iklim Berinvestasi

Investasi merupakan salah satu peluang besar untuk percepatan pertumbuhan ekonomi di Kota Cirebon. Besarnya peluang investasi dipengaruhi oleh kondusifitas iklim untuk berinvestasi di Kota Cirebon. Dinamika kebijakan di Kota Cirebon akan mempengaruhi iklim investasi yang berkembang. Iklim investasi yang kondusif adalah iklim yang mendorong penanam modal untuk melakukan investasi dengan biaya dan risiko serendah mungkin, dan menghasilkan keuntungan jangka panjang yang tinggi. Dengan demikian daya saing daerah Kota Cirebon dalam menarik investasi mencerminkan sejumlah faktor yang berkaitan dengan karakteristik lokasi tertentu yang harus ditingkatkan.

A. Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Ketenteraman dan ketertiban umum menjadi salah satu aspek penting daya saing daerah. Daerah dengan tingkat keamanan dan ketertiban yang lebih baik akan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Untuk mengetahui kondusifitas berinvestasi di Kota Cirebon dapat dilihat dari indikator jumlah tindak kriminal, jumlah tindak kriminal yang ditangani, dan persentase tindak kriminal yang ditangani.

Berdasarkan data Polres Cirebon Kota dalam Open Data Kota Cirebon tahun 2020 sampai dengan Maret 2021, jumlah tindak kriminal pada tahun 2020 sebesar 546 kasus mengalami penurunan dibanding tahun 2019 sebesar 762 kasus maupun tahun 2018 sebesar 941 kasus. Sedangkan tindak kriminal yang pada tahun 2020 sebesar 493 kasus lebih rendah dari tahun 2019 sebesar 599 kasus maupun tahun 2018 sebesar 659 kasus.

Tabel II-82 Angka Kriminalitas di Kota Cirebon

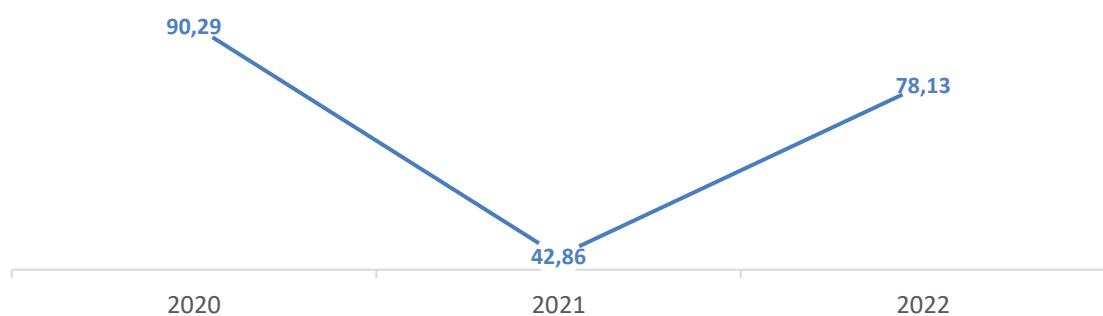
No	Angka Kriminalitas	Satuan	2020	2021	2022 ^{Per Juni}
1.	Jumlah Tindak Kriminal (<i>Kasus</i>)	Kasus	546	217	320
2.	Jumlah Tindak Kriminal yang Ditangani (<i>Kasus</i>)	Kasus	493	93	250
3.	Persentase Kriminalitas Yang Ditangani (%)	Persen	90,29	42,86	78,13

Sumber: Polres Cirebon Kota



Dengan demikian dari data tersebut diperoleh persentase angka kriminalitas yang ditangani pada tahun 2020 sebesar 90,29% lebih tinggi dan mengalami peningkatan penanganan dibanding tahun 2019 sebesar 78,61% . Hal ini mengindikasikan bahwa instansi Polres Cirebon Kota telah menangani kasus dengan baik dan tingkat responsifitas atas pelayanan masyarakat yang lebih baik. Sedangkan tahun 2021, jumlah tindak kriminal sebesar 95 kasus (per bulan Maret 2021) dimana yang sudah ditangani sebesar 93% atau 97,89%. Berikut data angka kriminalitas di Kota Cirebon yang dapat ditampilkan pada tabel dan grafik perkembangan penanganan kasus kriminalitas dari tahun 2020-2021 sebagai berikut:

Tabel II-83 Angka Kriminalitas di Kota Cirebon Yang Ditangani



Sumber: Polres Cirebon Kota

B. Perizinan

Pertimbangan yang paling prinsip bagi investor, sebelum memutuskan untuk mau berinvestasi ke Kota Cirebon berkaitan dengan pelayanan mengurus perizinan. Perizinan investasi tampaknya seperti prosedural semata-mata, namun sesungguhnya merupakan tantangan kesungguhan bagi Pemerintah Kota Cirebon untuk membuka diri dengan tangan terbuka. Hal ini menjadi pertarungan berinvestasi dapat menjadi tolok ukur investor berniat atau tidaknya menanamkan modalnya. Dengan demikian perizinan investasi merupakan cermin keberhasilan atau kegagalan mengurai hambatan investasi yang hendak masuk untuk menanamkan modalnya.

Program pelayanan perizinan melalui sistem One Stop Service atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) diharapkan dapat mendukung investasi di Kota Cirebon. Diharapkan dengan kebijakan tersebut, menjadi salah satu faktor pendorong bagi Kota Cirebon untuk meningkatkan sistem pelayanan kepada masyarakat termasuk di dalamnya para pelaku usaha. Saat ini, proses pelayanan perizinan di Kota Cirebon dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja. Jenis perizinan dalam rangka meningkatkan iklim investasi di Kota Cirebon, Pemerintah Daerah Kota Cirebon menyiapkan berbagai macam tata kelola perizinan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-84 Jenis Standar Operasional Prosedur Perizinan di Kota Cirebon

No.	Jenis Standar Operasional Prosedur (SOP)
1.	Standar Operasional Prosedur Pembuatan Izin Usaha Toko Swalayan
2.	Standar Operasional Prosedur Pembuatan Tanda Daftar Gudang
3.	Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)



No.	Jenis Standar Operasional Prosedur (SOP)
4.	Standar Operasional Prosedur Pembuatan Tanda Daftar Perusahaan
5.	Pembuatan Surat Tanda Daftar Industri (TDI)
6.	Standar Operasional Prosedur Pembuatan Surat Izin Usaha Industri
7.	Standar Operasional Prosedur Pembuatan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan
8.	Standar Operasional Prosedur Pembuatan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat
9.	Pembuatan Izin Usaha Industri (IUI)
10.	Pembuatan Surat Izin Pameran Dagang Konvensi dan/atau Seminar Dagang Lokal

Sumber: Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 61 Tahun 2019

C. Regulasi Daerah

Peraturan Daerah (Perda) sebagai kebijakan publik sangat menentukan arah kemajuan setiap daerah. Daerah yang memiliki kebijakan publik yang unggul akan mampu berkembang menjadi daerah yang unggul. Dalam rangka menciptakan produk kebijakan yang unggul, dibutuhkan pemanfaatan konsepsi strategis pembangunan sesuai dengan tuntutan otonomi daerah dan globalisasi oleh para pemangku kebijakan baik Pemerintah Daerah Kota Cirebon (eksekutif) maupun DPRD Kota Cirebon (legislatif). Hal ini dikarenakan membangun iklim investasi yang baik tidak dapat hanya dikerjakan oleh Pemerintah Daerah (eksekutif) atau pengusaha daerah, akan tetapi kehadiran DPRD Kota Cirebon juga penting supaya arah kebijakan pro-investasi dapat dicapai.

Kolaborasi antara Pemerintah Daerah, DPRD dan Pengusaha daerah merupakan aktor yang perlu memahami bagaimana menarik investasi. Keanggotaan DPRD sebagai non-pemerintah dimana notabene para anggota DPRD yang merupakan wirausahawan atau pelaku bisnis swasta. Juga memiliki visi yang lebih maju dalam hal investasi daerah.

Beberapa Peraturan Daerah Kota Cirebon yang mendukung iklim investasi di Kota Cirebon sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penanaman Modal;
2. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda No 9 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Menara Bersama Telekomunikasi;
3. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk;
4. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon;
5. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2021 Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dan kunci yang menjadi kriteria penting dalam regulasi daerah yang mendukung iklim investasi antara lain prinsip transparansi dalam tujuan penetapan Perda; transparansi dalam hal tarif dan denda; tidak ada adanya tumpang tindih antara satu Perda dengan Perda yang lain; Perda yang ramah dalam mendukung lingkungan usaha; dan Perda yang tepat sasaran dalam mendukung dinamika usaha.

2.1.4.3 Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu aset penting dalam pembangunan daerah. Dengan manusia dan generasi yang berkualitas akan mendorong pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

A. Kualitas Tenaga Kerja

Pendidikan merupakan modal bagi sumber daya manusia yang dapat meningkatkan kemampuan baik secara formal maupun keterampilan sumber daya manusia, sehingga lebih memudahkan sumber daya manusia tersebut dalam mencari pekerjaan karena mempunyai nilai daya saing yang tinggi dan berakibat pada berkurangnya tingkat pengangguran.

Tabel II-85 Penduduk Bekerja Berdasarkan Pendidikan Yang Ditamatkan

No.	Status Pendidikan	Satuan	2020	2021
1.	SD	Orang	35.321	36.313
2.	SMP	Orang	19.521	20.045
3.	SMA Umum & Kejuruan	Orang	57.921	57.459
4.	Diploma II/III & Perguruan Tinggi	Orang	26.585	25.579
5.	Penduduk Bekerja	Orang	139.334	139.397

Sumber: BPS 2021

Perkembangan penduduk bekerja di Kota Cirebon pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018. Indikasi dari penurunan jumlah penduduk bekerja pada tahun 2019 dan 2020 adalah adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada aktivitas perekonomian di Kota Cirebon. Adapun pada tahun 2021 terjadi peningkatan penduduk bekerja namun belum signifikan. Berdasarkan status pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk bekerja Kota Cirebon didominasi oleh tamatan SMA Umum/Kejuruan, pada tahun 2021 mencapai 57.459 orang. Sedangkan untuk tamatan Diploma II/III dan Perguruan Tinggi mengalami penurunan yang cukup signifikan.

B. Tingkat Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun) dengan usia produktif (antara 15 sampai 64 tahun) dikalikan 100. Indikator tersebut menunjukkan keadaan ekonomi suatu wilayah apakah tergolong daerah maju atau daerah yang sedang berkembang. Semakin tinggi angka rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan semakin rendah angka rasio ketergantungan menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.



Angka ketergantungan penduduk Kota Cirebon tahun 2020 sebesar 44,49%, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 44 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio sebesar 44,49% ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda (0-14 tahun), dan rasio ketergantungan penduduk tua (di atas 65 tahun). Dari indikator ini terlihat bahwa pada tahun 2020 penduduk usia kerja di Kota Cirebon masih dibebani tanggung jawab menanggung penduduk muda yang proporsinya lebih banyak dibandingkan tanggung jawab terhadap penduduk tua.

2.1.5 Aspek Pemenuhan Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar merupakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara. Target yang akan dicapai harus disesuaikan dengan data penduduk yang tidak mampu sehingga kebutuhan dasar untuk hidup dapat terpenuhi untuk didukung oleh negara.

2.1.5.1 SPM Bidang Pendidikan

Salah satu upaya strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui pendidikan. Pendidikan sangat penting karena merupakan dasar untuk pengembangan pola berpikir konstruktif dan kreatif. Dengan pendidikan yang cukup memadai, maka seseorang akan bisa berkembang secara optimal baik secara ekonomi maupun sosial. Rumusan tentang pendidikan, lebih jauh termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, bahwa pendidikan Indonesia bertujuan agar masyarakat Indonesia mempunyai pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Artinya, arah dari proses pendidikan nasional mencakup berbagai aspek kehidupan diri manusia dan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa aspek yang berkaitan dengan pendidikan dapat memberikan gambaran tentang kualitas sumber daya manusia yang ada antara lain tingkat partisipasi sekolah, HLS, RLS, ketersediaan sarana dan prasarana serta tingkat pendidikan.

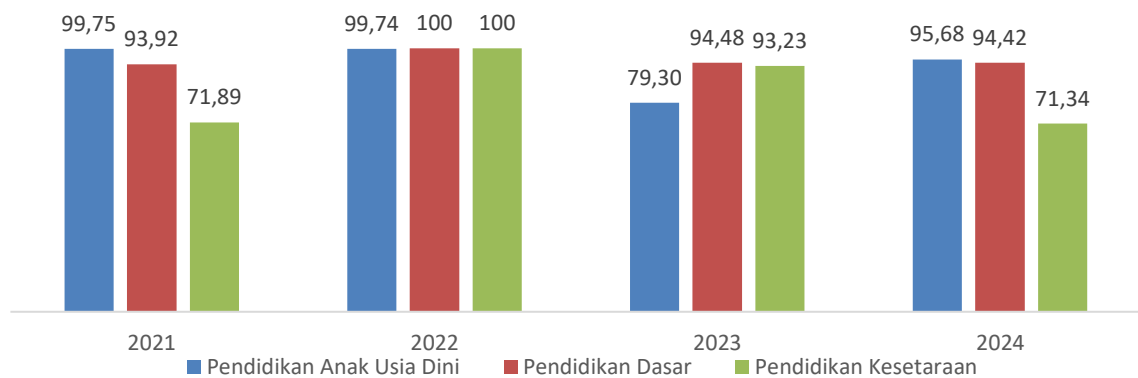
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Jenis Pelayanan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Kesetaraan, dan Pendidikan Anak Usia Dini.

Capaian Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar tingkat Kota Cirebon ini disesuaikan dengan ketentuan dasar hukum di atasnya yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Penyederhanaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon hasil pelaksanaan Pembangunan Pendidikan Kota Cirebon, yang diukur dari aspek pelayanan minimal melalui tiga jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

1. Pendidikan Dasar, yaitu jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SDMI, SMP/MTs);
2. Pendidikan Kesetaraan, yaitu jumlah warga negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang partisipasi dalam pendidikan kesetaraan; dan
3. Pendidikan Anak Usia Dini, yaitu jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Atas dasar tersebut Pelayanan Minimal urusan Pendidikan Kota Cirebon pada Tahun Anggaran 2020 dan 2021 adalah seperti yang digambarkan pada sebagai berikut:

Gambar II-34 Capaian SPM Bidang Pendidikan (%)



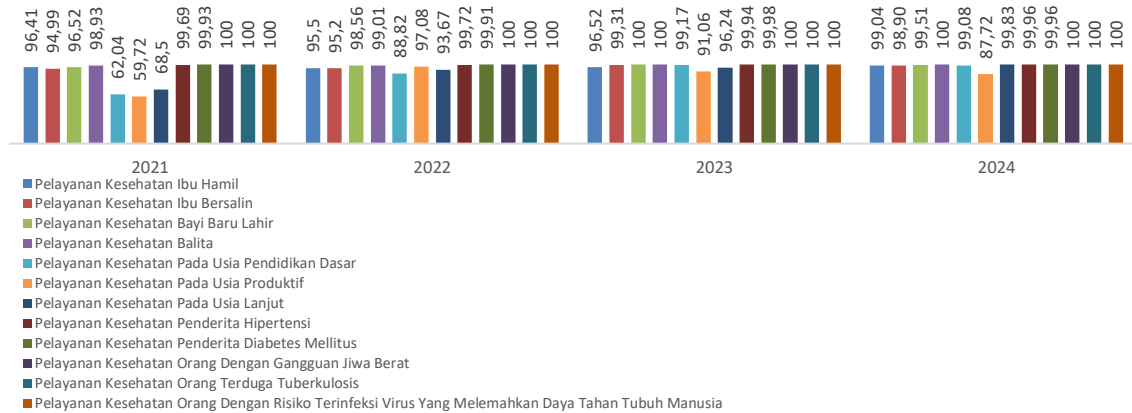
Sumber: spm.bangda.kemendagri.go.id

2.1.5.2 SPM Bidang Kesehatan

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, untuk skala Pemerintah Kabupaten/ Kota antara lain:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
4. Pelayanan Kesehatan Balita;
5. Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut;
8. Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi;
9. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus;
10. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

Gambar II-35 Capaian SPM Bidang Kesehatan (%)



Sumber: spm.bangda.kemendagri.go.id

Penentuan program prioritas bidang kesehatan dengan mempertimbangkan keterbatasan alokasi dana dan urgensi yang diformulasikan ke dalam arah dan kebijakan, dimana di dalamnya terdiri dari tujuan pelaksanaan program, sasaran yang hendak dicapai, dan indikator pencapaian yang digunakan dalam mengukur keberhasilan dalam pelaksanaan program. Berikut ini adalah target pencapaian SPM Pemerintah Kota Cirebon tahun 2020 dan 2021.

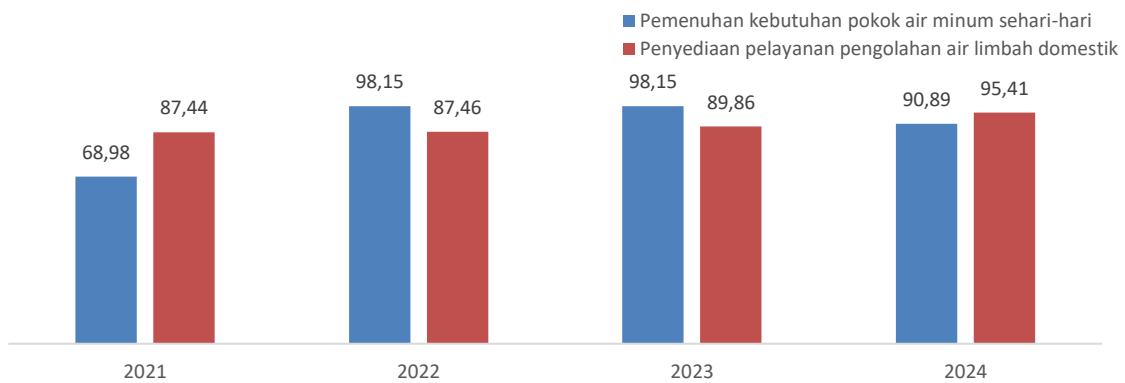
2.1.5.3 SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 /PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jenis Pelayanan Dasar dalam bagi Bidang Urusan Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
2. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.

Target capaian kinerja Pemerintah Daerah kabupaten/Kota dalam memberikan standar pelayanan Minimal bidang urusan Pekerjaan Umum dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100%.

Gambar II-36 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (%)



Sumber: spm.bangda.kemendagri.go.id

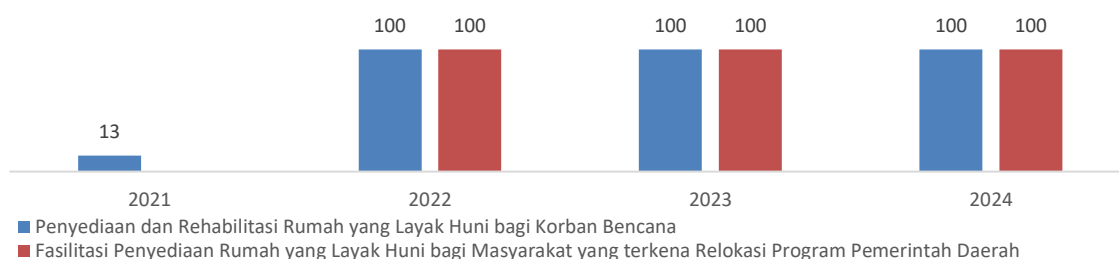
2.1.5.4 SPM Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana
2. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah.

Dalam Peraturan Wali Kota Cirebon No. 37 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat di Kota Cirebon, target tahunan untuk capaian target SPM Perumahan di Kota Cirebon yang telah ditetapkan hanya sampai dengan akhir tahun 2015. Oleh karena itu, target tahunan untuk tahun 2021 ini ditetapkan berdasarkan simulasi pencapaian target SPM Perumahan hingga tahun 2025.

Gambar II-37 Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



Sumber: spm.bangda.kemendagri.go.id

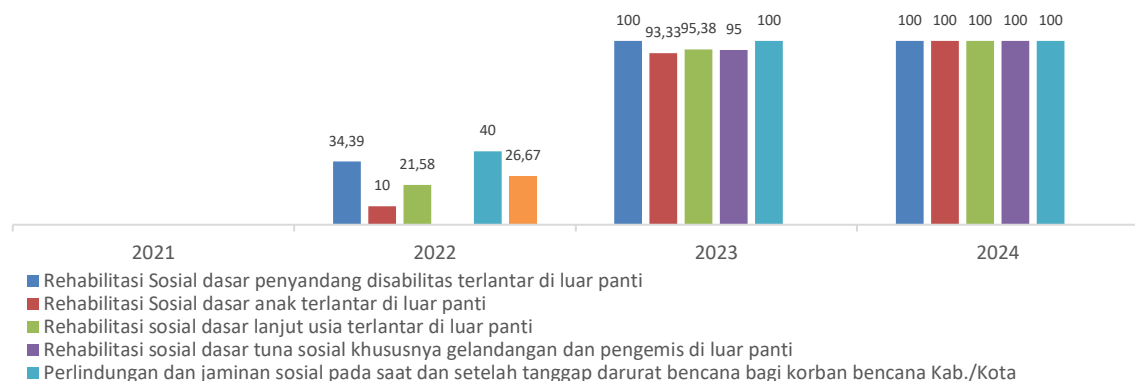
2.1.5.5 SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Linmas

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar disesuaikan dengan rencana capaian target sasaran terukur dari output kegiatan, dalam bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat untuk skala Pemerintah Kabupaten/ Kota antara lain:

1. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran;
2. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;

3. Pelayanan informasi rawan bencana;
4. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
6. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
7. Yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban;
8. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana; dan
9. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Bencana.

Gambar II-38 Capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas

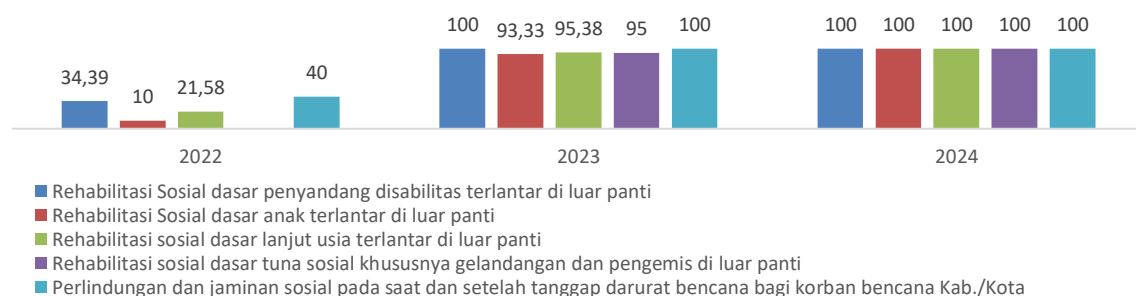


Sumber: spm.bangda.kemendagri.go.id

2.1.5.6 SPM Bidang Sosial

Pencapaian dan realisasi SPM Bidang Sosial yang dilaporkan adalah berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota serta berdasarkan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 36 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Kota Cirebon dan pelayanan dasar yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam peraturan tersebut, SPM Bidang Sosial mencakup 5 (lima) pelayanan dasar, yaitu

Gambar II-39 Capaian SPM Bidang Sosial (%)



Sumber: spm.bangda.kemendagri.go.id

2.1.6 Aspek Kerjasama Daerah

Kerjasama Pemerintah Daerah Kota Cirebon dengan Badan Usaha atau Pemerintah Daerah lain baik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi



maupun Pemerintah Kabupaten/Kota khususnya dalam penyediaan infrastruktur. Kerjasama Pemerintah Daerah Kota Cirebon dengan pihak lain dapat menjadi sumber pembiayaan Pemerintah Daerah Kota Cirebon untuk mendanai pelaksanaan pembangunan.

Kota Cirebon telah menjalin kerjasama cukup lama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan untuk pengadaan air bersih. Pada sektor pendidikan, Pemerintah Daerah Kota Cirebon menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta yang berada di sekitar wilayah Kota Cirebon. Adapun wacana kerjasama pembangunan TPPAS (Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah) Regional di Ciwaringin Cirebon yang telah disepakati pada 13 Desember 2017 oleh Gubernur Jawa Barat beserta Kepala Daerah Kab.Kota wilayah sekitar masih dalam proses. Selanjutnya untuk kerjasama Pemerintah Daerah Kota Cirebon dengan pihak lain dapat dikembangkan potensi jenis kerjasama selain dari kerjasama yang sudah pernah dilakukan. Berikut ini tabel jumlah kerjasama Pemerintah Daerah Kota Cirebon dengan pihak lain ini yang dilaksanakan hingga tahun 2022:

Tabel II-111 Perjanjian Kerja Sama Kota Cirebon dengan Pihak lain

Tahun	2020	2021	2022
Jumlah Kerja Sama	28	71	52

Sumber: Setda Kota Cirebon, 2024.

Kerjasama Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang sudah terjalin dan berkelanjutan seperti pengadaan air bersih yang di suplai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dan kerjasama dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta pada sektor pendidikan. Adapun wacana kerjasama pembangunan TPPAS (Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah) Regional di Ciwaringin Cirebon yang telah disepakati pada 13 Desember 2017 oleh Gubernur Jawa Barat beserta Kepala Daerah Kab.Kota wilayah sekitar masih dalam proses. Selanjutnya untuk kerjasama Pemerintah Daerah Kota Cirebon dengan pihak lain dapat dikembangkan potensi jenis kerjasama selain dari kerjasama yang sudah pernah dilakukan.

2.1.7 Aspek Kinerja Badan Usaha Milik Daerah

Perusahaan Umum Daerah adalah badan usaha milik daerah yang modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendiriannya dibentuk dengan Peraturan Daerah. Kota Cirebon memiliki lima perusahaan daerah, yaitu (1) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata Kota Cirebon; (2) Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon; (3) Perusahaan Umum Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon; (4) Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon; (5) Perusahaan Umum Daerah Pasar Berintan Kota Cirebon. Berikut kinerja BUMD Milik Daerah Kota Cirebon tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-86 Kinerja Badan Usaha Milik Daerah Kota Cirebon Tahun 2021



Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2026

No.	Kegiatan Usaha	Potensi Usaha	Kondisi Perusahaan
1.	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata Kota Cirebon		
	Bentuk kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Perumda Air Minum Tirta Giri Nata Kota Cirebon yaitu penyediaan, pengolahan dan pendistribusian air bersih bagi masyarakat Kota Cirebon dan sekitarnya	Jumlah Pegawai: 202 orang Jumlah Pelanggan: 57.542 pelanggan	<p>Produksi Air Jumlah produksi air yang dihasilkan pada tahun 2021 sebesar + 30.313.165 m³ mencapai tingkat 104,17% dari kapasitas produksi terpasang 29.100.000 M³.</p> <p>Distribusi Air Jumlah air yang dapat didistribusikan pada tahun 2021 sebesar + 27.928.293 M³ mencapai tingkat 105,39% dari jumlah distribusi air 26.500.000 M³. Terdiri dari penjualan air sebesar 16.408.147 M³ dan Non Rekening sebesar 98.533 M³ dan kehilangan air sebesar 11.421.613 M³.</p> <p>Tingkat Kehilangan Air Tingkat kehilangan air pada tahun 2021 sebesar 40,90% lebih tinggi dari standar kehilangan air nasional yaitu 20% dan lebih tinggi dari yang ditargetkan pada RKAP Perubahan tahun 2021 yaitu sebesar 31,83%.</p> <p>Pelayanan Suplai dan tekanan air serta pemakaian air pada beberapa wilayah belum merata mendapat suplai air 24 jam per hari karena tekanan air masih di bawah standar pelayanan sehingga diperlukan pengaturan tekanan dan upaya-upaya penanggulangan kehilangan air lebih intensif lagi.</p> <p>Investasi Investasi Perusahaan tahun 2021 sebesar Rp 7.981.648.969,94 atau 39,31% dari yang dianggarkan pada RKAP Perubahan tahun 2021 sebesar Rp 20.302.528.840,00. Sedangkan investasi dalam proses yang berkaitan dengan investasi untuk program pengembangan SPAM yang telah terealisasi pada tahun 2021 sebesar Rp 999.278.604,26 atau 0,95% dari RKAP Perubahan 2021 sebesar Rp 104.843.899.000,00.</p>
2.	Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon		
	Perumda BPR Bank Cirebon merupakan satu-satunya Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Kota Cirebon yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara masyarakat yang kelebihan dana (<i>surplus spending units</i>) dengan masyarakat yang kekurangan dana (<i>deficits spending units</i>). Kegiatan utama perusahaan adalah: Menghimpun dana dalam bentuk tabungan-tabungan (tabungan pasar-pasar, tabungan umum, tabungan debitur, tabungan simpati dan tabungan anak sekolah serta tabunganku) dan deposito berjangka (dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan). Menyalurkan dana melalui kredit yang diberikan (kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumtif).	Jumlah Pegawai: 86 orang	<p>Kredit yang diberikan berdasarkan jenis pinjaman, yaitu (1) Modal Kerja; (2) Investasi; (3) Konsumtif; (4) Lain-lain, dengan total Rp 202.022.961.255</p> <p>Tingkat kolektabilitas kredit yang diberikan: (1) Lancar 78,57 persen; (2) Dalam Perhatian Khusus 12,62% (3) Kurang Lancar 1,45 persen; (4) Diragukan 0,66 persen; dan (5) Macet 6,71 persen</p>
3.	Perusahaan Umum Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon		
	Dalam upaya untuk mendukung	Jumlah Pegawai: 18 orang	Unit Apotek Ciremai.



Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2026

No.	Kegiatan Usaha	Potensi Usaha	Kondisi Perusahaan
	<p>penyelenggaraan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan di bidang farmasi dan sarana kesehatan serta dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Kota Cirebon telah mendirikan Perusahaan Umum Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon</p>	<p>Perusahaan Umum Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon, memiliki lapangan usaha perusahaan, yang terdiri dari: Unit Apotek Ciremai Unit Pedagang Besar Farmasi (PBF) Unit Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Unit Laboratorium Klinik Ciremai ; dan Unit Usaha Lain di Bidang Farmasi</p>	<p>Unit apotek merupakan unit usaha yang sampai saat ini menjadi tulang punggung perusahaan. Adapun penjualan obat yang dilakukan apotek, melalui : Penjualan Obat Bebas Penjualan obat melalui Resep Dokter. Terdapat 6 dokter yang praktek di Perumda Farmasi Ciremai Penjualan Obat Kredit bekerjasama dengan Perumda Air Minum Tirta Giri Nata Kota Cirebon, Bank BJB, Yakes Telkom, OJK dan BPJS. Unit Pedagang Besar Farmasi (PBF). Unit Usaha PBF sampai dengan akhir Bulan Desember 2019 mengalami kerugian sehingga Unit PBF tidak beroperasi lagi dan pemberhentian Kerjasama dengan Pihak Ketiga. Unit Penyalur Alat Kesehatan (PAK). Unit usaha ini beroperasi tidak maksimal dikarenakan terbentur masalah perizinan dari Kementerian Kesehatan RI yang tidak dapat diproses disebabkan persyaratan tidak dapat dipenuhi yaitu bahwa untuk mendapatkan ijin PAK badan usaha harus berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah. Oleh sebab itu kerjasama dengan pihak ketiga maupun penjualan alat kesehatan sangat terbatas sekali. Selama tahun 2021 penjualan alat kesehatan terbatas alat kesehatan tertentu saja dan itu pun penjualannya atas nama Apotek Ciremai. Adapun sasaran penjualan alat kesehatan yang sudah dilakukan yaitu kepada Puskesmas yang ada di Kota Cirebon dan beberapa Puskesmas yang ada di Kabupaten Cirebon. Unit Laboratorium Klinik Ciremai. Untuk unit Laboratorium Klinik Ciremai pada tanggal 13 September 2021 sudah mulai beroperasi kembali meskipun Perumda Farmasi Ciremai Kota Cirebon hanya bekerja sama dengan Pihak Ketiga.</p>
4.	Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon		
	<p>Bisnis utama perusahaan bertumpu pada persediaan tanah, maka model bisnis yang di bangun dimulai dari mengidentifikasi seluruh persediaan tanah berdasarkan lokasi, produktivitas, pemanfaatan/ fungsi yang optimal, kondisi tanah, luas, legalitas tanah, nilai tanah, penguasaan saat ini, permasalahan yang ada di atasnya dan kondisi sosial pada lingkungan lokasi tanah yang dimaksud. Dari hasil identifikasi tersebut, dilakukan kajian/ analisa bisnisnya baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang untuk mengambil kebijakan dalam menyusun rencana bisnis. Atas dasar kajian/ analisis terhadap hasil identifikasi, manajemen menetapkan peruntukan tanah untuk disewakan dalam kategori di garap untuk pertanian/ perkebunan, dikerjasamakan membangun</p>		<p>Tahun 2021 pendapatan melebihi RKAP tetapi laba bersih masih di bawah target karena adanya peningkatan beban umum dan administrasi yang cukup signifikan, begitu pula bila dibandingkan dengan Tahun 2021. Pencapaian pendapatan melebihi target tetapi pencapaian laba bersih di bawah target (RKAP). Tahun 2021 Laba Kotor lebih tinggi dari Tahun 2020 tetapi laba usaha dan laba bersih menurun dibanding Tahun 2021 hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya beban umum dan administrasi.</p>



Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2026

No.	Kegiatan Usaha	Potensi Usaha	Kondisi Perusahaan
	perumahan (jangka pendek s.d. menengah), di bangun perumahan secara mandiri, dikerjasamakan dalam jangka panjang BOT misalnya dan bahkan di perjualbelikan.		
5	Perusahaan Umum Daerah Pasar Berintan Kota Cirebon		
	Kegiatan PUD Pasar Berintan Kota Cirebon dalam bidang usaha adalah : Menyelenggarakan pengelolaan di bidang sarana prasarana berupa bangunan pasar, toko, kios, los, dasaran dan lain-lain. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang perpasaran berupa penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan keindahan serta pemeliharaan bangunan-bangunan pasar dan lain-lain.	Adapun pasar di Kota Cirebon yang dikelola oleh Perumda Pasar Berintan Kota Cirebon terdiri atas: Pasar Pagi Pasar Kramat Balong Indah Plaza (Balinza) Pasar Kanoman Pasar Drajat Pasar Jagasatru Pusat Perdagangan Harjamukti (PPH) Pasar Perumnas Pasar Gunungsari Pasar Kesepuhan/ Besi	

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Cirebon, 2022

2.1.8 EVALUASI PELAKSANAAN HASIL RPKD KOTA CIREBON TAHUN 2024

Setiap tahapan penyusunan RKPD Kota Cirebon Tahun 2026, telah dilakukan pengendalian dan evaluasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2.1.8.1 EVALUASI KETERCAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Evaluasi terhadap hasil RKPD Kota Cirebon Tahun 2024 yang dilakukan, salah satunya terkait indikator kinerja program. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui ketercapaian program sesuai dengan target perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah dan menyampaikan laporan hasil evaluasi tersebut kepada Wali Kota melalui Bappelitbangda Kota Cirebon.

Pengukuran capaian kinerja dalam Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Triwulan IV Tahun 2024 dilakukan melalui pengukuran kinerja berdasarkan target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase.

Secara umum, persentase pencapaian kinerja pembangunan daerah dihitung dengan rumus yang hasilnya mengandung pengertian bahwa semakin tinggi persentase menggambarkan pencapaian kinerja yang semakin baik. Namun demikian, dalam pengukuran ini diperhatikan pula karakteristik indikator, dengan kondisi yang berbeda dan harus diperhatikan dalam pengukuran kinerja. Kondisi tersebut yaitu:



1. Semakin tinggi angka persentase menunjukkan pencapaian kinerja dan kondisi yang semakin baik (positif), maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. Semakin tinggi angka persentase menunjukkan pencapaian kinerja kondisi yang semakin buruk (negatif), maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{realisasi} - \text{rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Hasil penilaian menggunakan rumus di atas dapat menunjukkan rata-rata capaian indikator kinerja program/kegiatan. Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja program/kegiatan tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel T-E.1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada tabel berikut:

Tabel II-87 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 ≥	Sangat tinggi
2.	76 ≤ 90	Tinggi
3.	66 ≤ 75	Sedang
4.	51 ≤ 65	Rendah
5.	≤ 50	Sangat rendah

Sumber: Permendagri nomor 86 tahun 2017

Dari hasil perhitungan keseluruhan pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam setiap Bidang Urusan, diperoleh informasi bahwa Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2024 ini memiliki pencapaian kinerja tinggi dengan nilai capaian rata-rata sebesar 88,04% dan penyerapan anggaran yang juga Tinggi dengan nilai capaian rata-rata sebesar 85,20%.

Tabel II-88 Realisasi Kinerja dan Anggaran Masing-masing Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah Kota Cirebon Tahun 2024

No	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
A	URUSAN WAJIB	69,86	Sedang	65,58	Rendah
1	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	48,00	Sangat Rendah	50,00	Sangat Rendah
1.01	Pendidikan	45,00	Sangat Rendah	98,00	Sangat Tinggi
1.02	Kesehatan	64,00	Rendah	63,00	Rendah
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	142,00	Sangat Tinggi	75,00	Sedang



Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2026

No	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	18,00	Sangat Rendah	42,00	Sangat Rendah
1.05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	77,00	Tinggi	92,00	Sangat Tinggi
1.06	Sosial	82,00	Tinggi	97,00	Sangat Tinggi
2	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	91,72	Sangat Tinggi	81,17	Tinggi
2.07	Tenaga Kerja	84,00	Tinggi	82,00	Tinggi
2.08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	107,00	Sangat Tinggi	82,00	Tinggi
2.09	Pangan	96,00	Sangat Tinggi	91,00	Sangat Tinggi
2.10	Pertanahan	0,00	Sangat Rendah	0,00	Sangat Rendah
2.11	Lingkungan Hidup	114,00	Sangat Tinggi	93,00	Sangat Tinggi
2.12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	92,00	Sangat Tinggi	90,00	Tinggi
2.13	Pemberdayaan Masyarakat Desa	97,00	Sangat Tinggi	16,00	Sangat Rendah
2.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	109,00	Sangat Tinggi	77,00	Tinggi
2.15	Perhubungan	97,00	Sangat Tinggi	92,00	Sangat Tinggi
2.16	Komunikasi dan Informatika	103,00	Sangat Tinggi	91,00	Sangat Tinggi
2.17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	78,00	Tinggi	82,00	Tinggi
2.18	Penanaman Modal	100,00	Sangat Tinggi	87,00	Tinggi
2.19	Kepemudaan dan Olahraga	92,00	Sangat Tinggi	107,00	Sangat Tinggi
2.20	Statistik	100,00	Sangat Tinggi	81,00	Tinggi
2.21	Persandian	93,00	Sangat Tinggi	95,00	Sangat Tinggi
2.22	Kebudayaan	86,00	Tinggi	97,00	Sangat Tinggi
2.23	Perpustakaan	115,00	Sangat Tinggi	95,00	Sangat Tinggi
2.24	Kearsipan	88,00	Tinggi	103,00	Sangat Tinggi
3	URUSAN PILIHAN	88,17	Tinggi	90,93	Tinggi
3.25	Kelautan dan Perikanan	100,06	Sangat Tinggi	92,26	Sangat Tinggi
3.26	Pariwisata	80,50	Tinggi	97,54	Sangat Tinggi
3.27	Pertanian	95,87	Sangat Tinggi	90,66	Tinggi
3.28	Perdagangan	79,40	Tinggi	79,20	Tinggi
3.29	Perindustrian	85,00	Tinggi	95,00	Sangat Tinggi
4	PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	99,50	Sangat Tinggi	73,50	Sedang
4.01	Sekretariat Daerah	100,00	Sangat Tinggi	65,00	Rendah
4.02	Sekretariat DPRD	99,00	Sangat Tinggi	82,00	Tinggi
5	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	92,80	Sangat Tinggi	89,00	Tinggi
5.01	Perencanaan	100,00	Sangat Tinggi	85,00	Tinggi
5.02	Keuangan	85,00	Tinggi	90,00	Tinggi
5.03	Kepegawaian	97,00	Sangat Tinggi	87,00	Tinggi



Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2026

No	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
5.04	Pendidikan dan Pelatihan	100,00	Sangat Tinggi	89,00	Tinggi
5.05	Penelitian dan Pengembangan	82,00	Tinggi	94,00	Sangat Tinggi
6	PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	101,00	Sangat Tinggi	94,00	Sangat Tinggi
6.01	Inspektorat	101,00	Sangat Tinggi	94,00	Sangat Tinggi
7	PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN	72,00	Sedang	76,00	Tinggi
7.01	Kecamatan	72,00	Sedang	76,00	Tinggi
8	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	96,10	Sangat Tinggi	95,10	Sangat Tinggi
8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik	96,10	Sangat Tinggi	95,10	Sangat Tinggi
	TOTAL	88,04	Tinggi	85,20	Tinggi

Sumber: Hasil evaluasi RKPD tahun anggaran 2024

2.1.8.2 REKOMENDASI BERDASARKAN EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2024

Rekomendasi tindak lanjut untuk pelaksanaan RKPD tahun anggaran 2026 atas dasar hasil evaluasi RKPD tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi anggaran kegiatan yang ada dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan, serta mengusulkan penambahan jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) kepada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.
2. Meningkatkan koordinasi dan peran serta perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan sebagai upaya pencapaian kinerja yang lebih baik.
3. Selalu melakukan koordinasi dan konsultasi baik ke Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi terkait pelaksanaan Program Kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan terbaru.
4. Untuk mengatasi kekurangan sumber daya manusia di beberapa perangkat daerah, dapat dilakukan pendataan jumlah pegawai oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Cirebon dan melakukan distribusi dengan tepat kepada perangkat daerah yang kekurangan pegawai.
5. Melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di perangkat daerah terhadap pelaksanaan tupoksi masing-masing dengan mengikutsertakan pegawainya dalam pendidikan dan pelatihan atau juga bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas dan kinerja.
6. Percepatan dalam pelaksanaan program kegiatan dan juga penyerapan anggaran secara tepat dan efisien.

2.2 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.2.1 Permasalahan Pembangunan Daerah Yang Berhubungan Dengan



Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

Pembangunan Kota Cirebon telah menunjukkan kemajuan dari tahun ke tahun. Berdasarkan realisasi indikator makro pembangunan, memperlihatkan angka yang terus meningkat dengan capaian yang cukup menggembirakan. Namun demikian, angka-angka tersebut tidak lantas membuat Kota Cirebon berhenti berbenah untuk terus mengatasi permasalahan dan isu strategis yang muncul. Permasalahan di berbagai aspek pembangunan harus segera ditangani melalui pembangunan yang berkelanjutan. Disamping itu, menghadapi perubahan lingkungan strategis yang sangat pesat di masa depan memunculkan isu-isu strategis yang perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah pada subbab aspek demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan aspek daya saing daerah serta hasil evaluasi pembangunan daerah sampai dengan tahun 2023, maka ada beberapa permasalahan pembangunan yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Cirebon secara makro yaitu:

2.2.1.1 *Kemiskinan*

Permasalahan kemiskinan yang multidimensional melibatkan banyak aspek yang kompleks, termasuk aspek sosial, ekonomi dan politik. Masalah kemiskinan sebagai hal utama yang harus dianalisis untuk perencanaan pembangunan ke depan secara holistik. Faktor penyebab masyarakat menjadi miskin antara lain karena keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan yang buruk, pengangguran dan ketidakstabilan pekerjaan, tidak setara sosial dan ekonomi, infrastruktur dan akses sumber daya yang buruk termasuk akses yang terbatas terhadap air bersih, sanitasi, dan listrik serta adanya siklus kemiskinan dimana kemiskinan seringkali diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Faktor-faktor lain seperti tidak setara gender, kondisi alam, faktor budaya dan kebijakan pemerintah dapat memperburuk masalah kemiskinan di Kota Cirebon.

Jumlah penduduk miskin di Kota Cirebon tahun 2024 triwulan III sebesar 29.170 atau 9,02% jauh di atas persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Barat yang sebesar 7,08%. Jika dilihat dari indeks kedalaman kemiskinan (P_1) Kota Cirebon sebesar 1,18 di tahun 2024 menandakan jarak pengeluaran antara penduduk miskin dengan garis kemiskinan semakin dekat, angka ini masih di atas angka Provinsi Jawa Barat yang sebesar 1,05. Sedangkan berdasarkan indeks keparahan kemiskinan (P_2) Kota Cirebon sebesar 0,25 di tahun 2024 menandakan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin kecil, angka ini masih di atas angka Provinsi Jawa Barat yang sebesar 0,24. Menghapus kemiskinan menjadi tujuan pertama dari agenda TPB di tahun 2030. Jumlah penduduk miskin ekstrim kota Cirebon tahun 2023 sebesar 0,34% yang harus ditangani oleh Pemerintah Kota Cirebon menuju 0%.

2.2.1.2 *Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi*

LPE Kota Cirebon masih lamban di masa pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 perlu menjadi perhatian penting bagi Pemerintah Kota



Cirebon. Pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon tercatat 6,29 persen sebelum terjadi pandemi di tahun 2019 berada di atas LPE Provinsi Jawa Barat yang sebesar 5,65 persen dengan peringkat ke 8 nilai LPE Kabupaten/Kota se Jawa Barat. Namun pada tahun 2022 LPE Kota Cirebon sebesar 5,10 persen berada di bawah LPE Provinsi Jawa Barat yang sebesar 5,45 persen dan berada diperingkat 15 nilai LPE Kabupaten/Kota se Jawa Barat. Posisi LPE yang belum mampu menembus angka rata-rata menjadi hal yang sangat penting untuk diantisipasi karena menunjukkan masih terdapat pelemahan untuk pencapaian LPE tahun selanjutnya. Hal ini dibuktikan dengan capaian LPE tahun 2024 menurun menjadi sebesar 5,02%. Angka ini hampir menyentuh angka LPE tahun 2013 yang sebesar 4,90%. Perlambatan LPE ini disebabkan oleh menurunnya sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Beban perlambatan LPE ini juga perlu mendapatkan perhatian pada Indeks Gini dimana pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon belum dapat merata dirasakan oleh semua masyarakat kota Cirebon. Indeks Gini Kota Cirebon tahun 2023 masih sebesar 0,468 persen. Angka ini masih berada di atas angka Indeks Gini Provinsi Jawa Barat yang sebesar 0,425 persen dan Indeks Gini Nasional yang sebesar 0,388.

Beberapa permasalahan pokok lain selain Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi telah dirangkum berdasarkan aspek Sumber Daya Manusia, Ekonomi, Lingkungan Hidup, Infrastruktur Wilayah, dan Tata Kelola Pemerintahan:

A. Aspek Sumber Daya Manusia

Permasalahan pokok yang terjadi pada Aspek Sumber daya Manusia adalah Kesenjangan Kualitas Sumber Daya Manusia yang disebabkan oleh permasalahan-permasalahan seperti:

1. Masih terdapat penduduk usia produktif yang memiliki daya saing rendah
2. Rendahnya penggunaan identitas budaya Cirebon di masyarakat.
3. Belum meratanya derajat Kesehatan masyarakat.
4. Masih adanya kesenjangan kualifikasi pendidikan di masyarakat.

B. Aspek Ekonomi

Permasalahan pokok yang terjadi pada aspek Ekonomi yaitu Belum optimalnya pertumbuhan potensi ekonomi lokal yang disebabkan oleh beberapa hal seperti:

1. Masih terbatasnya pemasaran produk UMKM & IKM
2. Masih terbatasnya akses keuangan UMKM pada lembaga keuangan
3. Masih terbatasnya inovasi dalam pengembangan produk UMKM & IKM
4. Belum optimalnya pemanfaatan shelter bagi sektor informal
5. Belum maksimalnya penataan dan pengelolaan pasar tradisional dari kualitas layanan dan okupansi kios pasar
6. Kurang signifikannya peningkatan kualitas koperasi
7. Belum optimalnya pengelolaan pariwisata lokal dan industri kreatif sebagai sektor ekonomi potensial
8. Belum optimalnya sinkronisasi pelayanan izin usaha dengan



pemanfaatan ruang dan assessment jenis usaha

9. Tingginya ketergantungan terhadap ketersediaan dan produksi pangan

C. Aspek Infrastruktur Wilayah

Permasalahan pokok yang terjadi pada aspek infrastruktur Wilayah adalah belum mantapnya kondisi infrastruktur dasar diantaranya:

1. Sistem transportasi massal belum optimal
2. Penanganan banjir/genangan di Kota Cirebon
3. Tingkat kemacetan di Kota Cirebon belum tertangani
4. Pengelolaan sampah di TPA belum optimal
5. Kondisi infrastruktur perkotaan kurang merata
6. Perlu peremajaan terhadap kondisi infrastruktur non fisik/jaringan informasi digital

D. Aspek Lingkungan Hidup

Permasalahan pokok yang terjadi pada aspek Lingkungan Hidup yaitu: Degradasi kualitas lingkungan hidup perkotaan yang disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

1. Belum terpenuhinya 20 persen Luasan RTH publik di Kota Cirebon
2. Belum optimalnya pengelolaan persampahan.
3. Kualitas lingkungan hidup belum mencapai kategori baik
4. Tingkat kerentanan bencana di Kota Cirebon relatif tinggi
5. Dampak perubahan iklim di lingkungan perkotaan meningkat
6. Degradasi ekosistem lingkungan di kawasan pesisir
7. Pengendalian tutupan lahan yang rendah
8. Potensi Keanekaragaman hayati yang rendah

E. Aspek Tata Kelola Pemerintahan

Permasalahan pokok yang terjadi pada tata kelola pemerintahan di Kota Cirebon antara lain:

E.1 Belum optimalnya sistem kerja birokrasi.

E.2 Belum optimalnya kualitas pelayanan publik.

2.2.2 Isu Strategis dan Tema Pembangunan Kota Cirebon Tahun 2026

Isu strategis pembangunan merujuk pada tantangan yang memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan. Isu strategis sering kali menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan, karena memiliki potensi untuk mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat serta kemajuan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Perumusan isu strategis Kota Cirebon tahun 2026 disusun berdasarkan gambaran umum hasil evaluasi pelaksanaan dan permasalahan pembangunan tahun 2024 serta dikaitkan dengan isu strategis/tantangan dan arah kebijakan pada RKP 2026 dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026. Selain itu, isu strategis dihimpun berdasarkan pelaksanaan *focus group discussion* serta masukan dalam penyelenggaraan kegiatan Musrenbang RKPD Kota Cirebon Tahun 2026. Berikut ini beberapa isu strategis di Kota Cirebon :



2.2.2.1 *Peningkatan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia.*

Peningkatan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia merupakan isu penting yang berdampak langsung pada kemajuan ekonomi, sosial dan pembangunan suatu daerah. Rendahnya peningkatan dan pemberdayaan sumber daya manusia demi kemajuan ekonomi kota menjadi hal yang harus diperhatikan secara serius. Pemerintah Kota Cirebon telah melakukan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Beberapa kebijakan tersebut termasuk dalam upaya penguatan pemberdayaan masyarakat termasuk didalamnya upaya peningkatan kualitas keluarga, peningkatan layanan dasar dan perlindungan sosial, akselerasi pertumbuhan, dan pemerataan pembangunan berkelanjutan, serta peningkatan produktivitas daya saing daerah. Selain itu, perencanaan pembangunan juga difokuskan pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan dan pengembangan budaya. Hal ini sejalan dengan upaya untuk mewujudkan kota kreatif berbasis budaya dan sejarah serta mengatasi permasalahan seperti peningkatan angka kemiskinan, penurunan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kenaikan jumlah pengangguran. Selain itu, terdapat juga upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis masyarakat untuk mengatasi masalah pengangguran di wilayah Kota Cirebon.

2.2.2.2 *Optimalisasi Pertumbuhan Potensi Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing Tinggi, Inklusif, dan Berkelanjutan*

Potensi ekonomi lokal yang memiliki daya saing tinggi, inklusif, dan berkelanjutan menciptakan landasan yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan ekonomi lokal Kota Cirebon mengacu pada aktivitas ekonomi yang tumbuh dan memiliki potensi daya saing. Cakupan aktivitas ekonomi lokal di Kota Cirebon seperti UMKM, IKM, sektor ekonomi kreatif, pariwisata lokal, perikanan, termasuk aktivitas yang terjadi pada pasar tradisional dan modern.

Fokus pada daya saing tinggi menuntut pemanfaatan sumber daya lokal, pengembangan inovasi, dan peningkatan produktivitas. Dengan memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif, komunitas lokal dapat menonjolkan sektor-sektor unggulannya dalam pasar global. Selanjutnya, inklusifitas dalam konteks ini menekankan pentingnya memberdayakan semua lapisan masyarakat, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah serta industri kecil dan menengah. Dengan menyediakan akses terhadap pelatihan, pendanaan, dan pasar, ekonomi lokal inklusif menciptakan peluang yang setara untuk pertumbuhan usaha bagi semua. Terakhir, aspek berkelanjutan merujuk pada prinsip-prinsip pembangunan yang memperhatikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Menerapkan praktik-praktik yang ramah lingkungan, mendukung pekerjaan yang layak, dan mempromosikan inklusif sosial adalah kunci untuk mencapai ekonomi lokal yang berkelanjutan. Dengan memadukan ketiga dimensi ini, potensi ekonomi lokal dapat dioptimalkan, memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat dan memperkuat daya saing di tingkat yang lebih luas.



Dampak yang akan ditimbulkan ketika isu ini mampu diintervensi dengan baik yaitu peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja, peningkatan kapasitas pelaku usaha dari segi akses keuangan, inovasi produk, pemasaran, dan adaptasi teknologi, peningkatan jaringan infrastruktur pendukung sarana ekonomi, peningkatan daya saing potensi ekonomi dari sektor pariwisata dan industri kreatif, dan peningkatan peluang investasi yang pada akhirnya diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan, penangguran dan ketimpangan.

2.2.2.3 *Ketahanan Pangan dan Air*

Isu ketahanan pangan dan air adalah tantangan yang makin mendesak akibat pertumbuhan populasi, urbanisasi, perubahan iklim dan tekanan terhadap sumber daya alam. Keduanya saling terkait karena air adalah elemen krusial dalam produksi pangan. Rentannya ketahanan pangan, kecukupan terhadap nilai produksi/pengadaan pangan kota harus diantisipasi demi meningkatkan angka kecukupan pangan, pola pangan harapan dan mengurangi malnutrisi. Masalah pokok ketahanan pangan di Kota Cirebon mencakup tingginya ketergantungan terhadap ketersediaan dan produksi pangan, yang dapat menyebabkan kerentanan terhadap gangguan pasokan dan fluktuasi harga pangan. Pertama-tama, ketergantungan pada pasokan pangan luar kota atau bahkan luar provinsi dapat meningkatkan risiko ketidakstabilan pasokan, terutama dalam situasi darurat atau krisis kesehatan seperti pandemi. Terbatasnya produksi lokal juga dapat berdampak negatif terhadap ketahanan pangan, mengingat adanya risiko gangguan dalam rantai pasokan yang panjang.

Selain itu, faktor perubahan iklim dan bencana alam dapat mempengaruhi produksi pangan lokal di Kota Cirebon. Jika kota ini terlalu bergantung pada pasokan dari luar wilayah, kerentanan terhadap perubahan iklim dan bencana alam dapat meningkat, menyebabkan ketidakpastian dalam ketersediaan pangan. Dalam konteks ini, diversifikasi sumber pasokan pangan dan pendorong produksi lokal menjadi krusial. Mendorong pertanian perkotaan, mendukung petani lokal, dan membangun sistem distribusi pangan yang efisien dapat membantu mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar kota. Inisiatif ini juga dapat meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat lokal dan menciptakan lapangan kerja.

Selain itu, edukasi masyarakat mengenai pentingnya konsumsi pangan lokal dan budaya makanan sehat dapat memberikan dukungan kepada usaha lokal dan meningkatkan ketahanan pangan di tingkat komunitas. Pembangunan kebijakan yang mendukung inisiatif pertanian perkotaan dan penyediaan insentif bagi pelaku usaha lokal juga menjadi langkah penting untuk mengatasi masalah ketergantungan pada pasokan dan produksi pangan di Kota Cirebon. Dengan demikian, upaya bersama dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dapat membantu membangun ketahanan pangan yang lebih kokoh dan berkelanjutan di tingkat lokal.

Sebagai wilayah yang memiliki karakteristik urban ketersediaan air merupakan isu penting dalam menjamin keberlangsungan aktifitas dari skala



rumah tangga hingga aktifitas ekonomi dalam berbagai tingkatan. Sayangnya ketersediaan air justru menjadi salah satu tantangan geografis di Kota Cirebon dimana tidak terdapat banyak sumber air bersih yang memadai untuk mencukupi kebutuhan masyarakat kota secara mandiri. Kurangnya ketersediaan kualitas, kuantitas kontinuitas, dan keterjangkauan layanan dan sumber air dan layanan sanitasi kota menjadi persoalan serius yang harus diatasi.

2.2.2.4 *Optimalisasi Ruang Kota Tanpa Melampaui Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan*

Optimalisasi ruang kota menjadi sangat penting dalam konteks pertumbuhan perkotaan yang cepat dan berkelanjutan. Untuk menjawab kebutuhan populasi yang terus berkembang, diperlukan perencanaan perkotaan yang bijak dan berkelanjutan. Optimalisasi ruang kota adalah langkah untuk memastikan bahwa pertumbuhan perkotaan tidak melampaui daya dukung daya tampung lingkungan.

Ruang kota bukanlah sumber daya tidak terbatas, melainkan suatu ekosistem yang memerlukan pemeliharaan dan pemanfaatan yang berkelanjutan. Optimalisasi ruang kota mencakup penggunaan lahan yang efisien, pelestarian ruang terbuka hijau, dan pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan. Hal ini, harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan, keseimbangan ekosistem perkotaan, dan kemampuan alam untuk menanggung beban dari aktivitas manusia. Integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan perkotaan diharapkan dapat mengoptimalkan pertumbuhan perkotaan, menjaga keanekaragaman lingkungan, serta memastikan kesejahteraan dan kenyamanan bagi penduduk kota. Minimnya perencanaan adaptasi, mitigasi, dan pengelolaan informasi kebencanaan kota.

2.2.2.5 *Tata Kelola Pemerintahan yang inovatif, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif.*

Tata Kelola Pemerintahan yang inovatif, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif mengacu pada upaya pemerintah Kota Cirebon untuk mengembangkan sistem tata kelola yang lebih baik dan efektif dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Inovasi dalam tata kelola pemerintahan daerah dapat mencakup digitalisasi pelayanan publik, kolaborasi antar daerah dan pelaku pembangunan, koordinasi perencanaan dan penganggaran untuk percepatan pembangunan, serta peluang dan tantangan dalam penerapan kontrak kinerja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Transformasi riset dan inovasi juga dapat membantu dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

2.2.2.6 *Kemantapan Jaringan Infrastruktur Perkotaan Yang Inklusif Dan Berketahanan Di Seluruh Wilayah*

Kemantapan jaringan infrastruktur perkotaan yang mendukung kehidupan dan aktivitas masyarakat menjadi tantangan bagi pemerintah Kota Cirebon. Isu kemantapan jaringan infrastruktur yang inklusif dan



berketahanan berkaitan dengan bagaimana kota merencanakan, membangun, dan memelihara infrastruktur yang tidak hanya kuat dan tahan lama tetapi juga mampu mengakomodasi seluruh lapisan masyarakat dan mampu bertahan serta pulih dari berbagai tantangan dan bencana. Kemantapan jaringan infrastruktur meliputi sistem transportasi yang terintegrasi, kualitas jalan yang baik, ketersediaan energi dan kelistrikan, ketersediaan air minum dan sanitasi, infrastruktur pelayanan publik sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan penelaahan isu strategis dan mempertimbangkan tema pembangunan yang dapat mendukung pelaksanaan RPJPD Kota Cirebon Tahun 2025-2045 dan diturunkan dalam RPJMD Kota Cirebon Tahun 2025-2029 maka Tema Pembangunan Kota Cirebon Tahun 2026 adalah:

“Percepatan penataan lingkungan perkotaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menuju Kota Cirebon yang SETARA berkelanjutan.”

Tema tersebut memiliki makna bahwa pemerintah kota berupaya melakukan percepatan penataan ruang dan lingkungan perkotaan guna meningkatkan kualitas layanan dasar, daya dukung infrastruktur, dan keteraturan tata ruang. Penataan ini diarahkan untuk memperkuat konektivitas, menciptakan ruang hidup yang tertata, sehat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat serta meningkatkan daya saing wilayah. Pembangunan difokuskan pada pertumbuhan yang inklusif, merata, dan berkeadilan, sesuai dengan semangat mewujudkan Kota Cirebon yang SETARA. Seluruh program dan kegiatan juga diselaraskan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh generasi sekarang dan mendatang. Tema ini menjadi landasan dalam perumusan prioritas pembangunan yang selaras dengan agenda nasional, provinsi, dan visi jangka menengah daerah.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan rencana pembangunan daerah tahunan yang memuat Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah tahun 2026 yang meliputi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan. Kerangka ekonomi makro menggambarkan arah dan kebijakan ekonomi Kota Cirebon tahun 2026 berdasarkan analisa dan proyeksi dengan berdasarkan pada kondisi perekonomian tahun 2025. Dalam perumusan kebijakan perekonomian tersebut mempertimbangkan pula kebijakan pembangunan ekonomi Jawa Barat, Nasional dan Global.

Kerangka pendanaan daerah menjadi bagian yang sangat penting dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan. Analisis kerangka pendanaan memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2026. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi

3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya pemerintah daerah dalam rangka memantapkan pembangunan tematik tahun 2026 dan diwujudkan dengan mendorong serta memfasilitasi berjalannya ekonomi yang berbasis wilayah, dan berpihak kepada masyarakat. Fokus pada ekonomi kerakyatan yang senantiasa menyelaraskan antara kondisi dan potensi wilayah bertujuan untuk menggerakkan perekonomian yang mampu memperluas lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan.

Pada tingkat pusat arah kebijakan ekonomi nasional diselaraskan sesuai dengan tema pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026. Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 adalah "**Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif**". Tema ini berfokus pada dua klaster prioritas utama, yaitu penguatan ketahanan pangan dan energi serta pengembangan ekonomi yang mampu memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Kedaulatan Pangan dan Energi

- Fokus pada optimalisasi Bulog, pelaksanaan lumbung pangan, peningkatan bauran ethanol dan biodiesel, serta pengembangan energi terbarukan.
- Tujuannya adalah mencapai kemandirian dan ketersediaan pangan dan energi nasional yang stabil.

Ekonomi yang Produktif dan Inklusif

- Mencakup program seperti hilirisasi sumber daya alam, peningkatan produktivitas industri, transformasi digital, dan peningkatan investasi.
- Menekankan pada pengentasan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan yang merata dan tidak ada warga yang tertinggal.



Tema ini menjadi landasan dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 dan menguraikan Prioritas Nasional (PN) yang akan dijalankan pada tahun 2026. Prioritas kerja Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 berfokus pada kedaulatan pangan, energi, dan air, peningkatan produktivitas ekonomi melalui transformasi digital dan penguatan daya saing, serta penjaminan pembangunan inklusif untuk seluruh warga. Program prioritas unggulan meliputi program Makan Bergizi Gratis, pembangunan 3 juta unit rumah, sekolah rakyat dan digitalisasi pendidikan, serta program pengurangan kemiskinan.

Prioritas Utama RKP 2026

Prioritas RKP 2026 didasarkan pada "trisula pembangunan", yaitu:

- Sumber Daya Manusia (SDM) Ekonomi yang Tinggi dan Berkualitas : Meningkatkan SDM unggul sebagai fondasi Indonesia Emas 2045.
- Pengurangan Kemiskinan: Memastikan pembangunan yang inklusif, di mana kelompok rentan juga merasakan manfaatnya.
- Peningkatan Kedaulatan Pangan, Energi, dan Air: Meliputi pengembangan energi terbarukan, pengelolaan air, hingga pengembangan pangan melalui food estate dan pemanfaatan pekarangan.

Program Unggulan RKP 2026

Beberapa program prioritas yang diusung untuk RKP 2026:

- Makan Bergizi Gratis: Program untuk meningkatkan gizi masyarakat.
- Pembangunan 3 Juta Unit Rumah: Menangani kebutuhan perumahan masyarakat.
- Sekolah Rakyat dan Digitalisasi Pendidikan: Memastikan akses pendidikan yang lebih baik dan merata.
- Program Pengurangan Kemiskinan Terpadu: Mengatasi kemiskinan secara menyeluruh.
- Giant Sea Wall Pesisir Utara Jawa: Mengatasi defisit air baku, abrasi, dan penurunan muka tanah.

Penekanan dan Sinergi

- Prinsip Inklusivitas Total:
Memastikan seluruh warga negara, termasuk kelompok rentan, mendapatkan manfaat nyata dari pembangunan.
- Sinergi Multi-Pihak:
Pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat dalam menyukseskan agenda pembangunan.
- Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran:
RAPBN 2026 harus menjadi instrumen fiskal yang mendukung penuh RKP, dan RKP 2026 menjadi pedoman arah pembangunan nasional.
- Fokus pada Hasil Nyata:
Mendorong cara kerja baru yang lebih sinergis dan terfokus pada hasil, bukan hanya pada aktivitas rutin.

Tujuh PN tersebut merupakan Agenda Pembangunan yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2025–2029 dan tetap pada RKP Tahun 2026 sebagai



koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan untuk mencapai target indikator makro yaitu:

NO	INDIKATOR MAKRO	TARGET	KET
1.	Pertumbuhan Ekonomi:	5,2%–5,8%	
2.	Laju Inflasi:	1,5%–3,5%	
	Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$):	16.500–16.900	
3.	Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%):	6,6%–7,2%	
4.	Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/Barel):	60–80	
5.	Lifting Minyak Bumi (ribu barel per hari):	605–620	
6.	Lifting Gas Bumi (ribu barel setara minyak per hari):	953–1.017	

3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Barat

Tema Pembangunan Jawa Barat 2026 adalah "Menyongsong Jawa Barat Istimewa: Percepatan Transformasi Layanan Dasar". Tema ini mencerminkan fokus Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, yang bertujuan mempercepat peningkatan kualitas dan pemerataan layanan dasar bagi masyarakat Jabar, termasuk dalam aspek ekonomi, kesehatan, dan lingkungan.

Tema Pembangunan Jawa Barat 2026 adalah "Menyongsong Jawa Barat Istimewa: Percepatan Transformasi Layanan Dasar". Tema ini mencerminkan fokus Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, yang bertujuan mempercepat peningkatan kualitas dan pemerataan layanan dasar bagi masyarakat Jabar, termasuk dalam aspek ekonomi, kesehatan, dan lingkungan.

Poin-poin penting dari tema pembangunan Jabar 2026:

- Percepatan Transformasi Layanan Dasar:
Tema ini menekankan pentingnya mempercepat peningkatan mutu layanan dasar yang dapat diakses dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
- Fase Penting RPJMD 2025-2029:
Tahun 2026 menjadi tahun penting dalam pelaksanaan RPJMD Jawa Barat periode 2025-2029.
- Fokus pada Kesejahteraan Masyarakat:
Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah melalui strategi pembangunan yang berkelanjutan.
- Pembangunan Berkelanjutan:



Pembangunan akan didasarkan pada keberlanjutan lingkungan dan pemanfaatan potensi sumber daya lokal secara berdaya saing tinggi.

- Beragam Program Unggulan:

Tema ini mencakup berbagai program prioritas, termasuk pengembangan ekonomi, penguatan layanan kesehatan dan pendidikan, serta program ketahanan pangan.

Arah kebijakan Pembangunan Jawa Barat tahun 2026 akan fokus pada peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi melalui UMKM dan pariwisata, pembangunan infrastruktur yang merata, peningkatan swasembada pangan, pelestarian lingkungan hidup, serta penanggulangan masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan stunting. Strategi ini dirancang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan diimplementasikan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026.

3.1.3 Kondisi Ekonomi Daerah

Kondisi perekonomian daerah menggambarkan perkembangan kinerja indikator makro ekonomi daerah. Kota Cirebon menjadi bagian dari wilayah pendukung kawasan Metropolitan Segitiga Reban, berpotensi menjadi motor pertumbuhan ekonomi wilayah Jawa Barat bagian timur-utara. Namun potensi ini tentu harus dikelola dengan berbagai strategi pembangunan, yaitu strategi pembangunan yang berbasis pada pengembangan industri yang terintegrasi, inovatif, kolaboratif, berdaya saing tinggi dan berkelanjutan.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon mencatat Ekonomi Kota Cirebon Tahun 2024 mengalami pertumbuhan 5,01 persen terhadap tahun sebelumnya. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,99 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 5,96 persen. Pertumbuhan tersebut terjadi hampir pada semua lapangan usaha, kecuali lapangan usaha konstruksi, jasa keuangan dan asuransi, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib mengalami kontraksi. Perekonomian Kota Cirebon berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Tahun 2024 mencapai Rp28.772,59 milyar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp18.934,40 milyar.

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu tolak ukur penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi nasional atau daerah adalah tingkat pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, serta meningkatkan hubungan ekonomi regional (BPS, 2016).

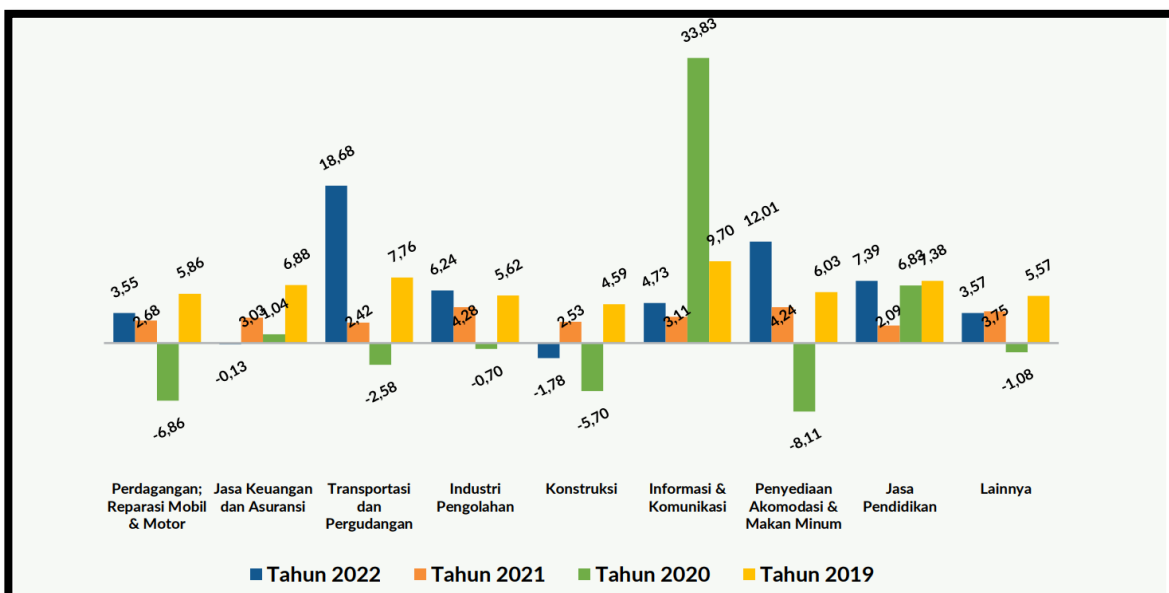
Untuk mengukur sejauh mana keberhasilan kinerja perekonomian digunakan salah satu indikator makro yaitu Produk Domestik Regional Bruto



(PDRB). Indikator ini dapat menggambarkan pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu tertentu, menggambarkan struktur ekonomi dan hasil analisisnya menggambarkan kinerja sektor perekonomian. Di samping itu, data statistik dan indikator ekonomi dapat digunakan untuk menganalisis dan menentukan arah kebijaksanaan serta mengevaluasi hasil pembangunan.

Ekonomi Kota Cirebon Tahun 2024 tumbuh 5,02 Persen. Perekonomian Kota Cirebon berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Tahun 2024 mencapai Rp 30.540,59 milyar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp19.884,40 milyar. Ekonomi Kota Cirebon Tahun 2024 mengalami pertumbuhan 5,02 persen terhadap tahun sebelumnya. Peran terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Cirebon pada tahun 2024 berasal dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor yang mencapai 27,31 persen, kemudian peran terbesar kedua adalah lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan dengan peran sebesar 15,14 persen. Kemudian disusul lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 10,86 persen.

Ekonomi Kota Cirebon Tahun 2024 dibanding Tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,02 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua lapangan usaha, kecuali Lapangan usaha Konstruksi; Jasa Keuangan dan Asuransi; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang mengalami kontraksi masing-masing dengan nilai pertumbuhan -1,78 persen; -0,03 persen; dan -1,48 persen. Lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan; dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan angka pertumbuhan berturut-turut 18,68 persen; dan 12,01 persen. Sementara itu, Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memiliki peran paling dominan dalam perekonomian Kota Cirebon mengalami pertumbuhan sebesar 3,55 persen. Beberapa lapangan usaha mampu tumbuh di atas 5 persen diantaranya adalah Industri pengolahan sebesar 6,24 persen, Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 5,24 persen, Pengadaan Air Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 6,56 persen, Real Estate sebesar 5,81 persen, Jasa Perusahaan sebesar 5,51 persen, Jasa Pendidikan sebesar 7,39 persen, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 5,78 persen, dan Jasa Lainnya sebesar 5,02 persen.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Cirebon, 2023

Gambar 3.1 Perkembangan PDRB pada lapangan usaha

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan disertai upaya-upaya perluasan dan keberpihakan kesempatan kerja kepada kelompok kurang mampu yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemiskinan. Prospek ekonomi tersebut dapat tercapai dengan asumsi: (1) perekonomian dunia terus mengalami pemulihan, (2) tidak ada gejolak dan krisis ekonomi dunia baru yang terjadi, dan (3) berbagai kebijakan yang telah ditetapkan ditetapkan dalam agenda pembangunan dapat terlaksana.

B. Inflasi

Perkembangan harga-harga secara umum merupakan salah satu indikator penting dalam menunjukkan kinerja perekonomian suatu daerah. Tinggi rendahnya tingkat harga belum tentu mencerminkan perekonomian yang memburuk atau membaik. Fluktuasi dari perubahan harga-harga yang tercermin dari besarnya nilai inflasi, dapat menjadi indikator apakah perekonomian sedang mengalami tekanan atau perbaikan. Inflasi yang moderat dan tidak berfluktuasi tinggi menunjukkan perkembangan perekonomian yang membaik dan direspon secara wajar oleh pelaku ekonomi, sebaliknya inflasi yang berfluktuasi dalam skala yang tinggi dapat menjadi indikator perekonomian sedang menunjukkan adanya permasalahan (*shock*).

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Sebaliknya, deflasi terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh turunnya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran.

Pada Desember 2024 Kota Cirebon mengalami inflasi sebesar 0,43 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 104,87. Pada Desember 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Jawa Barat sebesar 1,64 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,33. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Sukabumi sebesar 2,59 persen dengan IHK sebesar 107,60 dan terendah terjadi di Kabupaten Subang sebesar 0,93 persen dengan IHK sebesar 109,07.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 1,11 persen; kelompok pakaian dan alas kaki mengalami inflasi sebesar 0,03 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami deflasi sebesar 0,28 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga mengalami inflasi sebesar 0,04 persen; kelompok kesehatan mengalami inflasi sebesar 0,93 persen; kelompok transportasi



mengalami inflasi sebesar 0,30 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan tidak mengalami perubahan indeks; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya mengalami inflasi sebesar 0,10 persen; kelompok pendidikan tidak mengalami perubahan indeks; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran mengalami inflasi sebesar 0,08 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi sebesar 0,42 persen.

C. Tingkat Pengangguran Terbuka

Ketenagakerjaan merupakan bidang yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indikator yang menggambarkan ketenagakerjaan Kota Cirebon adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat digunakan sebagai indikator yang relevan untuk menghitung kualitas sumberdaya manusia sekaligus income rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mengukur kualitas kondisi ketenaga kerjaan di Kota Cirebon.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan penduduk usia kerja di atas 15 tahun yang menjadi bagian dari pasar tenaga kerja. Persentase penduduk usia kerja yang aktif pada suatu wilayah secara ekonomi mencerminkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yang besar. Semakin besar pasokan tenaga kerja yang tersedia dalam proses produksi barang dan jasa pada perekonomian, semakin tinggi nilai TPAK. Berikut data terkait tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Cirebon.

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kota Cirebon. Penduduk usia kerja pada Agustus 2024 sebanyak 250.126 orang, naik sebanyak 2.322 orang jika dibandingkan Agustus 2023. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 163.639 orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebesar 86.487 orang.

Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2024 terdiri dari 149.860 orang penduduk yang bekerja dan 13.779 orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2022, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 7.841 orang. Penduduk bekerja naik sebanyak 10.463 orang, sementara pengangguran turun sebanyak 2.622 orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan dibandingkan Agustus 2023. TPAK pada Agustus 2024 sebesar 68,55 persen, turun 0,16 persen poin dibandingkan Agustus 2023. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja.



TPT hasil Sakernas Agustus 2023 sebesar 7,66 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar tujuh orang penganggur. Pada Agustus 2024, TPT mengalami penurunan sebesar 2,11 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023 (6,29 persen).

Apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, TPT pada Agustus 2024 mempunyai pola yang hampir sama dengan Agustus 2023. Pada Agustus 2023, TPT dari tamatan Sekolah Menengah Umum masih merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 12,45 persen. Sementara TPT yang paling rendah adalah pada pendidikan Universitas, yaitu sebesar 1,87 persen

D. Indeks Gini

Indeks Gini (*Gini Ratio*) merupakan ukuran yang digunakan untuk menganalisa tingkat kesenjangan di suatu daerah. Menurut Michael Todaro, seorang ahli ekonomi pembangunan dari Italia, bahwa nilai *Gini Ratio* yang terletak antara 0,50–0,70 menandakan pemerataan yang sangat timpang, sedangkan apabila nilainya terletak antara 0,36–0,49 menunjukkan kesenjangan sedang, sementara apabila nilai Gini Rasio terletak diantara 0,20–0,35 dinyatakan pemerataan relatif tinggi (merata). Dalam hal ini, kenyataannya tidak mungkin suatu daerah/wilayah mempunyai angka gini ratio yang besarnya sama dengan 0 (nol) dan 1 (satu).

Pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan merupakan 2 (dua) hal yang bertolak belakang tetapi hubungannya sering menjadi bahan kajian sosial maupun ekonomi. Hal tersebut dikarenakan konsekuensi dari pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan sesuatu yang positif, tetapi menimbulkan juga dampak sampingan yang bisa jadi tidak diinginkan. Di Kota Cirebon masalah konsekuensi distribusi dari pertumbuhan ekonomi menjadi isu prioritas. Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi mulai dipertanyakan banyak kalangan, apakah hal itu dinikmati sebagian besar masyarakat atau hanya sekelompok masyarakat tertentu. Bahkan tidak sedikit orang yang mensinyalir bahwa pembangunan selama ini malah menciptakan kesenjangan yang semakin lebar di tengah masyarakat.

Indeks kesenjangan pendapatan Kota Cirebon walaupun menunjukkan kesenjangan yang sedang tetapi menunjukkan kecenderungan naik belakang ini, Pemerintah Daerah Kota Cirebon ke depan perlu memprioritaskan pengurangan kesenjangan pendapatan, karena jika tidak ditangani secara serius, dikhawatirkan kesenjangan di masyarakat akan lebih parah. Kebijakan yang diambil pemerintah daerah harus lebih memprioritaskan golongan masyarakat yang kurang tersentuh oleh hasil-hasil pembangunan.

Mengurangi kesenjangan antar wilayah harus menjadi prioritas pemerintah daerah Kota Cirebon. Potensi ekonomi, ketersediaan infrastruktur, keuangan daerah dan sumber daya manusia harus menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam perencanaan pembangunan, sehingga tidak ada lagi aktifitas ekonomi yang hanya terkonsentrasi di



beberapa wilayah tertentu, dan membiarkan daerah lainnya tertinggal. Perencanaan yang bersifat spasial dan mempertimbangkan dimensi wilayah sangat perlu diperhatikan.

Tahun 2021 indeks gini Kota Cirebon berada pada angka 0,489, di mana indeks ini mencerminkan tingkat pemerataan pendapatan penduduk di Kota Cirebon termasuk kategori sedang. Kondisi demikian memerlukan strategi pengembangan perekonomian yang tepat, sehingga akan memberikan daya tarik bagi investor untuk menanamkan investasinya, begitu juga daya tarik bagi urbanisasi, khususnya bagi tenaga kerja trampil dan terdidik.

Peningkatan indeks gini rasio tersebut memerlukan upaya penanganan yang lebih serius dalam pertumbuhan dan pengembangan ekonomi masyarakat yang dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat, sehingga efek negatif dari kenaikan indeks gini yaitu peningkatan angka kemiskinan dan angka pengangguran dapat diminimalisasi.

E. Tingkat Kemiskinan

Kota Cirebon sebagai salah satu dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat memberikan kontribusi terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Barat. Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Kota Cirebon pada tahun 2024 mencapai 29,20 ribu orang (9,82 persen), menurun sebesar 0,30 persen dibandingkan dengan penduduk miskin pada tahun 2023 yang sebesar 29,50 ribu orang (10,03 persen).

Garis Kemiskinan Kota Cirebon pada tahun 2024 sebesar Rp 485.613,- per kapita per bulan dan pada tahun 2023 sebesar Rp 467.248,-. Selama periode 2023 hingga 2024 terjadi kenaikan garis kemiskinan sebesar Rp 18.365,- per kapita per bulan atau naik 3,9 persen.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Cirebon terjadi penurunan dari 0,11 pada tahun 2024 menjadi 1,29 pada tahun 2023. Hal ini menandakan bahwa jarak pengeluaran antara penduduk miskin dengan garis kemiskinan semakin dekat.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Cirebon terjadi kenaikan dari 0,04 pada tahun 2024 menjadi 0,25 pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa ketimpangan (gap) pengeluaran diantara penduduk miskin itu sendiri semakin kecil.

3.1.4 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Prospek ekonomi Kota Cirebon tahun 2026 sangat baik dengan potensi menjadi motor pertumbuhan ekonomi di wilayah timur-utara Jawa Barat, terutama karena perannya dalam Metropolitan Segitiga Rebana, serta sektor perdagangan, jasa, dan pariwisatanya yang kuat. Namun, tantangannya adalah keterbatasan lahan industri, perluasan kualitas dan kuantitas layanan publik, serta pengentasan masalah stunting dan pengangguran untuk memastikan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Prospek Ekonomi

- Pusat Pertumbuhan Ekonomi:

Kota Cirebon memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah timur-utara Jawa Barat sebagai bagian dari Metropolitan Segitiga Rebana.

- Pengembangan Sektor Unggulan:

Sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata menjadi andalan dan akan terus dikembangkan untuk meningkatkan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Cirebon.

- Pariwisata:

Cirebon memiliki potensi untuk tumbuh menjadi kota pariwisata yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, didukung oleh kekayaan budaya dan sejarahnya.

Tantangan Ekonomi

- Keterbatasan Lahan Industri:

Karena luas wilayah yang tidak terlalu besar, Kota Cirebon memiliki keterbatasan lahan untuk pengembangan industri skala besar.

- Pengangguran:

Meskipun ada tren penurunan, tingkat pengangguran yang masih cukup tinggi (6,29% di 2024) menjadi tantangan yang perlu terus diatasi untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif.

- Masalah Stunting:

Angka prevalensi stunting yang masih di atas rata-rata nasional dan Jawa Barat pada tahun 2023 menunjukkan perlunya intervensi yang lebih kuat dan berkelanjutan.

- Peningkatan Kualitas Layanan Publik:

Kota Cirebon terus berupaya meningkatkan kualitas layanan publik agar semakin efisien dan memenuhi standar yang tinggi, seperti yang telah dicapai dengan predikat Kategori A dari Ombudsman RI.

3.1.5 Proyeksi Indikator Makro Ekonomi

Para tahun 2026, optimisme perbaikan kondisi perekonomian Kota Cirebon pada perbaikan dan pemantapan ekonomi. Aktivitas di sektor industri, pariwisata, perdagangan luar dan dalam negeri, pembangunan infrastruktur strategis sudah dimulai kembali berjalan secara normal. Secara umum, pada tahun 2026, perekonomian diharapkan mulai pulih. Hal ini juga diharapkan didukung dengan harmonisasi kebijakan pusat dengan kebijakan daerah terkait peningkatan daya saing ekonomi. Tantangan dan prospek perekonomian ini akan berdampak pada pertumbuhan seluruh komponen makro pembangunan yang disusun menjadi Indikator Kinerja Daerah.

Indikator kinerja daerah disusun untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator kinerja sasaran Visi Misi Wali Kota Cirebon.

Selanjutnya indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun menurut setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcome*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Tabel 3.1
Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Daerah
Kota Cirebon Tahun 2026

No.	Indikator Makro	Satuan	Capaian Kinerja		Target RKPD	
			2023	2024	2025	2026
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	76,46	78,09	78,53	78,97
2.	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan	Ribu Rupiah	12,906	12.500	12.505	12.600
3.	Persentase Penduduk Miskin	Persen	9,16	8,94	8,94	8,87
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	7,66	6,29	6,15	6,10
5.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,01	5,02	5,06	6,14



6.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	50,04	56,08	52,99	53,24
----	---	------	-------	-------	-------	-------

3.1.6 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Kota Cirebon

Arah kebijakan ekonomi daerah di Kota Cirebon yang direncanakan di tahun 2026 tentunya harus sejalan dengan arah kebijakan ekonomi nasional dan kebijakan ekonomi di tingkat Provinsi Jawa Barat terutama pengembangan sektor ekonomi yang dapat berjalan selaras dengan era revolusi industri 4.0 yang saat ini berkembang dengan pesat. Secara umum strategi ekonomi dan kebijakan pembangunan ekonomi Kota Cirebon diharapkan dapat berimplikasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon.

Adapun beberapa strategi dan arah kebijakan ekonomi secara umum di tahun 2026 di antaranya:

1. Pengembangan infrastruktur penunjang aksesibilitas & konektivitas kawasan sentra pertumbuhan ekonomi.
2. Sektor Industri dan perdagangan.
3. Sektor UMKM diarahkan pada peningkatan kualitas produk UMKM, sertifikasi dan uji produk UMKM, perluasan akses pembiayaan dari berbagai sumber alternatif pembiayaan, pengembangan pemasaran melalui optimalisasi teknologi informasi, penguatan kolaborasi dan sharing program yang difokuskan pada pemberdayaan UMKM.
4. Sektor pariwisata diarahkan pada akselerasi pembangunan kepariwisataan melalui *rebranding* pariwisata yang didukung peningkatan aksesibilitas, amenities dan atraksi pendukung pariwisata, peningkatan wisatawan domestik, dan peningkatan pemasaran wisata.
5. Sektor investasi dengan menarik investasi sebesar-besarnya untuk menggerakkan ekonomi melalui penyederhanaan perizinan berbasis online dengan dilakukannya upaya percepatan penggunaan sistem OSS, promosi investasi serta pendampingan realisasi investasi.

1.6 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kebijakan pendapatan daerah menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2026 serta strategi pencapaiannya, kebijakan belanja daerah mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya, sementara kebijakan pembiayaan menggambarkan sisi defisit atau surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.



1.6.1 3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2026 serta strategi pencapaiannya. Pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan meningkat menjadi **Rp. 1.767.129.835.156,00**.

Beberapa upaya untuk mencapai peningkatan pendapatan daerah tetap dilakukan, meliputi :

1. Target pendapatan tahun 2026 mengacu pada realisasi pendapatan tahun 2024 dengan kenaikan 10 persen untuk komponen Pendapatan Pajak Daerah dan Kenaikan 5 persen pada komponen Pendapatan dan retribusi dan pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain PAD yang Sah
2. Pemanfaatan Nilai Bidang Tanah (NBT), data terintegrasi digital dengan KPP Pratama, penyempurnaan BPHTB online, pengawasan pengendalian terintegrasi pajak daerah.
3. Pembangunan database Pajak dan Retribusi Online
4. Pemenuhan Sarana Prasarana Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah
5. Pendayagunaan Aset Daerah
6. Peningkatan akurasi data untuk perhitungan Dana Transfer
7. Peningkatan koordinasi dalam pelaksanaan Dana Perimbangan dan dana bagi hasil.
8. Meningkatkan koordinasi baik dengan organisasi perangkat daerah pengelola pendapatan, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah lima tahun terakhir, Pendapatan Daerah pada Tahun 2026 sebagai berikut:



Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2026

Tabel 3.2
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 – 2024

No	URAIAN	Jumlah					Proyeksi 2026
		Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	PENDAPATAN	1.346.961.959.551	1.477.506.731.345	1.457.194.121.028	1.554.837.161.627	1.754.624.268.694	1.767.129.835.156
1.1	Pendapatan Asli Daerah	401.086.141.279	532.653.850.484	532.653.743.353	559.033.085.899	779.897.929.358	795.195.580.738
1.1.1	Pajak Daerah	164.895.032.591	191.999.856.661	217.861.895.888	226.058.293.884	384.669.545.458	403.479.052.248
1.1.2	Retribusi Daerah	10.057.960.722	11.335.203.103	11.408.967.314	317.053.093.456	339.822.727.898	348.866.000.350
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.856.419.363	4.860.296.914	6.850.064.199	8.570.399.813	15.900.000.000	13.100.000.000
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	219.276.728.603	332.147.58.404	296.532.815.952	7.351.298.746	39.487.655.913	29.750.528.140
1.2	Pendapatan Transfer	903.950.858.272	935.824.150.272	935.185.155.631	991.867.648.844	947.744.339.336	971.934.254.418
1.2.1	Dana Perimbangan				827.744.168.801		
1.2.2	Transer Pemerintah Pusat Lainnya	781.480.595.484	789.571.543.248	807.443.139.522		929.209.799.000	925.456.680.000
1.2.3	Transfer Antar Daerah	122.470.262.788	291.164.944.897	114.967.238.152	119.123.380.043	45.534.540.336	46.468.574.418
1.2.3	Lain-lain PD yang Sah	41.924.960.000	1.339.566.000	2.130.000.000	3.936.526.784		
1.2.4	Hibah	2.337.000.000	2.337.000.000	2.130.000.000	3.936.526.784		
1.2.5	Dana Darurat	-	-	-		-	



Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2026

1.2.6	Lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	39.587.960.000	39.587.960.000	-	-	-	-
-------	---	----------------	----------------	---	---	---	---

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon, 2025

Adapun Target pendapatan tahun 2026 berdasarkan pada target realisasi pendapatan tahun 2024 ditambah kenaikan bervariasi 5% - 10% untuk beberapa komponen pendapatan asli daerah. Dalam upaya menutupi nilai belanja dan pembiayaan yang tidak seimbang dengan proyeksi pendapatan daerah maka Pemerintah Kota Cirebon berupaya dalam mencari sumber sumber pembiayaan lain di luar APBD agar di tahun 2025 semua kegiatan peningkatan pembangunan akan dapat terlaksana.

Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dikelompokkan atas :

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah. Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi pendapatan pada tahun-tahun sebelumnya, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 795.195.580.738,00 PAD ini berasal dari:

- Pajak daerah diproyeksikan sebesar Rp 403.479.052.248,00
- Hasil Retribusi Daerah di proyeksikan sebesar Rp 348.866.000.350,00
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah diproyeksikan sebesar Rp 13.100.000.000,00
- Lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan sebesar Rp 29.750.528.140,00.

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Insentif Daerah. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada Dana Perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kebijakan pendapatan dana perimbangan diproyeksikan dengan adanya kenaikan alokasi DAU, bagi hasil pajak dan bukan pajak serta alokasi dari Dana Alokasi Khusus. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lainnya yaitu Dana Insentif Daerah (DID) yang merupakan Pendapatan dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja tertentu. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan sebesar Rp 925.456.680.000,00 atau mengalami Kenaikan 10,7% Tahun Anggaran 2024.

Sementara jenis Pendapatan Transfer lainnya yaitu Transfer

Antar Daerah yaitu sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan yang diproyeksikan sebesar Rp 46.468.574.418,00.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada APBD Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan bersumber dari pendapatan hibah. Pendapatan Hibah ini berasal dari Dana BOS, dan Pendapatan Pengembalian Hibah tahun sebelumnya.

3.2.1 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan perubahannya, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tersebut, belanja daerah tahun 2026 diproyeksikan dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan kebijakan belanja daerah pada tahun 2026, yaitu meliputi:

1. Meningkatkan akuntabilitas belanja langsung yang diarahkan pada target-target sasaran program dan kegiatan yang terkait langsung pada pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM).
2. Alokasi anggaran untuk belanja yang bersifat wajib dan mengikat seperti belanja pegawai yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
3. Alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan minimal sebesar 20% dari total belanja dalam rangka peningkatan indeks pendidikan.
4. Alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan minimal sebesar 10% dari total belanja sesuai perintah UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam rangka peningkatan indeks kesehatan.
5. Peningkatan alokasi anggaran bidang perekonomian masyarakat dan infrastruktur penunjang perekonomian, dalam rangka peningkatan indeks daya beli.
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.
7. Hasil Musrenbang Kecamatan terutama bersifat fisik yang anggarannya disusun oleh Kecamatan sebagai tindak lanjut Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Wali Kota kepada Camat.
8. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan



pemberdayaan masyarakat sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

9. Memperhatikan hasil pembahasan Rancangan APBD khususnya dalam penganggaran program kegiatan yang memiliki prioritas skala kota serta keberlangsungan pembangunan.
10. Penetapan pagu indikatif untuk setiap program dan kegiatan dalam setiap misi dilakukan secara proporsional;
11. Penambahan anggaran penyeimbang untuk Perangkat Daerah dengan permasalahan khusus.

Berdasarkan arah kebijakan belanja tersebut di atas, serta hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi pendapatan daerah tiga (3) tahun terakhir, maka belanja daerah pada Tahun 2026 diproyeksikan sebagai berikut:



Tabel 3.3
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 – 2025

No	Uraian	Jumlah					Proyeksi 2026
		Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	BELANJA	1.582.881.804.426	1.334.562.609.268	1.444.799.763.410	1.444.790.063.126	1.641.779.270.836	1,767,129,835,156
02.01	Belanja Operasi	1.246.736.172.464	1.217.702.537.368	1.233.952.428.272	1.345.403.569.836	1.492.843.441.229	
02.01.01	Belanja Pegawai	649.899.173.688	649.514.219.615	594.700.895.912	666.258.493.164	783.071.456.167	
02.01.02	Belanja Barang dan Jasa	541.273.784.740	541.634.311.728	597.527.941.384	617.286.695.232	639.433.531.021	
02.01.03	Belanja Hibah	52.243.034.036	26.554.006.025	40.223.590.976	59.341.506.439	64.143.454.111	
02.01.04	Belanja Subsidi	0	0	1.500.000.000	1.350.000.000	2.000.000.000	
02.01.05	Belanja Bantuan Sosial	3.320.180.000	0	0	357.500.000	4.195.000.000	
02.02	Belanja Modal	294.349.725.481	113.104.657.435	131.595.627.288	92.790.771.193	105.441.610.432	
02.02.01	Belanja Tanah	309.742.600	0	2.000.000.000	0	945.000.126.000	
02.02.02	Belanja Peralatan dan Mesin	177.995.373.530	47.093.162.370	48.027.627.108	53.836.058.442	47.799.072.712	
02.02.03	Belanja Bangunan dan Gedung	96.173.347.051	58.205.309.931	37.428.237.631	22.024.728.830	29.750.277.035	
02.02.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	19.380.399.600	4.010.301.969	40.476.429.660	12.096.608.000	22.067.638.599	
02.02.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	490.862.700	3.795.883.165	4.811.753.121	10.605.666.227	4.879.621.960	



Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2026

No	Uraian	Jumlah					Proyeksi 2026
		Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
02.03	Belanja Tidak Terduga	41.795.906.481	3.755.414.465	79.251.707.850	6.596.622.097	18.138.934.872	
02.04	Belanja Transfer	0	0	0	0		

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon, 2025



Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan sebesar Rp 1,767,129,835,156,00 tetapi tidak dapat di klasifikasikan sesuai klasifikasi belanja daerah yang ada. Hal ini dikarenakan berdasarkan arahan Kementerian Dalam Negeri untuk penyusunan RKPD Tahun 2026 hanya menggunakan Pagu Anggaran untuk Perencanaan Tahun 2026. Hal inipun tertuang pada penyusunan dokumen perencanaan daerah pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD-RI).

3.2.2 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), transfer dari dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah di antaranya diperuntukan bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/saham), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih perhitungan.

Berdasarkan arah kebijakan belanja tersebut di atas, serta hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi pendapatan daerah tiga (3) tahun terakhir, maka pembiayaan pada Tahun 2026 diproyeksikan sebagai berikut:



Tabel 3.4
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020 – 2025

No	URAIAN	Jumlah					Proyeksi 2026
		Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2024	Realisasi 2024	Target 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
3	PEMBIAYAAN						
03.01	Penerimaan Pembiayaan	75.682.334.894	49.618.040.915	13.264.170.960	-	7.230.692.001	-
03.01.01	SilPA	44.482.334.894	49.618.040.915	13.264.170.960	-	7.230.692.001	-
03.01.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
03.01.03	Penerimaan Pinjaman Daerah	31.200.000.000	-	-	-	-	-
03.02	Pengeluaran Pembiayaan	77.104.567.789	4.500.000.000	21.677.101.000	28.150.318.955	5.909.000.000	-
03.02.01	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	77.104.567.789	-	-	-	5.909.000.000	-
03.02.02	Penyertaan Modal Daerah	-	4.500.000.000	10.677.101.000	13.205.737.355	-	9.000.000,-
03.02.03	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	11.000.000.000	14.944.581.600	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	1.422.232.895	45.118.040.915	8.412.930.040	28.150.318.955	1.321.692.001	-



Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2026

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon, 2025

Kebijakan pembiayaan daerah pada tahun 20256 adalah sebagai berikut :

1) Penerimaan Pembiayaan

Salah satu komponen dari Penerimaan Pembiayaan daerah adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024. Mengingat realisasi SiLPA pada tahun sebelumnya sebagian besar merupakan SiLPA berhadapan yang sudah jelas peruntukannya, dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan, maka proyeksi SiLPA Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan sebesar Rp 0,00.

2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan sebesar Rp 0,00. Pengeluaran pembiayaan ini berasal dari Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp 0,00 dan Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp 0,00.

1.7 Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah

Besarnya kebutuhan dana untuk pembangunan di Kota Cirebon dan terbatasnya sumber-sumber penerimaan konvensional mendorong Pemerintah Daerah Kota Cirebon untuk mencari alternatif pembiayaan anggaran dalam membangun Kota Cirebon. Sumber-sumber pendanaan pembangunan non-APBD yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan antara lain:

- 1) APBN;
- 2) APBD Provinsi;
- 3) Dana Masyarakat/Umat;
- 4) *Corporate Social Responsibility* (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL));
- 5) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU); dan
- 6) Hibah.

Adapun penjelasan alternatif pembiayaan pembangunan adalah sebagai berikut:

3.3.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pembangunan dalam suatu daerah membutuhkan banyak sumber pendanaan, pembangunan Kota Cirebon selain bersumber dari APBD Kota Cirebon, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Menjadi Kunci Menghadapi Keterbatasan Fiskal dalam APBD. APBN sebagai suatu rencana keuangan, mengandung arti bahwa pemerintah mempunyai perencanaan terhadap pengeluaran dan penerimaan untuk

untuk membiayai kepentingan negara atau pengelolaan pemerintahan. Dalam perencanaan keuangan, bisa saja pengeluaran direncanakan setinggi-tingginya, atau serendah-rendahnya. Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh Perangkat Daerah di kabupaten/kota maupun Perangkat Daerah Provinsi.

Dana pembangunan yang bersumber dari APBN juga dapat berupa Dana Insentif Daerah (DID). DID merupakan Pendapatan dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja tertentu. Beberapa kesempatan untuk mendapatkan DID, antara lain berasal dari kompetisi pemerintah daerah kabupaten/kota yang digelar oleh pemerintah nasional, seperti *Innovative Government Award* oleh Kementerian Dalam Negeri dan Sistem Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. DID didapatkan jika pemerintah daerah mampu menjadi pemenang kompetisi dan memenuhi persyaratan penetapan APBD tepat waktu.

3.3.2 APBD Provinsi

Keterbatasan sumber pembiayaan dalam pembangunan daerah melalui APBD Kota Cirebon dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan melalui kolaborasi pembiayaan dengan APBD Provinsi. Kolaborasi sangat diperlukan agar tercipta sinkronisasi dalam penuntasan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kolaborasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa program dan kegiatan Kota Cirebon sejalan dan sinergis dengan program dan kegiatan pemerintah provinsi sehingga antara provinsi dan Kota Cirebon dapat bekerja sama di dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun penuntasannya dilakukan dengan *sharing* pendanaan ataupun pembagian peran pendanaannya.

Salah satu mekanisme pendanaan dari APBD Provinsi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat adalah pendanaan hibah kompetitif. Mekanisme pendanaan hibah kompetitif berbeda dari mekanisme pendanaan dari APBD Provinsi yang lain di mana pemerintah daerah mengusulkan kegiatan dalam tema tertentu, dipresentasikan secara terbuka dengan proposal, video, infografis dan data-data pendukungnya secara terbuka dan kompetitif. Dalam hal ini, pemerintah daerah Kota Cirebon terdorong untuk mendapatkan tambahan pendanaan untuk belanja daerah secara unggul dan bertanggung jawab.

3.3.3 Dana Masyarakat/Umat

Salah satu potensi pendanaan non APBD yang bisa dijadikan sumber pembiayaan percepatan pembangunan daerah Kota Cirebon adalah melalui dana masyarakat/umat mengingat jumlah penduduk Kota Cirebon yang

sangat besar, maka potensi untuk pendanaan pembangunan melalui dana umat cukup besar. Akan tetapi potensi ini belum dapat memberi peran maksimal dalam menyejahterakan rakyat dan memberdayakan ekonomi masyarakat. Melalui dana umat ini diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi menuju manfaat masyarakat. Dana yang dikumpulkan pemerintah dan diperoleh dari hasil efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji dan dari sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari berbagai jenis dana umat, yang memungkinkan digali potensinya adalah zakat dan wakaf uang, untuk itu, diperlukan adanya komitmen dan kerjasama yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan zakat, baik pemerintah, DPRD, badan dan lembaga amil zakat, maupun masyarakat Kota Cirebon secara keseluruhan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

3.3.4 Corporate Social Responsibility (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL))

Selain APBN pendanaan pembangunan non APBD Kota Cirebon yang lainnya adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Mitra PKBL dan TJSL diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, namun turut juga berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitar dalam jangka panjang. Dalam artian bahwa tanggung jawab sosial yang dilakukan tidak hanya untuk mendapatkan nilai tambah dari masyarakat tetapi tanggung jawab ini harus berkesinambungan sampai waktu yang cukup panjang.

Sampai dengan saat ini, telah terdaftar sebanyak 19 mitra PKBL dan TJSL Kota Cirebon yang di dalamnya terbagi menjadi 7 perusahaan swasta, 6 BUMN dan 6 (enam) BUMD. Tahun 2019 Pemerintah Kota Cirebon mengeluarkan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 460.05/Kep.121-Adm.Perek/2019 Tentang Pembentukan Mitra Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Kota Cirebon agar pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan memperoleh hasil yang optimal, kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Program pembangunan yang dikolaborasikan dengan mitra PKBL dan TJSL adalah program yang kesinambungan serta berdampak positif terhadap masyarakat, penekanan kepada 3 (tiga) hal tersebut bahwa bantuan yang diberikan dirancang memiliki dampak yang berkelanjutan karena kerjasama program pembangunan PKBL dan TJSL berbeda dengan donasi bencana alam yang bersifat tidak terduga dan tidak dapat diprediksi. Program yang dikolaborasikan dengan mitra PKBL dan TJSL harus berdampak positif kepada masyarakat, baik secara ekonomi, lingkungan, maupun sosial.

3.3.5 Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha. Saat ini banyak pemerintah daerah yang menyadari pentingnya kontribusi dari pihak swasta dalam mendorong pembangunan. Berdasarkan fakta, pihak swasta dapat membawa keahlian, ilmu, teknologi, efisiensi, dan permodalan yang sangat dibutuhkan sektor publik sehingga apabila dikombinasikan dengan sumberdaya publik yang tepat dapat berkontribusi lebih besar untuk pembangunan berkelanjutan. Namun pihak swasta membutuhkan lingkungan yang stabil dan dukungan peraturan dan kerangka regulasi yang kuat, persiapan kelembagaan yang jelas, dan faktor lainnya yang penting untuk “menciptakan pangsa pasar”.

Salah satu persoalan yang dihadapi pemerintah daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak mampu sepenuhnya membiayai pembangunan infrastruktur yang diinginkan atau diharapkan. Artinya, masih banyak bidang-bidang lain, seperti kesehatan, pendidikan, kebudayaan, sosial, dan agama yang juga membutuhkan penyerapan anggaran dari APBD. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan. Pada kondisi ini skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dapat menjadi solusi dengan prinsip gotong royong. Melalui skema pembiayaan KPBU, pemerintah, BUMN/BUMD, serta swasta bahu-membahu untuk membiayai pengakselerasian pembangunan. Secara definisi dapat diartikan kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur dan/atau layanannya untuk kepentingan umum mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.

3.3.6 Hibah

Hibah dimaksud adalah Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) yang merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan dalam rangka mendukung pembangunan di berbagai sektor. Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) diperlukan karena adanya kebutuhan investasi untuk membangun ekonomi dan adanya keterbatasan sumber dana pemerintah untuk investasi.

Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan atau dalam bentuk jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Peraturan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), di antaranya Peraturan Menteri PPN/BAPPENAS Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman

Luar Negeri dan Penerimaan Hibah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Pengusulan kegiatan yang dibiayai dengan PHLN dapat dilakukan oleh Kementerian Negara (departemen dan non departemen), lembaga pemerintahan non departemen (selanjutnya disebut lembaga), Pemerintah Daerah (Pemda), dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kegiatan yang dapat diusulkan Pemerintah Daerah adalah:

- a. Kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri untuk penerusan pinjaman; Untuk usulan kegiatan ini harus melampirkan Surat Persetujuan DPRD calon penerima penerusan pinjaman, dan memenuhi kriteria khusus sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan yang diusulkan merupakan kegiatan investasi untuk prasarana dan/atau sarana yang menghasilkan penerimaan pada APBD Pemda, yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut;
 - 2) Kegiatan tersebut merupakan urusan Pemda;
 - 3) Kegiatan yang diusulkan adalah dalam rangka pencapaian sasaran program yang merupakan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan sejalan dengan program RPJM;
 - 4) Hasil dari kegiatan PHLN yang diusulkan dapat memberikan manfaat langsung bagi pelayanan masyarakat daerah setempat; dan
 - 5) Pemda mempunyai kemampuan fiskal untuk memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman.
- b. Kegiatan yang dibiayai dari hibah luar negeri untuk penerusan hibah. Untuk usulan kegiatan ini harus memenuhi kriteria khusus sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan tersebut untuk menunjang peningkatan fungsi pemerintahan;
 - 2) Kegiatan tersebut untuk meningkatkan pemberian layanan dasar umum;
 - 3) Kegiatan tersebut untuk pemberdayaan aparatur Pemerintah Daerah.
 - 4) Sumber PHLN adalah Negara Asing, Lembaga Multilateral, Lembaga Keuangan dan Lembaga Non Keuangan Asing. Jenis PHLN meliputi pinjaman lunak, Fasilitas Kredit Ekspor, Pinjaman Komersial dan Pinjaman Campuran.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026

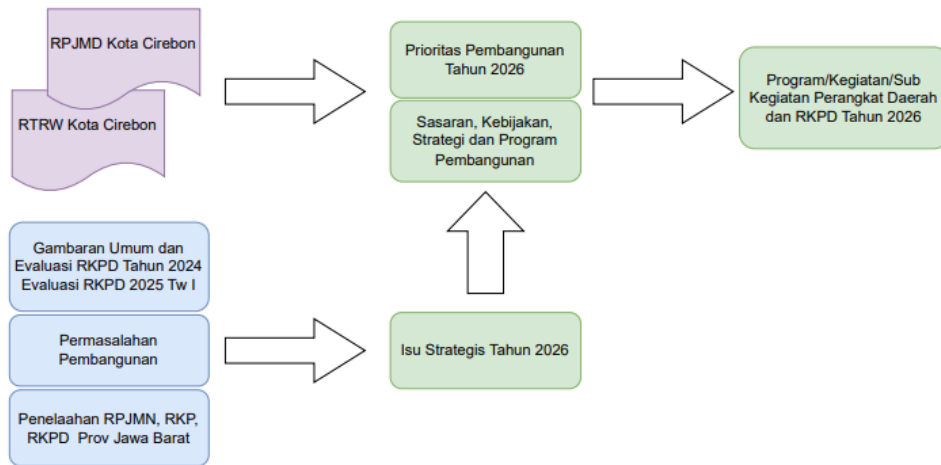
Tahun 2026 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon yang sekaligus menjadi momen strategis untuk mempercepat pencapaian target pembangunan daerah. Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan tahun ini disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2026, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kota Cirebon.

Selain berpedoman pada rancangan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2025-2029, perencanaan pembangunan tahun 2026 juga mempertimbangkan dokumen RPJPD Kota Cirebon Tahun 2025-2045 yang mengacu pada RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045.

Rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kota Cirebon tahun 2026 memperhatikan dan didasarkan pada: (1) RPJPD Kota Cirebon Tahun 2025-2045; (2) Rancangan RTRW Kota Cirebon Tahun 2023-2043; (3) RPJMN Tahun 2025-2029; (4) Rancangan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029; (5) Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan pada rancangan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2025-2029; (6) Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2024 dan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 triwulan I; (7) Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2026; (8) Kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan pembangunan daerah.

Pembangunan daerah Kota Cirebon tahun 2026 diselenggarakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang direncanakan pada RPJMD Tahun 2025-2029 dengan sejumlah rumusan indikator yang telah ditetapkan. Rangkaian strategi dan arah kebijakan dilaksanakan melalui program dan kegiatan Perangkat Daerah diharapkan dapat mempercepat terwujudnya SDM unggul dan berkarakter, pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, tata kelola pemerintahan yang baik, lingkungan kota yang lestari, serta kesejahteraan sosial berbasis pemberdayaan dan kearifan lokal. Kerangka pikir perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2026 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.1 Kerangka Pikir RKPD Kota Cirebon Tahun 2026



Sumber: Hasil Analisa Bappelitbangda Tahun 2025

IV.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Cirebon Tahun 2026 merujuk pada target kinerja RPJMD Kota Cirebon Tahun 2025-2029 yang harus dicapai sebagai bentuk kinerja pembangunan daerah. Penentuan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Cirebon tahun 2026 dilaksanakan dengan memperhatikan keterkaitan terhadap sasaran dan prioritas pembangunan Nasional.

IV.1.1 Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Serta Kebijakan Strategis Lainnya

Sasaran visi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045 pada periode pertama dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dengan tema: *'Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045'*. Tema ini dijabarkan ke dalam 8 (delapan) misi atau Asta Cita yang menjadi Prioritas Nasional atau tujuan (goals) yang ingin dicapai seperti gambar berikut.

Gambar 4.2 Delapan Misi (Asta Cita) atau Prioritas Nasional



Sumber: Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029.

Sasaran utama pada RPJMN 2025–2029 mencerminkan target yang ingin dicapai, seperti pengurangan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, sasaran juga mencakup aspek politik luar negeri dan pelestarian lingkungan. Sasaran tersebut tercermin pada 5 (lima) sasaran utama pembangunan Nasional pendapatan per kapita menuju setara Negara Maju, kepemimpinan dan pengaruh di Dunia Internasional meningkat, kemiskinan dan ketimpangan berkurang, daya saing SDM meningkat dan internsitas emisi gas rumah kaca menuju *net zero emission* dengan target kinerja akhir masa RPJMN 2025-2029 sebagai berikut:

Gambar 4.3 Target Sasaran Pembangunan Nasional



Sumber: Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029.

RPJMN Tahun 2025–2029 menekankan secara khusus pada strategi menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mencapai pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan. Penekanan pada ketiga strategi merupakan kunci keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah dan fondasi bagi pembangunan jangka panjang nasional.

1. Strategi Penurunan Kemiskinan

Penurunan kemiskinan mencakup berbagai dimensi, tidak hanya terkait keterbatasan ekonomi tetapi juga kesenjangan sosial, marginalisasi kelompok rentan, maupun keterbatasan akses terhadap layanan dasar.

Strategi Empat Pilar Utama Penurunan Kemiskinan

Strategi penurunan kemiskinan tersebut dilakukan dengan pendekatan lintas sektor dan diperlukan beberapa prasyarat yaitu:

1. Integrasi dan peningkatan akurasi data sasaran program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
2. Penerapan pendekatan yang terstandar, inklusif, dan berkesinambungan dalam perluasan program pemberdayaan ekonomi dan sosial.
3. Optimalisasi pendampingan pembangunan dan peningkatan kolaborasi strategis multi sektor dengan partisipasi kuat masyarakat dan sektor swasta untuk mempercepat peningkatan keberdayaan masyarakat, penciptaan lapangan kerja lokal, mendorong kewirausahaan berbasis komunitas, dan meningkatkan akses terhadap pasar serta teknologi.
4. Komitmen keberpihakan seluruh tingkatan pemerintah dan pemangku kepentingan dalam memfokuskan sumber daya yang tersedia untuk pemberantasan kemiskinan.

2. Strategi Peningkatan kualitas SDM

Strategi peningkatan kualitas SDM melalui intervensi secara konkret dalam pendidikan dan kesehatan. Intervensi kunci di bidang pendidikan antara lain peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan, penguatan pengelolaan pendidik dan penciptaan tenaga kependidikan berkualitas yang dilakukan melalui:

- ✓ Wajib belajar 13 tahun
- ✓ Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul;
- ✓ revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas;
- ✓ restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru,
- ✓ perlindungan hukum dan kesejahteraan berbasis kinerja;
- ✓ perluasan layanan pendidikan anak usia dini;
- ✓ pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah;
- ✓ peningkatan relevansi dan perluasan akses pendidikan tinggi;
- ✓ peningkatan kualitas dan relevansi lulusan pendidikan vokasi berdaya saing unggul.

Sedangkan intervensi bidang kesehatan terdiri dari pencegahan *stunting* serta peningkatan angka kelangsungan hidup anak dan dewasa. Strategi

pengecahan stunting difokuskan pada 1000 hari pertama kehidupan. Strategi peningkatan angka kelangsungan hidup anak dan dewasa diwujudkan melalui peningkatan akses dan manajemen terpadu pelayanan kesehatan; penguatan deteksi dini penyakit, pencegahan penyakit menular dan tidak menular, peningkatan kesehatan jiwa disertai investasi pelayanan primer untuk perluasan upaya promotif dan preventif kesehatan serta pemenuhan kebutuhan sumber daya kesehatan.

3. Strategi Pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen

Pertumbuhan ekonomi berfungsi sebagai ujung tombak mendorong terciptanya lapangan kerja, investasi produktif, dan inovasi. Strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat melalui industrialisasi, digitalisasi, pengembangan infrastruktur serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di berbagai daerah sesuai keunggulannya.

- Peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan
- Industrialisasi (hilirisasi): padat karya, berorientasi ekspor, dan berkelanjutan
- pariwisata dan ekonomi kreatif
- ekonomi biru dan ekonomi hijau
- perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
- transformasi digital
- investasi FDI berorientasi ekspor dan investaso non APBN
- Belanja negara untuk produktivitas:
- (makan gizi bratis, pembangunan 3 juta rumah, dll)

Implementasi Prioritas Nasional didukung pula dengan penerapan kebijakan umum yang berfokus pada Penguatan Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah serta Pemenuhan Infrastruktur dan Layanan Dasar sebagai fondasi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Selain kebijakan umum juga terdapat intervensi-intervensi spesifik yang diimplementasikan pada setiap provinsi untuk mendukung setiap prioritas nasional. Adapun *highlight* indikasi intervensi untuk Provinsi Jawa Barat yang berkaitan dengan Kota Cirebon adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Highlight Indikasi Intervensi Kota Cirebon

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat • Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik
Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah,	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama pada ranah siber dan area rentan • Fasilitasi business matchmaking startup digital • Fasilitasi digital technopreneur • Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian • Peningkatan produktivitas hortikultura dan peternakan yang berkelanjutan

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	<ul style="list-style-type: none"> • Prasarana air baku yang dibangun pada sistem penyediaan air minum Patimban • Sistem pengelolaan persampahan skala kota berupa pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu pada tempat pemrosesan akhir eksisting di Provinsi Jawa Barat
<p>Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban • Penguatan produktivitas industri makanan dan minuman • Penguatan ekosistem film, animasi, visual arts, seni, budaya, kerajinan, kuliner, dan pemampu ekonomi kreatif • Penguatan ekosistem pengembangan aplikasi dan gim • Pembangunan instalasi pengolahan air tahap II Sistem • Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi • Bendungan yang direhabilitasi/ditingkatkan kapasitasnya berupa pembangunan transmisi air baku
<p>Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak/raudhatul athfal/bustanul athfal) dan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah/ sederajat • Pengembangan bidang keahlian jenjang sekolah menengah kejuruan difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor industri pengolahan • Penurunan kematian ibu dan bayi • Pembangunan kualitas keluarga • Percepatan penurunan ketimpangan gender, khususnya melalui pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan; pencegahan perkawinan anak, khususnya di Kabupaten Garut, Ciamis, Indramayu, dan Cirebon; dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang, utamanya pada wilayah kantong pekerja migran • Peningkatan kapasitas layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak di RS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota • Fasilitasi literasi digital
<p>Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan industri kimia dasar dan logam dasar • Hilirisasi industri tembaga dan bauksit • Hilirisasi industri kelapa dan karet • Pengembangan industri kimia hilir dan farmasi • Pengembangan industri alat angkut termasuk electric vehicle dan kedirgantaraan • Pengembangan industri elektronik dan digital • Pembangunan Pelabuhan Patimban • Pemanfaatan teknologi digital di sektor logistik
<p>Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sistem perumahan publik yang terpadu dengan layanan infrastruktur dasar perkotaan dan disertai dengan penguatan tata kelola • Peremajaan kota (urban renewal) secara inklusif dan terpadu dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh



Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
<p>Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pelayanan terpadu satu pintu daerah berbasis online single submission dan mal pelayanan publik digital
<p>Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan ekonomi berbasis kebudayaan di Cagar Budaya Batu Jaya dan Keraton Cirebon • Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan

Sumber: Dokumen rancangan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026, data diolah Bappelitbangda 2025.

<p>Kawasan Perkotaan Cirebon dan Kawasan Pengembangan Industri Cirebon-Kertajati</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Cirebon, antara lain melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu 2. Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau 3. Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan. • Penataan permukiman kumuh terpadu Perkotaan • Pembangunan rumah murah dengan sanitasi yang baik bagi pekerja, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), gen Z, serta generasi milenial di kawasan perkotaan Cirebon (PHTC). • Pengembangan Pelayanan Unggulan Kesehatan: <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan layanan kesehatan termasuk pelayanan penyakit tidak menular (PTM), kanker, penyakit jantung, stoke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Guning Jati Cirebon (PHTC). • Pembangunan TPST Regional Cirebon Raya • Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Cirebon Raya • Pengembangan koridor Industri Cirebon-Kertajati (sektor industri prioritas: industri dirgantara dan industri mesin dan perlengkapan) • Hilirisasi Komoditas Pertanian tebu, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar tebu yaitu: raw sugar, GKP, Molase, bagasse, serta produk hilirisasi lanjutan tebu bioethanol, sirup glukosa, dan bioplastik • Pembangunan pipa gas bumi Cirebon-Semarang • Pengembangan Kertajati Aerocity • Perencanaan dan Persiapan Pembangunan Kereta Api Cepat (HST) Jakarta-Surabaya.
--	--

	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan Kota Agropolitan Cirebon• Mendorong pengembangan kota agropolitan yang berkelanjutan di Cirebon.• Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi serta produktivitas tenaga kerja melalui pembangunan/pengembangan/peningkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan industri di wilayah.
--	--

IV.1.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2026 diarahkan untuk mewujudkan Visi RPJMD 2025-2029 yang merupakan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode tahun 2025-2029 yaitu **“JAWA BARAT ISTIMEWA, Lembur diurus Kota ditata”**. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan Jawa Barat pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tujuan 1: Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Cageur, Bageur, Bener, Pinter dan Singer, dengan sasaran:

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
2. Terbentuknya individu beretika dan berbudaya;
3. Terbentuknya individu berintegritas dan taat hukum;
4. Terbentuknya individu berpengetahuan dan berwawasan;
5. Terbentuknya individu kreatif dan inovatif.

Tujuan 2.1: Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang berdaulat, berkelanjutan dan berdaya saing berbasis sumber daya local dan teknologi, dengan sasaran:

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor industri pengolahan untuk pemenuhan kebutuhan dalam dan luar negeri;
2. Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor industri pertanian, kehutanan dan perikanan untuk swasembada pangan;
3. Meningkatkan sektor perdagangan melalui optimalisasi distribusi barang dan jasa;
4. Meningkatkan produktivitas sektor pariwisata melalui pengembangan destinasi wisata dan industri kreatif.

Tujuan 2.2: Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, dengan sasaran:

1. Meningkatnya penciptaan dan perluasan lapangan kerja;
2. Meningkatnya kualifikasi, kompetensi dan keahlian tenaga kerja dan calon tenaga kerja;
3. Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan.

Tujuan 3: Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Kewilayahan, Sosial, dan Ekonomi yang berbasis lingkungan, dengan sasaran:

1. Meningkatnya layanan infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di pedesaan dan kawasan konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan;
2. Meningkatnya keterampilan, akses permodalan dan pemasaran Usaha Mikro dan Kecil;
3. Meningkatnya ketahanan social masyarakat.

Tujuan 4.1: Terciptanya masyarakat mandiri dan adaptif terhadap perkembangan social dan teknologi, dengan sasaran:

1. Meningkatnya peran Iptek, riset dan inovasi dalam pembangunan;
2. Meningkatnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan kebijakan.

Tujuan 4.2: Terwujudnya Birokrasi yang Gesit dan Berorientasi Pelayanan, dengan sasaran:

1. Meningkatnya pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif.

Adapun Tema Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 adalah **“Pemerataan Distribusi Akses Layanan Dasar”**. Tema tersebut memiliki makna bahwa akses layanan dasar perlu merata. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan Jawa Barat Istimewa yang ditandai dengan focus pembangunan pada penguatan fondasi transformasi, ekonomi dan tata kelola yang dimulai dari layanan dasar melalui peningkatan intensitas dan cakupan, baik di perkotaan maupun di pedesaan khususnya pada daerah-daerah yang belum merata namun memiliki nilai strategis yang tinggi.

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat dilaksanakan melalui 4 (empat) prioritas pembangunan daerah. Prioritas Pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2026 yaitu:

Prioritas 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul;

Prioritas 2: Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan Yang Tidak Eksploitatif;

Prioritas 3: Mengurangi Disparitas pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya;

Prioritas 4: Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, sesuai dengan Prinsip *Good and Clean Governance*.

IV.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Cirebon

Tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD Kota Cirebon Tahun 2026 disusun berdasarkan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2025-2029 yang diarahkan untuk mewujudkan visi misi Wali Kota terpilih periode 2025-2029 yaitu penyusunannya berbedoman pada visi RPJPD Kota Cirebon 2025-2045 yaitu **“TERWUJUDNYA KOTA CIREBON YANG SEJAHTERA, TERTATA, ASPIRATIF, RELIGIUS, AMAN DAN BERKELANJUTAN TAHUN 2029.”** atau dapat disingkat dengan Terwujudnya Kota Cirebon yang SETARA Berkelanjutan Tahun 2029. Adapun tujuan dan sasaran pada rancangan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2025-2029 yang menjadi tujuan dan sasaran pembangunan Kota Cirebon Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tujuan 1:

Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang unggul, kompetitif dan berkarakter, dengan sasaran yaitu:

1. Meningkatnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas
2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat secara merata
3. Meningkatnya kompetensi dan keterampilan kerja masyarakat usia produktif
4. Terciptanya SDM yang berkarakter, berintegritas, dan religius.

Tujuan 2:

Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan sektor unggulan daerah.

1. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan jasa, transportasi, pariwisata, ekonomi kreatif
2. Meningkatnya iklim investasi yang kompetitif
3. Meningkatnya kinerja BUMD
4. Meningkatnya kapasitas dan kemandirian pelaku UMKM dan Koperasi
5. Meningkatnya kesempatan kerja
6. Meningkatnya pemanfaatan potensi ekonomi hijau dan biru
7. Meningkatnya sistem ketahanan pangan daerah yang tangguh dan berkelanjutan

Tujuan 3:

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas, dengan sasaran yaitu:

1. Terciptanya birokrasi yang bersih, efisien dan akuntabel
2. Meningkatnya lingkungan kota yang tentram, tertib dan kondusif bagi masyarakat
3. Meningkatnya kinerja dan profesionalisme ASN
4. Meningkatnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
5. Meningkatnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik

Tujuan 4:

Terwujudnya Penataan Lingkungan Kota yang Berkelanjutan, dengan sasaran yaitu:

1. Meningkatnya kualitas perlindungan, pengelolaan, dan pelestarian lingkungan hidup
2. Tertatanya ruang kota yang fungsional, estetis, dan ramah lingkungan dengan pendekatan kota cerdas didukung ketersediaan, akses dan layanan infrastruktur dasar yang berkualitas
3. Terciptanya sistem transportasi dan mobilitas kota yang efisien dan rendah emisi
4. Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim

Tujuan 5:



Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui penurunan kemiskinan, melalui pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya lokal, dan integrasi kearifan lokal dalam pembangunan

1. Meningkatnya akses pelayanan dasar, perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)
2. Meningkatnya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan warisan budaya daerah yang berkelanjutan
3. Meningkatnya kualitas hidup keluarga, pemuda, kelompok rentan, serta tercapainya kesetaraan gender
4. Terciptanya masyarakat yang inklusif, toleran, dan harmonis

Selanjutnya penjabaran dari tujuan dan sasaran pembangunan Kota Cirebon tahun 2026 disertai dengan target indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan Kota Cirebon tahun 2026 disajikan pada tabel berikut: ng digunakan pada tabel berikut sesuai dengan RPJMD Kota Cirebon tahun 2025-2029.

Tabel 4.2

Target Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun Anggaran 2026

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN		KETERANGAN
				2025	2026	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(7)
<p>TERWUJUDNYA KOTA CIREBON YANG SEJAHTERA, TERTATA, ASPIRATIF, RELIGIUS, AMAN DAN BERKELANJUTAN TAHUN 2029</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal - Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Bebas KKN, dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik - Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing - Mewujudkan Keseimbangan serta Pelestarian Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan berketahanan - Meningkatkan Pemberdayaan Sosial dan Budaya Lokal 	<p>Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang unggul, kompetitif dan berkarakter</p>		Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	78,53	78,97	
		<p>Meningkatnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas</p>	Harapan Lama Sekolah (Tahun) (Tahun)	13,18	13,19	
			Angka Literasi/Numerasi (%)	82,00	83,00	
			Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	13,18	13,19	
			<p>Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan secara merata</p>	Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))	75,49	75,50
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%)		13,95	13,05	
		Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk. (Kasus)		485	414	
		<p>Meningkatnya kompetensi dan keterampilan kerja masyarakat usia produktif</p>	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kota (Juta Rupiah/Tenaga Kerja)	49,36	50,84	
			<p>Terciptanya SDM yang berkarakter, berintegritas, dan religius</p>	Indeks Pengembangan SDM Berkarakter (Poin)	-	-
		<p>Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan sektor unggulan daerah</p>			Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,06
			PDRB Per Kapita (Rupiah Juta) (*)	91.98-92.34	92.83-95.78	
			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6.15-6.64	6.10-6.62	
			Indeks Gini (poin) (poin)	0.419-0.428	0.414-0.423	
	<p>Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan jasa,</p>		Kontribusi PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran (%)	28,33	28,37	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN		KETERANGAN
				2025	2026	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(7)
		transportasi, pariwisata, ekonomi kreatif	Kontribusi PDRB sektor Transportasi dan Pergudangan (%)	14,57	14,72	
			Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	5,82	6,12	
			Kontribusi PDRB sektor Ekonomi Kreatif (%)	18,80	18,85	
		Meningkatnya iklim investasi yang kompetitif	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (%)	24,34	24,41	
			Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (%)	13,25	14,00	
		Meningkatnya kinerja BUMD	Return on Asset (ROA) BUMD (%)	2,51	2,69	
		Meningkatnya kapasitas dan kemandirian pelaku UMKM dan Koperasi	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	2,39	2,40	
			Rasio Volume Usaha UMKM terhadap PDRB (Persentase)	0,30	0,35	
		Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Kesempatan Kerja (Persentase)	94,71	95,71	
		Meningkatnya pemanfaatan potensi ekonomi hijau dan biru	Indeks Ekonomi Hijau Pilar Ekonomi (Indeks)	70,21	72,63	
			Kontribusi PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Persentase)	0,25	0,25	
		Meningkatnya sistem ketahanan pangan daerah yang tangguh dan berkelanjutan	Indeks Ketahanan Pangan Daerah (Indeks)	84,12	84,46	
			Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) ((%))	5,46	5,34	
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas		Indeks Reformasi Birokrasi (Poin) (poin)	85,24	85,34	
			Indeks Daya Saing Daerah (Angka)	4,00	4,05	
			Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Indeks)	97,05	99,10	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN		KETERANGAN	
				2025	2026		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	
		Terciptanya birokrasi yang bersih, efisien dan akuntabel	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)	3,100	3,140		
			Nilai SAKIP Kota (Skor)	69,25	69,50		
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Poin)	66,75	72,08		
			Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) (Poin)	4,13	2,70		
		Meningkatnya lingkungan kota yang tentram, tertib dan kondusif bagi masyarakat	Indeks ketenteraman dan ketertiban umum (Poin)	-	-		
		Meningkatnya kinerja dan profesionalisme ASN	Indeks Profesionalitas ASN (poin)	80,00	80,50		
		Meningkatnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	4,04	4,15		
			Indeks Kepuasan Masyarakat (poin)	86,60	86,62		
		Meningkatnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik	Indeks Inovasi Daerah (Angka)	53,74	54,24		
		Terwujudnya Penataan Lingkungan Kota yang Berkelanjutan		Penurunan Intensitas Emisi GRK (tonCO ₂ eq/2010 idr Milyar) (TON CO ₂ EQ)	0,15	0,36	
	Meningkatnya kualitas perlindungan, pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)	52,99	53,24	
	Tertatannya ruang kota yang fungsional, estetis, dan ramah lingkungan dengan pendekatan kota cerdas didukung ketersediaan, akses dan			Indeks Layanan Infrastruktur Kota (Poin)	-	-	
				Proporsi ruang terbuka hijau (Persentase)	-	-	
	Indeks Smart City (poin) (poin)			3,44	3,51		



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN		KETERANGAN
				2025	2026	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(7)
		layanan infrastruktur dasar yang berkualitas				
		Terciptanya sistem transportasi dan mobilitas kota yang efisien dan rendah emisi	Rasio konektivitas kabupaten/kota (%)	0,23	0,26	
		Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks Risiko Bencana (Indeks)	125,06	123,84	
			Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif (TON CO2 EQ)	8.381,49	13.093,63	
			Tingkat Kemiskinan ((%))	8,37	7,80	
	Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui penurunan kemiskinan, melalui pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya lokal, dan integrasi kearifan lokal dalam pembangunan	Meningkatnya akses pelayanan dasar, perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapat akses layanan dasar (%)	46,61	57,29	
		Meningkatnya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya daerah yang berkelanjutan	Persentase pelestarian obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya (%)	69,63	70,68	
		Meningkatnya kualitas hidup keluarga, pemuda, kelompok rentan serta tercapainya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Indeks)	66,6	67,5	
			Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) (poin)	61,54	61,74	
			Indeks ketimpangan gender (Indeks)	81,11	81,08	
			Indeks Pembangunan Gender/IPG (Poin) (poin)	95,85	95,87	
		Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)	67,67	67,65		



Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2026

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN		KETERANGAN
				2025	2026	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(7)
		Terciptanya masyarakat yang inklusif, toleran, dan harmonis	Indeks Harmoni Indonesia (Indeks)	6,65	6,70	

Sumber: RPJMD Kota Cirebon 2025-2029

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kota Cirebon tahun 2026, telah dirumuskan strategi dan arah kebijakan yang relevan dengan pembangunan Kota Cirebon. Secara lebih rinci, uraian rumusan strategi dan arah kebijakan yang mengacu pada RPJMD Kota Cirebon tahun 2025-2029 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3
Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN DAN SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
(1)	(2)	(3)
Tujuan 1. Terwujudnya SDM yang unggul, kompetitif dan berkarakter		
1.1. Meningkatnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Optimalisasi partisipasi dan penyelenggaraan pendidikan wajib belajar 13 tahun (1 tahun PAUD dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	Mengoptimalkan partisipasi dan menyelenggarakan pendidikan wajib belajar 13 tahun (1 tahun PAUD dan 12 tahun pendidikan dasar dan menengah).
	Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter	Memperkuat kurikulum pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter.
	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang merata di seluruh wilayah kota	Menyelenggarakan pendidikan anak usia dini secara merata di seluruh wilayah kota.
	Kebijakan peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidik sesuai dengan keahliannya	Meningkatkan kompetensi guru dan tenaga pendidik sesuai keahlian.
	Penataan dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur layanan pendidikan yang sesuai standar.	Menata dan memenuhi kebutuhan infrastruktur layanan pendidikan sesuai standar.
	Kebijakan pendidikan nonformal dan pendidikan terbuka, serta penyiapan akses dan pembangunan pendidikan bagi warga tidak mampu sebagai upaya peningkatan inklusi sosial, pendidikan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan.	Menerapkan kebijakan pendidikan nonformal dan terbuka serta menyediakan akses pendidikan bagi warga tidak mampu untuk inklusi sosial.
	Penyiapan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan.	Menyiapkan masyarakat lokal sebagai guru dan tenaga kependidikan.
1.2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat secara merata	Peningkatan akses terhadap kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas serta dapat menjangkau seluruh wilayah untuk pelayanan primer dan rujukan	Meningkatkan akses terhadap sarana dan prasarana kesehatan berkualitas untuk pelayanan primer dan rujukan.



TUJUAN DAN SASARAN (1)	ARAH KEBIJAKAN (2)	STRATEGI (3)
	Pemenuhan sarana dan prasarana air minum, sanitasi, ruang terbuka hijau untuk mendukung aktivitas fisik dan pola hidup sehat	Memenuhi sarana air minum, sanitasi, dan ruang terbuka hijau untuk mendukung gaya hidup sehat.
	Pemenuhan kebutuhan dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan	Memeratakan distribusi tenaga kesehatan.
	Pencegahan dan penuntasan stunting dengan dukungan integrasi data melalui pemanfaatan sistem informasi geospasial dan pemenuhan gizi seimbang berbasis konsumsi pangan local untuk mendukung upaya menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi	Mencegah dan menuntaskan stunting dengan integrasi data dan pemenuhan gizi seimbang berbasis pangan lokal.
	Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak	Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak.
	Pencegahan dan penanganan penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan serta masalah kesehatan akibat perubahan iklim	Mencegah dan menangani penyakit menular, tropis, dan dampak perubahan iklim.
	Kebijakan layanan jaminan kesehatan nasional	Menerapkan kebijakan layanan jaminan kesehatan nasional.
	Pengawasan kualitas produk peternakan yang beredar, dengan pemeriksaan organoleptis dan pengujian laboratorium, serta sosialisasi kualitas dan penanganan produk asal hewan	Mengawasi kualitas produk peternakan dan mencegah penyakit hewan menular.
	Pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular dan zoonosis	
1.3. Meningkatnya kompetensi dan keterampilan kerja masyarakat usia produktif	Penyiapan, pemetaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif dan angkatan kerja terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling yang terintegrasi dengan pemagangan dan penempatan tenaga kerja.	Menyiapkan, memetakan, dan meningkatkan kualitas SDM usia produktif melalui upskilling dan reskilling yang terintegrasi dengan pemagangan dan penempatan tenaga kerja.
	Peningkatan mutu dan kompetensi tenaga kerja, kewirausahaan, teknologi, serta akses terhadap layanan keuangan dan permodalan	Meningkatkan mutu dan kompetensi tenaga kerja, kewirausahaan, teknologi, serta akses layanan keuangan dan permodalan.



TUJUAN DAN SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
(1)	(2)	(3)
<p>1.4. Terciptanya SDM yang berkarakter, berintegritas, dan religius</p>	<p>Penguatan karakter dan identitas bangsa melalui pembinaan ideologi Pancasila untuk mewujudkan kedaulatan politik hukum dan ketentraman serta ketertiban umum</p>	<p>Memperkuat karakter dan identitas bangsa melalui pembinaan ideologi Pancasila untuk mewujudkan kedaulatan politik, hukum, ketentraman, dan ketertiban umum.</p>
<p>Tujuan 2. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan sektor unggulan daerah.</p>		
<p>2.1. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan jasa, transportasi, pariwisata, ekonomi kreatif, dan peningkatan kinerja BUMD</p>	<p>Peningkatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor jasa dan perdagangan didukung fasilitas MICE (Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran) yang sinergis dengan rencana pengembangan kawasan Rebana</p>	<p>Meningkatkan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik andal, termasuk fasilitas MICE yang sinergis dengan pengembangan kawasan.</p>
	<p>Penguatan tata kelola sektor perdagangan melalui diversifikasi ekonomi, peningkatan daya saing, peningkatan ekspor, pembukaan pasar baru, pengembangan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia</p>	<p>Memperkuat tata kelola sektor perdagangan melalui diversifikasi ekonomi, peningkatan daya saing, ekspor, pembukaan pasar baru, dan pengembangan SDM.</p>
	<p>Penataan dan penguatan daya tarik wisata budaya dan wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif sejalan dengan pengembangan MICE.</p>	<p>Menata dan memperkuat daya tarik wisata budaya dan perkotaan secara kolaboratif.</p>
	<p>Penataan dan restrukturisasi BUMD.</p>	<p>Menata dan merestrukturisasi BUMD.</p>
	<p>Industrialisasi koperasi terutama pada komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi tepat guna</p>	<p>Mengindustrialisasi koperasi pada komoditas unggulan, memperkuat proses bisnis, kelembagaan, dan mengadopsi teknologi tepat guna.</p>
	<p>Peningkatan pengendalian inflasi daerah.</p>	<p>Meningkatkan pengendalian inflasi daerah.</p>
	<p>Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer</p>	<p>Meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak dan retribusi, pembiayaan alternatif, kualitas belanja, dan sinergi perencanaan.</p>



TUJUAN DAN SASARAN (1)	ARAH KEBIJAKAN (2)	STRATEGI (3)
	ke Daerah, serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	
2.2. Meningkatnya kapasitas dan kemandirian pelaku UMKM	Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis serta akses terhadap jasa keuangan.	Memperkuat proses bisnis UMKM dengan memperluas ekosistem digital, ruang inovasi, kreasi, inkubator bisnis, dan akses jasa keuangan.
	Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan.	Memberdayakan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan.
2.3. Menurunnya tingkat pengangguran	Peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha bagi IKM/UMKM maupun usaha yang dapat menyerap tenaga kerja padat karya terampil.	Meningkatkan iklim investasi dan kemudahan berusaha bagi IKM/UMKM dan usaha padat karya terampil.
2.4. Meningkatnya pemanfaatan potensi ekonomi hijau dan biru	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan usaha ekonomi lokal berbasis ekonomi hijau dan biru	Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan usaha ekonomi lokal berbasis ekonomi hijau dan biru.
	Penyediaan sarana prasarana pendukung untuk pengembangan varietas unggul komoditas pertanian, perikanan, dan peternakan	Menyediakan sarana dan prasarana pendukung pengembangan varietas unggul pertanian, perikanan, dan peternakan.
	Penataan dan penyiapan kelembagaan, pembiayaan koperasi bagi petani, peternak, nelayan, dan pembudidaya serta penguatan kolaborasi dengan market, bank, dan asuransi pertanian serta perikanan	Menata kelembagaan dan pembiayaan koperasi bagi petani, peternak, nelayan, serta memperkuat kolaborasi dengan pasar, bank, dan asuransi.
	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan	Mengembangkan perikanan berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat pesisir dan nelayan.
	Pengembangan perikanan berkelanjutan, dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan.	Menyediakan sarana peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk.
	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan	



TUJUAN DAN SASARAN (1)	ARAH KEBIJAKAN (2)	STRATEGI (3)
	petambak dalam peningkatan produksi hasil perikanan	
	Penyediaan sarana dan prasarana bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan	
2.5. Meningkatnya sistem ketahanan pangan daerah yang tangguh dan berkelanjutan	Peningkatan produktivitas pertanian yang berdaya saing dengan infrastruktur yang terintegrasi	Meningkatkan produktivitas pertanian berdaya saing dengan infrastruktur terintegrasi.
	Pengendalian alih fungsi lahan pertanian serta perluasan penerapan pemanfaatan lahan pekarangan untuk pertanian	Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian dan memperluas pemanfaatan lahan pekarangan untuk pertanian.
	Peningkatan produksi peternakan, melalui peningkatan jumlah populasi ternak	Meningkatkan produksi peternakan dan populasi ternak.
	Perluasan pembentukan kampung perikanan budidaya serta peningkatan kapasitas pembudidaya	Memperluas kampung perikanan budidaya dan meningkatkan kapasitas pembudidaya.
	Pembangunan pasar atau jaringan distribusi untuk makanan yang tersisa atau mendekati tanggal kadaluarsa yang aman dan terstruktur	Membangun pasar atau jaringan distribusi makanan aman dan terstruktur.
	Penguatan kerja sama dan kelembagaan sektor pangan serta pengembangan produksi pangan di rumah tangga	Memperkuat kerja sama dan kelembagaan sektor pangan serta mengembangkan produksi pangan di rumah tangga.
	Peningkatan knowledge, attitude and practice masyarakat tentang pentingnya kualitas konsumsi dan pemenuhan gizi seimbang serta pentingnya mengurangi pemborosan pangan (stop boros pangan) sejalan	Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang konsumsi berkualitas, gizi seimbang, dan pengurangan pemborosan pangan.
	Peningkatan pengetahuan dan akses masyarakat tentang pemanfaatan lahan pertanian di perkotaan salah satunya dengan pemanfaatan pekarangan atau <i>rooftop farming</i> untuk mendukung produktivitas	Memanfaatkan lahan pertanian perkotaan seperti <i>rooftop farming</i> .



TUJUAN DAN SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
(1)	(2)	(3)
	pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil	
	Penerapan praktik pertanian Tangguh untuk mendorong system produksi pangan yang berkelanjutan	Menerapkan praktik pertanian tangguh untuk produksi berkelanjutan.
Tujuan 3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas		
3.1. Terciptanya birokrasi yang bersih, efisien dan akuntabel	Pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb).	Membentuk regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan pemerintahan sesuai karakteristik daerah, termasuk pelayanan publik lintas wilayah.
	Pembangunan sistem pengelolaan dan penyusunan regulasi daerah.	Membangun sistem pengelolaan dan penyusunan regulasi daerah.
	Pembangunan infrastruktur digital yang merata, penguatan kapasitas SDM, dan peningkatan keamanan SPBE untuk percepatan penyelenggaraan pelayanan publik berbasis digital.	Mengembangkan infrastruktur digital merata, memperkuat kapasitas SDM, dan meningkatkan keamanan SPBE untuk percepatan pelayanan publik digital.
	Pengembangan infrastruktur manajemen risiko untuk pengendalian pembangunan.	Mengembangkan infrastruktur manajemen risiko untuk pengendalian pembangunan.
	Penguatan peran Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah yang terkoordinasi dan sinergis	Memperkuat peran perangkat daerah dalam penegakan peraturan daerah yang terkoordinasi dan sinergis.
	Peningkatan kerja sama antar wilayah dalam pengelolaan berbagai aspek pembangunan daerah	Meningkatkan kerja sama antar wilayah dalam pengelolaan pembangunan daerah.
3.2. Menerapkan penerapan smart city dalam pembangunan	Penataan kelembagaan berbasis evaluasi yang tepat fungsi serta penguatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan sistem informasi digital.	Menata kelembagaan berbasis evaluasi fungsi dan penguatan monitoring serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sistem informasi digital.



TUJUAN DAN SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
(1)	(2)	(3)
	Pengembang infrastruktur digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital	Mengembangkan infrastruktur digital untuk transformasi digital.
3.3. Meningkatkan kinerja dan profesionalisme ASN	Pengembangan sistem meritokrasi untuk pengembangan karir ASN berbasis kinerja.	Mengembangkan sistem meritokrasi berbasis kinerja untuk pengembangan karir ASN.
3.4. Meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kebijakan partisipasi masyarakat sipil dan adat dalam kegiatan Musrembang dari tingkat kelurahan, kecamatan dan kota	Menerapkan kebijakan partisipasi masyarakat sipil dan adat dalam Musrenbang di tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota.
3.5. Meningkatkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik	Pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) daerah yang berdaya saing di tataran global.	Mengembangkan ekosistem riset dan inovasi IPTEK daerah untuk mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang berdaya saing global.
Tujuan 4. Terwujudnya Penataan Lingkungan Kota yang Berkelanjutan		
4.1. Meningkatkan kualitas perlindungan, pengelolaan, dan daya dukung lingkungan hidup	Penguatan regulasi dan tata kelola Lingkungan Hidup dengan partisipasi masyarakat	Memperkuat regulasi dan tata kelola lingkungan hidup dengan partisipasi masyarakat.
	Penyusunan strategi pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem serta jasa lingkungannya.	Menyusun strategi pelestarian, restorasi, dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem dan jasa lingkungan.
	Pengelolaan keanekaragamanhayati, pelestarian kawasan lindung, dan ekosistem alami	Mengelola keanekaragaman hayati, melestarikan kawasan lindung, dan ekosistem alami.
	Persiapan Pemulihan ex TPA Grenjeng menjadi kawasan lindung	Memulihkan eks TPA menjadi kawasan lindung.



TUJUAN DAN SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
(1)	(2)	(3)
	Percepatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Mempercepat pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
	Pencapaian target pengurangan sampah dengan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengurangan sampah	Mengurangi sampah dengan meningkatkan peran serta masyarakat.
	Penerapan pengelolaan air limpasan melalui rekayasa teknis berupa pembuatan kolam retensi, biopori, dan perbaikan dan pengembangan jaringan drainase yang berwawasan lingkungan sebagai bagian dari konservasi air yang berketahanan	Mengelola air limpasan melalui rekayasa teknis (kolam retensi, biopori, drainase berwawasan lingkungan).
	dengan peningkatan kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bencana	Meningkatkan kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, dan literasi masyarakat terhadap bencana.
	Pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim	Melaksanakan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
	Pengintegrasian tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan perencanaan pembangunan kota	Mengintegrasikan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan pembangunan kota.
	Peningkatan kualitas air dengan mengurangi polusi, yang masuk kedalam badan air dan secara signifikan meningkatkan daur ulang	Meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi dan meningkatkan daur ulang.
4.2. Meningkatnya ketersediaan, akses dan layanan infrastruktur dasar yang berkualitas	Penyediaan dan pengembangan perumahan yang layak dan terjangkau, infrastruktur air baku dan air minum, serta sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan. Pengembangan layanan infrastruktur dilakukan melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan untuk peningkatan ketahanan bencana.	Menyediakan dan mengembangkan perumahan layak dan terjangkau, infrastruktur air baku dan minum, serta sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu menuju zero waste city dan circular economy.
	Pemenuhan sarana dan prasarana persampahan	Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana persampahan sesuai standar.



TUJUAN DAN SASARAN (1)	ARAH KEBIJAKAN (2)	STRATEGI (3)
	Peningkatan TPS menjadi TPS 3R serta optimalisasi Pusat Daur Ulang Sampah (PDU)	Meningkatkan TPS menjadi TPS 3R dan mengoptimalkan Pusat Daur Ulang Sampah.
	Clean and Clear lahan TPA Kopi Luhur dan revitalisasi TPA Kopi Luhur dengan pembangunann TPST dengan RDF Tahap I (240 ton/ hari)	Merevitalisasi TPA dengan pembangunan TPST dan RDF.
	Penguatan kolaborasi dan kemitraan penyediaan air bersih serta pengembangan strategi dan rencana darurat untuk mengatasi krisis air	Memperkuat kolaborasi penyediaan air bersih dan strategi darurat krisis air.
	Penyediaan dan penataan basis data potensi sumber daya air untuk ketersediaan air yang berkelanjutan	Menyediakan dan menata basis data potensi sumber daya air berkelanjutan.
	Pengembangan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh.	Mengembangkan infrastruktur yang andal, berkelanjutan, dan tangguh.
	Pengembangan kapasitas tampung dan jaringan infrastruktur sumber daya air dengan mengoptimalkan sumber-sumber air baku alternatif, antara lain Jatigede.	Mengoptimalkan sumber-sumber air baku alternatif dan memperkuat kerjasama untuk alternatif supply air bersih.
	Penyediaan dan pengelolaan data sarana prasarana pelayanan dasar yang terintegrasi dengan berbasis spasial	Membangun platform data spasial terintegrasi untuk pengelolaan sarras layanan dasar
	Perencanaan penyediaan hunian layak di perkotaan sesuai kebutuhan pengguna dan karakteristik wilayah antara lain melalui penyediaan hunian vertikal, rumah deret, dan optimalisasi kawasan campuran serta penataan kawasan kumuh dengan memperhatikan alternatif skema pembiayaan yang terjangkau.	Menyusun perencanaan perumahan untuk hunian vertikal dengan memperhatikan alternatif skema pembiayaan yang terjangkau.
	Penyediaan, pengembangan dan peningkatan akses layanan air minum yang merata, aman dan terjangkau bagi semua.	Meningkatkan akses air minum yang merata, aman, dan terjangkau dan menguatkan kolaborasi penyediaan air bersih dan siapkan rencana darurat krisis air.
	Peningkatan akses terhadap sanitasi yang memadai dan merata bagi semua orang	Meningkatkan akses sanitasi dengan membangun MCK komunal dan sistem pengelolaan limbah domestik yang terpusat.



TUJUAN DAN SASARAN (1)	ARAH KEBIJAKAN (2)	STRATEGI (3)
4.3. Terciptanya sistem transportasi dan mobilitas kota yang efisien dan rendah emisi	Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas yang efisien dan merata, termasuk di Cirebon bagian selatan.	Memperluas cakupan layanan sarana prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi yang saling terintegrasi antar moda pada wilayah kota dengan memperhatikan aksesibilitas terhadap prasarana umum
	Penyediaan dan penataan infrastruktur penunjang aktivitas perdagangan dan jasa yang inklusif dan berdaya saing, termasuk antara lain kemudahan aksesibilitas, ketersediaan prasarana sarana umum yang memadai serta penyediaan akses telekomunikasi dan digital.	Menyediakan infrastruktur penunjang aktivitas perdagangan dan jasa yang inklusif dan berdaya saing, termasuk antara lain kemudahan aksesibilitas, ketersediaan prasarana sarana umum yang memadai serta penyediaan akses telekomunikasi dan digital.
	Pembangunan dan perluasan cakupan layanan sarana prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi yang saling terintegrasi antar moda pada wilayah kota dengan memperhatikan aksesibilitas terhadap prasarana umum dan obyek strategis serta kepentingan pengembangan MICE tourism.	Membangun transportasi publik massal rendah emisi yang terintegrasi.
	Perencanaan dan penataan jaringan pergerakan yang mendukung mobilitas yang humanis dan berkelanjutan antara lain jalur pedestrian dan jalur sepeda.	Menata dan mengembangkan jaringan pergerakan yang mendukung mobilitas yang humanis dan berkelanjutan antara lain jalur pedestrian dan jalur sepeda.
4.4. Tertatanya ruang kota yang fungsional, estetis, dan ramah lingkungan	Perencanaan dan penataan Kawasan pesisir yang sinergis dengan rencana tata ruang.	Melakukan penataan pesisir yang sesuai arahan rencana tata ruang.
	Peningkatan kapasitas dalam upaya pembangunan rendah karbon serta penguatan adaptasi perubahan iklim	Meningkatkan kapasitas dalam upaya pembangunan rendah karbon serta penguatan adaptasi perubahan iklim
	Penyediaan dan penataan basis data perencanaan, pengadaan dan pencadangan tanah pada lahan yang dibutuhkan untuk proyek dan/atau	Membangun basis data perencanaan, pengadaan dan pencadangan tanah pada lahan yang dibutuhkan untuk proyek



TUJUAN DAN SASARAN (1)	ARAH KEBIJAKAN (2)	STRATEGI (3)
	pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas pembangunan daerah maupun nasional diantaranya penyediaan lahan untuk pembangunan Jalan Lingkar Cirebon, pembangunan embung, serta pendukung pengembangan MICE (Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran).	dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas pembangunan daerah maupun nasional
	Penguatan pengelolaan jalan kota dan jalan lingkungan.	Membangun sistem pengelolaan jalan kota dan jalan lingkungan.
	Perencanaan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung pemanfaatan energi rendah emisi berbasis energi baru dan terbarukan, khususnya sistem ketenagalistrikan skala kecil pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi	Mengembangkan sistem ketenagalistrikan skala kecil pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi
	Penyelenggaraan penataan ruang yang mengarah pada penerapan compact city dalam penyediaan layanan perkotaan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, ketersediaan ruang terbuka hijau, keanekaragaman hayati, serta mempertimbangkan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim serta wilayah kesatuan lanskap ekologis.	Menerapkan compact city dalam penyediaan layanan perkotaan.
	Penyusunan rencana pengembangan kawasan, antara lain termasuk revisi RDTR, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, standar pelayanan, dsb.	Menyediakan rencana pengembangan kawasan untuk kawasan strategis dan potensial.
	Perencanaan dan implementasi penatagunaan tanah	Menyusun penatagunaan tanah yang terintegrasi
	Perencanaan penyediaan cadangan lahan untuk kepentingan pembangunan daerah.	Menyusun rencana penyediaan cadangan lahan untuk kepentingan pembangunan daerah.
	Sinkronisasi periodisasi dan substansi serta integrasi rencana tata ruang dengan dokumen	Melakukan sinkronisasi periodisasi dan substansi serta integrasi rencana tata ruang



TUJUAN DAN SASARAN (1)	ARAH KEBIJAKAN (2)	STRATEGI (3)
	perencanaan pembangunan berbasis spasial	dengan dokumen perencanaan pembangunan berbasis spasial
4.5. Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim	Mainstreaming Transisi Energi di masyarakat	Mainstreaming Transisi Energi di masyarakat
	Pengelolaan risiko bencana	Melakukan pengelolaan risiko bencana yang terpadu
	Perencanaan dan penyiapan kerangka implementasi standar bangunan dan penataan lingkungan yang berketahanan bencana dan iklim	Menyusun perencanaan kerangka implementasi standar bangunan dan penataan lingkungan yang berketahanan bencana dan iklim
Tujuan 5. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui penurunan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya lokal, dan integrasi kearifan lokal dalam pembangunan yang berkelanjutan.		
5.1. Meningkatnya akses pelayanan dasar, perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	Penguatan kebijakan pengendalian penduduk yang didukung sistem database kependudukan yang memiliki akurasi dan tingkat kepercayaan yang tinggi serta dikelola dalam suatu sistem yang integratif yang dapat menyediakan data dan informasi kependudukan yang andal, akurat, riil, dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan.	Menyusun sistem database kependudukan yang memiliki akurasi dan tingkat kepercayaan yang tinggi serta dikelola dalam suatu sistem yang integratif yang dapat menyediakan data dan informasi kependudukan yang andal, akurat, riil, dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan.
	Pemenuhan akses sanitasi dasar pada rumah tangga	Meningkatkan akses sanitasi dasar pada rumah tangga
	Penyediaan dan peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar yang merata, meliputi antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi dan penunjang konektivitas, termasuk di kawasan Cirebon selatan.	Meningkatkan akses infrastruktur pelayanan dasar yang merata, meliputi antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi dan penunjang konektivitas di seluruh wilayah
	Penyediaan, pengembangan dan peningkatan akses layanan air minum yang merata, aman dan terjangkau bagi semua.	Meningkatkan akses layanan air minum yang merata, aman dan terjangkau bagi semua.
	Kebijakan masyarakat penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	Menetapkan kebijakan bagi penyandang disabilitas untuk dapat bekerja di sektor formal



TUJUAN DAN SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
(1)	(2)	(3)
	Penataan dan Pemenuhan penyediaan Jaminan Sosial terutama Bagi Kelompok Rentan dan Masyarakat	Menyediakan Jaminan Sosial terutama Bagi Kelompok Rentan dan Masyarakat
	Penguatan peran keluarga dalam pembentukan karakter masyarakat dengan kemudahan akses edukasi dan informasi publik	Menguatkan peran keluarga dalam pembentukan karakter masyarakat dengan kemudahan akses edukasi dan informasi publik
	Perlindungan anak, perempuan, disabilitas, lansia dan pemuda	Meningkatkan perlindungan anak, perempuan, disabilitas, lansia dan pemuda
	Pemberdayaan perempuan, disabilitas, lansia dan pemuda	Meningkatkan pemberdayaan perempuan, disabilitas, lansia dan pemuda
5.3. Meningkatkan perlindungan dan pelestarian warisan budaya daerah yang berkelanjutan.	Penguatan peran masyarakat dalam pelestarian kebudayaan dan tradisi masyarakat Cirebon	Menguatkan peran masyarakat dalam pelestarian kebudayaan dan tradisi masyarakat Cirebon
	Penguatan karakter dan identitas budaya lokal melalui penggunaan atribut budaya sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya Cirebon.	Menggunakan atribut budaya sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya Cirebon.
5.4. Meningkatkan pemanfaatan budaya lokal dalam pembangunan ekonomi kreatif dan pariwisata.	Penyiapan dan penetapan instrumen circular economy dalam pengelolaan sampah	Menyiapkan dan menetapkan instrumen circular economy dalam pengelolaan sampah
5.5. Terciptanya masyarakat yang inklusif, toleran, dan harmonis.	Penguatan individu dan masyarakat dalam penghargaan dalam keberagaman etnis dan agama	Menguatkan individu dan masyarakat dalam penghargaan dalam keberagaman etnis dan agama

Sumber : Rancangan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2025-2029

IV.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kota Cirebon tahun 2026 disusun untuk mendukung prioritas dan sasaran pembangunan



Nasional, prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat, isu strategis daerah, prioritas pembangunan daerah dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kota Cirebon Tahun 2025-2029.

IV.2.1 Isu Strategis dan Tema Pembangunan Kota Cirebon Tahun 2026

Isu strategis pembangunan merujuk pada tantangan yang memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan. Isu strategis sering kali menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan, karena memiliki potensi untuk mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat serta kemajuan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Perumusan isu strategis Kota Cirebon tahun 2026 disusun berdasarkan gambaran umum hasil evaluasi pelaksanaan dan permasalahan pembangunan tahun 2024 serta dikaitkan dengan isu strategis/tantangan dan arah kebijakan pada RKP 2026 dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026. Selain itu, isu strategis dihimpun berdasarkan pelaksanaan *focus group discussion* serta masukan dalam penyelenggaraan kegiatan Musrenbang RKPD Kota Cirebon Tahun 2026. Adapun beberapa isu strategis di Kota Cirebon diantaranya:

1. Peningkatan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia.

Peningkatan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia merupakan isu penting yang berdampak langsung pada kemajuan ekonomi, sosial dan pembangunan suatu daerah. Rendahnya peningkatan dan pemberdayaan sumber daya manusia demi kemajuan ekonomi kota menjadi hal yang harus diperhatikan secara serius. Pemerintah Kota Cirebon telah melakukan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Beberapa kebijakan tersebut termasuk dalam upaya penguatan pemberdayaan masyarakat termasuk didalamnya upaya peningkatan kualitas keluarga, peningkatan layanan dasar dan perlindungan sosial, akselerasi pertumbuhan, dan pemerataan pembangunan berkelanjutan, serta peningkatan produktivitas daya saing daerah. Selain itu, perencanaan pembangunan juga difokuskan pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan dan pengembangan budaya. Hal ini sejalan dengan upaya untuk mewujudkan kota kreatif berbasis budaya dan sejarah serta mengatasi permasalahan seperti peningkatan angka kemiskinan, penurunan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kenaikan jumlah pengangguran. Selain itu, terdapat juga upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis masyarakat untuk mengatasi masalah pengangguran di wilayah Kota Cirebon.

2. Optimalisasi Pertumbuhan Potensi Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing Tinggi, Inklusif, dan Berkelanjutan

Potensi ekonomi lokal yang memiliki daya saing tinggi, inklusif, dan berkelanjutan menciptakan landasan yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan ekonomi lokal Kota Cirebon mengacu pada aktivitas ekonomi yang tumbuh dan memiliki potensi



daya saing. Cakupan aktivitas ekonomi lokal di Kota Cirebon seperti UMKM, IKM, sektor ekonomi kreatif, pariwisata lokal, perikanan, termasuk aktivitas yang terjadi pada pasar tradisional dan modern.

Fokus pada daya saing tinggi menuntut pemanfaatan sumber daya lokal, pengembangan inovasi, dan peningkatan produktivitas. Dengan memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif, komunitas lokal dapat menonjolkan sektor-sektor unggulannya dalam pasar global. Selanjutnya, inklusifitas dalam konteks ini menekankan pentingnya memberdayakan semua lapisan masyarakat, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah serta industri kecil dan menengah. Dengan menyediakan akses terhadap pelatihan, pendanaan, dan pasar, ekonomi lokal inklusif menciptakan peluang yang setara untuk pertumbuhan usaha bagi semua. Terakhir, aspek berkelanjutan merujuk pada prinsip-prinsip pembangunan yang memperhatikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Menerapkan praktik-praktik yang ramah lingkungan, mendukung pekerjaan yang layak, dan mempromosikan inklusif sosial adalah kunci untuk mencapai ekonomi lokal yang berkelanjutan. Dengan memadukan ketiga dimensi ini, potensi ekonomi lokal dapat dioptimalkan, memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat dan memperkuat daya saing di tingkat yang lebih luas.

Dampak yang akan ditimbulkan ketika isu ini mampu diintervensi dengan baik yaitu peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja, peningkatan kapasitas pelaku usaha dari segi akses keuangan, inovasi produk, pemasaran, dan adaptasi teknologi, peningkatan jaringan infrastruktur pendukung sarana ekonomi, peningkatan daya saing potensi ekonomi dari sektor pariwisata dan industri kreatif, dan peningkatan peluang investasi yang pada akhirnya diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan, penangguran dan ketimpangan.

3. Ketahanan Pangan dan Air

Isu ketahanan pangan dan air adalah tantangan yang makin mendesak akibat pertumbuhan populasi, urbanisasi, perubahan iklim dan tekanan terhadap sumber daya alam. Keduanya saling terkait karena air adalah elemen krusial dalam produksi pangan. Rentannya ketahanan pangan, kecukupan terhadap nilai produksi/pengadaan pangan kota harus diantisipasi demi meningkatkan angka kecukupan pangan, pola pangan harapan dan mengurangi malnutrisi. Masalah pokok ketahanan pangan di Kota Cirebon mencakup tingginya ketergantungan terhadap ketersediaan dan produksi pangan, yang dapat menyebabkan kerentanan terhadap gangguan pasokan dan fluktuasi harga pangan. Pertama-tama, ketergantungan pada pasokan pangan luar kota atau bahkan luar provinsi dapat meningkatkan risiko ketidakstabilan pasokan, terutama dalam situasi darurat atau krisis kesehatan seperti pandemi. Terbatasnya produksi lokal juga dapat berdampak negatif terhadap ketahanan pangan, mengingat adanya risiko gangguan dalam rantai pasokan yang panjang.



Selain itu, faktor perubahan iklim dan bencana alam dapat mempengaruhi produksi pangan lokal di Kota Cirebon. Jika kota ini terlalu bergantung pada pasokan dari luar wilayah, kerentanan terhadap perubahan iklim dan bencana alam dapat meningkat, menyebabkan ketidakpastian dalam ketersediaan pangan. Dalam konteks ini, diversifikasi sumber pasokan pangan dan pendorong produksi lokal menjadi krusial. Mendorong pertanian perkotaan, mendukung petani lokal, dan membangun sistem distribusi pangan yang efisien dapat membantu mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar kota. Inisiatif ini juga dapat meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat lokal dan menciptakan lapangan kerja.

Selain itu, edukasi masyarakat mengenai pentingnya konsumsi pangan lokal dan budaya makanan sehat dapat memberikan dukungan kepada usaha lokal dan meningkatkan ketahanan pangan di tingkat komunitas. Pembangunan kebijakan yang mendukung inisiatif pertanian perkotaan dan penyediaan insentif bagi pelaku usaha lokal juga menjadi langkah penting untuk mengatasi masalah ketergantungan pada pasokan dan produksi pangan di Kota Cirebon. Dengan demikian, upaya bersama dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dapat membantu membangun ketahanan pangan yang lebih kokoh dan berkelanjutan di tingkat lokal.

Sebagai wilayah yang memiliki karakteristik urban ketersediaan air merupakan isu penting dalam menjamin keberlangsungan aktifitas dari skala rumah tangga hingga aktifitas ekonomi dalam berbagai tingkatan. Sayangnya ketersediaan air justru menjadi salah satu tantangan geografis di Kota Cirebon dimana tidak terdapat banyak sumber air bersih yang memadai untuk mencukupi kebutuhan masyarakat kota secara mandiri. Kurangnya ketersediaan kualitas, kuantitas kontinuitas, dan keterjangkauan layanan dan sumber air dan layanan sanitasi kota menjadi persoalan serius yang harus diatasi.

4. Optimalisasi Ruang Kota Tanpa Melampaui Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan

Optimalisasi ruang kota menjadi sangat penting dalam konteks pertumbuhan perkotaan yang cepat dan berkelanjutan. Untuk menjawab kebutuhan populasi yang terus berkembang, diperlukan perencanaan perkotaan yang bijak dan berkelanjutan. Optimalisasi ruang kota adalah langkah untuk memastikan bahwa pertumbuhan perkotaan tidak melampaui daya dukung daya tampung lingkungan.

Ruang kota bukanlah sumber daya tidak terbatas, melainkan suatu ekosistem yang memerlukan pemeliharaan dan pemanfaatan yang berkelanjutan. Optimalisasi ruang kota mencakup penggunaan lahan yang efisien, pelestarian ruang terbuka hijau, dan pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan. Hal ini, harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan, keseimbangan ekosistem perkotaan, dan kemampuan alam untuk menanggung beban dari aktivitas manusia. Integrasi prinsip-prinsip pembangunan



berkelanjutan dalam perencanaan perkotaan diharapkan dapat mengoptimalkan pertumbuhan perkotaan, menjaga keanekaragaman lingkungan, serta memastikan kesejahteraan dan kenyamanan bagi penduduk kota. Minimnya perencanaan adaptasi, mitigasi, dan pengelolaan informasi kebencanaan kota.

5. Tata Kelola Pemerintahan yang inovatif, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif.

Tata Kelola Pemerintahan yang inovatif, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif mengacu pada upaya pemerintah Kota Cirebon untuk mengembangkan sistem tata kelola yang lebih baik dan efektif dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Inovasi dalam tata kelola pemerintahan daerah dapat mencakup digitalisasi pelayanan publik, kolaborasi antar daerah dan pelaku pembangunan, koordinasi perencanaan dan penganggaran untuk percepatan pembangunan, serta peluang dan tantangan dalam penerapan kontrak kinerja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Transformasi riset dan inovasi juga dapat membantu dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

6. Kemantapan Jaringan Infrastruktur Perkotaan Yang Inklusif Dan Berketahanan Di Seluruh Wilayah

Kemantapan jaringan infrastruktur perkotaan yang mendukung kehidupan dan aktivitas masyarakat menjadi tantangan bagi pemerintah Kota Cirebon. Isu kemantapan jaringan infrastruktur yang inklusif dan berketahanan berkaitan dengan bagaimana kota merencanakan, membangun, dan memelihara infrastruktur yang tidak hanya kuat dan tahan lama tetapi juga mampu mengakomodasi seluruh lapisan masyarakat dan mampu bertahan serta pulih dari berbagai tantangan dan bencana. Kemantapan jaringan infrastruktur meliputi sistem transportasi yang terintegrasi, kualitas jalan yang baik, ketersediaan energi dan kelistrikan, ketersediaan air minum dan sanitasi, infrastruktur pelayanan publik sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan penelaahan isu strategis dan mempertimbangkan tema pembangunan yang dapat mendukung pelaksanaan RPJPD Kota Cirebon Tahun 2025-2045 dan diturunkan dalam RPJMD Kota Cirebon Tahun 2025-2029 maka Tema Pembangunan Kota Cirebon Tahun 2026 adalah:

“Percepatan penataan lingkungan perkotaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menuju Kota Cirebon yang SETARA berkelanjutan.”

Tema tersebut memiliki makna bahwa pemerintah kota berupaya melakukan percepatan penataan ruang dan lingkungan perkotaan guna meningkatkan kualitas layanan dasar, daya dukung infrastruktur, dan keteraturan tata ruang. Penataan ini diarahkan untuk memperkuat konektivitas, menciptakan ruang hidup yang tertata, sehat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat serta meningkatkan



daya saing wilayah. Pembangunan difokuskan pada pertumbuhan yang inklusif, merata, dan berkeadilan, sesuai dengan semangat mewujudkan Kota Cirebon yang SETARA. Seluruh program dan kegiatan juga diselaraskan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh generasi sekarang dan mendatang. Tema ini menjadi landasan dalam perumusan prioritas pembangunan yang selaras dengan agenda nasional, provinsi, dan visi jangka menengah daerah.

IV.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Cirebon 2026

Penetapan prioritas pembangunan daerah Kota Cirebon tahun 2026 disusun untuk mendukung pencapaian visi misi dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Cirebon 2025–2029. Prioritas ini merupakan respons terhadap isu strategis yang berkembang, hasil evaluasi capaian tahun sebelumnya, serta kebutuhan percepatan pembangunan daerah. Seluruh prioritas diarahkan untuk mendorong peningkatan sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan kualitas layanan publik, dan pembangunan yang berkelanjutan serta merata.

Prioritas pembangunan daerah disusun dengan menerapkan konsep THIS, yaitu 1) **Tematik** (disesuaikan dengan isu strategis dan tema pembangunan); 2) **Holistik** (menyelesaikan permasalahan secara komprehensif dari hulu sampai hilir); 3) **Integratif** (melibatkan berbagai Perangkat Daerah Kota Cirebon dan terintegrasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat); dan 4) **Spasial** (mengacu pada kebijakan penataan ruang dan kebijakan kewilayahan).

Prioritas pembangunan daerah Kota Cirebon Tahun 2026 yaitu:

1. PRIORITAS 1, yaitu Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing tenaga kerja.
2. PRIORITAS 2, yaitu Penguatan ekonomi kota berbasis sektor unggulan.
3. PRIORITAS 3, yaitu Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
4. PRIORITAS 4, yaitu Penataan lingkungan perkotaan yang berkualitas untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan.
5. PRIORITAS 5, yaitu Terwujudnya kesejahteraan sosial melalui penurunan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya lokal, dan integrasi kearifan lokal dalam pembangunan.

Prioritas pembangunan daerah tahun 2025 dijabarkan ke dalam sasaran prioritas pembangunan daerah yang merupakan bagian dari sasaran pembangunan daerah yang tercantum dalam rancangan RPJMD Kota Cirebon 2025-2029.

Tabel 4.4

Prioritas, Sasaran Pembangunan dan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2026

TUJUAN DAN SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM KERJA WALI KOTA	PROGRAM PRIORITAS	STRATEGI PERWUJUDAN PROGRAM
1	2	3	4	5	6
VISI : TERWUJUDNYA KOTA CIREBON YANG SEJAHTERA, TERTATA, ASPIRATIF, RELIGIUS, AMAN DAN BERKELANJUTAN TAHUN 2029					
MISI 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing					
TUJUAN 1. Terwujudnya SDM yang unggul, kompetitif dan berkarakter		Indeks Pembangunan Manusia			
1. Meningkatnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Peserta didik memperoleh layanan pendidikan secara merata dan mampu mencapai standar kompetensi literasi dan numerasi yang ditetapkan nasional.	Harapan Lama Sekolah	- Kebijakan sekolah negeri bebas pungutan dan pemerataan kualitas pendidikan melalui pemerataan guru, fasilitas dan sarana prasarana pendidikan	Pemerataan akses pendidikan berkualitas berbasis karakter dan budaya lokal	- Penyediaan anggaran pendidikan melalui APBD untuk beasiswa dan Peningkatan sarana prasarana
		Angka Literasi/Numerasi	- Peningkatan perhatian Pemerintah Daerah kepada guru PAUD, guru TK, pegawai TU sekolah swasta dan guru honorer		- Penguatan koordinasi dengan Dinas pendidikan untuk Pemerataan guru dan tenaga pendukung
		Rata-rata Lama Sekolah	- Dukungan anggaran, beasiswa, dan fasilitas untuk semua jenjang dengan meningkatkan anggaran beasiswa untuk siswa		- Pengawasan Transparansi penggunaan dana BOS sekolah



TUJUAN DAN SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM KERJA WALI KOTA	PROGRAM PRIORITAS	STRATEGI PERWUJUDAN PROGRAM
1	2	3	4	5	6
			berprestasi maupun siswa dari keluarga kurang mampu		
			- Transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS sekolah		
2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat secara merata	Masyarakat menikmati layanan kesehatan yang mudah dijangkau, sehingga angka harapan hidup meningkat dan kasus penyakit menular dapat ditekan.	Usia Harapan Hidup (Tahun)	- Perluasan cakupan BPJS melalui dukungan APBD	Pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan	- Dukungan anggaran untuk perluasan cakupan BPJS dan operasional posyandu
		Prevalensi Stunting	- Penguatan layanan posyandu dan upaya pencegahan stunting melalui peningkatan bantuan PMT dan operasional untuk posyandu, posbindu dan poskesma		- Pengelolaan fasilitas kesehatan milik Pemda Kota, termasuk pemanfaatan ex RS Pamitran
		Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk*	- Pemanfaatan ex RS Pamitran sebagai rumah sakit khusus warga kota Cirebon		- Kampanye kesehatan dan pencegahan stunting melalui program kerja sama lintas OPD
3. Meningkatnya kompetensi dan keterampilan kerja masyarakat usia produktif	Angkatan kerja memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri	Tingkat produktivitas tenaga kerja kota		Revitalisasi pendidikan keterampilan dan pelatihan vokasi	- Pengembangan pelatihan vokasi di BLK dan pusat pelatihan milik Pemda Kota



TUJUAN DAN SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM KERJA WALI KOTA	PROGRAM PRIORITAS	STRATEGI PERWUJUDAN PROGRAM
1	2	3	4	5	6
	lokal, sehingga daya saing dan produktivitas tenaga kerja meningkat.				<ul style="list-style-type: none"> - Kerjasama dengan dunia usaha dan industri lokal untuk magang dan sertifikasi kompetensi - Pemberian insentif dan fasilitasi pelatihan bagi kelompok rentan
4 Terciptanya SDM yang berkarakter, berintegritas, dan religius	Pemuda dan pelajar menunjukkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai moral, budaya, dan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.	Tingkat Pengembangan SDM Berkarakter	<p>Revitalisasi sarana olahraga khususnya Stadion Bima, meningkatkan olahraga prestasi dan pengembangan seni budaya di Kota Cirebon;</p> <p>a. Dukungan kepada tokoh agama, rumah ibadah, dan guru ngaji melalui peningkatan perhatian pemerintah terhadap guru ngaji, marbot masjid dan pengurus rumah ibadah</p>	Peningkatan peran pemuda dalam kegiatan produktif	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan kegiatan olahraga dan seni budaya di fasilitas umum Pemerintah Kota - Pemberian perhatian khusus kepada tokoh agama, guru ngaji, dan pengurus rumah ibadah melalui program hibah dan pelatihan



TUJUAN DAN SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM KERJA WALI KOTA	PROGRAM PRIORITAS	STRATEGI PERWUJUDAN PROGRAM
1	2	3	4	5	6
			b. Penguatan pendidikan karakter religius dan budaya melalui pelibatan peran tokoh agama, organisasi keagamaan dan tempat ibadah dalam pembinaan kerukunan antar umat beragama, peningkatan kegiatan keagamaan dan budaya di sekolah untuk membentuk pribadi siswa berakhlakul karimah dan berbudaya, peningkatan kegiatan keagamaan di kantor Pemkot Cirebon dan implementasi Perda Diniyah Takmiliah		- Integrasi pendidikan karakter dalam kurikulum sekolah dan kegiatan masyarakat
MISI 2. Meningkatkan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal					
Tujuan 2 Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan sektor unggulan daerah.		Laju Pertumbuhan Ekonomi			
		PDRB per kapita			
		Tingkat Pengangguran Terbuka			
		Indeks Gini			



TUJUAN DAN SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM KERJA WALI KOTA	PROGRAM PRIORITAS	STRATEGI PERWUJUDAN PROGRAM
1	2	3	4	5	6
1. Meningkatnya kontribusi sektor jasa perdagangan, transportasi, pariwisata, ekonomi kreatif	Sektor-sektor unggulan daerah tumbuh pesat, tercermin dari meningkatnya nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru.	Kontribusi PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran	menghidupkan seni budaya dan meningkatkan kunjungan wisatawan melalui Revitalisasi Wisata Bahari, Wisata Religi, Wisata Sejarah dan Wisata Kuliner.	Pengembangan destinasi wisata unggulan melalui peningkatan infrastruktur dan promosi digital berbasis data wisatawan, dan penguatan city branding	- Investasi pada infrastruktur pariwisata dan fasilitas pendukung
		Kontribusi PDRB sektor Transportasi dan Pergudangan			- Promosi digital dan penguatan branding kota
		Kontribusi PDRB sektor Pariwisata			- Fasilitasi pelaku ekonomi kreatif dan pengembangan BUMD sebagai penggerak ekonomi lokal
		Kontribusi PDRB sektor Ekonomi Kreatif			
2. Meningkatnya iklim investasi yang kompetitif	Investor merasakan kemudahan dalam proses perizinan dan insentif, sehingga realisasi investasi daerah meningkat setiap tahun.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Menigkatkan investasi melalui Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta kemudahan dan kecepatan perijinan untuk Investasi Usaha Baru yang menyerap tenaga kerja banyak	Pengembangan layanan investasi terpadu	- Optimalisasi Mall Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan integrasi layanan digital
					- Penyederhanaan dan percepatan perizinan melalui Mall Pelayanan Publik (MPP)



TUJUAN DAN SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM KERJA WALI KOTA	PROGRAM PRIORITAS	STRATEGI PERWUJUDAN PROGRAM
1	2	3	4	5	6
			Penguatan pelayanan terpadu, percepatan perizinan, dan sinergi antar lembaga melalui optimalisasi Mall Pelayanan Terpadu Satu Pintu Satu Atap		- Pemberian insentif pajak daerah dan retribusi yang bersifat kompetitif
					- Sosialisasi dan kemudahan akses informasi investasi bagi pelaku usaha
		Persentase peningkatan investasi			- Penguatan peran koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kapasitas pengelolaan, pemanfaatan potensi lokal, dan akses modal yang mudah serta berkelanjutan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatnya kinerja BUMD	BUMD mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap	Return on Asset (ROA) BUMD	Revitalisasi BUMD, dan optimalisasi pajak daerah sebagai penggerak ekonomi daerah	Peningkatan kinerja BUMD	- Restrukturisasi manajemen BUMD dan peningkatan kapasitas SDM



TUJUAN DAN SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM KERJA WALI KOTA	PROGRAM PRIORITAS	STRATEGI PERWUJUDAN PROGRAM
1	2	3	4	5	6
	pendapatan asli daerah melalui peningkatan efisiensi dan inovasi layanan.				<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan pengawasan dan akuntabilitas BUMD oleh Pemda Kota - Diversifikasi usaha BUMD yang sesuai potensi daerah
4. Meningkatnya kapasitas dan kemandirian pelaku UMKM dan Koperasi	Pelaku UMKM dan koperasi memperoleh akses permodalan, pelatihan, serta pemasaran yang lebih luas sehingga omzet usaha meningkat.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Penguatan koperasi berbasis RW berbadan hukum untuk melawan rentenir dan pinjol ilegal	Pengembangan inkubasi UMKM	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi akses permodalan melalui program bantuan modal bergulir
		Rasio Volume Usaha UMKM terhadap PDRB			<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan kewirausahaan dan pemasaran digital oleh Dinas Koperasi dan UMKM - Pendampingan hukum dan penguatan kelembagaan koperasi tingkat RW
5. Meningkatnya kesempatan kerja	Terserapnya angkatan kerja dalam lapangan pekerjaan formal dan informal, sehingga tingkat pengangguran terbuka menurun	Tingkat Kesempatan Kerja	Penciptaan lapangan kerja baru melalui pembuatan unit-unit usaha baru yang berada dalam naungan Perumda (BUMD)	Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya Lokal	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi bursa kerja dan job matching melalui Dinas Tenaga Kerja
					<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan kewirausahaan dan pendampingan start-up lokal



TUJUAN DAN SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM KERJA WALI KOTA	PROGRAM PRIORITAS	STRATEGI PERWUJUDAN PROGRAM
1	2	3	4	5	6
					<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian insentif bagi perusahaan yang memprioritaskan tenaga kerja lokal - Pengembangan database ketenagakerjaan terintegrasi untuk mempertemukan pencari kerja dengan pemberi kerja - Penguatan kerjasama dengan dunia usaha dan industri untuk program magang dan perekrutan
6. Meningkatnya pemanfaatan potensi ekonomi hijau dan biru	Pelaku usaha dan masyarakat memanfaatkan sumber daya alam secara lestari untuk menciptakan nilai tambah ekonomi serta menjaga keberlanjutan lingkungan	Indeks ekonomi hijau pilar Ekonomi		Pengembangan sektor perikanan berkelanjutan dan pengelolaan potensi pesisir	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi pelatihan dan pendampingan UMKM/IKM di sektor pertanian, perikanan, dan pengelolaan limbah ramah lingkungan - Pemberian insentif dan kemudahan perizinan bagi usaha ramah lingkungan dan ekonomi biru



TUJUAN DAN SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM KERJA WALI KOTA	PROGRAM PRIORITAS	STRATEGI PERWUJUDAN PROGRAM
1	2	3	4	5	6
					- Penguatan kerjasama dengan perguruan tinggi dan komunitas u/ inovasi teknologi hijau dan biru
		Kontribusi PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			
					- Optimalisasi pemanfaatan lahan tidur dan kawasan pesisir untuk budidaya, konservasi, dan ekowisata
					- Penyusunan regulasi daerah untuk mendukung investasi dan perlindungan kawasan ekonomi hijau dan biru
7. Meningkatnya sistem ketahanan pangan daerah yang tangguh dan berkelanjutan	Ketersediaan dan distribusi pangan daerah terjaga, sehingga masyarakat tidak	Indeks Ketahanan Pangan Daerah		Peningkatan kemandirian pangan keluarga	- Program Kampung Pangan dengan pemberdayaan masyarakat melalui APBD



TUJUAN DAN SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM KERJA WALI KOTA	PROGRAM PRIORITAS	STRATEGI PERWUJUDAN PROGRAM
1	2	3	4	5	6
	mengalami kekurangan pangan sepanjang tahun.				- Penyediaan bibit dan pelatihan budidaya hortikultura serta perikanan
		Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)			- Koordinasi lintas OPD untuk pengendalian inflasi dan ketahanan pangan
MISI 3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Bebas KKN, dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik					
		Indeks Reformasi Birokrasi			



TUJUAN DAN SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM KERJA WALI KOTA	PROGRAM PRIORITAS	STRATEGI PERWUJUDAN PROGRAM
1	2	3	4	5	6
Tujuan 3 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas		Indeks Daya Saing Daerah			
1. Terciptanya birokrasi yang bersih, efisien dan akuntabel	Proses administrasi pemerintahan berjalan transparan dan responsif, didukung oleh sistem digital yang terintegrasi.	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Reformasi birokrasi berbasis kompetensi dan pelayanan digital melalui Penempatan Jabatan ASN sesuai dengan analisis pertimbangan kepangkatan, senioritas, pendidikan, kemampuan dan kelayakan, serta digitalisasi pelayanan pemerintah yang terintegrasi; c. Peningkatan kerjasama antar Pemerintah Daerah dan pengoordinasian CSR	Pengembangan satu data dan platform Pemerintah Digital terpadu yang mengintegrasikan berbagai layanan publik digital	- Implementasi e-government dan digitalisasi layanan publik
			Harmonisasi sinergitas Eksekutif - Legislatif dan Lembaga Vertikal		- Reformasi birokrasi berbasis kompetensi dan sistem merit
					- Penguatan pengawasan internal



TUJUAN DAN SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM KERJA WALI KOTA	PROGRAM PRIORITAS	STRATEGI PERWUJUDAN PROGRAM
1	2	3	4	5	6
					dan transparansi melalui sistem SPIP
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)			
		Nilai SAKIP Kota			
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah			
		Indeks SPBE/Pemerintah Digital			
2. Meningkatnya lingkungan kota yang tentram, tertib dan kondusif bagi masyarakat	Tingkat kriminalitas dan pelanggaran ketertiban menurun, serta masyarakat merasa aman dalam beraktivitas di ruang publik.	Indeks ketenteraman dan ketertiban umum*	Peningkatan kerjasama Kamtibmas dengan kepolisian dalam penanggulangan kenakalan remaja; Peningkatan peran Satpol PP dalam penegakkan Perda dan Pemberdayaan Hansip RW	Peningkatan ketenteraman ketertiban umum masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Sinergi dengan kepolisian dalam pengamanan dan penegakan hukum - Penguatan peran Satpol PP dan pemberdayaan Hansip RW - Kampanye kesadaran masyarakat tentang ketertiban dan keamanan lingkungan

TUJUAN DAN SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM KERJA WALI KOTA	PROGRAM PRIORITAS	STRATEGI PERWUJUDAN PROGRAM
1	2	3	4	5	6
3. Meningkatnya kinerja dan profesionalisme ASN	ASN menunjukkan kinerja optimal, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan sistem pemerintahan berbasis elektronik.	Indeks Profesionalitas ASN	Reformasi birokrasi berbasis kompetensi dan pelayanan digital melalui Penempatan Jabatan ASN sesuai dengan analisis pertimbangan kepangkatan, senioritas, pendidikan, kemampuan dan kelayakan, serta digitalisasi pelayanan pemerintah yang terintegrasi	Implementasi sistem manajemen talenta untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mempertahankan ASN berkinerja tinggi.	- Penempatan ASN berdasarkan analisis kompetensi dan kebutuhan organisasi
					- Pelatihan dan pengembangan kapasitas ASN secara berkelanjutan
					- Pemanfaatan teknologi informasi untuk monitoring kinerja dan pelayanan
4. Meningkatnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik meningkat, serta aspirasi warga terakomodasi secara efektif.	Indeks Pelayanan Publik	Media aspirasi langsung warga melalui Hotline Walikota Mendengar	Peningkatan Komunikasi Pemerintahan	- Pengembangan kanal komunikasi langsung seperti Hotline Walikota Mendengar
					- Forum konsultasi publik dan musrenbang partisipatif
					- Transparansi informasi dan laporan kinerja pemerintah daerah
					- Pengembangan aplikasi dan sistem informasi yang user friendly



TUJUAN DAN SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM KERJA WALI KOTA	PROGRAM PRIORITAS	STRATEGI PERWUJUDAN PROGRAM
1	2	3	4	5	6
		Indeks Kepuasan Masyarakat			- Sinergi antar OPD dan lembaga vertikal dalam inovasi pelayanan
5. Meningkatnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik	Pemerintah daerah mampu menghadirkan solusi kreatif berbasis teknologi untuk mempercepat pelayanan masyarakat.	Indeks Inovasi Daerah		Penerapan inovasi pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat	
MISI 4. Mewujudkan Keseimbangan serta Pelestarian Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan berketahanan					
Tujuan 4 Terwujudnya Penataan Lingkungan Kota yang Berkelanjutan		Penurunan Intensitas Emisi GRK			
1. Meningkatnya kualitas perlindungan, pengelolaan, dan pelestarian lingkungan hidup	Kualitas udara, air, dan ruang terbuka hijau terjaga, serta pengelolaan sampah berjalan efektif dan ramah lingkungan.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Pengelolaan Sampah yang profesional dan pemberdayaan komunitas lingkungan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, degradasi kawasan pesisir dan penghijauan kota	Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan air limbah terpadu dengan pemanfaatan teknologi	- Pengelolaan sampah berbasis komunitas dan sistem pengumpulan terjadwal - Pemberdayaan kelompok lingkungan dan edukasi masyarakat



TUJUAN DAN SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM KERJA WALI KOTA	PROGRAM PRIORITAS	STRATEGI PERWUJUDAN PROGRAM
1	2	3	4	5	6
					- Penghijauan kota dan perlindungan kawasan pesisir melalui program Pemda
2. Tertatanya ruang kota yang fungsional, estetik, dan ramah lingkungan dengan pendekatan kota cerdas didukung ketersediaan, akses dan layanan infrastruktur dasar yang berkualitas	Infrastruktur kota tertata baik, ruang publik hijau bertambah, dan aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas umum meningkat.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Penanganan banjir yang komprehensif, terintegrasi dengan memperhatikan masterplan drainase, sungai bersih dan pembangunan embung	Pengendalian banjir dan penataan drainase perkotaan	- Pemanfaatan data spasial dalam pengelolaan jaringan drainase perkotaan yang terintegrasi dengan pengelolaan sumber daya air dan infrastruktur pendukung mitigasi bencana - Penegakan Perda lingkungan hidup dan tata ruang
		Proporsi ruang terbuka hijau	Penataan ruang public hijau dan ramah inklusif; Penegakkan peraturan tentang lingkungan hidup dan Revitalisasi Kali Sukalila	Penyediaan dan pengelolaan RTH dan penghijauan kawasan perkotaan	- Inventarisasi, pemetaan, penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) - Penyediaan dan pengelolaan ruang publik hijau yang inklusif
		Indeks Smart City	Penataan ruang public hijau dan ramah inklusif;	Pengelolaan Sumber Daya Air yang berkelanjutan untuk	- Penyediaan dan pengelolaan embung



TUJUAN DAN SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM KERJA WALI KOTA	PROGRAM PRIORITAS	STRATEGI PERWUJUDAN PROGRAM
1	2	3	4	5	6
			Penegakkan peraturan tentang lingkungan hidup dan Revitalisasi Kali Sukalila	menja min ketersediaan air bersih di masa depan	
			Penataan ruang public hijau dan ramah inklusif; Penegakkan peraturan tentang lingkungan hidup	Revitalisasi kawasan ekonomi potensial dan cagar budaya	- Inventarisasi dan pemetaan kawasan ekonomi potensial cagar budaya
3. Terciptanya sistem transportasi dan mobilitas kota yang efisien dan rendah emisi	Warga dapat memanfaatkan transportasi publik yang nyaman, terintegrasi, dan ramah lingkungan untuk mobilitas sehari-hari.	Rasio Konektivitas Kota	respons cepat dalam perbaikan infrastruktur kota; Penanganan banjir yang komprehensif, terintegrasi dengan memperhatikan masterplan drainase, sungai bersih dan pembangunan embung; Penataan lalu lintas, trotoar dan perparkiran, serta pembangunan flyover jalan kereta api	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan transportasi publik untuk mendukung aksesibilitas dan manajemen logistik perkotaan yang efisien	- Perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan trotoar - Pengaturan lalu lintas dan pengembangan transportasi massal - Kampanye penggunaan transportasi ramah lingkungan
4. Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim	Risiko bencana dapat diminimalisir melalui kesiapsiagaan, infrastruktur mitigasi, dan sistem peringatan dini yang efektif.	Indeks Risiko Bencana		Peningkatan infrastruktur mitigasi dan adaptasi bencana untuk mendukung sistem kesiapsiagaan dan respon bencana	- Pembangunan embung, drainase, dan sistem peringatan dini bencana - Pelatihan kesiapsiagaan



TUJUAN DAN SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM KERJA WALI KOTA	PROGRAM PRIORITAS	STRATEGI PERWUJUDAN PROGRAM
1	2	3	4	5	6
		Intensitas Emisi GRK Kumulatif			bencana bagi masyarakat dan PD - Integrasi mitigasi bencana dalam perencanaan pembangunan daerah
MISI 5. Meningkatkan Pemberdayaan Sosial dan Budaya Lokal					
Tujuan 5 Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui penurunan kemiskinan, melalui pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya lokal, dan integrasi kearifan lokal dalam pembangunan		Tingkat kemiskinan			
1. Meningkatnya akses pelayanan dasar, perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	Kelompok rentan dan masyarakat miskin menerima bantuan sosial dan layanan dasar secara tepat sasaran.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapat akses layanan dasar*	a. Program “Sapa Warga” dan pelibatan peran tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi keagamaan, akademisi, pers dan stakeholders lainnya dalam pembangunan;	Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan sosial	- Program “Sapa Warga” dan pelibatan tokoh masyarakat dalam pendampingan sosial



TUJUAN DAN SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM KERJA WALI KOTA	PROGRAM PRIORITAS	STRATEGI PERWUJUDAN PROGRAM
1	2	3	4	5	6
			b. Pemberdayaan RT/RW, PKK, Karang Taruna, dan LPM.		- Pemberdayaan RT/RW, PKK, Karang Taruna, dan LPM sebagai ujung tombak pelayanan
			c. Kampung Pangan untuk ketahanan pangan dan kesejahteraan warga yaitu Pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan lahan lingkungan yang terbatas dengan tanaman hortikultura, budi daya ikan dan unggas sebagai sumber gizi keluarga untuk menjaga ketersediaan pangan keluarga, peluang usaha keluarga, pencegahan stunting dan pengendalian inflasi daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat		- Pengembangan Kampung Pangan untuk ketahanan pangan keluarga
				Sistem layanan terpadu berbasis pemadanan data terintegrasi	
				Peningkatan layanan dasar di kantong-kantong kumuh	



TUJUAN DAN SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM KERJA WALI KOTA	PROGRAM PRIORITAS	STRATEGI PERWUJUDAN PROGRAM
1	2	3	4	5	6
2. Meningkatnya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan warisan budaya daerah yang berkelanjutan.	Warisan budaya daerah tetap lestari dan menjadi daya tarik wisata serta sumber edukasi generasi muda.	Persentase pelestarian obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya		Revitalisasi dan perlindungan warisan budaya dengan penguatan jaringan dukungan komunitas budaya	- Penguatan jaringan komunitas budaya dan pelestarian cagar budaya
					- Penyediaan ruang ekspresi seni dan budaya di fasilitas kota
3. Meningkatnya kualitas hidup keluarga, pemuda, kelompok rentan, serta tercapainya kesetaraan gender.	Keluarga, pemuda, dan kelompok rentan memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi.	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan*		Pengembangan inovasi penanganan masalah sosial	- Program-program pemberdayaan keluarga dan pemuda berbasis komunitas
		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)			- Penguatan layanan sosial inklusif dan advokasi kesetaraan gender
4. Terciptanya masyarakat yang inklusif, toleran, dan harmonis.		Indeks Harmoni Indonesia	c. Ruang ekspresi seni dan penguatan struktur sosial keagamaan melalui penyediaan ruang pentas	Pengembangan kampung harmoni dan inklusif di kawasan multikultur	- Fasilitasi dialog antar kelompok masyarakat dan kegiatan seni budaya



TUJUAN DAN SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM KERJA WALI KOTA	PROGRAM PRIORITAS	STRATEGI PERWUJUDAN PROGRAM
1	2	3	4	5	6
			seni budaya dan pemberdayaan Rukun Kematian tingkat RW		<ul style="list-style-type: none">- Penyediaan ruang pentas seni dan penguatan struktur sosial keagamaan- Program edukasi toleransi dan inklusivitas di sekolah dan komunitas

Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda, 2025



IV.2.2.1 *Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2026*

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2026 disusun berdasarkan permasalahan dan isu strategis pembangunan tahun 2026, arah kebijakan pada rancangan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2026-2029 serta mempertimbangkan pokok-pokok pikiran anggota DPRD tahun 2026. Prioritas pembangunan daerah Kota Cirebon tahun 2026 disusun untuk mendukung prioritas pembangunan Nasional tahun 2026 dan prioritas pembangunan provinsi Jawa Barat 2026. Berikut keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah.

Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Cirebon Tahun 2026 merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses, penjangkangan usulan, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Aspirasi tersebut mencerminkan kebutuhan riil masyarakat di berbagai kelurahan dan kecamatan, khususnya dalam memperkuat layanan dasar, memperbaiki infrastruktur, serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup warga.

Secara umum, pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2026 menekankan pada pentingnya percepatan penataan lingkungan perkotaan, pengurangan kawasan kumuh, peningkatan kualitas jalan lingkungan, drainase, dan fasilitas publik, serta dukungan terhadap pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM. Selain itu, terdapat perhatian khusus terhadap pemerataan akses pendidikan, kesehatan, peningkatan kapasitas pemuda dan perempuan, serta penguatan kegiatan keagamaan dan kebudayaan yang menjadi identitas khas Kota Cirebon.

Pokir DPRD ini telah diselaraskan dengan tema pembangunan tahun 2026, yakni "Percepatan penataan lingkungan perkotaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menuju Kota Cirebon yang SETARA berkelanjutan" sehingga menjadi bagian integral dari proses perencanaan pembangunan yang partisipatif dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Tabel 4.5**Keterkaitan Prioritas Pembangunan dengan Pokok-Pokok Pikiran
DRPD Tahun 2026**

Permasalahan Pada Pokok-Pokok Pikiran DPRD 2026	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026
1	2
<ol style="list-style-type: none">1. Sarana dan Prasarana Pendidikan yang tidak memenuhi standar kelayakan bangunan2. Perlunya pengembangan pendidikan non formal bagi masyarakat3. Terbatasnya fasilitas pendidikan anak usia dini4. Terbatasnya sarana prasarana pengembangan daya saing keolahragaan5. Terbatasnya sarana prasarana pengembangan kapasitas dan daya saing pemuda6. Perlunya pelatihan kerja berbasis kompetensi bagi pencari kerja	P1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing tenaga kerja.
<ol style="list-style-type: none">1. Masih minimnya upaya meningkatkan daya tarik destinasi wisata melalui pengembangan destinasi wisata baru2. Belum optimalnya penanganan daerah rawan pangan3. Belum optimalnya peningkatan pemahaman konsumsi pangan masyarakat yang B2SA4. Belum optimalnya pemberdayaan kelompok tani ternak5. Belum optimalnya pemberdayaan kelompok tani6. Belum optimalnya pemberdayaan pembudidaya ikan kecil7. Belum optimalnya peningkatan pemahaman masyarakat dalam konsumsi ikan8. Terbatasnya pemberdayaan UMKM9. Festival UMKM	P2. Penguatan ekonomi kota berbasis sektor unggulan.



Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2026

Permasalahan Pada Pokok-Pokok Pikiran DPRD 2026	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026
1	2
<ol style="list-style-type: none">1. Masih rendahnya pemahaman dan keterampilan literasi digital di kalangan masyarakat2. Masih minimnya keberadaan kelompok masyarakat dalam pengelolaan Informasi dan Komunikasi3. Masih rendahnya penyebarluasan informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan Kota Cirebon melalui media massa cetak dan elektronik4. Terbatasnya sarana dan prasarana perpustakaan5. Terbatasnya sarana prasarana pengelolaan kearsipan6. Terbatasnya sarana prasarana perlindungan dan penyelamatan kearsipan7. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran8. Belum adanya Internet of Things/IoT kebencanaan yang terintegrasi9. Kurangnya pemahaman dan ketaatan masyarakat terhadap Perda dan Perkada10. Terbatasnya kemampuan Satlinmas Kelurahan dan Kecamatan dalam menjaga Trantimbumlinmas11. Kurangnya Sarana dan prasarana untuk meningkatkan kinerja dan efektifitas pelaksanaan tugas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum12. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana di Kecamatan/Kelurahan	P3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas



Permasalahan Pada Pokok-Pokok Pikiran DPRD 2026	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026
1	2
<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah 2. Belum optimalnya Pembangunan, Rehabilitasi dan Normalisasi sungai 3. Belum optimalnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung dan Langsung dengan Sungai 4. Belum optimalnya Pembangunan, Peningkatan dan Optimalisasi jaringan penyediaan air minum non SK Kumuh 5. Belum optimalnya Pembangunan, Rehabilitasi, Peningkatan dan Optimalisasi sarana dan prasarana jaringan pengelolaan air limbah non SK Kumuh 6. Belum optimalnya Pembangunan, Pemeliharaan, peningkatan dan rehabilitasi/Perbaikan rumah tidak layak huni dikawasan kumuh Kota Cirebon 7. Belum optimalnya Pembangunan, Pemeliharaan, peningkatan dan rehabilitasi/Perbaikan rumah tidak layak huni dikawasan non kumuh Kota Cirebon 8. Belum optimalnya Pembangunan, Pemeliharaan, peningkatan dan rehabilitasi PSU yang sudah diserahkan asetnya ke pemerintah daerah 9. Belum optimalnya Pembangunan, Pemeliharaan, peningkatan dan rehabilitasi PSU di kawasan kumuh 10. Belum optimalnya Pengembangan Angkutan Perkotaan di Kota Cirebon 11. Belum Optimalnya Peningkatan fasilitas perlengkapan jalan (Rambu, marka jalan, ZOSS, CCTV ATCS, Halte, Jalur sepeda) pada lokasi tertentu untuk menunjang keselamatan LLAJ 12. Minimnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 13. Pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tingkat tapak/rw masih minim 	<p>P4. Penataan lingkungan perkotaan yang berkualitas untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan</p>

Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda, 2025

IV.2.2.2 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2026 dengan Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2026 dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Prioritas Pembangunan Nasional (PN) merupakan Agenda Pembangunan yang tertuang pada RKP Tahun 2026 sebagai pelaksanaan kerangka tema dan arah kebijakan pembangunan. Prioritas pembangunan dalam RKP 2026 dijabarkan ke dalam 8 prioritas nasional yang akan menjadi langkah awal dalam perwujudan Indonesia Emas 2045. Selain pada tingkat nasional, daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota juga menyusun prioritas daerahnya masing-masing. Hal ini tentunya juga harus mendukung pelaksanaan prioritas nasional. Berikut merupakan tabel keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah



Tabel 4.6

Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Cirebon dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Prioritas Nasional Tahun 2026	Prioritas Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026	Prioritas Daerah Kota Cirebon Tahun 2026
PN 1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	P4 : Mewujudkan masyarakat dan birokrasi yang adaptif, berorientasi pelayanan sesuai dengan prinsip good dan clean governance.	P3 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas
PN 2 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia berkarakter unggul P2 : Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif P3 : Mengurangi disparitas pembangunan daerah perkotaan perdesaan serta miskin dan kaya	P1 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing tenaga kerja P2 : Penguatan ekonomi kota berbasis sektor unggulan P4 : Penataan lingkungan perkotaan yang berkualitas untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan P5 : Terwujudnya kesejahteraan sosial melalui penurunan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya lokal, dan integrasi kearifan lokal dalam pembangunan
PN 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan	P2 : Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif P3 : Mengurangi disparitas pembangunan daerah perkotaan perdesaan serta miskin dan kaya	P2 : Penguatan ekonomi kota berbasis sektor unggulan P4 : Penataan lingkungan perkotaan yang berkualitas untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan



Prioritas Nasional Tahun 2026	Prioritas Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026	Prioritas Daerah Kota Cirebon Tahun 2026
Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi		
PN 4 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	P1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia berkarakter unggul P2 : Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif P3 : Mengurangi disparitas pembangunan daerah perkotaan perdesaan serta miskin dan kaya	P1 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing tenaga kerja P5 : Terwujudnya kesejahteraan sosial melalui penurunan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya lokal, dan integrasi kearifan lokal dalam pembangunan
PN 5 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P2 : Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif	P2 : Penguatan ekonomi kota berbasis sektor unggulan
PN 6 Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	P3 : Mengurangi disparitas pembangunan daerah perkotaan perdesaan serta miskin dan kaya	P5 : Terwujudnya kesejahteraan sosial melalui penurunan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya lokal, dan integrasi kearifan lokal dalam pembangunan



Prioritas Nasional Tahun 2026	Prioritas Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026	Prioritas Daerah Kota Cirebon Tahun 2026
PN 7 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	<p>P1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia berkarakter unggul</p> <p>P2 : Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif</p> <p>P4: Mewujudkan masyarakat dan birokrasi yang adaptif, berorientasi pelayanan sesuai dengan prinsip good dan clean governance.</p>	<p>P3 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas</p>
PN 8 : Memperkuat Penyelesaian Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	<p>P1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia berkarakter unggul</p> <p>P3 : Mengurangi disparitas pembangunan daerah perkotaan perdesaan serta miskin dan kaya</p>	<p>P3 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas</p> <p>P5 : Terwujudnya kesejahteraan sosial melalui penurunan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya lokal, dan integrasi kearifan lokal dalam pembangunan</p>

Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda, 2025

IV.2.3 Program Prioritas Daerah Kota Cirebon Tahun 2026

IV.2.3.1 *Penjabaran Prioritas Pembangunan Dalam Program Prioritas dan Program Pembangunan Daerah*

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kota Cirebon tahun 2026 diimplementasikan melalui rangkaian Program Prioritas dan program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh seluruh stakeholder pembangunan Kota Cirebon. Penjabaran prioritas pembangunan daerah Kota Cirebon tahun 2026 ke dalam program dan program pembangunan daerah disajikan pada tabel berikut ini.



Tabel 4.7

Penjabaran Prioritas Pembangunan Daerah ke Dalam Program Prioritas dan Program Perangkat Daerah

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
20252029 - Terwujudnya Kota Cirebon Yang Sejahtera, Tertata, Aspiratif, Religius, Aman Dan Berkelanjutan Tahun 2029 - Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing - Meningkatkan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal - Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Bebas Kkn, Dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik - Mewujudkan Keseimbangan Serta Pelestarian Lingkungan Hidup Berkelanjutan Dan	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Unggul, Kompetitif Dan Berkarakter	Meningkatnya Akses Dan Mutu Pendidikan Yang Berkualitas		Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)		
				Harapan Lama Sekolah (Tahun) (Tahun)		
				Angka Literasi/Numerasi (%)		
				Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)		
			Meningkatnya Mutu Dan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru Yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	1.01.04 Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	
			Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (%)	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	
	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Paud (%)	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan				



Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
Berketahanan - Meningkatkan Pemberdayaan Sosial Dan Budaya Lokal				Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar Dan Menengah Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan (%)	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	
				Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah Pertama (%)	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Secara Merata	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan Dan Masyarakat	Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) (%)		
				Usia Harapan Hidup (Uhh) ((Tahun))		
			Insiden Tuberkulosis (ltb) Per 100.000 Penduduk. (Kasus)			



Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Angka Kematian Ibu (Aki) ((Per 100.000 Kelahiran Hidup))	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
		Meningkatnya Kompetensi Dan Keterampilan Kerja Masyarakat Usia Produktif		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kota (Juta Rupiah/Tenaga Kerja)		
			Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Di Sektor Prioritas Yang Meningkatkan Produktivitasnya (%)	2.07.03 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	
				Persentase Tenaga Kerja Di Sektor Prioritas Yang Meningkatkan Produktivitasnya (%)	2.07.03 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	
		Terciptanya Sdm Yang Berkarakter, Berintegritas, Dan Religius		Indeks Pengembangan Sdm Berkarakter (Poin)		
			Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	2.19.02 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	



Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	
			Meningkatnya Kualitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kepramukaan (Persentase)	2.19.04 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan		
			Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	1.01.03 Program Pengembangan Kurikulum		
	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Melalui Penguatan Sektor Unggulan Daerah				Tingkat Pengangguran Terbuka(%)		
					Pdrb Per Kapita (Rupiah Juta)(*)		
					Laju Pertumbuhan Ekonomi (Lpe)(%)		
					Indeks Gini (Poin)(Poin)		
			Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Jasa, Transportasi, Pariwisata, Ekonomi Kreatif		Kontribusi Pdrb Sektor Perdagangan Besar Dan Eceran (%)		
					Rasio Pdrb Penyediaan Akomodasi Makan Dan Minum (%)		
					Kontribusi Pdrb Sektor Transportasi Dan Pergudangan (%)		



Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Kontribusi Pdrb Sektor Ekonomi Kreatif (%)		
			Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	3.26.02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
			Meningkatnya Kelancaran Distribusi Dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	3.30.04 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	
			Meningkatnya Kualitas Ekosistem Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	3.26.04 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
			Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan Dan Distribusi Barang Yang Efisien, Merata Dan Terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan Yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	3.30.03 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
			Meningkatnya Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Promosi Produk Lokal Yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	3.30.07 Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	



Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	
		Meningkatnya Iklim Investasi Yang Kompetitif		Pembentukan Modal Tetap Bruto (Pmtb) (%)			
				Persentase Peningkatan Investasi Di Kabupaten/Kota (%)			
		Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor Yang Berinvestasi (Persentase)	2.18.03 Program Promosi Penanaman Modal			
		Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Persentase Realisasi Total Terhadap Target Investasi (Persentase)	2.18.02 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal			
		Meningkatnya Kinerja Bumd		Return On Asset (Roa) Bumd (%)			
				Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian Dan Pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian Dan Pembangunan (Persentase)	4.01.03 Program Perekonomian Dan Pembangunan	
			Meningkatnya Kapasitas Dan Kemandirian Pelaku Umkm Dan Koperasi		Rasio Volume Usaha Umkm Terhadap Pdrb (Persentase)		
					Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap Pdrb (%)		



Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya Daya Saing Umkm	Proporsi Ukm Menjalinkan Kemitraan Dan Ekspor (Persentase)	2.17.08 Program Pengembangan Umkm	
			Meningkatnya Kapasitas Umkm Yang Tangguh Dan Mandiri	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	2.17.07 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	
			Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	2.17.04 Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	
			Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas (Persentase)	2.17.06 Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	
		Meningkatnya Kesempatan Kerja		Tingkat Kesempatan Kerja (Persentase)		
			Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Di Dalam Negeri (Persentase)	2.07.04 Program Penempatan Tenaga Kerja	
		Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Ekonomi Hijau Dan Biru		Kontribusi Pdrb Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan (Persentase)		
				Indeks Ekonomi Hijau Pilar Ekonomi (Indeks)		



Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	
			Meningkatnya Distribusi Dan Kualitas Sarana Pertanian	Produksi Komoditas Peternakan (Ton)	3.27.02 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian		
				Produksi Tanaman Pangan Dan Hortikultura (Ton)	3.27.02 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian		
			Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.25.04 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		
			Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	3.25.03 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap		
		Meningkatnya Sistem Ketahanan Pangan Daerah Yang Tangguh Dan Berkelanjutan			Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence Of Undernourishment) ((%))		
					Indeks Ketahanan Pangan Daerah (Indeks)		
				Meningkatnya Distribusi Dan Kualitas Prasarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian Yang Ditetapkan Menjadi Lp2b (Ha)	3.27.03 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	



Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	
			Meningkatnya Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Konsumsi) (Poin)	2.09.03 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat		
				Skor Pola Pangan Harapan (Ketersediaan) (Poin)	2.09.03 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat		
			Meningkatnya Penangan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	2.09.04 Program Penanganan Kerawanan Pangan		
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Akuntabel, Partisipatif Dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Berkualitas				Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)(Poin)		
					Indeks Daya Saing Daerah(Angka)		
			Terciptanya Birokrasi Yang Bersih, Efisien Dan Akuntabel		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Indeks)		
					Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Poin)		



Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)		
				Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) (Nilai)				
				Nilai Sakip Kota (Skor)				
				Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) (Poin)				
			Meningkatnya Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Barang Milik Daerah			Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Barang Milik Daerah Terhadap Perencanaan Barang Milik Daerah (%)	5.02.03 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika			Presentase Perangkat Daerah (Pd) Yang Terhubung Dengan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dkis (%)	2.16.03 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
						Presentase Layanan Publik Dan Administrasi Pemerintahan Yang Diselenggarakan Secara Elektronik Dan Terintegrasi (%)	2.16.03 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah			Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (%)	5.02.02 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	



Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Yang Akuntabel Dan Transparan			
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Rkpd Dengan Renja Pd Pada Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia (Persentase)	5.01.03 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Rpjmd Dengan Rkpd (Persentase)	5.01.02 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
			Menurunnya Kejadian Penyelewengan Atau Penyimpangan Baik Yang Bersifat Anggaran Atau pun Proses Dan Kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi Bpk Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	6.01.02 Program Penyelenggaraan Pengawasan	
		Meningkatnya Lingkungan Kota Yang Tenram, Tertib Dan Kondusif Bagi Masyarakat		Indeks Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Poin)		
			Meningkatnya Penanganan Gangguan	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	1.05.02 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	



Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Ketentraman Dan Ketertiban Umum			
		Meningkatnya Kinerja Dan Profesionalisme Asn		Indeks Profesionalitas Asn (Poin)		
			Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan Yang Sesuai Dengan Formasi (Persentase)	5.03.02 Program Kepegawaian Daerah	
			Meningkatnya Kualitas Penilaian Kinerja Asn	Persentase Pegawai Dengan Skp Bernilai Baik (Persentase)	5.03.02 Program Kepegawaian Daerah	
			Meningkatnya Pengembangan Kompetensi Asn	Persentase Asn Yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	5.03.02 Program Kepegawaian Daerah	
			Meningkatnya Tata Kelola Pengembangan Karir Asn	Persentase Pengembangan Karir Asn Sesuai Dengan Kompetensinya (Persentase)	5.03.02 Program Kepegawaian Daerah	
		Meningkatnya Partisipasi Dan Kepercayaan Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)		
				Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		



Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Persentase Realisasi Total Terhadap Target Investasi (Persentase)	2.18.02 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kematian Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 Program Pencatatan Sipil	
				Persentase Akta Kelahiran Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 Program Pencatatan Sipil	
				Persentase Akta Perkawinan Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 Program Pencatatan Sipil	
				Persentase Akta Perceraian Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 Program Pencatatan Sipil	
		Meningkatnya Inovasi Dalam	Indeks Inovasi Daerah (Angka)			



Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kajian Yang Termanfaatkan Sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah Dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti Dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah Yang Termanfaatkan Dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	5.05.02 Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	
			Meningkatnya Kajian Yang Termanfaatkan Sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah Dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti Dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah (Persentase)	5.05.03 Program Riset Dan Inovasi Daerah	
	Terwujudnya Penataan Lingkungan Kota Yang Berkelanjutan			Penurunan Intensitas Emisi Grk (Tonco2eq/2010 Idr Milyar)(Ton Co2 Eq)		
		Meningkatnya Kualitas Perlindungan, Pengelolaan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Iklh) (Poin)	



Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	
			Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 Yang Terkelola (Persentase)	2.11.05 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)		
			Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah ((%))	2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan		
		Tertatanya Ruang Kota Yang Fungsional, Estetis, Dan Ramah Lingkungan Dengan Pendekatan Kota Cerdas Didukung Ketersediaan, Akses Dan Layanan			Proporsi Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)	2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan	
					Indeks Layanan Infrastruktur Kota (Poin)		
					Proporsi Ruang Terbuka Hijau (Persentase)		
					Indeks Smart City (Poin) (Poin)		
					Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Yang Nyaman Dan Aman	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	1.03.10 Program Penyelenggaraan Jalan



Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Peningkatan Kapasitas Yang Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota (Persentase)	1.03.03 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
			Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi Warga Negara Korban Bencana Dan Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah	Persentase Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi Yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni (Persentase)	1.04.02 Program Pengembangan Perumahan	
				Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni (%)	1.04.02 Program Pengembangan Perumahan	
		Terciptanya Sistem Transportasi Dan Mobilitas Kota Yang Efisien Dan Rendah Emisi		Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota (%)		
			Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	Persentase Kelengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	2.15.02 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	



Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)				
				Konektivitas Darat (Persentase)	2.15.02 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)					
				Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana Dan Perubahan Iklim	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif (Ton Co2 Eq)					
							Indeks Risiko Bencana (Indeks)			
							Meningkatnya Kesiapan Dan Kapasitas Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Di Daerah Layanan Wmk	Cakupan Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran (%)	1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	
							Persentase Terbentuknya Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (Skkl) Di Tingkat Kelurahan Dalam Daerah Layanan Wmk (%)	1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran		
Mewujudkan Kesejahteraan Sosial			Tingkat Kemiskinan((%))							



Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
	Melalui Penurunan Kemiskinan, Melalui Pemberdayaan Masyarakat, Pelestarian Budaya Lokal, Dan Integrasi Kearifan Lokal Dalam Pembangunan	Meningkatnya Akses Pelayanan Dasar, Perlindungan Dan Pemberdayaan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Ppks)		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Ppks) Yang Mendapat Akses Layanan Dasar (%)		
			Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Sdm Kesejahteraan Sosial Yang Meningkatkan Kompetensinya Dalam Pelayanan Sosial (%)	1.06.02 Program Pemberdayaan Sosial	
		Meningkatnya Perlindungan, Pelestarian Dan Pemanfaatan Warisan Budaya Daerah Yang Berkelanjutan		Persentase Pelestarian Obyek Pemajuan Kebudayaan Dan Cagar Budaya (%)		
			Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	2.22.02 Program Pengembangan Kebudayaan	
			Meningkatnya Warisan Budaya Yang Dilestarikan	Persentase Warisan Budaya Yang Dilestarikan (Persentase)	2.22.05 Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	



Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		Meningkatnya Kualitas Hidup Keluarga, Pemuda, Kelompok Rentan Serta Tercapainya Kesetaraan Gender		Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (Ipbk) (Indeks)		
				Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) (Poin)		
				Indeks Ketimpangan Gender (Indeks)		
				Indeks Pembangunan Gender/Ipg (Poin) (Poin)		
				Indeks Perlindungan Anak (Ipa) (Indeks)		
		Meningkatnya Kualitas Keluarga Dalam Mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak, Serta Perlindungan Perempuan Dan Anak	Meningkatnya Kualitas Keluarga Dalam Mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak, Serta Perlindungan Perempuan Dan Anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Yang Berperspektif Gender Dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	2.08.04 Program Peningkatan Kualitas Keluarga	



Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya Pencegahan Dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan Dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (Ipka) (Indeks)	2.08.07 Program Perlindungan Khusus Anak	
				Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	2.08.07 Program Perlindungan Khusus Anak	
		Terciptanya Masyarakat Yang		Indeks Harmoni Indonesia (Indeks)		



Visi / Misi (01)	Tujuan (02)	Sasaran (03)	Outcome (04)	Indikator (05)	Program Prioritas (06)	Keterangan (07)
		Inklusif, Toleran, Dan Harmonis	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Masyarakat	Persentase Kebijakan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah Yang Dilaksanakan (Persentase)	8.01.05 Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	
			Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial Yang Diselesaikan	Persentase Konflik Sosial Yang Diselesaikan (Persentase)	8.01.06 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	

Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda, 2025

Penjabaran prioritas dan sasaran pembangunan daerah kota Cirebon tahun 2026 kedalam program prioritas dan program pembangunan daerah disertai indicator kinerja program, pagu anggaran dan perangkat daerah penanggungjawab dengan total pagu anggaran sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.8

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, Program Prioritas dan Program Pembangunan Daerah, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing tenaga kerja

PRIORITAS DAERAH	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026	PAGU ANGGARAN	NAMA PERANGKAT DAERAH
P1 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing tenaga kerja	1. Meningkatnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Harapan Lama Sekolah	Persen	13,19	1. Pemerataan akses pendidikan berkualitas berbasis karakter dan budaya lokal.	1. Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah				DISDIK
		Angka Literasi/Numerasi	Skor	83,00		2. Program Pengembangan Kurikulum	Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan				
		Rata-rata Lama Sekolah	Persen	13,19		3. Program Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan				
						1. Program Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan				DISPUSIP
	2. Meningkatnya kompetensi dan keterampilan kerja masyarakat usia produktif	Tingkat produktivitas tenaga kerja kota	Rupiah Per Tenaga Kerja	50.840.000	2. Revitalisasi pendidikan keterampilan dan pelatihan vokasi	1. Program Perencanaan Tenaga Kerja	-Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) -SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	Dok Orang	2 240	75.000.000 2.345.874.000	DISNAKER



PRIORITAS DAERAH	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026	PAGU ANGGARAN	NAMA PERANGKAT DAERAH
						2. Program Pelatihan Kerja dan roduktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				
	3. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat secara merata	Usia Harapan Hidup (Tahun)	Tahun	75,61	3. Pemerataan akses dan mutu pelayanan Kesehatan.	1. Program Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	-Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 kelahiran hidup	123	403.062.796.524	DINKES
							-Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	Persen	15,2		
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Indeks	0,39			2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Persen	80	451.800.000
		Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk*	per 100.000 pddk	405							
	4 Terciptanya SDM yang	Tingkat Pengembang			4. Peningkatan peran pemuda	1. Program Pengembangan	Meningkatnya daya saing kepemudaan				DISPORA



Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2026

PRIORITAS DAERAH	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026	PAGU ANGGARAN	NAMA PERANGKAT DAERAH
	berkarakter, berintegritas, dan religius	n SDM Berkarakter*			dalam kegiatan produktif	Kapasitas Daya Saing Kepemudaan					
						2. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Meningkatnya kualitas kepramukaan				
						TOTAL ANGGARAN				405.935.470.524	

Tabel 4.9

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, Program Prioritas dan Program Pembangunan Daerah, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas 2. Penguatan Ekonomi Kota Berbasis Sektor Unggulan

PRIORITAS DAERAH	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026	PAGU ANGGARAN	NAMA PERANGKAT DAERAH
P2 : Penguatan ekonomi kota berbasis sektor unggulan	1. Meningkatnya kontribusi sektor jasa perdagangan, transportasi, pariwisata, ekonomi kreatif	Kontribusi PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran	persen	28,37%	1. Pengembangan destinasi wisata unggulan melalui peningkatan infrastruktur dan promosi digital berbasis data wisatawan, dan penguatan city branding	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Kontribusi PDRB sektor Transportasi dan Pergudangan	persen	14,64%		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata				
		Kontribusi PDRB sektor Pariwisata	persen	6,12%	6. Pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif				
		Kontribusi PDRB sektor Ekonomi Kreatif	persen	18,85%		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif				



PRIORITAS DAERAH	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026	PAGU ANGGARAN	NAMA PERANGKAT DAERAH
		Kontribusi PDRB sektor Jasa keuangan dan asuransi									
	2. Meningkatnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase peningkatan investasi	persen	14%	2. Pengembangan layanan investasi terpadu	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kemudahan berinvestasi				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						2. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal				
						3. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko				
						4. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal				
						5. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal				
	4. Meningkatnya kapasitas dan kemandirian pelaku UMKM dan Koperasi	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	persen	2,40%	3. Pengembangan inkubasi UMKM	1. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,



PRIORITAS DAERAH	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026	PAGU ANGGARAN	NAMA PERANGKAT DAERAH
		Rasio Volume Usaha UMKM terhadap PDRB	persen	0,35%		2. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya daya saing UMKM				PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		Pengeluaran perkapita anggota koperasi	Rupiah	Rp14.400.000							
	6. Meningkatnya pemanfaatan potensi ekonomi hijau dan biru	Indeks ekonomi hijau pilar Ekonomi	Indeks	71,83	4. Pengembangan sektor perikanan berkelanjutan dan pengelolaan potensi pesisir	Program pengelolaan perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	5140,4	230.194.000	DKPPP
		Kontribusi PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	persen	0,25		Program pengelolaan perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	383,51	422.456.000	DKPPP
						Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Presentase pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan yang mematuhi ketentuan perundangan yang berlaku	persen	84	30.000.000	DKPPP
						Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Angka konsumsi ikan	Kg/Kap/Tahun	40,05	214.500.000	DKPPP



PRIORITAS DAERAH	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026	PAGU ANGGARAN	NAMA PERANGKAT DAERAH
	7. Meningkatnya sistem ketahanan pangan daerah yang tangguh dan berkelanjutan	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	Indeks	84,46	5. Peningkatan kemandirian pangan keluarga	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (konsumsi)	Poin	92,6	994.125.000	DKPPP
							Skor Pola Pangan Harapan (Ketersediaan)	Poin	92,6		
						Program penanganan kerawanan pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan	Persen	18,18	391.817.000	DKPPP
						Program pengawasan keamanan pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	Persen	95	200.718.248	DKPPP
						Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	- Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura - Produksi Komoditas Peternakan	Ton Ton	1379 9381	321.000.000	DKPPP
						Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	Ha	2,69	159.626.498	DKPPP



Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2026

PRIORITAS DAERAH	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026	PAGU ANGGARAN	NAMA PERANGKAT DAERAH
						Program Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	Persen	100	132.995.668	DKPPP
	3. Meningkatnya kinerja BUMD	Return on Asset (ROA) BUMD	persen	2,69	7. Peningkatan kinerja BUMD	1. Program Perekonomian dan Pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Persen	82	1.781.500.000	SETDA
						2. Program Pengelolaan Keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen		15.412.145.005	BPKPD
									TOTAL	18.509.577.419	

Tabel 4.10

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, Program Prioritas dan Program Pembangunan Daerah, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas 3. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Akuntabel, Partisipatif dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Berkualitas

PRIORITAS DAERAH	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026	PAGU ANGGARAN	NAMA PERANGKAT DAERAH
P3 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas	1. Terciptanya birokrasi yang bersih, efisien dan akuntabel	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	99,10	1. Pengembangan satu data dan platform SPBE terpadu yang mengintegrasikan berbagai layanan publik digital	1. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	Persen	100	520.000.000	DISDUKCA PIL
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Poin	3.140		2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Efektivitas Kerjasama Daerah Persentase produk hukum yg dihasilkan Efektifitas pelaksn kebijakan kesra	Persen Persen Persen	77,5 82 82	3.144.500.000	SETDA
		Nilai SAKIP Kota	Skor	69,50	3. Program Perekonomian dan Pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan kebijakan pengelolaan	Persen	82	1.781.500.000		



PRIORITAS DAERAH	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026	PAGU ANGGARAN	NAMA PERANGKAT DAERAH
							perekonomian dan pembangunan				
						4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kematangan organisasi	Skor	50,02	60.344.150.081	
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	72,08		5. Program Pengelolaan Keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen		15.412.145.005	BPKPD
		Indeks SPBE	Poin	4,25		6. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Presentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan	Persen	100	6.032.953.737	DKIS
						7. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Presentase Terselenggaranya Layanan Persandian dan Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon	Persen	100	579.223.209	DKIS
						8. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase penyelenggaraan statistik sektoral (jumlah PD yg melakukan pengolahan data yang sesuai dengan	Persen	75	533.314.626	DKIS



PRIORITAS DAERAH	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026	PAGU ANGGARAN	NAMA PERANGKAT DAERAH
							manajemen CSD dibagi seluruh PD x 100%)				
						9. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persen	100	535.753.431	Bappelitbang da
	2. Meningkatnya lingkungan kota yang tenang, tertib dan kondusif bagi masyarakat	Indeks ketenteraman dan ketertiban umum*	Indeks		4. Peningkatan ketenteraman ketertiban umum masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah Kecamatan	Persen	100	125.009.800	KECAMATAN PEKALIPAN
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persen	100	31.518.000	
						PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Persen	100	18.650.000	
						Program Penyelenggaraan	Persentase pelaksanaan pelayanan	Persen	100	30.651.060	KECAMATAN KESAMBI



PRIORITAS DAERAH	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026	PAGU ANGGARAN	NAMA PERANGKAT DAERAH
						Pemerintahan dan Pelayanan Publik	administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah Kecamatan				
						Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah Kecamatan	Persen	100	50.900.000	KECAMATAN KEJAKSAN
						Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah Kecamatan	Persen	100	100.000.000	KECAMATAN HARJAMUKT I
						Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persen	100	3.140.138.799	SATPOL PP
	3. Meningkatnya kinerja dan profesionalisme ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Skor	80,00	2. Implementasi sistem manajemen talenta untuk mengidentifikasi,	1. Program Kepegawaian Daerah	1. Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan formasi	Persen	83	1.330.000.000	BKPSDM



PRIORITAS DAERAH	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026	PAGU ANGGARAN	NAMA PERANGKAT DAERAH
					mengembangkan, dan mempertahankan ASN berkinerja tinggi		2. Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya 3. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya 4. Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik	Persen Persen Persen	100 91 92	572.500.000 1.189.000.000 530.750.000	
						2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis 2. Persentase realisasi pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan	Persen Persen	41.1 100	3.679.622.550 3.479.622.550	
	4. Meningkatnya partisipasi dan kepercayaan	Indeks Pelayanan Publik	Skor	4,15	3. Peningkatan Komunikasi Pemerintahan	1. Program Pendaftaran Penduduk	1. Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital	Persen Persen	10 64	204.000.000	DISDUK CAPIL



PRIORITAS DAERAH	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026	PAGU ANGGARAN	NAMA PERANGKAT DAERAH
	masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik						2. Persentase kepemilikan kartu identitas anak				
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	86,69		2. Program Pencatatan Sipil	1. Persentase akte kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	100	135.000.000	
							2. Persentase akte kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	100		
							3. Persentase akte perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	100		
							4. Persentase akte perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	100		
						4. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	- Ketepatan penetapan perda APBD tahun n	Persen	100	683.400.000	SETWAN
							- Persentase Penempatan RANPERDA tahun n	Persen	90	5.091.704.450	



PRIORITAS DAERAH	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026	PAGU ANGGARAN	NAMA PERANGKAT DAERAH
							- Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persen	100	6.099.000.000	
						5. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persen	100		DKIS
						6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kematangan organisasi	Skor	50,02		SETDA
						7. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah Kecamatan	Persen	100	306.560.860	Kecamatan
	5. Meningkatnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan	Indeks Inovasi Daerah		54,24	5. Penerapan inovasi pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat	1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1. Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi	Persen	100	1.450.000.000	Bappelitbang da



PRIORITAS DAERAH	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026	PAGU ANGGARAN	NAMA PERANGKAT DAERAH
								Persen	100		
						2. Program Riset dan Inovasi Daerah	1. Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan 2. Meningkatnya fasilitas pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah				
						1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persen	100		DKIS
						2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kematangan organisasi	Skor	50,02		SETDA
									TOTAL	116.486.007.298	

Tabel 4.11



Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, Program Prioritas dan Program Pembangunan Daerah, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas 4. Penataan lingkungan perkotaan yang berkualitas untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan

PRIORITAS DAERAH	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PENDUKUNG DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026	PAGU ANGGARAN	NAMA PERANGKAT DAERAH
P4 : Penataan lingkungan perkotaan yang berkualitas untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan	1. Meningkatnya kualitas perlindungan, pengelolaan, dan pelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	59,40	1. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan air limbah terpadu dengan pemanfaatan teknologi	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang terkelola	Persen	95,90	17.075.209.659	DLH
						Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)				
						1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	Persen	91,13	3.612.538.125	DPUTR
						2. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	Persen	30	2.758.000.000	



PRIORITAS DAERAH	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PENDUKUNG DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026	PAGU ANGGARAN	NAMA PERANGKAT DAERAH
						Persampahan Regional					
	2. Tertatanya ruang kota yang fungsional, estetis, dan ramah lingkungan dengan pendekatan kota cerdas didukung ketersediaan, akses dan layanan infrastruktur dasar yang berkualitas	Indeks Layanan Infrastruktur Kota*			2. Pengendalian banjir dan penataan drainase perkotaan	1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Persen	89	9.238.739.039	DPUTR
		Proporsi ruang terbuka hijau*				2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air	1)% peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir 2) % peningkatan perlindungan kawasan dari abrasi dan banjir rob	Persen	80,00	9.196.449.209	
		Indeks Smart City	Indeks	3,51	3. Pengelolaan Sumber Daya Air yang berkelanjutan untuk menjamin ketersediaan air bersih di masa depan	1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupateri/Kota	Persen	100	972.090.325	DPUTR



PRIORITAS DAERAH	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PENDUKUNG DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026	PAGU ANGGARAN	NAMA PERANGKAT DAERAH
					4. Penyediaan dan pengelolaan RTH dan penghijauan kawasan perkotaan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Luas taman Kehati yang dikelola	Ha	4,70	250.000.000	DLH
					7. Revitalisasi kawasan ekonomi potensial dan cagar budaya						
	3. Terciptanya sistem transportasi dan mobilitas kota yang efisien dan rendah emisi	Rasio Konektivitas Kota		0,26	5. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan transportasi publik untuk mendukung aksesibilitas dan manajemen logistik perkotaan yang efisien	1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1. Meningkatkan Pelayanan Kapasitas Jalan 2. Meningkatkan Pelayanan Kapasitas Jalan 3. Menekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas 4. Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum 5. Bertambahnya Jumlah Lokasi Parkir yg dikelola 6. Meningkatkan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor 7. Bertambahnya Titik PJU	Rasio Rasio Kejadian Persen Lokasi	0,63 Rasio 0,63 Ratio 140 Kejadian 2,0 Persen 328 Lokasi 68 Persen	7.978.005.524	DISHUB



PRIORITAS DAERAH	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PENDUKUNG DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026	PAGU ANGGARAN	NAMA PERANGKAT DAERAH
								Persen Titik	8059 Titik		
						2. Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kernantapan Jalan	Persen	98	22.490.752.375	DPUTR
						3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU [Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Persen	38.24 Persen	14.015.919.583	DPRKP
						4. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	81.56 persen	1.005.565.300	DPRKP
	4. Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks Risiko Bencana	Indeks	123,84- 123,62	6. Peningkatan infrastruktur mitigasi dan adaptasi bencana untuk mendukung sistem kesiapsiagaan	1. Program Penanggulangan Bencana	1. Cakupan Lembaga di tingkat Kelurahan yang mendapatkan pelatihan kebencanaan 2. Cakupan	Persen	4,55	1.725.995.000	BPBD



PRIORITAS DAERAH	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PENDUKUNG DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026	PAGU ANGGARAN	NAMA PERANGKAT DAERAH
					dan respon bencana		Penanganan Kejadian Bencana	Persen	100		
		Intensitas Emisi GRK Kumulatif	tonCO ₂ eq	13.093,63		2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	1. Persentase Terbentuknya Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) di tingkat Kelurahan dalam daerah layanan WMK 2. Tingkat pelaksanaan penanggulangan kebakaran yang berhasil	Poin Persen	22,73 100	4.509.232.188	DPKP
						3. Program Pengembangan Perumahan	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan	Persen	100	350.154.400	DPRKP



PRIORITAS DAERAH	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PENDUKUNG DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026	PAGU ANGGARAN	NAMA PERANGKAT DAERAH
							Rumahyang Layak Huni				
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah Kecamatan	Persen	100	115.354.151	KECAMATAN LEMAHWUN GKUK
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan: Presentase RW di Wilayah Kecamatan dengan predikat Baik	Persen	100	933.993.462	
							Kelurahan: Presentase Kondisi Sarana Fasilitas Umum di Wilayah Kelurahan dengan kondisi baik			6.488.573.930	
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	88.759.360	



PRIORITAS DAERAH	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PENDUKUNG DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026	PAGU ANGGARAN	NAMA PERANGKAT DAERAH
						PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Persen	100	110.930.000	
						Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan: Presentase RW di Wilayah Kecamatan dengan predikat Baik	Persen	100	1.942.258.432	Kecamatan Kesambi
							Kelurahan: Presentase Kondisi Sarana Fasilitas Umum di Wilayah Kelurahan dengan kondisi baik			7.329.201.267	
						Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	54.865.269	
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan: Presentase RW di Wilayah Kecamatan dengan predikat Baik	Persen	100	1.444.000.000	Kecamatan Kejaskan



Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2026

PRIORITAS DAERAH	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PENDUKUNG DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026	PAGU ANGGARAN	NAMA PERANGKAT DAERAH
							Kelurahan: Presentase Kondisi Sarana Fasilitas Umum di Wilayah Kelurahan dengan kondisi baik			5.280.469.281	
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	83.000.000	
						PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Persen	100	75.000.000	
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan: Presentase RW di Wilayah Kecamatan dengan predikat Baik	Persen	100	700.000.000	Kecamatan Harjamukti
							Kelurahan: Presentase Kondisi Sarana Fasilitas Umum di Wilayah Kelurahan dengan kondisi baik			10.900.255.033	
									TOTAL	130.725.310.912	

Tabel 4.12

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, Program Prioritas dan Program Pembangunan Daerah, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas 5. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui penurunan kemiskinan, melalui pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya lokal, dan integrasi kearifan lokal dalam pembangunan.

PRIORITAS DAERAH	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026	PAGU ANGGARAN	NAMA PERANGKAT DAERAH
P5 : Terwujudnya kesejahteraan sosial melalui penurunan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya lokal, dan integrasi kearifan lokal dalam pembangunan	1. Meningkatnya akses pelayanan dasar, perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapat akses layanan dasar*			1. Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan sosial	1. Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi tata kelola desa	Persen	90,91	165.000.000	SETDA
						2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa (LKD)	Persen	85,71	1.380.625.000	
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan: Presentase RW di Wilayah Kecamatan dgn predikat Baik	Persen	100	933.993.462	KECAMATAN LEMAHWUNG KUK
							Kelurahan: Presentase Kondisi Sarana Fasilitas Umum di Wilayah Kelurahan dgn kondisi baik			6.488.573.930	
					Program Pemberdayaan	Kecamatan: Presentase RW di Wilayah	Persen	100	1.942.258.432	Kecamatan Kesambi	



PRIORITAS DAERAH	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026	PAGU ANGGARAN	NAMA PERANGKAT DAERAH
						Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan dengan predikat Baik				
							Kelurahan: Presentase Kondisi Sarana Fasilitas Umum di Wilayah Kelurahan dengan kondisi baik			7.329.201.267	
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan: Presentase RW di Wilayah Kecamatan dengan predikat Baik	Persen	100	1.444.000.000	Kecamatan Kejaskan
							Kelurahan: Presentase Kondisi Sarana Fasilitas Umum di Wilayah Kelurahan dengan kondisi baik			5.280.469.281	
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan: Presentase RW di Wilayah Kecamatan dengan predikat Baik	Persen	100	700.000.000	Kecamatan Harjamukti
							Kelurahan: Presentase Kondisi Sarana Fasilitas Umum di Wilayah			10.900.255.033	



PRIORITAS DAERAH	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026	PAGU ANGGARAN	NAMA PERANGKAT DAERAH
							Kelurahan dengan kondisi baik				
	2. Meningkatnya kualitas hidup keluarga, pemuda, kelompok rentan, serta tercapainya kesetaraan gender.	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan*			2. Peningkatan layanan dasar di kantong-kantong kumuh	1. Program Kawasan Permukiman	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman				DPRKP
		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Poin	61,74	3. Pengembangan inovasi penanganan masalah sosial	1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1. Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan 2. Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan	Persen Persen	100 100	1.450.000.000	Bappelitbangda



PRIORITAS DAERAH	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026	PAGU ANGGARAN	NAMA PERANGKAT DAERAH
							Daerah 3. Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yg Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	Persen	100		
						2. Program Riset dan Inovasi Daerah					
		Indeks Ketimpangan Gender	indeks	403	4. Sistem layanan terpadu berbasis	1. Program Pengendalian Penduduk	Data keluarga yg dimutakhirkan Integrasi materi pembangunan				DP3APPKB



PRIORITAS DAERAH	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026	PAGU ANGGARAN	NAMA PERANGKAT DAERAH
					pemadanan data terintegrasi		keluarga, kependudukan dan keluarga berencana dalam kegiatan pembelajaran di sekolah				
		Indeks Pemberdayaan Gender/IDG									
		IPA (Indeks Perlindungan Anak)*		69,72			Integrasi data pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan				
	3. Meningkatnya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan warisan budaya daerah yang berkelanjutan.	Persentase pelestarian obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya	persen	70,68%	5. Revitalisasi dan perlindungan warisan budaya dengan penguatan jaringan dukungan komunitas budaya	1. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno				DISPUSIP
2. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan Kebudayaan				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
3. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL						Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	



PRIORITAS DAERAH	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026	PAGU ANGGARAN	NAMA PERANGKAT DAERAH
							kesenian tradisional				
						4. PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						5. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Meningkatnya warisan budaya yang diilestarikan				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						6. PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Meningkatnya tata kelola museum				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	4. Terciptanya masyarakat yang inklusif, toleran, dan harmonis.	Indeks Harmoni Indonesia	skor	6,70	6. Pengembangan kampung harmoni dan inklusif di kawasan multikultur	1. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi	Persen	71,00	210.000.000	KESBANGPOL



Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2026

PRIORITAS DAERAH	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026	PAGU ANGGARAN	NAMA PERANGKAT DAERAH
							kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan				



IV.2.3.2 *Dukungan Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Daerah Tahun 2026 terhadap Program Prioritas Nasional dan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2026*

Dalam rangka mendukung program prioritas nasional dan kegiatan prioritas nasional tahun 2026, Pemerintah Kota Cirebon merumuskan prioritas pembangunan daerah dan program prioritas tahun 2026. Tingkat dukungan program daerah terhadap prioritas nasional (Asta Cita) digambarkan dengan menyusun matrik persandingan keterkaitan antara program prioritas daerah Kota Cirebon dengan kegiatan prioritas dalam dokumen RKP Tahun 2026.

Matriks persandingan disusun dalam rangka menjamin sinergisitas pembangunan pusat dan daerah, didasari pada bagaimana outcome, program, kegiatan dan sub kegiatan daerah mendukung prioritas nasional (asta cita) sesuai bidang urusan pemerintahan daerah berdasarkan hasil kesepakatan Rakortekbang. Hasil kesepakatan Rakortekbang Nasional Tahun 2025 yang menjadi acuan Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD tahun 2026, disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.11

Dukungan Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Daerah Tahun 2026 terhadap Program Prioritas Nasional

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah Kota Cirebon	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
1	2	3	4
PN1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia		P3 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas	
S1. Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia	1. Indeks Demokrasi Indonesia Aspek Kebebasan	Terciptanya birokrasi yang bersih, efisien dan akuntabel	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah
	2. Indeks Aktualisasi Pancasila Aspek Rumah Tangga		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
	3. Indeks Kemerdekaan Pers		Nilai SAKIP Kota
	4. Indeks Keterbukaan Informasi Publik		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
	5. Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik		
	6. Persentase kader yang menempati Jabatan Strategis		
	7. Indeks Demokrasi Indonesia		
	8. Indeks Demokrasi Indonesia Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi		
	9. Indeks Demokrasi Indonesia Aspek Kesetaraan		
	10. Indeks Hak Asasi Manusia		



Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah Kota Cirebon	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
1	2	3	4
	11. Indeks HAM Dimensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya		
	12. Indeks HAM Dimensi Hak Sipil dan Politik		
	13. Indeks Akses terhadap Keadilan		
PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.		P1 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing tenaga kerja P2 : Penguatan ekonomi kota berbasis sektor unggulan P4 : Penataan lingkungan perkotaan yang berkualitas untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan P5 : Terwujudnya kesejahteraan sosial melalui penurunan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya lokal, dan integrasi kearifan lokal dalam pembangunan	
S2. Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan	1. Asia Power Index (Military Capability)	Meningkatnya lingkungan kota yang tentram, tertib dan kondusif bagi masyarakat	Indeks ketenteraman dan ketertiban umum
	2. Asia Power Index (Diplomatic Influence)		
	3. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman		
	Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)		
	4. Global Cybersecurity Index		
	5. Indeks Keamanan Laut Nasional		
S3. Terbangunnya Eco-region Sistem Pangan Berbasis Sumber Daya dan Kearifan Lokal	6. Indeks Ketahanan Pangan	Meningkatnya sistem ketahanan pangan daerah yang tangguh dan berkelanjutan	Indeks Ketahanan Pangan Daerah
	7. Prevalensi Ketidakcukupan Pangan		



Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah Kota Cirebon	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
1	2	3	4
	8. Meningkatkan Produksi Pangan		
	9. Berkurangnya Impor Pangan		
	10. Nilai Tukar Petani Indeks Kesejahteraan Petani		
S4. Meningkatnya ketahanan energi melalui peningkatan pasokan energi, perluasan akses dan jangkauan, serta pemanfaatan energi bersih	11. Indeks Ketahanan Energi	Meningkatnya kualitas perlindungan, pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
	12. Pasokan Energi Primer	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks Risiko Bencana
13. Konsumsi Energi Final per Kapita	Intensitas Emisi GRK Kumulatif		
	14. Porsi EBT dalam Bauran Energi	Tertatanya ruang kota yang fungsional, estetik, dan ramah lingkungan dengan pendekatan kota cerdas didukung ketersediaan, akses dan layanan infrastruktur dasar yang berkualitas	Indeks Layanan Infrastruktur Kota
	15. Intensitas Energi Primer		Proporsi ruang terbuka hijau
	16. Kapasitas Tampung Air per Kapita		Indeks Smart City
	17. Meningkatnya Air Minum Jaringan Perpipaan		
	18. Meningkatnya Rumah Tangga yang terlayani Air Minum Aman		
	19. Menurunnya luas lahan kritis		



Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah Kota Cirebon	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
1	2	3	4
	20. Meningkatnya Rumah Tangga yang terlayani Akses Sanitasi Aman		
	21. Mengentaskan perilaku BABS di tempat terbuka		
S5. Menguatnya peran ekonomi syariah untuk peningkatan produktivitas ekonomi	22. Posisi Ekonomi Syariah Indonesia di Tingkat Global (Peringkat GIEI)		
	23. Kontribusi PDB Syariah		
S6. Terwujudnya Pengembangan Ekonomi Digital melalui peningkatan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB	24. Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan jasa, transportasi, pariwisata, dan ekonomi kreatif	Kontribusi PDRB sektor Ekonomi Kreatif
	25. Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)		Kontribusi PDRB sektor Jasa keuangan dan asuransi
S7. Meningkatnya Indeks Ekonomi Hijau untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	26. Indeks Ekonomi Hijau	Meningkatnya pemanfaatan potensi ekonomi hijau dan biru	Indeks ekonomi hijau pilar ekonomi
			Kontribusi PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
		Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks Risiko Bencana
	27. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)		Intensitas Emisi GRK Kumulatif
	28. Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan)	Meningkatnya kualitas perlindungan, pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
	29. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		



Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah Kota Cirebon	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
1	2	3	4
	30. Proporsi Tenaga Kerja Hijau		
	31. Tingkat Input Material Sirkular		
S8. Pengembangan Ekonomi Biru sebagai sumber Pertumbuhan Baru	32. Nilai Tambah Sektor Ekonomi Biru	Meningkatnya pemanfaatan potensi ekonomi hijau dan biru	Indeks ekonomi hijau pilar ekonomi
	33. Perlindungan Kawasan Perairan		Kontribusi PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
	34. Kapasitas Sumber Daya Manusia		
	Sektor Ekonomi Biru		
PN 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri, Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi		P2 : Penguatan ekonomi kota berbasis sektor unggulan P4 : Penataan lingkungan perkotaan yang berkualitas untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan	
S9. Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan	1. Stok Infrastruktur terhadap PDB (%)	Tertatanya ruang kota yang fungsional, estetis, dan ramah lingkungan dengan pendekatan kota cerdas didukung ketersediaan, akses dan layanan infrastruktur dasar yang berkualitas	Indeks Layanan Infrastruktur Kota
	2. Wktu Tempuh pada Lintas Utama (Jam/ 100 Km)		Proporsi ruang terbuka hijau
	3. Peningkatan Kinerja Bongkar Muat Pelabuhan (%)		Indeks Smart City
	4. On Time Performance Udara (%)	Terciptanya sistem transportasi dan mobilitas kota yang efisien dan rendah emisi	Rasio konektivitas
	5. Penurunan Rasio Fatalitas Kecelakaan Jalan (%)		



Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah Kota Cirebon	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
1	2	3	4
	6. Kondisi Jalur KA sesuai Standar (TQI) Kategori 1 dan 2 (%)		
	7. Jumlah Penumpang Angkutan		
	Perkotaan di 10 Kota Metropolitan (Juta Penumpang)		
	8. Indeks Pembangunan TIK Nasional		
	9. Konsumsi Listrik per Kapita (kwh)		
S10. Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB	10. Total Aset Sektor Keuangan/PDB (%)	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan jasa, transportasi, pariwisata, dan ekonomi kreatif	Kontribusi PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran
	11. Aset Perbankan/PDB (%)		Kontribusi PDRB sektor Transportasi dan Pergudangan
	12. Aset Dana Pensiun/PDB (%)		Kontribusi PDRB sektor Pariwisata
	13. Aset Asuransi/PDB (%)		Kontribusi PDRB sektor Ekonomi Kreatif
	14. Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)		Kontribusi PDRB sektor Jasa keuangan dan asuransi
	15. Total Kredit/PDB (%)		
	16. Inklusi Keuangan (%)		
S11. Meningkatnya nilai tambah pariwisata	17. Rasio PDB Pariwisata (%)		
	18. Devisa Pariwisata (Miliar USD)		



Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah Kota Cirebon	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
1	2	3	4
S12. Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas	19. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Kesempatan Kerja
	20. Rasio Volume usaha Koperasi terhadap PDB (%)		
	21. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%)		
	22. Rasio Kewirausahaan (%)		
S13. Terwujudnya Pengembangan Ekonomi Digital melalui peningkatan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB	23. Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)		
PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas		P1 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing tenaga kerja P5 : Terwujudnya kesejahteraan sosial melalui penurunan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya lokal, dan integrasi kearifan lokal dalam pembangunan	
S14. Pendidikan Berkualitas yang Merata	1. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahu keatas (tahun)	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Harapan Lama Sekolah
	2. Harapan Lama Sekolah (tahun)		Angka Literasi/Numerasi
	3. Rata-rata nilai PISA		Rata-rata lama sekolah
	a. Membaca		
	b. Matematika		
	c. Sains		



Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah Kota Cirebon	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
1	2	3	4
	4. Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional 17.03		
	a. Literasi Membaca		
	b. Numerasi		
	5. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (%)		
	6. Proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)		
	7. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)		
	8. Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran		
S15. Kesehatan untuk Semua	9. Usia Harapan Hidup (tahun)		Usia Harapan Hidup (UHH)
	10. Angka kelahiran total (Total Fertility Rate) (Rata-rata kelahiran per wanita usia subur 15-49 tahun)	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan secara merata	Indeks Keluarga Sehat (IKS)
	11. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)		Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk
	12. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)		



Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah Kota Cirebon	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
1	2	3	4
	13. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		
	14. Prevalensi obesitas >18 tahun		
	15. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)		
S16. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	16. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Meningkatnya kualitas hidup keluarga, pemuda, kelompok rentan serta tercapainya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan
			Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
	17. Indeks Perlindungan Anak		Indeks Ketimpangan Gender
	18. Indeks Pembangunan Pemuda		Indeks Pemberdayaan Gender/IDG
			IPA (Indeks Perlindungan Anak)
	19. Indeks Ketimpangan Gender		
	20. Indeks Pembangunan Gender		
	21. Mobilitas Penduduk Lanjut Usia (%)		
	22. Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas (%)		
S17. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	23. Peringkat Indeks Inovasi Global	Meningkatnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik	Indeks inovasi Daerah
	24. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		
	25. Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)		



Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah Kota Cirebon	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
1	2	3	4
	26. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan		
S18. Peningkatan Prestasi dan Pembudayaan Olahraga	27. Jumlah Perolehan Medali Emas pada Olympic Games	Terciptanya SDM yang berkarakter, berintegritas, dan religius	Tingkat Pengembangan SDM Berkarakter
	28. Jumlah Perolehan Medali Emas pada Paralympic Games		
	29. Peringkat pada Asian Games		
	30. Peringkat pada Asian Para Games		
	31. Peringkat pada SEA Games		
	32. Peringkat pada ASEAN Para Games		
	33. Persentase penduduk berumur 10 tahun keatas yang aktif berolahraga (%)		
PN 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri		P2 : Penguatan ekonomi kota berbasis sektor unggulan	
S19. Meningkatnya Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan	1. Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	Meningkatnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase peningkatan investasi
	2. Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (%)		
	3. Nilai Tambah Industri Pengolahan		



Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah Kota Cirebon	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
1	2	3	4
	(MVA) per Kapita (Rp Juta)		
	4. Rasio PDRB Industri Pengolahan di Provinsi KI/KEK Prioritas terhadap PDB		
	Industri Pengolahan (%)		
S20. Menguatnya Kinerja layanan konektivitas backbone dan Sistem Logistik Nasional untuk Mendukung Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	5. Biaya Logistik (%PDB)	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan jasa, transportasi, pariwisata, dan ekonomi kreatif	Kontribusi PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran
	6. Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB (%)		Kontribusi PDRB sektor Transportasi dan Pergudangan
S21. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	7. Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDB)		Kontribusi PDRB sektor Pariwisata
	8. Ekspor Barang dan Jasa (%PDB)		Kontribusi PDRB sektor Ekonomi Kreatif
	9. Nilai PMA dan PMDN (Rp. Triliun)		Kontribusi PDRB sektor Jasa keuangan dan asuransi
	10. Kontribusi ekspor barang Indonesia	Meningkatnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase peningkatan investasi
	terhadap total ekspor barang dunia (%)		
	11. Pangsa pasar nilai ekspor Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global (%)		
PN 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan		P5 : Terwujudnya kesejahteraan sosial melalui penurunan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya lokal, dan integrasi kearifan lokal dalam pembangunan	
S22. Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan	1. Tingkat Kemiskinan	Meningkatnya akses pelayanan dasar, perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi	Persentase PPKS yang mendapatkan akses layanan dasar



Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah Kota Cirebon	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
1	2	3	4
	2. Proporsi penduduk kelas menengah	pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	
	3. Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal		
	4. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan		
S23. Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	5. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)	Meningkatnya akses pelayanan dasar, perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang mendapatkan akses layanan dasar
S24. Mewujudkan kemandirian perdesaan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	6. Persentase desa mandiri (%)		
S25. Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	7. Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional		
PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		P2 : Penguatan ekonomi kota berbasis sektor unggulan P3 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas	
S26. Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem antikorupsi	1. Indeks Integritas Partai Politik	Terciptanya birokrasi yang bersih, efisien dan akuntabel	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah
	2. Indeks Pembangunan Hukum		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
	3. Indeks Materi Hukum		Nilai SAKIP Kota
	4. Indeks Persepsi Korupsi		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah



Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah Kota Cirebon	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
1	2	3	4
	5. Indeks Integritas Nasional		
S27. Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani	6. Indeks Pelayanan Publik		
	7. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		
	8. Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri		
S28. Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba	9. Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika		
S29. Menekan potensi kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan akibat tindakan judi dan penyelundupan	10. Clearance rate tindak pidana judi		
	11. Clearance rate tindak pidana penyelundupan		
S30. Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan	12. Return on Asset (ROA) BUMN (%)	Meningkatnya kinerja BUMD	Return on Asset (ROA) BUMD
S31. Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi	13. Rasio pendapatan negara terhadap PDB (%)		
	14. Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (%)		



Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah Kota Cirebon	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
1	2	3	4
S32. Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	15. Tingkat Inflasi (%)		
PN 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur		P1: Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing tenaga kerja P4 : Penataan lingkungan perkotaan yang berkualitas untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan P5 : Terwujudnya kesejahteraan sosial melalui penurunan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya lokal, dan integrasi kearifan lokal dalam pembangunan	
S33. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	1. Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	Terciptanya SDM yang berkarakter, berintegritas, dan religius	Tingkat Pengembangan SDM Berkarakter
	2. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Terciptanya masyarakat yang inklusif, toleran, dan harmonis.	Indeks Harmoni Indonesia
	3. Indeks Layanan Keagamaan		
	4. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)		
	5. Nilai Dimensi Kohesi Sosial IPMas		
S34. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	6. Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks Risiko Bencana
	7. Penurunan Potensi Kerugian Ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB pada empat sektor prioritas (kelautan&pesisir, air, pertanian dan kesehatan)		Intensitas Emisi GRK Kumulatif
	8. Penurunan Nilai Indeks Risiko Bencana		

Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda, 2025



IV.2.3.3 *Dukungan Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Daerah Tahun 2026 terhadap Arah Kebijakan Pengarusutamaan (Mainstreaming) Pembangunan Nasional Tahun 2026*

Pemerintah mengarusutamakan *Sustainable Development Goals* (SDG's) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke dalam RPJMN Tahun 2024-2029 dan RKP Tahun 2026 dengan mengintegrasikan target tujuan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah daerah melaksanakan pelokalan tujuan pembangunan berkelanjutan dengan mengarusutamakan dan menggunakan sasaran dan target tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2024-2029.

Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan melibatkan pemerintah dengan non pemerintah seperti masyarakat sipil, mitra pembangunan, filantropi, pelaku usaha dan perguruan tinggi, begitupun terhadap pendanaannya. Perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan melibatkan pemerintah dan non pemerintah. Dukungan prioritas pembangunan daerah dan program prioritas daerah Kota Cirebon Tahun 2026 terhadap arah kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.20 Dukungan Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Daerah Tahun 2025 terhadap Arah Kebijakan Pengarusutamaan Pembangunan Nasional Tahun 2025

Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2026
Aspek I : Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	
Goal 1 Tanpa Kemiskinan	
Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	Program Pengembangan UMKM Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program Rehabilitasi Sosial Program Pemberdayaan Sosial Program Penanganan Bencana
Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Program Pengendalian Penduduk Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Program Perlindungan Perempuan Program Peningkatan Kualitas Keluarga Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja



Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2026
<p>●Target 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.</p>	<p>Program Perencanaan Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja Program Hubungan Industrial</p>
<p>1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.</p>	
<p>1.b Membuat kerangka kebijakan yang kuat di tingkat nasional, regional dan internasional, berdasarkan strategi pembangunan yang memihak pada kelompok miskin dan peka terhadap isu gender untuk mendukung investasi yang cepat dalam tindakan pemberantasan kemiskinan.</p>	
<p>Goal 2 Tanpa Kelaparan</p>	
<p>Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.</p>	<p>Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Penanganan Kerawanan Pangan Program Pengawasan Keamanan Pangan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</p>
<p>Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.</p>	<p>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Program Penyuluhan Pertanian</p>
<p>Target 2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian.</p>	<p>Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</p>
<p>Target 2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim,</p>	



Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2026
cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.	
Target 2.5 Pada tahun 2021, mengelola keragaman genetik benih tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianeka ragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pertanian	
2.a Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur perdesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk peningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang.	
2.c Mengadopsi langkah langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim	
Goal 3 Kehidupan Sehat & Sejahtera	
Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan	



Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2026
pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	
Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	
Target 3.8 Pada tahun 2030, Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	
Target 3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco	
Target 3.b Mendukung penelitian & pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yg terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yg menegaskan hak negara berkembang untk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait kekeluargaan untk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	
Goal 4 Pendidikan Berkualitas	
Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengembangan Kurikulum Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	Program Pembinaan Perpustakaan Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
Target 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.	Program Perlindungan Khusus Anak



Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2026
Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	
Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	
Goal 5 Kesetaraan Gender	
Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi	Program Perlindungan Perempuan
Target 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	
Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	
Goal 6 Air Bersih & Sanitasi Layak	
<ul style="list-style-type: none"> Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua 	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun



Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2026
Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	(B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)
Target 6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita	Program Pengelolaan Persampahan
Goal 7 Energi Bersih & Terjangkau	
Target 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	
Target 7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.	
Target 7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.	
7.a Pada tahun 2030, memperkuat kerjasama internasional untuk memfasilitas akses pada teknologi dan riset energi bersih, termasuk energi, terbarukan, efisiensi energi, canggih, teknologi bahan bakar	
fosil lebih bersih, dan mempromosikan investasi di bidang infrastruktur energi dan teknologi energi bersih	
Goal 8 Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi	
Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) Program Pengembangan UMKM Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja
Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	



Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2026
Target 8.6 Pada tahun 2021, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	Program Hubungan Industrial Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan
Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	Intellectual Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Program Pengembangan Kebudayaan Program Pengembangan Kesenian Tradisional
Target 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua	Program Pengelolaan Permuseuman
Goal 9 Industri, Inovasi & Infrastruktur	
Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Program Penyelenggaraan Jalan
Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Program Pengendalian Izin Usaha Industri Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
Target 9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.	
Target 9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2021	
Goal 10 Berkurangnya Kesenjangan	
Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS) Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial,	Program hubungan industrial



Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2026
serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	
Goal 11 Kota & Permukiman Yang Berkelanjutan	
Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	Program Pengembangan Perumahan Program Kawasan Permukiman Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.	Program Pengembangan Kebudayaan Program Pengembangan Kesenian Tradisional Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
●Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan	Program Penanggulangan Bencana
●Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Program Pengelolaan Persampahan
Goal 12 Konsumsi & Produksi yang Bertanggung Jawab	
●Target 12.4 Pada tahun 2021 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
●Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH
●Target 12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat



Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2026
	<p>Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</p> <p>Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</p>
Goal 13 Penanganan Perubahan Iklim	
<ul style="list-style-type: none"> ●Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara. 	<p>Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</p> <p>Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</p>
<ul style="list-style-type: none"> ●Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional. 	<p>Program Penanganan Bencana</p>
Goal 14 Ekosistem Lautan	
<ul style="list-style-type: none"> ●Target 14.2 Pada tahun 2021, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif. 	<p>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</p> <p>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</p> <p>Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan</p>
<ul style="list-style-type: none"> ●Target 14.5 Pada tahun 2021, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia. 	<p>Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah</p>
<ul style="list-style-type: none"> ●Target 14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar 	
Goal 15 Ekosistem Daratan	
<ul style="list-style-type: none"> ●Target 15.1 Pada tahun 2021, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional. 	<p>Program Perencanaan Lingkungan Hidup</p> <p>Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)</p> <p>Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH</p>
<ul style="list-style-type: none"> ●Target 15.3 Pada tahun 2021, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi. 	
<ul style="list-style-type: none"> ●Target 15.4 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat 	



Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2026
<ul style="list-style-type: none"> ●Target 15.9 Pada tahun 2021, mengintegrasikan nilai- nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan. 	
<ul style="list-style-type: none"> ●Target 15.a Memobilisasi dan meningkatkan sumber daya keuangan secara signifikan dari semua sumber untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan. 	
Goal 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	
<ul style="list-style-type: none"> ●Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak. 	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH
<ul style="list-style-type: none"> ●Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua. 	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
<ul style="list-style-type: none"> ●Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. 	
<ul style="list-style-type: none"> ●Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan. 	
Goal 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan	
<ul style="list-style-type: none"> ●Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya 	Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Aspek II : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
Menciptakan manajemen pembangunan dan pengelola pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi yang bersandar pada kepentingan rakyat.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Program Penataan Organisasi Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Penyelenggaraan Pengawasan
Aspek III : Gender	



Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2026
Menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia melalui pengurangan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
Aspek IV : Modal Sosial Budaya dan Transformasi Digital	
1. Internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (local knowledge), kearifan local (local wisdom), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
2. Optimalisasi peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sumber pertumbuhan ekonomi	

Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda, 2025

IV.2.4 Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

Kebijakan Penataan Ruang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87/2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan

Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Cirebon didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 87/2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan. Berdasarkan Peraturan tersebut, percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, meliputi 7 (tujuh) kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Kuningan. Pengembangan kawasan tersebut berbasis ecoindustry, yang dilakukan melalui pembangunan eco-industrial park atau kawasan industry berwawasan lingkungan.

Dalam kebijakan tersebut, arah fungsi kawasan Kota Cirebon sebagai Kawasan Perkotaan diarahkan sebagai Pusat Perkotaan Inti. Kota Cirebon sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), dengan peran untuk melayani kegiatan skala internasional. Kawasan Rebana KPI Cirebon (Kota Cirebon dan Kab. Cirebon) dengan spesialisasi investasi: Industri pengolahan makanan dan minuman, furnitur dan barang dari kayu, perkapalan, pakan, dan bahan galian nonlogam, bahan bangunan, pengolahan garam konsulasi, dan pengolahan hotmix dan beton.



Beberapa program yang akan dikembangkan di Kota Cirebon diantaranya:

- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Cirebon Raya (SPAM Jatigede) Tahap I & Tahap II
- Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan

Kebijakan Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa Barat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang RTRWP Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042

Kebijakan penataan ruang merupakan arahan dalam mencapai Tujuan Penataan Ruang Jawa Barat yaitu mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan berdaya saing menuju Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia. Tujuan penataan ruang Jawa Barat dicapai melalui sasaran penataan ruang, meliputi:

- a. Tercapainya ruang untuk kawasan lindung seluas 45% dari wilayah Jawa Barat;
- b. tersedianya ruang untuk ketahanan pangan;
- c. Terwujudnya ruang investasi melalui dukungan infrastruktur strategis;
- d. Terwujudnya ruang untuk kawasan perkotaan dan perdesaan dalam sistem wilayah yang terintegrasi; dan
- e. Terlaksananya prinsip mitigasi bencana dalam penataan ruang.

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pembangunan dan mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah, dilakukan pengembangan Wilayah dengan membagi ke dalam 6 (enam) WP, yaitu: WP Bodebekpunjur, WP Purwasuka, WP Ciayumajakuning, WP Priangan Timur-Pangandaran, WP Sukabumi dan sekitarnya, serta WP Cekungan Bandung.

Kota Cirebon termasuk dalam WP Ciayumajakuning, meliputi Daerah Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, dan sebagian Wilayah di Kabupaten Sumedang. Pengembangan WP diarahkan pada pembatasan perkembangan kegiatan budidaya yang dapat meningkatkan terjadinya alih fungsi lahan, alih fungsi Kawasan lindung dan pertanian lahan basah beririgasi teknis yang dapat mengganggu keberlanjutan ekosistem wilayah serta daya dukung dan daya tampung lingkungan serta merupakan antisipasi terhadap perkembangan pembangunan wilayah perbatasan.

Dalam arahan pembagian wilayah pengembangan, ditetapkan tema pengembangan untuk WP Ciayumajakuning untuk mendorong pengembangan wilayah gerbang timur Jawa Barat. Fokus pengembangan untuk Kota Cirebon diarahkan sebagai kawasan perkotaan inti dari PKN dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi dengan wilayah pengaruhnya (hinterland), serta menjadi simpul utama pelayanan jasa dan perdagangan, dan industry di Daerah bagian timur, serta untuk kegiatan wisata budaya dan religi.



Adapun arah kebijakan WP Ciayumajakuning sebagaimana tercantum dalam table berikut ini:

FOKUS	ARAH KEBIJAKAN
Pusat Pertumbuhan	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan diarahkan pada upaya melengkapi fasilitas pendukung PKN, PKW dan PKL; mengembangkan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif; mengembangkan sistem inovasi daerah untuk percepatan pembangunan; pemerataan pembangunan wilayah dan peningkatan pendapatan masyarakat menengah ke bawah.
SDM	Pengembangan SDM diarahkan pada upaya meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas dalam menghadirkan SDM yang unggul dan sejahtera; membangun sistem perlindungan sosial terintegrasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin; mengembangkan pendidikan vokasi dan keselarasan subsidi pendidikan antar wilayah perbatasan dan pendidikan karakter berlandaskan nilai budaya; serta mendorong kesetaraan entitas sosial dan individu dalam pembangunan pendidikan.
Infrastruktur	Pengembangan infrastruktur pendukung diarahkan pada upaya membangun infrastruktur strategis yang terintegrasi, efisien, merata serta adaptif terhadap bencana serta membangun infrastruktur sumber daya air yang andal dalam mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
Ekonomi	Pembangunan perekonomian diarahkan pada upaya menciptakan perluasan lapangan pekerjaan serta pembentukan SDM tenaga kerja yang kompeten sesuai pasar kerja; mengembangkan sistem pangan yang berkelanjutan; mengembangkan sektor dan komoditas unggulan; mendorong agribisnis; meningkatkan produktivitas, kualitas dan daya saing produk barang dan jasa sektor-sektor perekonomian; mengembangkan UMKM yang unggul, berdaya saing serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi.
Lingkungan	Percepatan pembangunan berbasis hijau dan sirkular diarahkan pada upaya meningkatkan kondisi lingkungan yang berkualitas dan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan bagi pembangunan; mengembangkan wisata budaya, religi dan alam; mendorong pengembangan hutan mangrove, rumput laut dan perikanan tambak; mengendalikan perikanan tangkap; serta mengembangkan mitigasi risiko bencana berbasis masyarakat.

Rencana struktur ruang wilayah meliputi sistem pusat permukiman yang terdiri atas PKN, PKW dan PKL. Sistem pusat permukiman ini terintegrasi dengan pusat pertumbuhan kelautan yang tersebar antar lain di daerah Kota Cirebon sebagai pusat Pelabuhan perikanan dan sentra industry maritim.

Kebijakan Penataan Ruang Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Cirebon Tahun 2021 - 2041

Wilayah Perencanaan (WP) Kota Cirebon terdiri atas 5 (lima) Kecamatan dan 22 (dua puluh dua) Kelurahan. WP Kota Cirebon dibagi menjadi 4 (empat) Sub Wilayah Perencanaan (SWP) yang terdiri atas SWP A (mencakup seluruh Kelurahan Kejaksan, Kelurahan Sukapura, Kelurahan Kesenden, dan



Kelurahan Kebonbaru di Kecamatan Kejaksan; SWP B (mencakup seluruh Kelurahan Kesepuhan, Kelurahan Lemahwungkuk, Kelurahan Panjunan dan Kelurahan Pegambiran di Kecamatan Lemahwungkuk; SWP C (mencakup seluruh Kelurahan Drajat, Kelurahan Karyamulya, Kelurahan Kesambi, Kelurahan Pekiringan, Kelurahan Sunyaragi di Kecamatan Kesambi, seluruh Kelurahan Pekalangan, Kelurahan Pekalipan, Kelurahan Pulasaren, dan Kelurahan Jagastru di Kecamatan Pekalipan; serta SWP D (mencakup Kelurahan Argasunya, Kelurahan Harjamukti, Kelurahan Kalijaga, Kelurahan Kecapi dan Kelurahan Larangan di Kecamatan Harjamukti).

Tujuan penataan ruang Kota Cirebon yang ditetapkan dalam RDTR Kota Cirebon Tahun 2021-2041 adalah "Terwujudnya Ruang Kota Cirebon sebagai PKN dan Pusat Pelayanan Regional Perdagangan dan Jasa didukung Sektor Pariwisata dan Budaya yang Berlandaskan Nilai-Nilai Religius, Tangguh Bencana dan Berkelanjutan".

Pusat pelayanan regional perdagangan dan jasa, dimaksudkan fungsi ini memiliki pengaruh terhadap perkembangan ekonomi di Kota Cirebon dan sekitarnya meliputi peluang kerja yang relatif terbuka dan adanya gerakan arus barang agar membawa dampak terhadap perkembangan transportasi, perdagangan, perkantoran, jasa, dan kegiatan perdagangan perikanan yang memanfaatkan hasil perikanan dan dari hulu sampai hilir. Di Kota Cirebon telah berkembang berbagai kegiatan perkotaan seperti perdagangan dan jasa yang memiliki skala pelayanan tidak hanya untuk Kota Cirebon saja tetapi juga untuk wilayah sekitarnya, seperti Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan. Hal ini sejalan dengan fungsi Kota Cirebon sebagai Pusat Kegiatan Nasional.

Adapun pariwisata dan budaya artinya kegiatan yang mengoptimalkan objek wisata yang berada di Kota Cirebon, dengan didukung oleh sarana dan prasarana pendukung kegiatan pariwisata. Sementara nilai-nilai religius artinya nilai-nilai Agama mewarnai perilaku masyarakat, kegiatan ekonomi, social, budaya dan sikap mereka terhadap alam. Nilai-nilai Agama sudah menjadi nilai spiritual warga dan masyarakat. Sedangkan berkelanjutan dan tangguh bencana artinya segenap pembangunan Kota Cirebon memperhatikan aspek lingkungan dan mitigasi bencana agar pembangunan yang dilakukan berkelanjutan.

Rencana struktur ruang Kota Cirebon meliputi rencana pengembangan pusat pelayanan; rencana jaringan transportasi; rencana jaringan energi; rencana jaringan telekomunikasi; rencana jaringan sumber daya air; rencana jaringan air minum; rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; rencana jaringan persampahan; rencana jaringan drainase; dan rencana jaringan prasarana lainnya. Rencana pengembangan pusat pelayanan terdiri atas pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan (PPK) Kejaksan; Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan (SPPK) Kesepuhan, SPPK Karyamulya dan SPPK Kecapi; serta Pusat Pelayanan Lingkungan (PL) yang meliputi PL Kecamatan dan PL Kelurahan.



Adapun rencana pola ruang meliputi Zona Lindung dan Zona Budidaya. Zona Lindung terdiri atas Zona Badan Air, Zona Perlindungan setempat, zona RTH Kota, zona Cagar Budaya, serta Zona Ekosistem Mangrove. Zona budidaya meliputi zona badan jalan, pertanian, perikanan, pembangkitan tenaga listrik, Kawasan peruntukan industry, pariwisata, perumahan, sarana pelayanan umum, campiran, perdagangan dan jasa, perkantoran, peruntukan lainnya, pengelolaan persampahan, transportasi, serta pertahanan dan keamanan.

Program prioritas pemanfaatan ruang meliputi perwujudan rencana struktur ruang WP dan perwujudan rencana pola ruang WP. Tahapan waktu pelaksanaan program prioritas pemanfaatan ruang meliputi:

- a. tahap pertama, yaitu tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026, diprioritaskan pada perencanaan dan pembangunan infrastruktur perkotaan prioritas serta monitoring/pemeliharaan, evaluasi perencanaan dan pemanfaatan ruang;
- b. tahap kedua, yaitu tahun 2027 sampai dengan Tahun 2031 diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur perkotaan, monitoring/pemeliharaan, peningkatan kualitas, evaluasi perencanaan dan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. tahap ketiga, yaitu tahun 2032 sampai dengan Tahun 2036, diprioritaskan pada monitoring/pemeliharaan, evaluasi perencanaan dan pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pemantapan infrastruktur perkotaan; dan
- d. tahap keempat, yaitu tahun 2037 sampai dengan Tahun 2041, diprioritaskan pada monitoring/pemeliharaan, pengendalian pemanfaatan ruang dan pemantapan infrastruktur perkotaan.



BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2026

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon 2025-2029. Rencana Kerja tersebut disusun dalam rangka pencapaian indikator kinerja pada Tahun 2026.

Penentuan program dan kegiatan daerah tahun 2026 berpedoman pada Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2025-2029 pada tahun berkenaan dan memperhatikan keterkaitannya dengan prioritas pembangunan nasional tahun 2026, Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat serta harus mempunyai keberpihakan terhadap penyelesaian permasalahan pembangunan yang terjadi di Kota Cirebon. Selain itu dalam penyajian Rencana Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Perangkat Daerah yang digunakan mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penjelasan lebih rinci terkait program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah Kota Cirebon pada tahun 2026 dapat dilihat pada lampiran yang tidak terpisahkan Dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2026.

Rencana kegiatan melalui APBD Kota Cirebon Tahun 2026 secara ringkas di jelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 5.1.

Ringkasan Pagu Indikatif RKPD Kota Cirebon Tahun 2026

Nama Urusan Dan Perangkat Daerah	Pagu Anggaran
1.01.0.00.0.00.01.0000	393,092,387,432.00
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	393,092,387,432.00
Dinas Pendidikan	393,092,387,432.00
1.02.0.00.0.00.01.0000	630,792,478,267.00
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	630,792,478,267.00
Dinas Kesehatan	630,792,478,267.00
1.03.2.10.0.00.01.0000	74,356,830,112.00
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	74,252,181,496.00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	74,252,181,496.00
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	104,648,616.00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	104,648,616.00
1.04.0.00.0.00.01.0000	36,354,638,200.00



Nama Urusan Dan Perangkat Daerah	Pagu Anggaran
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	36,354,638,200.00
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	36,354,638,200.00
1.05.0.00.0.00.01.0000	17,552,412,909.00
Non Urusan	12,941,753.00
Satuan Polisi Pamong Praja	12,941,753.00
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	17,539,471,156.00
Satuan Polisi Pamong Praja	17,539,471,156.00
1.05.0.00.0.00.02.0000	15,317,906,578.00
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	15,317,906,578.00
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	15,317,906,578.00
1.05.0.00.0.00.03.0000	7,897,752,117.00
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	7,897,752,117.00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7,897,752,117.00
1.06.0.00.0.00.01.0000	11,442,558,819.00
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	11,442,558,819.00
Dinas Sosial	11,442,558,819.00
2.07.0.00.0.00.01.0000	12,395,546,684.00
Non Urusan	5,682,476,000.00
Dinas Tenaga Kerja	5,682,476,000.00
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	6,713,070,684.00
Dinas Tenaga Kerja	6,713,070,684.00
2.09.3.25.0.00.01.0000	19,853,081,050.00
Urusan Pemerintahan Pilihan	4,345,398,399.00
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	4,345,398,399.00
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	15,507,682,651.00
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	15,507,682,651.00
2.11.0.00.0.00.01.0000	47,003,821,903.00
Non Urusan	614,750,217.00
Dinas Lingkungan Hidup	614,750,217.00
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	46,389,071,686.00
Dinas Lingkungan Hidup	46,389,071,686.00
2.12.0.00.0.00.01.0000	8,889,996,356.00
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	8,889,996,356.00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	8,889,996,356.00
2.14.2.08.0.00.01.0000	14,777,855,905.00
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	14,777,855,905.00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	14,777,855,905.00
2.15.0.00.0.00.01.0000	34,286,468,665.00
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	34,286,468,665.00



Nama Urusan Dan Perangkat Daerah	Pagu Anggaran
Dinas Perhubungan	34,286,468,665.00
2.16.2.20.2.21.01.0000	21,126,236,960.00
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	21,126,236,960.00
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	21,126,236,960.00
2.17.3.30.3.31.01.0000	16,931,958,076.00
Urusan Pemerintahan Pilihan	2,452,335,985.00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian	2,452,335,985.00
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	14,479,622,091.00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian	14,479,622,091.00
2.18.0.00.0.00.01.0000	9,125,273,707.00
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	9,125,273,707.00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9,125,273,707.00
2.19.0.00.0.00.01.0000	19,053,146,972.00
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	19,053,146,972.00
Dinas Pemuda Dan Olah Raga	19,053,146,972.00
2.22.3.26.0.00.01.0000	13,886,709,522.00
Urusan Pemerintahan Pilihan	2,251,891,737.00
Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	2,251,891,737.00
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	11,634,817,785.00
Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	11,634,817,785.00
2.23.2.24.0.00.01.0000	12,145,908,373.00
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	12,145,908,373.00
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	12,145,908,373.00
4.01.2.13.0.00.01.0000	67,925,904,977.00
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	66,457,561,227.00
Sekretariat Daerah	66,457,561,227.00
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	1,468,343,750.00
Sekretariat Daerah	1,468,343,750.00
4.02.0.00.0.00.01.0000	80,482,206,203.00
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	80,482,206,203.00
Sekretariat Dprd	80,482,206,203.00
5.01.5.05.0.00.01.0000	14,963,077,407.00
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	14,963,077,407.00
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	14,963,077,407.00
5.02.0.00.0.00.01.0000	62,449,136,276.00
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	62,449,136,276.00
Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah	62,449,136,276.00
5.03.5.04.0.00.01.0000	16,344,889,137.00
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	16,344,889,137.00



Nama Urusan Dan Perangkat Daerah	Pagu Anggaran
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	16,344,889,137.00
6.01.0.00.0.00.01.0000	15,019,072,125.00
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	15,019,072,125.00
Inspektorat Daerah	15,019,072,125.00
7.01.2.13.0.00.01.0000	13,429,746,879.00
Non Urusan	890,828,650.00
Kecamatan Kejaksan	890,828,650.00
Unsur Kewilayahan	12,538,918,229.00
Kecamatan Kejaksan	12,538,918,229.00
7.01.2.13.0.00.02.0000	17,717,256,596.00
Unsur Kewilayahan	17,717,256,596.00
Kecamatan Kesambi	17,717,256,596.00
7.01.2.13.0.00.03.0000	18,960,031,915.00
Non Urusan	168,988,380.00
Kecamatan Harjamukti	168,988,380.00
Unsur Kewilayahan	18,791,043,535.00
Kecamatan Harjamukti	18,791,043,535.00
7.01.2.13.0.00.04.0000	15,361,892,832.00
Unsur Kewilayahan	15,361,892,832.00
Kecamatan Lemahwungkuk	15,361,892,832.00
7.01.2.13.0.00.05.0000	13,210,975,794.00
Unsur Kewilayahan	13,210,975,794.00
Kecamatan Pekalipan	13,210,975,794.00
8.01.0.00.0.00.01.0000	14,982,676,408.00
Unsur Pemerintahan Umum	14,982,676,408.00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	14,982,676,408.00
Grand Total	1,767,129,835,156.00

Pagu Indikatif masih bersifat sangat sementara, akan dilakukan penyesuaian penambahan maupun pengurangan berdasarkan kemampuan kapasitas fiskal atau defisit RAPBD tahun 2026 serta belanja wajib/prioritas.

Tabel 5.3 Kompilasi Program dan Pagu Indikatif Tiap Perangkat Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026

NAMA PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	PAGU ANGGARAN
1.01.0.00.0.00.01.0000	393,092,387,432.00
Dinas Pendidikan	393,092,387,432.00
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	1,564,810,000.00
Program Pengelolaan Pendidikan	115,409,219,200.00
Program Pengembangan Kurikulum	726,245,000.00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	275,392,113,232.00
1.02.0.00.0.00.01.0000	630,792,478,267.00
Dinas Kesehatan	630,792,478,267.00
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1,070,496,250.00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	449,309,716,467.00



NAMA PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	PAGU ANGGARAN
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	451,800,000.00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	179,661,808,276.00
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	298,657,274.00
1.03.2.10.0.00.01.0000	74,356,830,112.00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	74,356,830,112.00
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	160,997,870.00
Program Penataan Bangunan Gedung	6,078,669,960.00
Program Penatagunaan Tanah	104,648,616.00
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3,612,538,123.61
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	74,827,278.00
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1,223,583,820.00
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	8,657,660,524.00
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	482,993,592.00
Program Pengembangan Permukiman	-
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	287,783,694.00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18,584,604,216.39
Program Penyelenggaraan Jalan	34,730,302,156.00
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	358,220,262.00
1.04.0.00.0.00.01.0000	36,354,638,200.00
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	36,354,638,200.00
Program Kawasan Permukiman	7,105,000,000.00
Program Pengembangan Perumahan	921,012,500.00
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	14,558,266,280.00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12,520,359,420.00
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	1,250,000,000.00
1.05.0.00.0.00.01.0000	17,552,412,909.00
Satuan Polisi Pamong Praja	17,552,412,909.00
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	3,140,138,799.00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14,412,274,110.00
1.05.0.00.0.00.02.0000	15,317,906,578.00
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	15,317,906,578.00
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	4,919,293,150.00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10,398,613,428.00
1.05.0.00.0.00.03.0000	7,897,752,117.00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7,897,752,117.00
Program Penanggulangan Bencana	2,314,488,606.00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5,583,263,511.00
1.06.0.00.0.00.01.0000	11,442,558,819.00
Dinas Sosial	11,442,558,819.00
Program Pemberdayaan Sosial	795,000,000.00
Program Penanganan Bencana	320,000,000.00
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	42,000,000.00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8,879,414,344.00
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	600,000,000.00
Program Rehabilitasi Sosial	806,144,475.00
2.07.0.00.0.00.01.0000	12,395,546,684.00
Dinas Tenaga Kerja	12,395,546,684.00



NAMA PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	PAGU ANGGARAN
Program Hubungan Industrial	455,777,188.00
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	2,595,874,000.00
Program Penempatan Tenaga Kerja	572,188,500.00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8,696,706,996.00
Program Perencanaan Tenaga Kerja	75,000,000.00
2.09.3.25.0.00.01.0000	19,853,081,050.00
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	19,853,081,050.00
Program Penanganan Kerawanan Pangan	391,817,000.00
Program Pengawasan Keamanan Pangan	200,718,248.00
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	30,000,000.00
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1,001,409,733.00
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	230,194,000.00
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	50,000,000.00
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	634,375,000.00
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	214,500,000.00
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	994,125,000.00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13,921,022,403.00
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	234,626,498.00
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1,742,297,500.00
Program Penyuluhan Pertanian	207,995,668.00
2.11.0.00.0.00.01.0000	47,003,821,903.00
Dinas Lingkungan Hidup	47,003,821,903.00
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	160,482,967.00
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	84,917,922.00
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	250,000,000.00
Program Pengelolaan Persampahan	19,937,370,465.00
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	145,000,000.00
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	592,600,000.00
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	217,997,750.00
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	173,327,925.00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25,302,124,874.00
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	140,000,000.00
2.12.0.00.0.00.01.0000	8,889,996,356.00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	8,889,996,356.00
Program Pencatatan Sipil	131,800,000.00
Program Pendaftaran Penduduk	204,900,000.00
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	410,000,000.00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8,143,296,356.00
2.14.2.08.0.00.01.0000	14,777,855,905.00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	14,777,855,905.00
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	1,905,400,000.00
Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	1,019,857,750.00
Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	201,882,272.00



NAMA PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	PAGU ANGGARAN
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	271,377,425.00
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	22,513,125.00
Program Pengendalian Penduduk	185,331,017.00
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	312,357,650.00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10,402,880,966.00
Program Perlindungan Khusus Anak	275,907,000.00
Program Perlindungan Perempuan	180,348,700.00
2.15.0.00.0.00.01.0000	34,286,468,665.00
Dinas Perhubungan	34,286,468,665.00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25,619,914,630.00
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	8,666,554,035.00
2.16.2.20.2.21.01.0000	21,126,236,960.00
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	21,126,236,960.00
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	4,103,432,467.00
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	2,816,854,017.00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12,512,688,944.00
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	1,077,821,726.00
Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	615,439,806.00
2.17.3.30.3.31.01.0000	16,931,958,076.00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian	16,931,958,076.00
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	40,000,000.00
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	298,126,406.00
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)	328,894,420.00
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	145,000,000.00
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	90,000,000.00
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	49,999,880.00
Program Pengembangan Ekspor	171,117,197.00
Program Pengembangan Umkm	553,358,022.00
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	38,794,398.00
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	360,000,000.00
Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usk Koperasi	16,000,000.00
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	9,274,408.00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13,008,243,243.00
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1,291,229,575.00
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	9,752,204.00
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	202,623,151.00
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	319,545,172.00
2.18.0.00.0.00.01.0000	9,125,273,707.00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9,125,273,707.00
Program Pelayanan Penanaman Modal	289,776,309.00
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	116,217,431.00
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	277,038,155.00
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	214,641,088.00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8,059,780,772.00
Program Promosi Penanaman Modal	167,819,952.00
2.19.0.00.0.00.01.0000	19,053,146,972.00
Dinas Pemuda Dan Olah Raga	19,053,146,972.00



NAMA PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	PAGU ANGGARAN
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	10,425,928,461.00
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1,029,542,508.00
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	350,000,000.00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7,247,676,003.00
2.22.3.26.0.00.01.0000	13,886,709,522.00
Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	13,886,709,522.00
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	604,466,385.00
Program Pemasaran Pariwisata	725,267,295.00
Program Pembinaan Sejarah	-
Program Pengelolaan Permuseuman	165,769,260.00
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	120,000,000.00
Program Pengembangan Kebudayaan	2,347,244,286.00
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	250,000,000.00
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	293,019,695.00
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1,113,604,747.00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8,267,337,854.00
2.23.2.24.0.00.01.0000	12,145,908,373.00
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	12,145,908,373.00
Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	169,693,182.00
Program Pembinaan Perpustakaan	1,163,278,829.00
Program Pengelolaan Arsip	373,994,615.00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10,342,982,121.00
Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	95,959,626.00
4.01.2.13.0.00.01.0000	67,925,904,977.00
Sekretariat Daerah	67,925,904,977.00
Program Administrasi Pemerintahan Desa	156,750,000.00
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1,311,593,750.00
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	5,921,475,000.00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	58,946,451,227.00
Program Perekonomian Dan Pembangunan	1,589,635,000.00
4.02.0.00.0.00.01.0000	80,482,206,203.00
Sekretariat Dprd	80,482,206,203.00
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	9,064,866,039.00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	71,417,340,164.00
5.01.5.05.0.00.01.0000	14,963,077,407.00
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	14,963,077,407.00
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	706,500,000.00
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	660,000,000.00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12,646,577,407.00
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	422,000,000.00
Program Riset Dan Inovasi Daerah	528,000,000.00
5.02.0.00.0.00.01.0000	62,449,136,276.00
Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah	62,449,136,276.00
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1,697,950,768.00
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	13,922,722,916.00
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3,274,446,789.00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	43,554,015,803.00



NAMA PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	PAGU ANGGARAN
5.03.5.04.0.00.01.0000	16,344,889,137.00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	16,344,889,137.00
Program Kepegawaian Daerah	2,987,775,000.00
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2,993,540,000.00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10,363,574,137.00
6.01.0.00.0.00.01.0000	15,019,072,125.00
Inspektorat Daerah	15,019,072,125.00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14,429,870,645.00
Program Penyelenggaraan Pengawasan	376,951,000.00
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	212,250,480.00
7.01.2.13.0.00.01.0000	13,429,746,879.00
Kecamatan Kejaksan	13,429,746,879.00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	45,000,000.00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	3,530,601,789.00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9,544,145,090.00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	265,000,000.00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	45,000,000.00
7.01.2.13.0.00.02.0000	17,717,256,596.00
Kecamatan Kesambi	17,717,256,596.00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	34,364,278.00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	6,226,796,550.00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11,412,515,424.00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	20,230,344.00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	23,350,000.00
7.01.2.13.0.00.03.0000	18,960,031,915.00
Kecamatan Harjamukti	18,960,031,915.00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	130,000,000.00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	6,630,378,603.00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11,956,920,503.00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	150,000,000.00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	92,732,809.00
7.01.2.13.0.00.04.0000	15,361,892,832.00
Kecamatan Lemahwungkuk	15,361,892,832.00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	34,795,000.00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	4,395,746,411.00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10,685,306,627.00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	189,282,794.00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	56,762,000.00
7.01.2.13.0.00.05.0000	13,210,975,794.00
Kecamatan Pekalipan	13,210,975,794.00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	31,518,000.00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	2,428,880,236.00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10,567,018,458.00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	125,009,800.00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	58,549,300.00
8.01.0.00.0.00.01.0000	14,982,676,408.00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	14,982,676,408.00
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	106,000,000.00



NAMA PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	PAGU ANGGARAN
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	460,000,000.00
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1,241,000,000.00
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	2,748,997,248.00
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	2,641,689,307.00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7,784,989,853.00
Grand Total	1,767,129,835,156.00

Pemerintah Kota Cirebon dalam mendukung Pencapaian SPM pada Tahun 2026 dengan dukungan anggaran sebagai berikut :

Tabel. 5.3 Perencanaan Anggaran dalam Pencapaian SPM Kota Cirebon Tahun 2026

Standar Pelayanan Minimal Bidang	PAGU ANGGARAN
SPM BIDANG KESEHATAN	8,705,788,715.00
DINAS KESEHATAN	5,121,642,965.00
UPT Puskesmas Astanagarib	87,550,000.00
UPT Puskesmas Cangkol	168,180,000.00
UPT Puskesmas Drajat	65,650,000.00
UPT Puskesmas Gunungsari	229,744,200.00
UPT Puskesmas Jagasatru	231,850,000.00
UPT Puskesmas Jl. Kembang	68,500,000.00
UPT Puskesmas Kalijaga Permai	323,056,000.00
UPT Puskesmas Kalitanjung	170,520,000.00
UPT Puskesmas Kejaksan	236,767,650.00
UPT Puskesmas Kesambi	191,822,500.00
UPT Puskesmas Kesunean	157,700,000.00
UPT Puskesmas Larangan	144,800,000.00
UPT Puskesmas Majasem	81,700,000.00
UPT Puskesmas Nelayan	136,462,000.00
UPT Puskesmas Pamitran	168,240,000.00
UPT Puskesmas Pegambiran	214,819,000.00
UPT Puskesmas Pekalangan	152,600,000.00
UPT Puskesmas Perumnas Utara	151,100,000.00
UPT Puskesmas Pesisir	272,464,000.00
UPT Puskesmas Pulasaren	47,100,000.00
UPT Puskesmas Sitopeng	134,050,000.00
UPT Puskesmas Sunyaragi	149,470,400.00
SPM BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6,665,189,760.00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2,046,140,235.00
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	4,464,293,150.00
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	154,756,375.00



Standar Pelayanan Minimal Bidang	PAGU ANGGARAN
SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4,836,121,943.61
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	2,669,354,972.61
UPT Pengelolaan Air Limbah	2,166,766,971.00
SPM BIDANG PENDIDIKAN	51,490,428,200.00
DINAS PENDIDIKAN	51,490,428,200.00
SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	871,012,500.00
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	871,012,500.00
SPM BIDANG SOSIAL	741,144,475.00
DINAS SOSIAL	741,144,475.00
Grand Total	73,309,685,593.61

Pemerintah Kota Cirebon dalam mendukung prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah, menyusun rencana kegiatan yang didanai dari APBN dan APBD Provinsi. Hal ini merupakan bentuk kolaborasi pendanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.

Rencana usulan melalui APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 yang telah diusulkan melalui SIPD adalah sebagai berikut :

Tabel. 5.4 Rencana Usulan Kegiatan Prioritas Kota Cirebon Melalui APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026

NAMA PERANGKAT DAERAH TUJUAN	ANGGARAN
DINAS KESEHATAN	15.210.840.960
#BK Jaminan Kesehatan Bagi PBPU dan BP yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah	15.210.840.960
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	887.000.000
#BK Dana Operasional Posyandu Kelurahan dan TP Posyandu Kab/Kota, Kecamatan dan Kelurahan	887.000.000
Dinas Pemuda dan Olahraga	0
#BK Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Olahraga	0
DINAS PERHUBUNGAN	3.713.147.650
#BK Penyediaan Perlengkapan Jalan Kabupaten/Kota	3.713.147.650
Dinas Perumahan dan Permukiman	0
#BK Pembangunan Toilet dan Tangki Septik Individual	0
Grand Total	19.810.988.610



BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator kinerja yang telah ditetapkan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran pencapaian keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah. Tahun 2026 merupakan Tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2025-2029, yang pada saat penyusunan RKPD Kota Cirebon Tahun 2026 masih merupakan Rancangan Akhir menuju Proses Penetapan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pasal 1 ayat (5) Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah hasil kerja dari suatu keluaran yang dapat diukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tanggung jawab kewenangan dalam waktu yang telah ditentukan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri atas capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dan capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.

Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun Indikator Kinerja Daerah merupakan ukuran keberhasilan capaian kinerja dari setiap aspek berdasarkan bidang urusan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap penyusunan perencanaan dan pada akhir pelaksanaan perencanaan, dengan maksud untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja.

VI.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026

Indikator Utama Pembangunan (IUP) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian suatu daerah serta kontribusi terhadap tujuan pembangunan nasional jangka panjang. Indikator Utama Pembangunan (IUP) disusun dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan prinsip sinkronisasi-keselarasan. Indikator Utama Pembangunan (IUP) Kota Cirebon mengacu pada Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPN yang terdiri dari 45 indikator. IUP dan target Kota Cirebon tahun 2025 ditetapkan untuk mengukur capaian arah pembangunan dan sasaran pokok sebagai penjabaran visi dan misi RPJPD Kota Cirebon

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian indikator pembangunan Kota Cirebon Tahun 2024 serta dengan mempertimbangkan berbagai hal termasuk isu strategis yang berkembang secara global/Internasional, Nasional maupun Regional yang kemungkinan akan dihadapi pada tahun 2026 serta dengan mempedomani Dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kota Cirebon Tahun 2025-2029, maka Pemerintah Daerah Kota Cirebon menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dicapai pada tahun 2026, sebagai berikut :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Makro Kota Cirebon Tahun 2026

No.	Indikator Makro	Target Indikator Makro Kontribusi Jawa Barat	Target RKPD Kota Cirebon 2026
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,97 - 6,14	6,14
2.	PDRB per Kapita (Juta Rupiah)	98,00 - 100,37	98,97
3.	Kontribusi PDRB Kabupaten / Kota	1,11	1,11
4.	Tingkat Kemiskinan (%)	7,14 - 7,80	7,80
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,34 - 5,64	6,00
6.	Rasio Gini (Poin)	0,340 - 0,420	0,419
7.	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	79,12	78,99
8.	Penurunan Intensitas Emisi GRK (ton CO ₂ eq/Miliar)	0,36	0,36
9.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (point)	53,24	53,25
10.	Prevalensi Stunting (%)	12,27	13,05

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Cirebon Tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN
			2026
(01)	(02)	(03)	(04)
1.	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	poin	85,34
2.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	78,97
3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	6,14
4.	Tingkat Kemiskinan	(%)	7,80
5.	Penurunan Intensitas Emisi GRK (tonCO ₂ eq/2010 idr Milyar)	TON CO ₂ EQ	0,36
6.	PDRB Per Kapita (Rupiah Juta)	*	92.83-95.78
7.	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	4,05
8.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6.10-6.62
9.	Indeks Gini (poin)	poin	0.414-0.423
10.	Indeks ketenteraman dan ketertiban umum	Poin	-
11.	Indeks Profesionalitas ASN	poin	80,50
12.	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	Indeks	84,46
13.	Indeks Layanan Infrastruktur Kota	Poin	-
14.	Tingkat Kesempatan Kerja	Persentase	95,71
15.	Return on Asset (ROA) BUMD	%	2,69



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN
			2026
(01)	(02)	(03)	(04)
16.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	2,40
17.	Indeks Ekonomi Hijau Pilar Ekonomi	Indeks	72,63
18.	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Tahun	13,19
19.	Persentase pelestarian obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya	%	70,68
20.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapat akses layanan dasar	%	57,29
21.	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	4,15
22.	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	67,5
23.	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	99,10
24.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	53,24
25.	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	75,50
26.	Indeks Inovasi Daerah	Angka	54,24
27.	Rasio konektivitas kabupaten/kota	%	0,26
28.	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	6,70
29.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	123,84
30.	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	14,00
31.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,140
32.	Angka Literasi/Numerasi	%	83,00
33.	Proporsi ruang terbuka hijau	Persentase	-
34.	Rasio Volume Usaha UMKM terhadap PDRB	Persentase	0,35
35.	Kontribusi PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persentase	0,25
36.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	(%)	5,34
37.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif	TON CO2 EQ	13.093,63
38.	Indeks Kepuasan Masyarakat	poin	86,62
39.	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	poin	61,74
40.	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	%	13,05
41.	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Kasus	414
42.	Indeks Smart City (poin)	poin	3,51



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN
			2026
(01)	(02)	(03)	(04)
43.	Indeks ketimpangan gender	Indeks	81,08
44.	Nilai SAKIP Kota	Skor	69,50
45.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	13,19
46.	Indeks Pembangunan Gender/IPG (Poin)	poin	95,87
47.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	72,08
48.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kota	Juta Rupiah/Tenaga Kerja	50,84
49.	Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)	Poin	2,70
50.	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	67,65
51.	Indeks Pengembangan SDM Berkarakter	Poin	-
52.	Kontribusi PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran	%	28,37
53.	Kontribusi PDRB sektor Transportasi dan Pergudangan	%	14,72
54.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	6,12
55.	Kontribusi PDRB sektor Ekonomi Kreatif	%	18,85

VI.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2026

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian indikator pembangunan Kota Cirebon Tahun 2024 serta dengan mempertimbangkan isu strategis yang berkembang, baik global/internasional, nasional dan regional yang akan dihadapi pada tahun 2025 dan mempedomani RPD Kota Cirebon Tahun 2024-2026, maka Pemerintah Daerah Kota Cirebon menetapkan Indikator Kinerja Daerah Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang harus dicapai pada tahun 2025 oleh seluruh Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah Kota Cirebon sebagai berikut :

Tabel 6.3

Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Aspek dan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN		KET
				2025	2026	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	78,53	78,53	78,97	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN		KET
				2025	2026	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	5,06	5,06	6,14	
3	PDRB Per Kapita (Rupiah Juta)	*	91.98-92.34	91.98-92.34	92.83-95.78	
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6.15-6.64	6.15-6.64	6.10-6.62	
5	Indeks Gini (poin)	poin	0.419-0.428	0.419-0.428	0.414-0.423	
6	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Tahun	13,17	13,18	13,19	
7	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	75,48	75,49	75,50	
8	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	13,16	13,18	13,19	
9	Indeks Pembangunan Gender/IPG (Poin)	poin	-	95,85	95,87	
10	Kontribusi PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran	%	27,31	28,33	28,37	
11	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100	100	100	
II	ASPEK DAYA SAING DAERAH					
1	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,95	4,00	4,05	
III	ASPEK PELAYANAN UMUM					
1	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	(%)	6,56	5,46	5,34	
2	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Kasus	1,136	485	414	
3	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	%	97,94	97,95	99,10	
4	Indeks Ketahanan Daerah	poin	0,77	0,77	0,77	
5	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Nilai	1	2	3	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN		KET
				2025	2026	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
6	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	Persentase	-	100,00	100,00	
7	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100	100	100	
8	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	99,68	99,69	99,70	
9	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persentase	100	100	100	
10	TFR (Angka Kelahiran Total)	Jiwa	1,97	2,10	2,10	
11	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	
12	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	100,00	100,00	100,00	
13	Persentase Penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat	Persentase	15	17	19	
14	Presentase Terselenggaranya Layanan Persandian dan Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon	%	86	93	100	
15	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air	Persentase	15,88	16,35	16,92	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN		KET
				2025	2026	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
	Limbah Domestik Layak dan Aman)					
16	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Persentase	-	-	17,99	
17	Presentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh DKIS	%	100	100	100	
18	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	%	3	-	43,48	
19	Tingkat Kemantapan Jalan	Persentase	94	96	94	
20	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Persentase	60,62	60,64	60,81	
21	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	Persentase	48,84	49,56	50,28	
22	Presentase Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan yang diselenggarakan secara elektronik dan terintegrasi	%	38	39	40	
23	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,98	2,98	3,00	
24	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	18.70-18.70	18.60-18.1	18.50-17.5	
25	Angka Kematian Ibu (AKI)	(per 100.000 kelahiran hidup)	123	123	123	
26	Tingkat partisipasi warga negara usia	%	73,43	73,78	74,13	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN		KET
				2025	2026	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
	5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD					
27	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase	85	85	86	
28	Persentase Rumah Layak Huni	%	-	-	96,19	
29	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	%	87	88	88,5	
30	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	15,70	15,40	15,10	
31	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Persentase	70	86	0	
32	Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi	Persentase	100	100	100	
33	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Persentase	4,55	9	27	
34	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Orang	13	13	12	
35	Nilai SAKIP	poin	81,75	82	82,15	
IV	INDIKATOR KINERJA KUNCI					
AA	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan	%	-	100	100	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN		KET
				2025	2026	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
	pengemis yang terpenuhi					
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	-	100	100	
AB	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					
1	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persentase	100	95,00	95,00	
2	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	18,18	18,18	18,18	
3	Skor Pola Pangan Harapan (Ketersediaan)	Poin	93,00	93,00	93,05	
4	Skor Pola Pangan Harapan (Konsumsi)	Poin	92,58	92,58	92,60	
5	Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	44,00	44,10	44,20	
6	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	66,93	66,95	67,00	
AC	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	59,20	52,99	53,24	
2	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	poin	49,90	55	60	
3	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase	19,26	21,31	23,36	
4	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas	(%)	67,36	86,51	98,04	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN		KET
				2025	2026	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
	Pengolahan Sampah					
5	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	
6	Persentase Tingkat Pencemaran Lingkungan	%	17,10	17,10	17,10	
7	Luas Taman Kehati yang Dikelola	Ha	4,70	4,70	4,70	
8	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	%	71,43	72,73	74,03	
9	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Persentase	100	100	100	
10	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Persentase	100	100	100	
11	Presentase Peningkatan kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase	-	60,00	65,00	
12	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	72,64	90,90	95,12	
13	Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	41,00	41,50	41,50	
AD	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN		KET
				2025	2026	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
1	Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis	6	6	6	
2	Dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil	Jenis	1	1	1	
3	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	%	100,00	100,00	100,00	
4	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100,00	100,00	100,00	
5	Pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian	Orang	70	50	50	
6	Dokumen hasil pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Jenis	1	1	1	
7	Dokumen Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jenis	2	2	3	
8	Dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Perangkat daerah	Jenis	3	3	3	
9	Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	%	100,00	100,00	100,00	
10	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	6,82	8,00	10,00	
11	Dokumen penyelenggaraan pencatatan sipil	Jenis	1	1	3	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN		KET
				2025	2026	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
12	Dokumen hasil pemeliharaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Jenis	5	5	5	
13	Dokumen Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Jenis	3	3	3	
14	Dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jenis	2	2	2	
15	Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jenis	3	3	3	
16	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Persentase	100,00	100,00	100,00	
17	Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jenis	3	3	3	
18	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jenis	7	7	7	
19	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persentase	51,97	62,00	64,00	
AE	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					
1	Persentase Koperasi Aktif	Persentase	65,97	66,30	66,63	
2	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	Persentase	22	26	26	
3	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase	92,59	93,06	93,52	
4	Pertumbuhan Wirausaha	Persentase	10,76	11,16	11,72	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN		KET
				2025	2026	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
5	Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	48	48,1	48,2	
6	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase	65,77	67,00	71,00	
7	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Persentase	6,33	6,33	6,33	
8	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persentase	3,22	3,30	3,35	
AF	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					
1	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persentase	100	80	82,25	
2	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Persentase	80	82	83	
3	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Persentase	83,92	25	30	
4	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Persentase	80	70	75	
5	Persentase Realisasi Total terhadap Target Investasi	Persentase	66,00	70,00	72,50	
6	Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	46	46,1	46,2	
AG	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					
1	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	Persentase	-	70,00	71,00	
2	Persentase ketercapaian persyaratan pendirian dan pengelolaan museum	%	-	80	81	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN		KET
				2025	2026	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
3	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Persentase	22	32	32,85	
4	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Persentase	77,14	77,14	77,50	
5	Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	43,00	43,50	44,00	
6	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Persentase	80,50	81,00	81,25	
AH	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					
1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	376,49	376,50	383,51	
2	Angka Konsumsi Ikan	Kg/KAP/TH	38,15	39,05	40,05	
3	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	7.784,42	5.090,40	5.140,40	
4	Presentase pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan yang mematuhi ketentuan perundangan yang berlaku	Persentase	-	-	84	
5	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/kota (sumber data : one data KKP)	Ton	8.160,91	5.466,90	5.523,91	
AI	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					
1	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Persentase	0,58	1,00	1,20	
2	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Persentase	2,54	2,75	3,00	
3	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase	64,80	65,00	65,25	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN		KET
				2025	2026	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
	yang Aktif dan Tervalidasi					
4	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persentase	0	1,00	1,50	
AJ	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	%	5,6	5,6	5,6	
2	Persentase tingkat pencegahan dan pengendalian penyakit hewan	%	70,00	70,00	71,00	
3	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Ha	2,69	2,69	2,69	
4	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Persentase	46,00	56,60	56,60	
5	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	Persentase	100	100	100	
6	Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ton	1.357,85	1.376,00	1.379,00	
7	Produksi Komoditas Peternakan	Ton	9.313,97	9.381,00	9.381,00	
8	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	50	50	50	
AK	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					
1	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Persentase	4	5	6	
2	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	Persentase	8	9	10	
3	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	75,92	78	81	
4	Persentase Sarana Perdagangan yang	Persentase	4	6	7	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN		KET
				2025	2026	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
	Ditingkatkan Kualitasnya					
5	Nilai Ekspor Barang	Nilai	29.561.322,92	21.867.000,00	22.223.000,00	
6	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase	83	84	85	
AL	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					
1	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	Persentase	-	70,00	70,00	
2	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Persentase	100,00	70,00	70,00	
3	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Persentase	-	80	80	
AM	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					
1	Nilai SAKIP Kota (poin)	poin	69,04	69,25	69,50	
AN	4.02 - SEKRETARIAT DPRD					
1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	0	75,00	76,00	
AO	5.02 - KEUANGAN					
1	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	100	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	
2	Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	5,23	5,11	4,99	
3	Rasio Belanja Urusan pemerintahan Umum (Dikurangi transfer expenditures)	%	87,15	86,71	86,28	
4	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	2,17	2,16	2,15	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN		KET
				2025	2026	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
5	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	13,92	13,27	12,61	
6	Rasio PAD	%	35.95:35.95	36.3:36.8	36.8:37.5	
7	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	31.96:31.96	31.2:31.5	29.8:30	
AP	5.03 - KEPEGAWAIAN					
1	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase	90,50	91,00	92,00	
2	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	Persentase	100,00	100,00	100,00	
3	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	Persentase	90,00	91,00	92,00	
4	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	Persentase	82,50	82,75	83,00	
AQ	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
1	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	Persentase	100,00	100,00	100,00	
2	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase	13,90	14,00	14,10	
AR	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					
1	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Persentase	68,00	68,00	69,00	
2	Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	38,00	38,00	38,10	
3	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	
4	Hasil Survey Penilaian Integritas	poin	66,51	66,51	68	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN		KET
				2025	2026	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	poin	87,00	87,00	87,50	

Sumber: RPJMD 2025-2029




BAB VII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2026 merupakan implementasi pelaksanaan tahun kedua Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2025-2029 sehingga disusun untuk menjamin konsistensi dan kesinambungan perencanaan jangka menengah provinsi dengan perencanaan menengah nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

RKPD Kota Cirebon Tahun 2026 memuat Program Indikatif berdasarkan Permendagri 90 tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tahun 2020 nomor 050-5889 dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026. RKPD Kota Cirebon Tahun 2026 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026.

Selanjutnya dalam kerangka manajerial, perlu dipedomani beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon harus konsisten mengupayakan tercapainya tujuan dan sasaran program pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan Daerah RPJMD Kota Cirebon 2025-2029.
2. RKPD Tahun 2026, disusun dengan memperhatikan juga asumsi makro yang terkait internal dan eksternal Pemerintah Daerah Kota Cirebon dan pembiayaan sesuai dengan kewenangannya.
3. RKPD Kota Cirebon Tahun 2026 memprioritaskan pada Pencapaian Pelayanan Dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan wajib yang Selaras dan Sinergi dengan RKPD Provinsi Jawa Barat dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional serta Prioritas Pembangunan berdasarkan RPJMD Kota Cirebon 2025-2029.
4. Penyusunan Renja Perangkat Daerah harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, transparan dan akuntabel sesuai dengan standar kinerja yang telah ditentukan.
5. RKPD Tahun 2026 harus menjadi pedoman dan arah bagi unsur pemerintah (birokrasi), dan bekerja sama secara sinergis dengan DPRD, dunia usaha dan atau masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan tahunan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197112281998031002

WALI KOTA CIREBON,
ttd,
EFFENDI EDO